



PERATURAN DAERAH

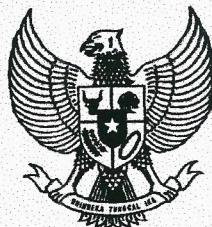
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

NOMOR 5 TAHUN 2021



TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021-2026





BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Perda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu di tetapkan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Seluma yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
 4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

5. Urusan....

- : 5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Seluma yang dipimpin oleh Camat.

20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
21. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
22. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
23. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
24. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 2

RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, dan Keuangan Daerah serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergi dan terpadu.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- b. pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PEDOMAN, RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 berpedoman pada :

- a. RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;
- c. RPJPD Kabupaten Seluma Tahun 2005-2025;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 2012-2032;
- e. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar;
- f. Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pasal 5

Ruang Lingkup RPJMD meliputi :

- a. Visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
- b. Tujuan, sasaran, strategi;
- c. arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah;
- d. Program Perangkat Daerah; dan
- e. Rencana Kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 6

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan tujuan, Hubungan Antar Dokumen, dan Sistematika Penulisan.

b. BAB II....

b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Bagian ini menjabarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan, serta menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Memuat Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kinerja Pelaksanaan APBD, Neraca Daerah, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, Proporsi Penggunaan Anggaran, Analisis Pembiayaan, Kerangka Pendanaan, Proyeksi Pendapatan dan Belanja, Penghitungan Kerangka Pendanaan. Bagian ini menjelaskan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Menjelaskan Permasalahan Pembangunan, dan Isu Strategis, menjabarkan permasalahan pembangunan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, menguraikan tentang artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan Visi dan Misi dan menetapkan indikator kinerja dan target tujuan dan sasaran selama lima tahun.

f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif dan target kinerja Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

h. BAB VIII....

h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Seluma dan Wakil Bupati Seluma yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode RPJMD.

i. BAB IX : Penutup

Memuat pedoman transisi perencanaan tahun 2024 setelah RPJMD tahun 2021-2026 berakhir. Selain itu juga kaidah pelaksanaan RPJMD yang menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kepala BAPEDDA Kabupaten Seluma.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan perencanaan RPJMD Tahun 2021-2026; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan perencanaan RPJMD Tahun 2021-2026;
 - b. pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026; dan
 - c. hasil RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Seluma dan Wakil Bupati Seluma yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode RPJMD.

i. BAB IX : Penutup

Memuat pedoman transisi perencanaan tahun 2024 setelah RPJMD tahun 2021-2026 berakhir. Selain itu juga kaidah pelaksanaan RPJMD yang menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kepala BAPEDDA Kabupaten Seluma.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan perencanaan RPJMD Tahun 2021-2026; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan perencanaan RPJMD Tahun 2021-2026;
 - b. pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026; dan
 - c. hasil RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Seluma Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Seluma 2021-2026 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

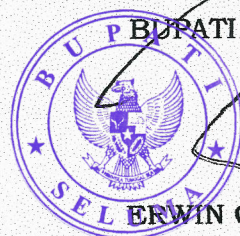
BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

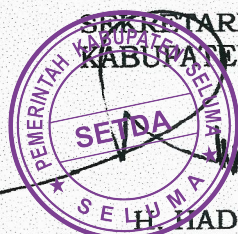
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 31 Desember 2021


BUPATI SELUMA,
ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Seluma
Pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,
H. HADIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTER 5/90/2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	I - i
1.1 Latar Belakang	I - i
1.2 Dasar Hukum.....	I - i
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I - i
1.4 Maksud dan Tujuan	I - i
1.5 Sistematika Dokumen.....	I - i
BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH	II - i
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II - i
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II - i
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - i
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II - i
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II - i
2.2 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020.....	II - i
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III - 1
3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD (tahun 2015-2020).....	III - 2
3.1.1 Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah	III - 3
3.1.2 Kinerja Realisasi Pengeluaran Daerah	III - 12
3.1.3 Neraca	III - 17
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III - 24
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III - 24
3.2.2 Analisis Pembiayaan.....	III - 25
3.3 Kerangka Pendanaan.....	III - 27
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III - 27
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan	III - 32
BAB IV PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS.....	IV - 1
4.1 Permasalahan Daerah.....	IV - 1

4.1.1	Urusan Pemerintahan yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	IV - 1
4.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	IV - 3
4.1.3	Urusan Pemerintahan Pilihan.....	IV - 6
4.1.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	IV - 7
4.2	Isu-isu Strategis	IV - 8
4.2.1	Isu Internasional.....	IV - 8
4.2.2	Isu-isu Strategis Nasional.....	IV - 14
4.2.3	Isu-isu Strategis Daerah.....	IV - 18
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V - 1
5.1	Visi Pembangunan.....	V - 1
5.2	Misi Pembangunan	V - 4
5.2.1	Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Bidang Pekerjaan Umum, Pelayanan Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Permukiman, Bidang Sosial Serta Memajukan Bidang Kebudayaan.....	V - 5
5.2.2	Optimalisasi Sumber Daya Daerah Untuk Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Dan Investasi Yang Kondusif.....	V - 5
5.2.3	Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas dan Berbasis Teknologi Informasi	V - 5
5.3	Tujuan dan Sasaran	V - 6
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	VI - 1
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan	VI - 2
6.2	Program Pembangunan Daerah	VI - 4
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII - 1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII - 1
BAB IX	PENUTUP	IX - 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen	I - 7
Gambar 2.2	Peta Batas Administrasi Kabupaten Seluma	II - 3
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu	II - 10
Gambar 2.4	Rencana Pola Ruang	II - 21
Gambar 2.5	Peta Rencana Struktur Ruang.....	II - 22
Gambar 2.6	Peta Rencana Pola Ruang Budidaya Kawasan Pertanian Kabupaten Seluma.....	II - 28
Gambar 2.7	Peta Rencana Pola Ruang Budidaya Kawasan Pertambangan Kabupaten Seluma.....	II - 33
Gambar 2.8	Peta Rencana Pola Ruang Budidaya Kawasan Permukiman Kabupaten Seluma	II - 37
Gambar 2.9	Peta Sebaran Desa Tertinggal Kabupaten Seluma 2020	II - 85
Gambar 3.1	Struktur Pendapatan Asli Daerah dari APBD Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020	III - 9
Gambar 3.2	Struktur Belanja Daerah Kabupaten Seluma Kurun Waktu Tahun 2016-2020	III - 13
Gambar 5.1	Kerangka Prioritas Pembangunan Kabupaten Seluma Pertama.....	V - 22
Gambar 5.2	Kerangka Prioritas Pembangunan Kabupaten Seluma Kedua	V - 23
Gambar 5.3	Kerangka Prioritas Pembangunan Kabupaten Seluma Ketiga	V - 24
Gambar 5.4	Kerangka Prioritas Pembangunan Kabupaten Seluma Keempat	V - 25
Gambar 5.5	Kerangka Prioritas Pembangunan Kabupaten Seluma Kelima	V - 26
Gambar 6.1	Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Pertama RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026.....	VI - 8
Gambar 6.2	Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Kedua RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026.....	VI - II
Gambar 6.3	Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026.....	VI - 13

DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1	Luas Wilayah Kabupaten Seluma.....	II - 2
Grafik	2.2	Jumlah Penduduk Per Tahun Kabupaten Seluma.....	II - 40
Grafik	2.3	Penduduk dan Kepadatan Penduduk per km ² Menurut Kecamatan (jiwa)	II - 40
Grafik	2.4	Jumlah Penduduk Kabupaten seluma per kecamatan tahun 2016-2020	II - 41
Grafik	2.5	Jumlah Penduduk Kabupaten seluma per kecamatan per jenis kelamin tahun 2016-2020.....	II - 42
Grafik	2.6	Jumlah Penduduk Kabupaten seluma per kecamatan per jenis kelamin tahun 2016-2019.....	II - 42
Grafik	2.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu 2016-2019 (data proyeksi)	II - 43
Grafik	2.8	Grafik Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Seluma	II - 45
Grafik	2.9	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Seluma 2016-2020	II - 53
Grafik	2.10	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Seluma tahun 2016-2020	II - 54
Grafik	2.11	Tingkat pengangguran terbuka kabupaten seluma tahun 2018-2020	II - 55
Grafik	2.12	Jumlah Murid Putus Sekolah Tingkat SD Tahun 2016-2020	II - 63
Grafik	2.13	Jumlah Murid Putus Sekolah Tingkat SMP Tahun 2016-2020	II - 63
Grafik	2.14	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020	II - 64
Grafik	2.15	Kondisi Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Seluma Tahun 2021 (Km)	II - 70
Grafik	2.16	Kondisi Jalan Aspal (AC, HRS, ATB)di Kabupaten Seluma Tahun 2021 (km, %)	II - 71
Grafik	2.17	Kondisi Jalan dengan Jenis Permukaan Lapis Penetrasi/ Lata sir/ Macadam	II - 71
Grafik	2.18	Kondisi jalan dengan jenis telford / kerikil / Urpil.....	II - 72
Grafik	2.19	Perkembangan status desa tahun 2018-2020	II - 82

Grafik	2.20	Komposisi Desa berdasarkan status desa Tahun 2020	II - 83
Grafik	2.21	Sebaran UMKM berdasarkan kecamatan tahun 2019.....	II - 87
Grafik	2.22	Luas Panen Padi menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu (Ha).....	II - 91
Grafik	2.23	Produksi Padi menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu (Ton)	II - 91
Grafik	2.24	Produktivitas Tanaman Padi (ton/ ha) menurut kabupaten/ kota di Provinsi Bengkulu	II - 92
Grafik	2.25	Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 (Rupiah)	II - 100
Grafik	3.1	Efektivitas Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Seluma dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020	III - 6
Grafik	4.1	Grafik Struktur Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Seluma	IV - 22
Grafik	4.2	Grafik Ilustrasi Kuadran Pergerakan Bersih.....	IV - 26
Grafik	4.3	Grafik Hasil Analisis Kuadran PDRB Berdasarkan Harga Konstan di Kabupaten Seluma	IV - 29
Grafik	4.4	Kondisi jalan Kabupaten Seluma Tahun 2017-2020.....	IV - 30
Grafik	4.5	Grafik Angka Kemiskinan Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu kurun waktu 2016-2020	IV - 31

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Nama Kecamatan dan Luasan Kecamatan	II - 2
Tabel	2.2	Kondisi Ketinggian di Kabupaten Seluma.....	II - 9
Tabel	2.3	Kondisi Kemiringan di Kabupaten Seluma	II - 10
Tabel	2.4	Sebaran Ketinggian Lahan Wilayah Kabupaten Seluma	II - 11
Tabel	2.5	Sebaran Kemiringan Lahan Wilayah Kabupaten Seluma.....	II - 11
Tabel	2.6	Rata-Rata Temperatur dan Rata-Rata Kelembaban Udara pada Stasiun Klimatologi Pulau Baai Tahun 2017	II - 12
Tabel	2.7	Sebaran Jenis Tanah Di Kabupaten Seluma.....	II - 14
Tabel	2.8	Luas Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)/ Sub DAS di Kabupaten Seluma Tahun 2020	II - 16
Tabel	2.9	Penggunaan Lahan di Kabupaten Seluma Tahun 2017	II - 20
Tabel	2.10	Luasan kawasan hutan di Kabupaten Seluma.....	II - 21
Tabel	2.11	Luas Lahan Kritis Menurut DAS di Kabupaten Seluma Tahun 2020	II - 23
Tabel	2.12	Sebaran Potensi Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Seluma	II - 38
Tabel	2.13	Sebaran Potensi Rawan Banjir di Kabupaten Seluma.....	II - 39
Tabel	2.14	Jumlah Penduduk Kabupaten seluma tahun 2010-2020	II - 40
Tabel	2.15	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Seluma Tahun 2017 – 2032.....	II - 45
Tabel	2.16	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Seluma Tahun 2017 – 2032	II - 46
Tabel	2.17	PDRB Kabupaten Seluma tahun 2010-2019	II - 48
Tabel	2.18	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Seluma	II - 49
Tabel	2.19	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Seluma	II - 50
Tabel	2.20	PDRB per Kapita Kabupaten Seluma 2016-2020.....	II - 51
Tabel	2.21	Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2017- 2020	II - 52
Tabel	2.22	Indeks Kemiskinan Kabupaten Seluma	II - 53

Tabel	2.23	Angka Melek Huruf di Kabupaten Seluma Tahun 2016-200	II - 56
Tabel	2.24	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur (persen)	II - 56
Tabel	2.25	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Seluma, 2019	II - 58
Tabel	2.26	Perkembangan APS Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020	II - 58
Tabel	2.27	Perkembangan APM Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020	II - 59
Tabel	2.28	Perkembangan APK Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020	II - 60
Tabel	2.29	Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar Tingkat SD	II - 60
Tabel	2.30	Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar Tingkat SMP	II - 61
Tabel	2.31	Rasio Guru Terhadap Murid Tingkat SD	II - 62
Tabel	2.32	Persentase Guru SD dan SMP yang Sudah Sertifikasi Tahun 2017-2020	II - 64
Tabel	2.33	Perkembangan SD dan SMP yang Telah mendapatkan Akreditasi A dan B Tahun 2016- 2020	II - 65
Tabel	2.34	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020	II - 66
Tabel	2.35	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020	II - 67
Tabel	2.36	Angka Stunting di Kabupaten Seluma Tahun 2018-2021	II - 68
Tabel	2.37	Prevalensi Stunting Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2020	II - 68
Tabel	2.38	Sebaran fasilitas kesehatan per kecamatan tahun 2020	II - 69
Tabel	2.39	Kondisi Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Seluma Tahun 2021 (Km)	II - 70
Tabel	2.40	Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Mantap 2016-2021	II - 72
Tabel	2.41	Luas Areal Kumuh di Kabupaten Seluma	II - 75

Tabel	2.42	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda Tahun 2016-2021	II - 76
Tabel	2.43	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Tahun 2016-2021	II - 76
Tabel	2.44	Capaian Persentase PMKS yang ditangani.....	II - 76
Tabel	2.45	Indeks Resiko Bencana Tahun 2016-2021.....	II - 77
Tabel	2.46	TPAK Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Seluma, 2016-2020	II - 78
Tabel	2.47	Indeks Pembangunan Gender 2016-2021.....	II - 78
Tabel	2.48	Indeks Pemberdayaan Gender 2016-2021.....	II - 79
Tabel	2.49	kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tahun 2016-2020	II - 79
Tabel	2.50	Capaian Indikator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II - 80
Tabel	2.51	Perkembangan Indeks Kualitas Udara Tahun 2018-2020	II - 81
Tabel	2.52	Kinerja urusan kependudukan dan Catatan Sipil.....	II - 81
Tabel	2.53	Sebaran Desa berdasarkan status desa menurut kecamatan tahun 2018 dan 2020	II - 83
Tabel	2.54	Rincian Capaian Indeks SPBE Kabupaten Seluma.....	II - 86
Tabel	2.55	Perkembangan indikator-indikator urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020	II - 87
Tabel	2.56	Perkembangan indikator bidang penanaman modal	II - 88
Tabel	2.57	Perkembangan kinerja urusan Kebudayaan di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020.....	II - 88
Tabel	2.58	kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020	II - 89
Tabel	2.59	Perkembangan Pariwisata Kabupaten Seluma	II - 90
Tabel	2.60	Data Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian	II - 90
Tabel	2.61	Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2016-2021	II - 93
Tabel	2.62	Perkembangan kinerja Kesetariatan Daerah Tahun 2016-2020	II - 94

Tabel	2.63	Jumlah Raperda yang Ditetapkan Menjadi Perda Kurun Waktu 2016-2020	II - 94
Tabel	2.64	Kinerja Perencanaan Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020	II - 95
Tabel	2.65	Perkembangan kinerja urusan pengawasan Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020	II - 96
Tabel	2.66	Kinerja Urusan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma Tahun 2016-2020	II - 97
Tabel	2.67	Perkembangan Kepegawaian Kabupaten Seluma Kurun Waktu 2016-2020.....	II - 98
Tabel	2.68	Perkembangan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Seluma	II - 98
Tabel	2.69	Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Berdasarkan Sektor Tahun 2016-2020.....	II - 101
Tabel	2.70	Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Berdasarkan Sektor Tahun 2016-2020	II - 102
Tabel	2.71	Angka Kriminalitas Tahun 2016-2020.....	II - 103
Tabel	2.72	Perkembangan indikator terkait fokus iklim investai	II - 103
Tabel	2.73	Perkembangan Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Tahun 2016-2020	II - 103
Tabel	2.74	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih	II - 104
Tabel	2.75	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah	II - 105
Tabel	2.76	apaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Seluma Tahun 2020	II - 119
Tabel	3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Seluma Tahun 2015-2020	III - 4
Tabel	3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020	III - 5
Tabel	3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020	III - 8

Tabel	3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah Kabupaten Seluma selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020	III - 11
Tabel	3.5	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Seluma Selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2016 s.d Tahun 2020	III -14
Tabel	3.6	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Seluma selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun 2020	III - 16
Tabel	3.7	Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dan Rata-rata Pertumbuhannya	III - 18
Tabel	3.8	Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Seluma dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020	III - 22
Tabel	3.9	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Seluma selama 3 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2020	III - 25
Tabel	3.10	Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Seluma dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020	III - 26
Tabel	3.11	Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma selama 5 Tahun Mendatang dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026	III - 30
Tabel	3.12	Proyeksi Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026	III - 33
Tabel	3.13	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026	III - 34
Tabel	3.14	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026	III - 36

Tabel	4.1	Laju Pertumbuhan PDRB Seluma Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020.....	IV - 20
Tabel	4.2	PDRB Kabupaten Seluma Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017	IV - 21
Tabel	4.3	Hasil Analisis LQ PDRB Berdasarkan Harga Berlaku di Kabupaten Seluma Pada Tahun 2017.....	IV - 24
Tabel	4.4	Hasil Analisis Shift Share PDRB Berdasarkan Harga Konstan di Kabupaten Seluma Tahun 2017	IV - 25
Tabel	4.5	Hasil Analisis Pergerakan Bersih PDRB Berdasarkan Harga Konstan di Kabupaten Seluma Tahun 2017	IV - 28
Tabel	4.6	Kondisi jalan Kabupaten Seluma Tahun 2017-2020.....	IV - 31
Tabel	5.1	Perumusan Penjelasan Visi Kabupaten Seluma 2021-2026	V - 2
Tabel	5.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026	V - 19
Tabel	5.3	Keterkaitan antara Isu Strategis, Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah	V - 27
Tabel	5.4	Keterkaitan 5 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma dengan Misi RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026, Prioritas Pembangunan Daerah Propinsi Tahun 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024.....	V - 29
Tabel	6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Seluma	VI - 2
Tabel	6.2	Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Seluma	VI - 18
Tabel	6.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026	VI - 23
Tabel	7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2021-2026 Kabupaten Seluma	VII - 2
Tabel	7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026	VII - 3
Tabel	8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seluma	VIII - 2

Tabel	8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Seluma	VIII - 4
-------	-----	--	----------



**PEMERINTAH KABUPATEN
SELUMA**

BAB I. PENDAHULUAN

selumaalap



Selumaalap



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah setiap lima tahun sekali. Calon-calon Kepala Daerah diminta untuk menyampaikan visi, misi dan program prioritasnya dalam masa kampanye pemilihan dengan mengacu pada permasalahan dan isu strategis yang masih ada di Kabupaten Seluma.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan posisi RPJMD dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2021-2025.

Merujuk hal tersebut bahwa posisi RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 masuk dalam tahap IV (keempat) atau tahap akhir pencapaian RPJMD Kabupaten Seluma melalui visinya “Mila Besamo Untuk Seluma Alap” yang dapat



diartikan “Mari Bersama Untuk Seluma Elok. Selain itu, RPJMD disusun harus memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Bengkulu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah, kondisi lingkungan strategis daerah, potensi daerah, isu-isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rendalev Bangda, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa dalam menyusun RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan, 1) politis; 2) teknokratik; 3) Partisipatif; 4) atas-bawah (top-down) dan bawah–atas (bottom-up). Dimana keempat pendekatan perencanaan pembangunan tersebut telah dilaksanakan secara sistematis dan konsisten, yang mulai dari melakukan pendekatan teknokratis dilaksanakan berdasarkan kajian ilmiah dan bukti fisik, data dan informasi yang akurat kondisi existing Kabupaten Seluma. Selanjutnya pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik sehingga dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, serta terciptanya konsensus. Sehingga membutuhkan pendekatan top down dan bottom up dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan melalui forum konsultasi publik. Terakhir pendekatan politis dilakukan melalui pembahasan di Kabupaten Seluma, yang mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (1,) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Didasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut juga mengatur bahwa dalam RPJMD harus memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), bertujuan untuk menjaga sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026. Konsistensi antar dokumen perencanaan ini akan berdampak

saat dilakukan evaluasi pada akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa periodisasi RPJMD

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 didasari melalui beberapa Peraturan Perundangan, antara lain:

- 1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup strategis;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - 10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 15);
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 6);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
- 25) Peraturan Daerah No.5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2006 – 2025;



- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032;
- 27) Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021;
- 28) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

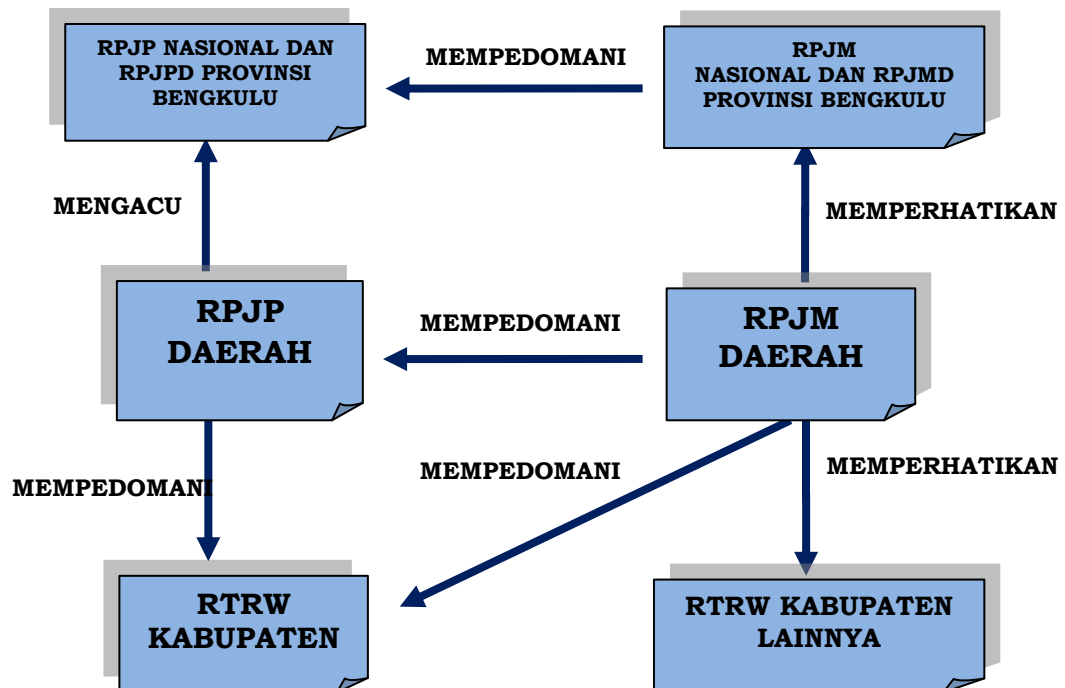
Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Seluma mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Seluma merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten, RPJP dan RPJM Daerah Provinsi Bengkulu, serta memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
2. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Seluma dan mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 serta memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dan RTRW Kabupaten lainnya lainnya.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen



1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

RPJMD Kabupaten Seluma ditetapkan dengan maksud sebagai acuan bagi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2021-2026 ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Seluma, khususnya periode tahun 2021-2026;
2. Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Seluma;



3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Seluma. Selanjutnya, RKPD tersebut menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. Sebagai alat ukur untuk penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;
5. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja Kepala SKPD dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program bupati terpilih;
6. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di wilayah Kabupaten Seluma;
7. Sebagai instrumen untuk menjalankan fungsi pengawasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma, khususnya dalam pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah agar sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dan aspirasi masyarakat.

Adapun tujuannya adalah:

- 1) Untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 2) Menyajikan gambaran umum kondisi daerah, kebijakan nasional dan lingkungan strategis sebagai bahan perumusan permasalahan, dan isu strategis daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan;
- 3) Mengidentifikasi agenda kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021-2026.
- 4) Merumuskan dan menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.
- 5) Menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja tahunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma

1.5. Sistematika Dokumen

Adapun sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 yang berisikan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal yang digunakan dalam penyusunan penyempurnaan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan penyusunan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 dan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan penyempurnaan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika

Memuat sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang kondisi pengelolaan keuangan daerah saat ini, asumsi-asumsi perencanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun ke depan. Pada BAB III ini, struktur keuangan daerah menggunakan struktur sesuai PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Menyajikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah sebagai dasar menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016 – 2021 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang terkait dengan isu strategis daerah

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode RPJMD.

BAB IX. PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan bahwa Dokumen RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dalam melakukan pembangunan selama 5 Tahun kedepan.

BAB II. **GAMBARAN UMUM**

Selumaalap



Rppmd Kab Seluma 2021-2026



BAB II

GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Pada awal pembentukan Kabupaten Seluma, jumlah kecamatan di Kab. Seluma sebanyak 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kecamatan Semidang Alas, dan Kecamatan Semidang Alas Maras. Sekarang sudah dimekarkan menjadi 14 (empat belas) kecamatan dengan jumlah kelurahan/desa di Kab. Seluma pada tahun 2020 yaitu sebanyak 202 kelurahan/desa yang terdiri dari 20 kelurahan dan 182 desa.

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Seluma berada di Pantai Barat Pulau Sumatera bagian Selatan, membujur di sepanjang Bukit Barisan dengan posisi koordinat 03°49'55,66" - 04°21'40,22" LS dan 101°17'27,57" - 102°59'40,54" BT. Letak geografis tersebut, secara administratif mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Samudera Indonesia.

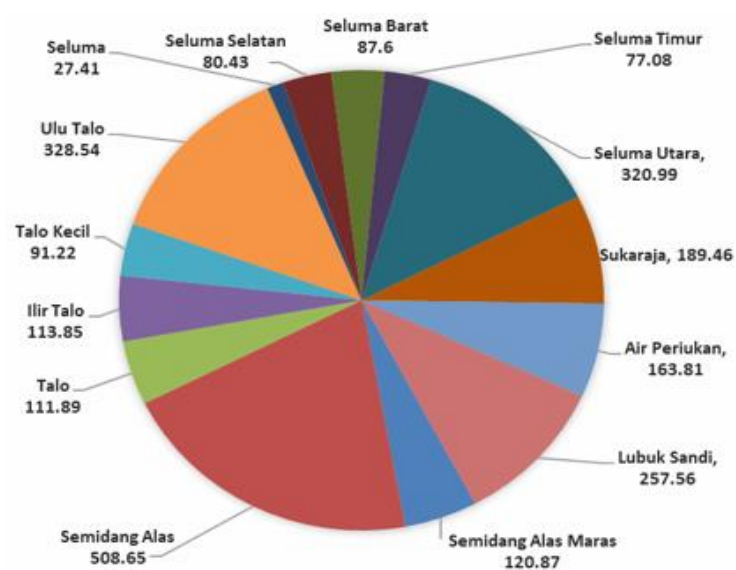
Wilayah Kabupaten Seluma ini semula merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, yang menjadi dasar terbentuknya Kabupaten Seluma, dengan luas wilayah 4.128,46 km². 2.400,44 km² atau 240.044 Ha wilayah darat dan ± 1.728,02 km² wilayah laut.

Tabel 2.1
Nama Kecamatan dan Luasan Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total (km2)
1	Semidang Alas Maras	Kembang Mumpo	120,87
2	Semidang Alas*	Pajar Bulan	508,65
3	Talo	Masmambang	111,89
4	Iilir Talo	Padang Cekur	113,85
5	Talo Kecil	Sukamerindu	91,22
6	Ulu Talo*	Air Keruh	328,54
7	Seluma	Tais	27,41
8	Seluma Selatan	Rimbo Kedui	80,43
9	Seluma Barat	Pagar Agung	87,60
10	Seluma Timur	Selebar	77,08
11	Seluma Utara*	Puguk	320,99
12	Sukaraja	Sukaraja	189,46
13	Air Periukan	Dermayu	163,81
14	Lubuk Sandi*	Rena Panjang	257,56
			2 479,36

Sumber : Seluma dalam angka tahun 2021

Grafik 2.1
Grafik Luas Wilayah Kabupaten Seluma



Gambar 2.2





1. Kecamatan Sukaraja

Kecamatan Sukaraja memiliki luas wilayah 24.078 Ha atau 10,03% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan Sukaraja terdiri dari 2 kelurahan dan 19 desa yaitu Kelurahan Sukaraja, Kelurahan babatan, Desa Lubuk sahung, padang pelawi, bukit peninjauan II, Kayu arang, niur, cahaya negeri, bukit peninjauan I, riak siabun, jenggalu, sidosari, sari mulyo, sidoluhur, sumber arum, riak siabun I, padang kuas, kuti agung, air kemuning, air petai, sumber makmur.

2. Kecamatan Air Periukan

Kecamatan Air Periukan memiliki luas wilayah 12.233 Ha atau 5,10 % dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan Air Periukan terdiri dari 16 desa yaitu Desa Pasar ngalam, sukasari, tawang rejo, kungkai baru, keban agung, lawang agung, padang pelasan, air periukan, dermayu, sukamaju, talang benuang, talang alai, lubuk gilang, talang sebaris, lokasi baru dan taba lubuk puding. Wilayah Administratif Kecamatan Air Periukan berbatasan langsung dengan ; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Sandi Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Seluma Selatan dan Samudera Hindia dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

3. Kecamatan lubuk sandi

Kecamatan Lubuk sandi memiliki luas wilayah 17.519 Ha atau 7,3% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan lubuk sandi terdiri dari 14 desa yaitu Desa tumbuan, renah panjang, gunung agung, padang capo ulu, padang capo ilir, tanjung kuaw, talang giring, dusun tengah, talang kebun, arang sapat, napal jungur, cawang, sakaian dan lubuk terentang.

Wilayah Administratif Kecamatan Lubuk Sandi berbatasan langsung dengan: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten bengkulu Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seluma Utara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seluma BaratSebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Air Periukan

4. Kecamatan seluma barat

Kecamatan Seluma barat memiliki luas wilayah 10.245 Ha atau 4,27% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan seluma barat terdiri dari



9 desa yaitu Desa purbosari, talang prapat, air latak, pagar agung, talang tinggi, lunjuk, lubuk lagan, tanjung agung dan sengkuang jaya. Wilayah Administratif Kecamatan Seluma Barat berbatasan langsung dengan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Sandi dan Kecamatan Air Periukan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Air Periukan dan Samudera Hindia Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Seluma Selatan dan Kecamatan Seluma dan Samudera Hindia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seluma Utara.

5. Kecamatan seluma

Kecamatan Seluma memiliki luas wilayah 2.183 Ha atau 0,91% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan seluma terdiri dari 7 kelurahan yaitu Kelurahan pasar tais, lubuk lintang, lubuk kebur, talang saling, talang dantuk, dusun baru dan napal. Wilayah Administratif Kecamatan Seluma berbatasan langsung dengan ; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seluma Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seluma timur, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Seluma Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seluma barat.

6. Kecamatan seluma timur

Kecamatan Seluma timur memiliki luas wilayah 6.450 Ha atau 2,69% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan seluma timur terdiri dari 3 kelurahan dan 5 desa yaitu Kelurahan sembayat, bunga mas, selebar, desa kota agung, kunduran, tenagan, talang Sali, rawasari. Wilayah Administratif Kecamatan Seluma timur berbatasan langsung dengan ; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seluma Utara dan Seluma Kota, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seluma Utara dan Kecamatan Talo, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Talo dan Kecamatan Ilir Talo dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seluma selatan.

7. Kecamatan seluma selatan

Kecamatan Seluma selatan memiliki luas wilayah 7.446 Ha. Kecamatan seluma selatan terdiri dari 3 kelurahan dan 9 desa yaitu kelurahan rimbo kedui, kelurahan sidomulyo, kelurahan padang rambun, tanjung seluai, pasar seluma, tangga batu, sukarami, padang genting, sengkuang, tanjungan, tanjung seru, padang merbau. Wilayah Administratif Kecamatan Seluma selatan berbatasan



langsung dengan ; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seluma dan Kecamatan Seluma Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seluma Timur, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Seluma Timur dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Samudera Hindia dan Kecamatan Seluma Barat

8. Kecamatan seluma utara

Kecamatan Seluma utara memiliki luas wilayah 41.089 Ha atau 17,12% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan seluma utara terdiri dari 1 kelurahan dan 9 desa yaitu kelurahan puguk, desa simpang, selingsingan, pandan, talang beringin, talang rami, lubuk resam, sekalak, sinar pagi, talang empat. Wilayah Administratif Kecamatan Seluma Utara berbatasan langsung dengan ; sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Talo, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Seluma dan Seluma Timur dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Sandi danSeluma Barat

9. Kecamatan talo

Kecamatan talo memiliki luas wilayah 11.120 Ha atau 4,63% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan talo terdiri dari 1 kelurahan dan 15 desa yaitu kelurahan masmambang, desa air teras, air payangan, batu tugu, lubuk gadis, lubuk ngantungan, bunut tinggi, napal melintang, harapan mulya, kampai, durian bubur, simpang tiga pagar gasing, serambi gunung, muara danau, lubuk gio dan kembang seri. Wilayah Administratif Kecamatan Talo berbatasan langsung dengan ; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Talo dan Kecamatan Seluma Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Talo Kecil, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Ilir Talo dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seluma Timur

10. Kecamatan talo kecil

Kecamatan talo kecil memiliki luas wilayah 5.977 Ha atau 2,45% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan talo kecil terdiri dari 11 desa yaitu desa pering baru, suka bulan, sukamerindu, talang padang, bakal dalam, napalan, lubuk lagan, sungai petai, tebat sibun dan batu balai. Wilayah Administratif Kecamatan Talokecil berbatasan langsung dengan; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Semidang Alas Maras dan Kecamatan Ulu Talo,

sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Semidang Alas Maras, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Ilir Talo dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Talo dan Kecamatan Ilir Talo

11. Kecamatan ilir talo

Kecamatan ilir talo memiliki luas wilayah 13.138 Ha atau 5,47% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan ilir talo terdiri dari 15 desa yaitu desa dusun baru, penago baru, penago I, penago II, tanah abang, padang batu, rawa indah, talang kabu, talang panjang, padang cekur, nanti agung, pasar talo, paluah terap, margo sari, dan mekar sari. Wilayah Administratif Kecamatan ilir Talo berbatasan langsung dengan; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Talo dan Kecamatan Talo Kecil, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Semidang Alas Maras, Sebelah Selatan berbatasan Samudera Hindia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seluma Selatan

12. Kecamatan ulu talo

Kecamatan ulu talo memiliki luas wilayah 22.716 Ha atau 9,46% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan ulu talo terdiri dari 13 desa yaitu desa pagar banyu, pagar, air keruh, hargobinangun, mekar jaya, simpur ijang, muara simpur, tanjung agung, pagar agung, girimulya, banyu kencana, muara nibung, girinanto. Wilayah Administratif Kecamatan ulu Talo berbatasan langsung dengan; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seluma Utara dan Kecamatan Talo Kecil, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Semidang Alas Maras, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Talo dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Seluma Utara

13. Kecamatan semidang alas

Kecamatan semidang alas memiliki luas wilayah 55.475 Ha atau 23,11% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan semidang alas terdiri dari 1 kelurahan dan 18 desa yaitu kelurahan pajar bulan, desa Maras Jauh, Tebat Gunung, Padang Serunaian, Gunung Mesir, Petai Kayu, Nanjungan, Bandung Agung, Pinju Layang, Nanti Agung, Rantau Panjang, Talang Durian, Air Melancar, Cugung Langu, Renah Gajah Mati I, Muara Dua, Renah Gajah Mati II, Kayu Elang, Napalan, Mekar Sari Mukti, Telatan, Suban, Gunung Megang, dan Kemang Manis.

14. Kecamatan semidang alas maras

Kecamatan semidang alas maras memiliki luas wilayah 10.375 Ha atau 4,32 % dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan semidang alas maras terdiri dari 1 kelurahan dan 25 desa yaitu kelurahan Kembang Mumpo, Desa Tedunan, Ketapang Baru, Padang Bakung, Talang Alai, Jambat Akar, Karang Anyar, Ujung Padang, Sendawar, Gelombang, Lubuk Betung, Padang Peri, Maras Tengah, Gunung Kembang, Gunung Bantan, Genting Juar, Padang Kelapo, Talang Beringin, Muara Maras, Pematang Riding, Serian Bandung, Rimbo Besar, Muara Timput, Maras Bantan, Talang Kemang dan Karang Dapo. Wilayah Administratif Kecamatan Semidang Alas Maras berbatasan langsung dengan; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Semidang Alas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Semidang Alas dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Talo Dan Talo Kecil

B. Kondisi Topografi

Bentangan wilayah menurut panjang garis pantai adalah sekitar 70 Km dan lebar dari pantai ke punggung pegunungan berkisar antara 31 sampai 44 Km. Secara geomorfologi atau bentukan permukaan bumi terdapat 4 karakter utama yang berturut-turut dari arah pantai ke pegunungan sebagai berikut:

- Dataran Pantai yang terletak sepanjang pantai
- Dataran Aluvial yang terletak memanjang di belakang dataran pantai
- Zona Lipatan yang memanjang dan sejajar di belakang dataran Aluvial
- Zona Vulkanik yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan dengan karakter pegunungan patahan (dikenal dengan Patahan Semangko) dan kompleks vulkanik dengan pusat erupsi di luar wilayah Kabupaten Seluma (yang menonjol adalah Gunung Dempo di Kabupaten Lahat)

Kabupaten Seluma memiliki ketinggian tempat antara 0 - >1.000 m dpl, yaitu 0 – 25 m sebesar 30,67 %, 25 – 100 m sebesar 29 %, 100 – 500 m sebesar 21,50 %, 500 – 1.000 m sebesar 15,96 % dan > 1.000 m sebesar 16 %. Kelompok daerah perbukitan menempati lereng bawah dari rangkaian Bukit Barisan yang memanjang ke arah barat laut - tenggara dengan perbedaan ketinggian sekitar 300 m. Puncak-puncaknya berada pada ketinggian 500 – 2.000 m dpl dan ditengah-tengah jalur rangkaian dijumpai sistem patahan Sumatera.



Keadaan topografi di wilayah Kabupaten Seluma terdiri dari daerah datar dan berbukit sampai bergunung. Berdasarkan atas ketinggiannya dari permukaan laut, maka wilayah Kabupaten Seluma terbagi atas :

- Daerah yang berada pada ketinggian >10 m dpl dengan luas 30.810 Ha atau 12,834 %.
- Daerah yang berada pada ketinggian 10 – 25 m dpl dengan luas 22.322 Ha atau 9,295 %.
- Daerah yang berada pada ketinggian 25 – 50 m dpl dengan luas 27.274 Ha atau 11,357 %.
- Daerah yang berada ketinggian 50 – 100 m dpl dengan luas 18.773 Ha atau 7,817 % .
- Daerah yang berada ketinggian 100 – 500 m dpl dengan luas 58.409 Ha atau 24,322 %.
- Daerah yang berada pada ketinggian 500 – 1.000 m dpl dengan luas 42.323 Ha atau 17,624 %.
- Daerah yang berada pada ketinggian >1.000 m dpl dengan luas 40.223 Ha atau 16,750 %.

Selaras dengan geomorfologi topografi wilayah Kabupaten Seluma menurut selang ketinggian di atas permukaan laut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kondisi Ketinggian di Kabupaten Seluma

No	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 - 10	30,820	12.83
2	10 - 25	22,322	9.30
3	25 - 50	27,274	11.36
4	50 - 100	18,773	7.82
5	100 - 500	58,409	24.32
6	500 - 1000	42,323	17.62
7	>1000	40,223	16.75
Total		240,144	100.00

Sumber : RTRW Kabupaten Seluma Tahun 2012

Tabel 2.3

No	Kemiringan (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 - 3	62,060	25.84
2	3 - 8	20,080	8.36
3	8 - 15	25,784	10.74
4	15 - 25	20,812	8.67
5	25 - 40	43,046	17.93
6	>40	68,362	28.47
Total		240,144	100.00

Gambar 2.3

PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU

Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran ketinggian wilayah Kabupaten Seluma dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.4
Sebaran Ketinggian Lahan Wilayah Kabupaten Seluma

No	Kecamatan	Selang Ketinggian (mdpl)							Total (Ha)
		<10	25-Oct	25 - 50	50 - 100	100 - 500	500 - 1000	>1000	
1	Sukaraja	12,026	4,551	5,326	4,344	13,162	4,326	15,220	58,925
2	Seluma	8,309	5,008	7,103	5,040	13,864	13,320	10,250	62,894
3	Talo	7,947	5,438	7,232	6,112	13,135	7,367	5,224	52,475
4	Semidang Alas	-	2,050	5,197	3,131	18,278	17,290	9,529	55,475
5	Semidang Alas Maras	2,538	5,275	2,416	146	-	-	-	10,375
Kabupaten Seluma		30,82	22,322	27,274	18,773	58,409	42,323	40,223	240,144
Presentase (%)		12,83	9,30	11,36	7,82	24,32	17,62	16,75	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Seluma Tahun 2012

Tabel 2.5
Sebaran Kemiringan Lahan Wilayah Kabupaten Seluma

No	Kecamatan	Selang Kemiringan (%)						Total (Ha)
		0-3	3-8	8-15	15-25	25-40	>40	
1	Sukaraja	25,65	4,960	3,856	-	17,721	6,738	58,925
2	Seluma	11,077	5,793	7,953	6,083	10,303	21,685	62,894
3	Talo	15,703	5,409	5,244	5,473	8,067	12,579	52,475
4	Semidang Alas	3,167	1,928	7,664	8,741	6,615	27,360	56,475
5	Semidang Alas Maras	6,463	1,990	1,067	515	340	-	10,375
Kabupaten Seluma		62,00	20,080	25,784	20,812	43,046	68,362	240,144
Persentase (%)		25,84	8,36	10,74	8,67	17,93	28,47	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Seluma Tahun 2012



C. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Seluma beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata maksimum antara 31°C – 33°C dan rata-rata suhu minimum antara 22°C – 23°C, sedangkan kelembaban rata-rata antara 80 – 88%, curah hujan rata-rata dalam satu tahun adalah 223,083 mm. Musim yang terjadi di wilayah Kabupaten Seluma sebagaimana wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu dikenal dua musim, yaitu musim hujan yang terjadi di bulan Desember-Maret dan musim kemarau yang terjadi di bulan Juni-September. Sementara pada bulan April-Mei dan Oktober- November merupakan masa peralihan atau pancaroba.

Tabel 2.6

**Rata-Rata Temperatur dan Rata-Rata Kelembaban Udara pada Stasiun
Klimatologi Pulau Baai Tahun 2017**

Bulan	Maks	Min	Rata-rata	Average of Humanity (%)	Curah Hujan
Januari	29,6	23,9	26,1	85	376
Februari	30,1	23,6	26,2	87	477
Maret	30,9	24,0	27,0	83	322
April	32,1	24,9	27,7	85	330
Mei	31,6	24,8	27,5	84	238
Juni	31,5	24,3	27,1	82	211
Juli	31,4	24,0	27,0	83	98
Agustus	31,3	23,9	26,8	83	317
September	31,2	24,2	26,8	85	480
Oktober	30,9	24,1	26,9	83	343
November	30,3	24,4	26,8	84	324
Desember	29,7	24,0	26,4	85	402

Sumber: Kabupaten Seluma Dalam angka Tahun 2018

Kondisi iklim di pengaruhi oleh jumlah curah, pada tahun 2020 curah hujan di Kabupaten Seluma sebanyak 4.816 mm dengan jumlah hari sebanyak 219 hari. Demikian tipe iklim tropis basah ini, maka potensial bagi pengembangan pertanian. Namun di lain pihak dengan karakter topografi morfologi wilayah di atas sangat penting adanya kawasan lindung berupa kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya khususnya hutan lindung dan kawasan resapan air.



D. Kondisi Geologi

Karakter geologi di Kabupaten Seluma dicirikan oleh endapan permukaan (*surficial deposits*) serta batuan sedimen dan gunung berapi (*sedimentary and volcanic rocks*). Batuan sedimen dan gunung api tersebut tersebar pada 3 lajur, 2 lajur terdapat dibagian lajur bengkulu (*Bengkulu zones*) dan Lajur Barisan (*Barisan zones*), serta Lajur Palembang (*Palembang zones*) terletak di bagian Timur Wilayah Kabupaten Seluma, tepatnya berada di wilayah perbatasan Sumatera Selatan. Endapan permukaan terletak di bagian barat wilayah Kabupaten Seluma yang merupakan kompleks pesisir dan dataran rendah. Dalam kelompok ini terdapat bentukan geologi berupa:

- Aluvium (Qa, Qal), Bongkah, kerikil, pasir, lanau, lumpur, dan lempung;
- Endapan Rawa, Pasir lanau, lumpur, lempung dengan sisa tumbuhan;
- Undak Aluvium (Qat), pasir, lanau, lempung, dan kerikil.

Bahan sedimen dan gunung api, khususnya lajur Bengkulu, terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Seluma, pada transisi dari pesisir/dataran rendah ke pengunungan Bukit Barisan. Dalam kelompok ini terdapat formasi geologi yaitu:

- ✚ Formasi Bintunan (Qtb) : Konglomerat aneka bahan, breksi, batugamping terumbu, batu lempung tufan, berbatu apung, kayu terkersikkan;
- ✚ Formasi Spg Aur (Tmps) : Batupasir tufan, tuf, batu lempung tufan, batupasir bermoluska, konglomerat anekabahan;
- ✚ Formasi Sebelat (Ttoms) : Perselingan batupasir, batu lanau, dan batu lempung dengan sisipan tipis batu gamping.
- ✚ Andesit (Tpan) : Andesit, yang merupakan batuan terobosan (intrusive rocks).

Batuan sedimen dan gunung api, khususnya lajur Barisan, terletak dibagian timur atau di bagian hulu wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompleks Pegunungan Bukit Barisan. Dalam kompleks ini terdapat formasi geologi, yaitu:

- Satuan Batuan Gunung Api Andesit-Basal (Qv)
Lava bersusunan andesit sampai basal, tuf dan breksi laharsari Bukit Dingin (Qvd)
- Formasi Hulusimpang (Tomh) :
Lava, breksi gunung api dan tuf, terubah, bersusunan andesit sampai basal, tebal 700 m.

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Seluma pada bagian pesisir atau hilir terdiri atas regosol, alluvial dan organosol glei humus. Sementara di bagian tengah dan hulu didominasi oleh assosiasi podsolik dan latosol. Di sekitar Bukit Sanggulerdapat jenis tanah andosol. Adapun sebaran jenis tanah di wilayah Kabupaten Seluma dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini (gambar peta jenis tanah) Jenis tanah di Kabupaten Seluma terdiri dari tanah Organosol dengan komposisi 4,67%, tanah alluvial dengan komposisi 17,24%, Regosol dengan komposisi 23,77%, Padsolik Merah Kuning dengan komposisi 8,99%, Litosol dengan komposisi 5,41%, Padsolik Merah Kuning Latosol dengan komposisi 17,29%, Padsolik Coklat Litosol dengan komposisi 19%. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran jenis tanah di Kabupaten Seluma dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Sebaran Jenis Tanah Di Kabupaten Seluma

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	%
1	Organosol	11,219	4,67
2	Alluvial	41,372	17,24
3	Regosol	57,066	23,77
4	Padsolik Merah Kuning	21,572	8,99
5	Litosol	12,967	5,41
6	Padsolik Merah Kuning Latosol	41,495	17,29
7	Padsolik Merah Kuning Litosol	8,721	3,63
8	Padsolik Coklat Litosol	240,044	19
Jumlah		240,044	100

Sumber : RTRW Kabupaten Seluma Tahun 2012

E. Kondisi Hidrologi

Sungai-sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Seluma yang relatif besar mengalir dari hulunya di pegunungan Bukit Barisan dan bermuara di Samudera Indonesia. Sementara sungai-sungai yang relatif kecil dengan arah aliran yang sama, namun hulunya belum sampai ke Pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten Seluma memiliki sungai besar dan kecil, antara lain : Air Ngalam, Air Seluma, Air



Simpang, Air Dingin, Air Plubang, Air Gambiran, Air Rika, Air Plubang Simpang Kanan dan Simpang Kiri, Air Tanjung Aur, Air Nelas Kiri, Air Keruh, Air Nelas, Air Sindur, Air Kungkai, Air Penago, Air Talo, Air Alas, dan Air Maras. Sungai-sungai tersebut ada yang langsung bermuara ke Samudra Indonesia. Sungai di Kabupaten Seluma berfungsi sebagai sumber irigasi dan sumber air minum PDAM.

Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Seluma adalah datar hingga curam. Berdasarkan kemiringan lereng, wilayah bertopografi datar seluas 89.105 ha (37,12%), curam seluas 59.760 ha (24, 90%) dan sangat curam (terjal) seluas 67.239 ha (28.01%).

Tekstur tanah di Kabupaten Seluma umumnya bertekstur agak halus dengan luas 1.112,60 km² (46,35%), tekstur sedang 607.92 km² (25,33%), halus 336,28 km² (14,01%), agak kasar 124,85 km² (5,20%) , dan kasar 218,79 km² (9,11%).

Jenis tanah pada umumnya di Kabupaten Seluma adalah alluvial, podsolik merah kuning latosol, dan podsolik coklat litosol. Komposisi jenis tanah tersebut secara berurutan adalah 17,24%; 23,77%; 17,29% ; dan 19,0%. Sedangkan jenis tanah lainnya umumnya rata-rata dibawah 10 persen, yaitu : organosol gley humus (4,67%), podsolik merah kuning (8,99%), litosol (5,41%), dan podsolik merah kuning litosol (3,63%).

Ditinjau dari aspek tata air Kabupaten Seluma memiliki sungai besar dan kecil, antara lain: Sungai Air Ngalam, Air Seluma, Air Simpang, Air Dingin, Air Plubang, Air Gambiran, Air Rika, Air Plubang Simpang Kanan dan Simpang Kiri, Air Tanjung Aur, Air Nelas Kiri, Air Keruh, Air Nelas, Air Sindur, Air Kungkai, Air Penago, Air Talo, Air Alas, dan Air Maras. Sungai-sungai tersebut ada yang langsung bermuara ke Samudra Indonesia. Sungai di Kabupaten Seluma berfungsi sebagai sumber irigasi dan sumber air minum PDAM. Wilayah Kabupaten Seluma juga berbatasan dengan lautan Samudra Indonesia, dimana kedalaman laut cukup bervariasi mulai dari 5 m sampai 200 m di bawah permukaan air laut. Pada kondisi tertentu pasang air laut tercatat maksimum 120 cm di Muara Sungai Seluma.

Kabupaten Seluma sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian 100 – 1.000 Meter di atas permukaan laut (dpl). Memiliki Relief tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lahan cukup tajam dan curam, berbukit dan terjal, terutama di wilayah yang berada

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Seluma juga beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 210 mm/bulan dengan jumlah bulan kering selama 3 bulan, bulan basah 9 bulan, kelembaban nisbi rata-rata 85,11 persen dan suhu harian rata-rata 25,34°C, dengan suhu maksimal 31,46° C dan suhu minimum 20,28°S. Sumber daya air di Kabupaten Seluma terdiri dari sumber daya air permukaan berupa air sungai serta sumber air tanah berupa sumber air tanah dangkal dan air tanah dalam. Sumber air tanah permukaan diantaranya adalah Sungai Air Kungkai, Sungai Air Ngalam, Sungai Air Pelumbang, Sungai Air Tais, S. Air Alas, S. Air Pino. Di Kabupaten Seluma terdapat Bendung Seluma yang digunakan untuk mengairi daerah irigasi teknis yang tersebar di bagian selatan wilayah Kabupaten Seluma.

Tabel 2.8
Luas Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)/ Sub DAS
di Kabupaten Seluma Tahun 2020

DAS/ Sub DAS	Luas DAS* (km2)	Kecamatan/ Wilayah
Nelas	296,45	Air Periukan, Lubuk Sandi, Sukaraja
Kungkai	334,66	Air Periukan, Lubuk Sandi, Seluma Barat, Seluma Selatan, Sukaraja
Seluma	639,33	Ilir Talo, Lubuk Sandi, Seluma, Seluma Barat, Seluma Selatan, Seluma Timur, Seluma Utara, Talo, Ulu Talo
Talo	519,97	Ilir Talo, Seluma Timur, Seluma Utara, Semidang Alas, Semidang Alas Maras, Talo, Talo Kecil, Ulu Talo
Alas	551,07	Ilir Talo, Semidang Alas, Semidang Alas Maras, Talo, Talo Kecil, Ulu Talo
Maras	137,88	Semidang Alas, Semidang Alas Maras

Catatan/Note : Luas Menyesuaikan Perbub Seluma tahun 2017 perihal Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Seluma/* Area Adjusts the 2017 Seluma regency regulations regarding the Determination and Affirmation of the Seluma District Limits*

Sumber/Source : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu/ Bengkulu Natural Resources Conservation Center



F. Penggunaan Lahan

Klasifikasi pengembangan wilayah yaitu dibagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang menjadi termasuk dalam pengembangan wilayah yaitu Dalam wilayah Provinsi Bengkulu, telah ditetapkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), yang menetapkan baik hutan dengan fungsi lindung maupun hutan dengan fungsi budidaya. Dimana penetapan kawasan hutan berdasarkan kepmenhutbun nomor: 420/kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu dan dilakukan perubahan terakhir sesuai dengan kepmenhut RI Nomor : SK.643/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 2.192 hektar, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas ± 31.013 hektar, dan penunjukan kawasan bukan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 101 hektar di Provinsi Bengkulu.

Dalam kawasan lindung juga terdapat kawasan resapan air dimana curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Kawasan resapan air di Kabupaten Seluma terdapat di Kecamatan Lubuk Sandi, Kecamatan Seluma Utara, Kecamatan Ulu Talo, dan Kecamatan Semidang Alas. Kawasan lindung juga berada pada kawasan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, sempadan mata air, ruang terbuka hijau. Pada kawasan lindung di Kabupaten Seluma juga terdapat kawasan suaka alam dan cagar budaya.

Pada kawasan budidaya terdapat kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman serta peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan tanaman. Sedangkan kawasan peruntukan hutan yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain - lain.

Kawasan peruntukan pertanian baik pertanian tanaman pangan dan hortikultura telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan Kabupaten Seluma, baik terhadap PDRB, dan penyerapan tenaga kerja. Potensi sumberdaya lahan tanaman pangan dan hortikultura meliputi lahan sawah dan lahan

bukan sawah yang terdiri dari pekarangan, ladang, dan tegalan/kebun. Dari potensi yang ada masih menunjukkan bahwa intensitas pertanian masih rendah, terutama lahan bukan sawah.

Untuk potensi kawasan perikanan khususnya perikanan tangkap di Kabupaten Seluma dikembangkan di sepanjang pesisir tiap kecamatan di Kabupaten Seluma, meliputi Kecamatan Sukaraja, Air Periukan, Seluma Barat, Seluma Selatan, Ilir Talo, Talo Kecil dan Semidang Alas Maras, sedangkan potensi pengembangan perikanan darat tersebar di tiap kecamatan di Kabupaten Seluma, sedangkan untuk budidaya air payau/tambak tersebar di Kecamatan Sukaraja, Air Periukan, Seluma Selatan, Ilir Talo, Talo Kecil dan Semidang Alas Maras.

Kabupaten Seluma merupakan wilayah yang kaya akan hasil pertambangan, terutama : batubara dan berbagai pertambangan mineral lainnya. Terdapat 10 lokasi yang berpotensi mengandung batu bara dan baru 2 lokasi yang baru dikelola diantaranya di Kecamatan Lubuk Sandi dan Seluma Utara. Sedangkan potensi pasir besi di sepanjang pantai Kecamatan Ilir Talo dan Seluma Selatan. Dalam mengelola usaha pertambangan, pemerintah menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), yang terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Pengembangan potensi kepariwisataan dilakukan dengan membagi destinasi pariwisata Kabupaten Seluma kedalam 5 (lima) Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP), sebagai berikut :

- a. DPP I , meliputi Koridor Kungkai Baru dan Pasar Ngalam
- b. DPP II, meliputi Koridor Tais, Puguk dan Lubuk Resam
- c. DPP III, meliputi Koridor Pasar Seluma
- d. DPP IV, meliputi Masmambang, Penago Baru dan Pasar Talo
- e. DPP V, meliputi Koridor Pajar Bulan, Air Melancar, Ketapang Baru dan Muara Maras

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Seluma, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan



dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis. Pengembangan potensi kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan yang tersebar.

Kawasan peruntukan industri yang direncanakan untuk dikembangkan terutama untuk industri kecil dan menengah yaitu di 7 kecamatan yaitu : Sukaraja, Seluma Selatan, Talo, Ilir Talo, Ulu Talo, Talo Kecil, dan Semidang Alas.

Kawasan peruntukan lainnya yang akan dikembangkan di Kabupaten Seluma adalah kawasan pertahanan dan keamanan yang meliputi TNI AD, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi vertikal lainnya yang memiliki peran dalam pertahanan dan keamanan negara di Kabupaten Seluma. Untuk pertahanan dan keamanan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada instansi vertikal masing-masing yang nantinya dirakomodir di dalam penataan ruang daerah, pengembangan terhadap kawasan pertahanan dan keamanan berada di lokasi Kecamatan Sukaraja, Seluma, Seluma Timur, Semidang Alas Maras, dan Talo.

Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Seluma adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) yang berlokasi di Kecamatan Seluma merupakan potensi wilayah yang diperuntukan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.



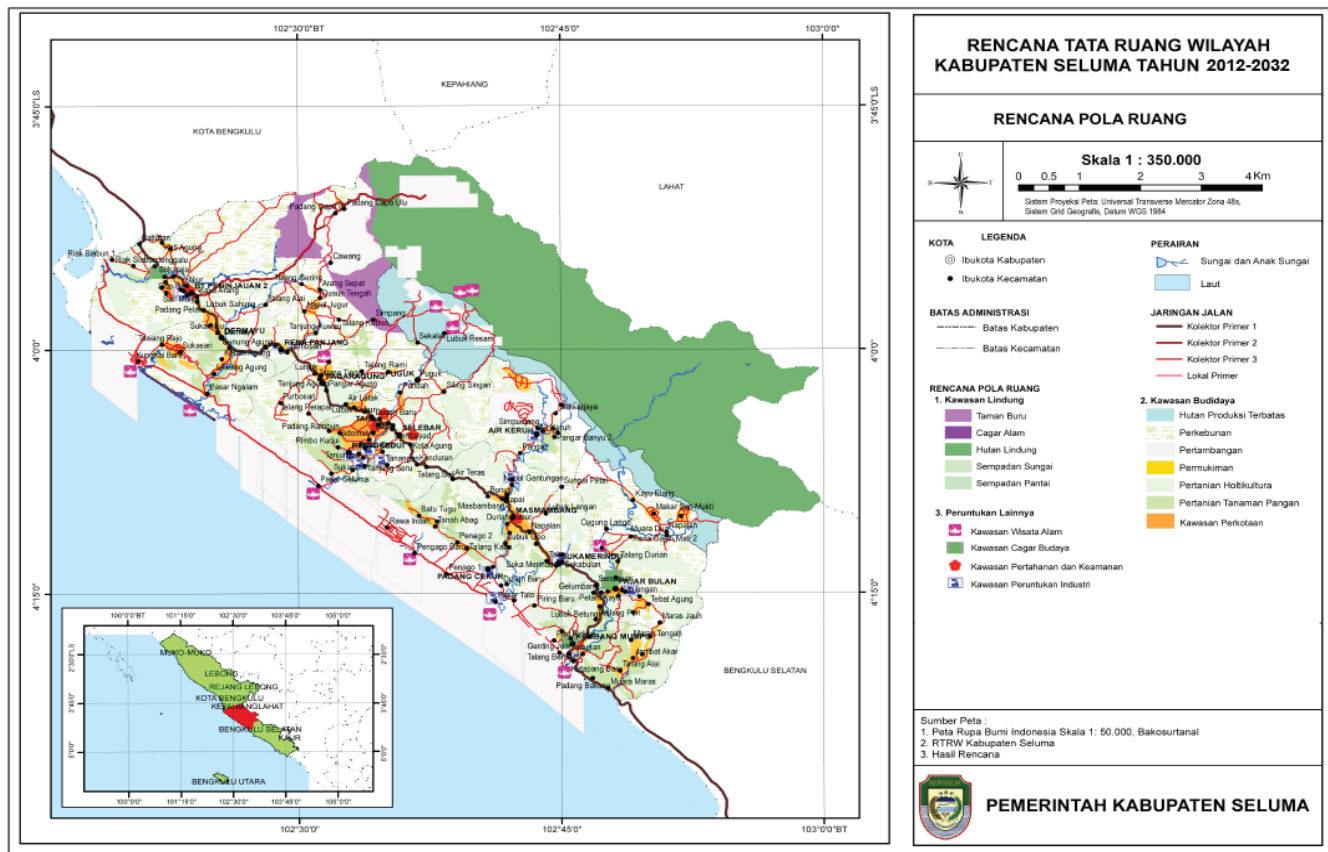
Tabel 2.9

Penggunaan Lahan di Kabupaten Seluma Tahun 2017

Kecamatan	Danau/ Situ	Empang	Gedung/ Bangunan	Hutan Rimba	Pasir/Bukit Pasir Laut	Perkebunan/ Kebun	Permukiman
Kec. Air Periukan	5.99	10.19	0.65		20.12	14279.10	901.51
Kec. Ilir Talo		3.60			5.46	6952.56	300.99
Kec. Lubuk Sandi			0.28	11.21		6768.28	215.95
Kec. Seluma	0.42		0.66			1694.71	185.05
Kec. Seluma Barat	4.61	2.71	0.37		4.65	8455.76	227.05
Kec. Seluma Selatan	0.76	2.57	0.17		6.85	4874.37	216.32
Kec. Seluma Timur	2.47	0.70	0.38			3879.96	155.37
Kec. Seluma Utara		1.71	0.05	14526.90		7223.84	98.25
Kec. Semidang Alas	1.66		0.67	33105.40		8391.42	176.09
Kec. Semidang Alas Maras	19.52	1.23	0.31	4.62	7.21	6074.38	367.96
Kec. Sukaraja		26.76	1.90			22027.00	1530.93
Kec. Talo			0.26			3486.82	186.68
Kec. Talo Kecil	0.23	2.94	0.04			5817.12	101.72
Kec. Ulu Talo		0.12		13284.60		2600.12	105.44
Grand Total	35.67	52.52	5.73	60932.74	44.30	102525.44	4769.31
Persentase (%)	0.01	0.02	0.00	24.65	0.02	41.47	1.93
Kecamatan	Rawa	Sawah	Semak Belukar	Sungai	Tambak	Tegalan/ Ladang	Grand Total
Kec. Air Periukan	5.77	47.94	15.69	492.97	12.19	323.06	16115
Kec. Ilir Talo	2.40	1024.24	951.37	178.12		381.94	9801
Kec. Lubuk Sandi		87.63	5597.90	170.21		5492.50	18344
Kec. Seluma	4.27	162.92	141.46	47.06		143.91	2380
Kec. Seluma Barat	2.11	216.83	1141.44	0.09		511.42	10567
Kec. Seluma Selatan	1.76	567.89	412.80	168.51		175.97	6428
Kec. Seluma Timur	4.80	287.68	3140.03	18.04		406.01	7895
Kec. Seluma Utara		99.55	11213.90	241.05		8874.25	42279
Kec. Semidang Alas	0.44	301.86	8587.05	351.33		1550.44	52466
Kec. Semidang Alas Maras	1.65	2546.44	1640.47	244.68		138.45	11047
Kec. Sukaraja	0.67	135.90	64.69	161.95		464.57	24414
Kec. Talo	1.33	775.45	6361.67	168.48		539.60	11520
Kec. Talo Kecil	0.36	518.37	3519.87	66.29		126.88	10154
Kec. Ulu Talo	0.42	272.24	6448.64	126.73		953.02	23791
Grand Total	25.99	7044.92	49236.98	2435.51	12.19	20082.00	247203
Persentase (%)	0.01	2.85	19.92	0.99	0.00	8.12	100

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

Gambar 2.4
Rencana Pola Ruang



Sumber : RTRW Kabupaten Seluma tahun 2012

Terdapat 13 Lokasi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berada di Cahaya Negeri;Masmambang;Rimbo Kedui; Dermayu;Pajar Bulan;Puguk; Renah Panjang; Pagar Agung; Kembang Mumpo; Selebar; Air Keruh;Padang Cekur; dan Suka Merindu. dan penetapan 5 lokasi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berada di Sukasari;Kayu Elang; Muara Maras;Rawa Indah; dan Dusun Tengah.

Tabel 2.10

Luasan kawasan hutan di Kabupaten Seluma

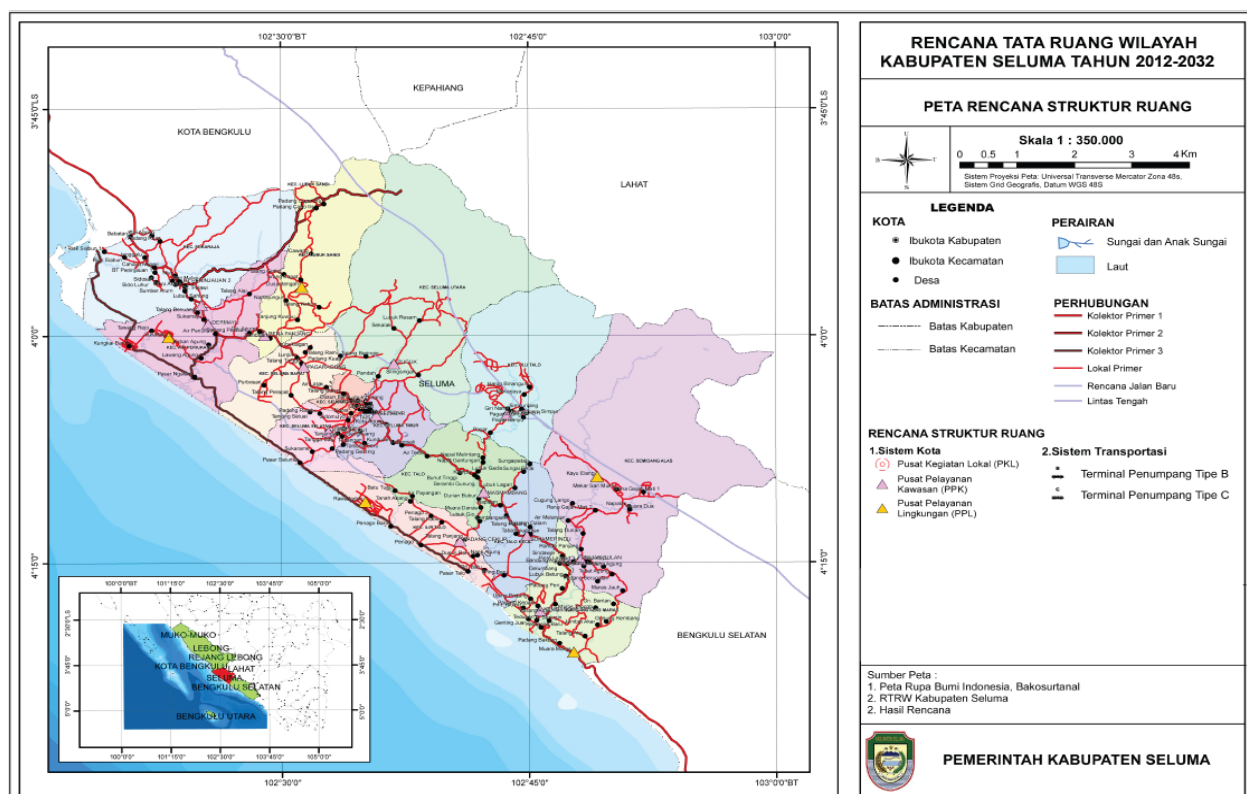
Uraian	Luas Hutan* (ha)
1 Hutan Konservasi/ Conservation	6 339,2
Kawasan Suaka Alam/ Conservation/ Sanctuary Reserve Area	
- Cagar Alam/ Nature Preserve	962,42
- Suaka Margasatwa/ Wildlife reserve	-
Kawasan Pelestarian Alam/ Nature Conservation Area	
- Taman Nasional/ National Parks	-

Uraian	Luas Hutan* (ha)
- Taman Wisata Alam/ <i>Natural Park</i>	-
- Taman Hutan Raya/ <i>Forest Park</i>	-
- Taman Buru/ <i>Game Hunting Park</i>	5 376,78
2 Hutan Lindung/ <i>Protection Forest</i>	66 892,34
3 Hutan Produksi/ <i>Production Forest</i>	15 732,34
- Hutan Produksi Terbatas/ <i>Limited Production Forest</i>	15 732,34
- Hutan Produksi Konversi/ <i>Conversion Production Forest</i>	-

Catatan/Note : Luas Menyesuaikan Perbub Seluma tahun 2017 perihal Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Seluma/*
Area Adjusts the 2017 Seluma regency regulations regarding the Determination and Affirmation of the Seluma District Limits*

Sumber/Source : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu/ Bengkulu Natural Resources Conservation Center

Gambar 2.5
Peta Rencana Struktur Ruang



Tabel 2.11
Luas Lahan Kritis Menurut DAS di Kabupaten Seluma
Tahun 2020

Kecamatan	Luas Lahan Kritis Berdasarkan Kawasan* (ha)		
	Di Dalam Kawasan Hutan	Di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Total
Semidang Alas Maras	61,50	7 305,05	7 366,55
Semidang Alas	26 897,67	19 033,01	45 930,68
Talo	-	10 420,13	10 420,13
Iilir Talo	270,47	6 865,55	7 136,02
Talo Kecil	-	7 856,49	7 856,49
Ulu Talo	19 739,03	6 526,82	26 265,85
Seluma	-	2 315,09	2 315,09
Seluma Selatan	212,77	3 097,11	3 309,88
Seluma Barat	-	4 389,11	4 389,11
Seluma Timur	-	3 676,88	3 676,88
Seluma Utara	19 461,4	8 972,6	28 434,01
Sukaraja	3,34	10 213,91	10 217,25
Air Periukan	190,42	7 928,52	8 118,94
Lubuk Sandi	11 297,96	9 155,61	20 453,57
Total	107 755,91	78 134,54	185 890,45

Catatan/Note : Luas Menyesuaikan Perbub Seluma tahun 2017 perihal Penetapan dan Penegasan BatasWilayah Kabupaten Seluma/ * Area Adjusts the 2017 Seluma regency regulations regarding the Determination and Affirmation of the Seluma Distric Limits*

Sumber/Source : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu/ Bengkulu Natural Resources Conservation Center

G. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

a) Kawasan Konservasi

Tujuan perlindungan terhadap cagar budaya adalah untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional dan keragaman bentuk geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Cagar budaya yang ada di Kabupaten Seluma, yaitu :

- Situs Megalitik Gerincing di Kecamatan Semidang Alas;
- Situs Megalitik Rantau Panjang di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Semidang Alas;
- Rumah Tradisional Serawai di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas;
- Tugu Perjuangan Front Selatan, merupakan bukti sejarah perjuangan melawan penjajahan pada era perang kemerdekaan di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja;
- Situs Puyang Mulo jadi di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja;
- Situs Puyang Mutar Alam di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja;
- Situs Puyang Gadis di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja;
- Makam Puyang Lumbuk Sahung di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja;
- Makam Depatih Puyang Negro (Rangga Jenuh) di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja;
- Makam Rejo Lelo di Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan;
- Makam Puyang Patih Sirung di Desa Dermayu Kecamatan Air Periukan;
- Meriam Kuno di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan;
- Makam Puyang Rajo Mudo di Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Periukan;
- Makam Puyang Pejurit dan Kelimbing di Desa Tumbukan Kecamatan Lubuk Sandi;
- Makam Puyang Tebat Panjang di Desa Arang Sapat Kecamatan Lubuk Sandi;
- Makam Puyang Tapak Lebar di Desa Sakaian Kecamatan Lubuk Sandi;

- Rumah Pangeran Dayok di Desa Tumbukan Kecamatan Lubuk Sandi;
- Makam Puyang Suban Sakti (Kerio Dulat) di Desa Lubuk Terentang Kecamatan Lubuk Sandi;
- Makam Puyang Tingkis dan Rio Sakti Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat;
- Situs Makam Sidi Kecil Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma
- Situs Makam Padang Periangin Desa Selinsingan Kecamatan Seluma Utara;
- Situs Pemakaman Puyang Serunting Sakti Palak Tanah Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur;
- Makam Puyang Rajo Api di Desa Lubuk Ngantungan Kecamatan Talo;
- Makam Puyang Rajo Melinggang di Desa Lubuk Ngantungan Kecamatan Talo
- Makam Puyang Tebat Paku di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo;
- Penarakan Ulu Penago di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo;
- Tugu Penembakan Lawang Antu Desa Air Teras Kecamatan Ulu Talo
- Monumen Ir. A. M. Hanafi di Desa Lubuk Ngantungan;
- Rumah Upas di Kelurahan Masmambang Kecamatan talo;
- Makam Puyang Sanggan di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo
- Rumah Tradisional Pangeran Arfan Desa Karang Anyar di Kecamatan Semidang Alas Maras; dan
- Situs Megalitik Makam Puyang Pejago Desa Gunung Mesir Kecamatan Semidang Alas Maras.

b) Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Pembangunan pertanian tanaman pangan telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan Kabupaten Seluma, baik terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Potensi sumberdaya lahan tanaman pangan meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah yang terdiri dari pekarangan, lading, dan tegalan/kebun. Dari potensi yang ada masih menunjukkan bahwa intensitas pertanaman masih rendah, terutama lahan bukan sawah. Rencana pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura diarahkan untuk pemanfaatan secara intensif lahan-lahan yang dimanfaatkan dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Seluma. Selain itu juga akan ditetapkan lahan-lahan pertanian tanaman pangan abadi untuk mendukung ketahanan pangan. Rencana Kawasan budidaya tanaman pangan dengan luas kurang lebih 11.991,50 hektar terdapat di :



- Kecamatan Sukaraja;
- Kecamatan Air Periukan;
- Kecamatan Lubuk Sandi;
- Kecamatan Seluma Barat;
- Kecamatan Seluma Timur;
- Kecamatan Seluma Utara;
- Kecamatan Seluma Selatan;
- Kecamatan Talo;
- Kecamatan Talo Kecil;
- Kecamatan Ulu Talo;
- Kecamatan Ilir Talo;
- Kecamatan Semidang Alas; dan
- Kecamatan Semidang Alas Maras

Kawasan tanaman hortikultura, Kawasan budidaya hortikultura dengan luas kurang lebih 43.363,75 hektar terdapat :

- Kecamatan Sukaraja;
- Kecamatan Air Periukan;
- Kecamatan Lubuk Sandi;
- Kecamatan Seluma Barat;
- Kecamatan Seluma Timur;
- Kecamatan Seluma Utara;
- Kecamatan Seluma;
- Kecamatan Seluma Selatan;
- Kecamatan Talo;
- Kecamatan Talo Kecil;
- Kecamatan Ulu Talo;
- Kecamatan Ilir Talo;
- Kecamatan Semidang Alas; dan
- Kecamatan Semidang Alas Maras.

Kawasan Perkebunan, Kawasan perkebunan di Kabupaten Seluma dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing memiliki prospek ekonomi cepat tumbuh. Menurut jenis komoditasnya, pengembangan perkebunan meliputi kelapa sawit, karet, kakao, kopi,



kelapa dalam, pinang, kasiavera, gambir, nilam dan lain-lain. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya dan menghindari timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, dan kawasan permukiman.

Rencana pengembangan perkebunan di Kabupaten Seluma dengan luas kurang lebih 69.796,83 diarahkan tersebar pada :

- Kecamatan Sukaraja
- Kecamatan Air Periukan
- Kecamatan Lubuk Sandi
- Kecamatan Seluma Barat
- Kecamatan Seluma Timur
- Kecamatan Seluma Utara
- Kecamatan Seluma
- Kecamatan Seluma Selatan
- Kecamatan Talo
- Kecamatan Talo Kecil
- Kecamatan Ulu Talo
- Kecamatan Ilir Talo
- Kecamatan Semidang Alas
- Kecamatan Semidang Alas Maras

c) Kawasan Peternakan

Rencana pengembangan peternakan di Kabupaten Seluma diarahkan tersebar pada:

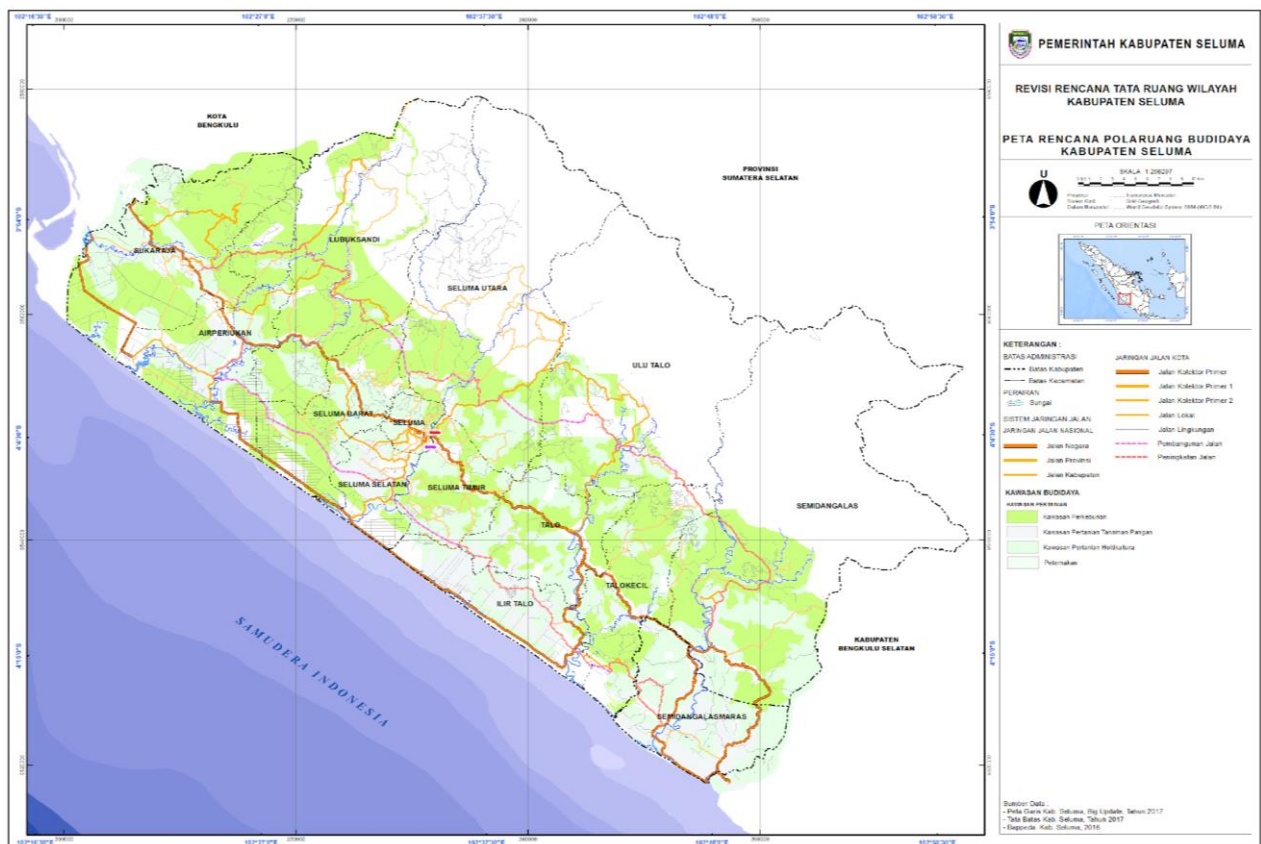
- Kecamatan Sukaraja;
- Kecamatan Air Periukan;
- Kecamatan Lubuk Sandi;
- Kecamatan Seluma Barat;
- Kecamatan Seluma Timur;
- Kecamatan Seluma Utara;
- Kecamatan Seluma;
- Kecamatan Seluma Selatan;
- Kecamatan Talo;

- Kecamatan Talo Kecil;
- Kecamatan Ulu Talo;
- Kecamatan Ilir Talo;
- Kecamatan Semidang Alas; dan
- Kecamatan Semidang Alas Maras

Lebih jelasnya mengenai rencana peruntukan kawasan pertanian dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.6

Peta Rencana Pola Ruang Budidaya Kawasan Pertanian Kabupaten Seluma





d) Kawasan Peruntukan Perikanan

Perikanan Tangkap, Sesuai dengan Undang-undang tersebut maka batas wilayah laut termasuk kawasan perikanan tangkap yang pengelolaannya menjadi wewenang provinsi adalah sejauh 4 mil. Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Seluma dikembangkan sepanjang pesisir tiap kecamatan di Kabupaten Seluma, meliputi Kecamatan Sukaraja, Air Periukan, Seluma Barat, Seluma Selatan, Ilir Talo, Talo Kecil dan Kecamatan Semidang Alas Maras. Kawasan peruntukan perikanan tangkap Jalur penangkapan ikan IA, meliputi:

- perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah;
- Jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.

Perikanan Budidaya, Perikanan budidaya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar. Kriteria untuk kawasan pengembangan budidaya air tawar dan tambak adalah sebagai berikut:

- Kelerengan lahan <8%.
- Persediaan air cukup.
- Jauh dari sumber pencemaran, baik pencemaran domestik maupun industri.
- Kualitas air baik (memenuhi kriteria kualitas air untuk budidaya perikanan).

Kriteria untuk kawasan pengembangan budidaya laut adalah:

- Terlindung dari gelombang dan angin. Menghindari terjadinya kerusakan pada kegiatan atau usaha budidaya yang berasal dari gelombang dan arus yang besar.
- Jauh dari permukiman dan industri. Limbah atau pencemaran yang berasal dari rumah tangga dan industri dapat mengakibatkan kerusakan perairan dan kegagalan usahabudidaya.
- Jauh dari muara sungai. Muara sungai juga sangat mempengaruhi budidaya laut dengan adanya proses sedimentasi akibat aktifitas di daerah atas (up- land) seperti penebangan hutan, pertanian, permukiman dan industri yang dekat bantaran sungai. Kondisi ini menjadi kompleks karena daerah muara sungai secara oseanografi sangat dipengaruhi oleh air laut. Akibatnya, kondisi perairan, biota dan ekosistemnya memiliki karakteristik yang khas. Dengan demikian kegiatan budidaya laut tidak mungkin dilakukan di daerah ini.
- Jauh dari kawasan ekosistem penting laut, seperti terumbu karang, mangrove dan



padang lamun.

- Kualitas air baik. Kualitas air ini mengindikasikan kelayakan kondisi perairan yang dapat dijadikan lokasi budidaya laut. Kelayakan kondisi perairan ini dapat diukur dari parameter fisika, kimia dan biologi. Parameter fisika : kecerahan; parameter kimia : dissolved oxygen (DO), chemical oxygen demand (COD), kandungan organik (organic matter), biological oxygen demand (BOD), kandungan klorofil dan parameter biologi : plankton.

Rencana pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Seluma meliputi:

- Kawasan perikanan budidaya perairan umum meliputi :
 - Kecamatan Sukaraja;
 - Kecamatan Air Periukan;
 - Kecamatan Seluma Barat;
 - Kecamatan Seluma Selatan;
 - Kecamatan Ilir Talo;
 - Kecamatan Talo Kecil; dan
 - Kecamatan Semidang Alas Maras.
- Kawasan perikanan budidaya kolam air tenang meliputi :
 - Kecamatan Sukaraja;
 - Kecamatan Air Periukan;
 - Kecamatan Seluma Selatan;
 - Kecamatan Ilir Talo;
 - Kecamatan Talo Kecil; dan
 - Kecamatan Semidang Alas Maras.
- Pengembangan prasarana perikanan budidaya meliputi Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembibitan Rakyat (UPR) meliputi :
 - Kecamatan Seluma;
 - Kecamatan Seluma Selatan.

e) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kabupaten Seluma merupakan wilayah yang kaya akan hasil pertambangan, terutama : batubara dan berbagai pertambangan mineral lainnya. Terdapat 10 lokasi yang berpotensi mengandung batubara dan baru 2 lokasi yang baru dikelola diantaranya di Kecamatan Sukaraja, Talo dan Seluma Utara. Sedangkan potensi

pasir besi di sepanjang pantai Kecamatan Ilir Talo dan Seluma Selatan (Pantai Ngalam). Dalam mengelola usaha pertambangan, pemerintah menetapkan wilayah pertambangan (WP), yang terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan wilayah pencadangan negara (WPN). Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WUP ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi. Dan wilayah yang telah mendapat izin usaha pertambangan disebut WIUP. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) tempat dilakukannya usaha pertambangan rakyat. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota, sesuai pasal 21, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan.

Kriteria untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah :

- Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepisungai.
- Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter.
- Endapan teras, dataran banjir dan endapan sungaipurba.
- Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar.
- Menyebutkan jenis komoditi yang akan ditambang, dan/atau
- Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Wilayah Pencadangan Negara (WPN), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Penetapan wilayah pencadangan negara (WPN) dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan aspirasi daerah sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian luasnya, sedangkan WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktunya. WPN yang diusahakan sebagian luasnya statusnya berubah menjadi wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK). Perubahan status WPN menjadi WUPK dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :



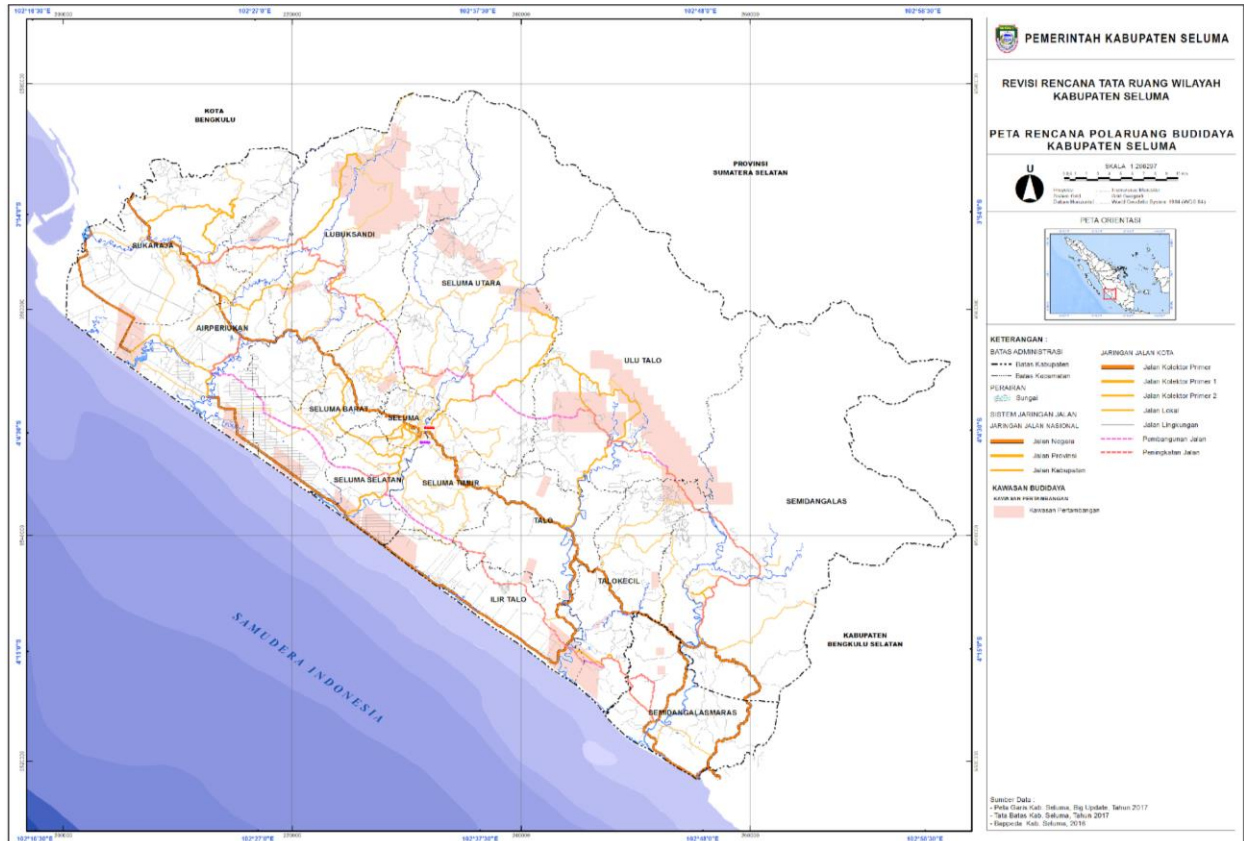
- Pemenuhan bahan baku industry dan energi dalam negeri
- Sumber devisa negara
- Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana
- Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
- Daya dukung lingkungan; dan/atau
- Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

Kawasan peruntukan pertambangan yang ada di Kabupaten Seluma dengan 20,482.40 hektar berupa pertambangan mineral dan batubara. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara berada di :

- Kecamatan Sukaraja;
- Kecamatan Lubuk Sandi;
- Kecamatan Seluma Utara;
- Kecamatan Seluma Selatan;
- Kecamatan Seluma Timur;
- Kecamatan Ulu Talo;
- Kecamatan Ilir Talo;
- Kecamatan Semidang Alas; dan
- Kecamatan Semidang Alas Maras

Kawasan peruntukan pertambangan tidak termasuk di kawasan cagar alam. Untuk mengetahui rencana kawasan peruntukan pertambangan dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.7
Peta Rencana Pola Ruang Budidaya Kawasan Pertambangan
Kabupaten Seluma



f) Kawasan Peruntukan Industri

Rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Seluma diarahkan untuk pengembangan industri kecil dan menengah. Pengembangan industri diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan. Rencana pengembangan industri diarahkan pada :

- Kecamatan Sukaraja;
- Kecamatan Lubuk Sandi;
- Kecamatan Air Perukan;
- Kecamatan Seluma Selatan;
- Kecamatan Seluma Utara;
- Kecamatan Talo Kecil;
- Kecamatan Ulu Talo;



- Kecamatan Talo;
- Kecamatan Semidang Alas; dan
- Kecamatan Semidang Alas Maras

g) Kawasan Pariwisata

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata. Upaya pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Seluma ini juga tetap dikaitkan dengan daerah tujuan wisata (destinasi) nasional yakni : Jakarta, Jogja dan Bali sebagai satu kesatuan destinasi wisata nasional sekaligus menarik minat pengunjung, ditujukan terhadap wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Rencana pengembangan Kawasan pariwisata Kabupaten Seluma, meliputi :

- Kawasan pariwisata alam
 - Penataan Kawasan wisata alam pantai (Pantai Muara Kunkai, Pantai Muara Ngalam, Pantai Penago, Pantai Seluma, Pantai Ancol, Pantai Ketapang Baru, Pantai Tedunan, Pantai Muara Maras dan Pantai Muara Talo), Air Terjun (Air Terjun Kroya, Air Terjun Melancar, Air Terjun Cughup Embun, Air Terjun Batu Kekinyau, Air Terjun Palua Ijang, Air Terjun Mentangur, Air Terjun Suruman dan Air Terjun Gunjingan), goa (goa Lubuk Resam), panjat tebing (Lubuk Resam), arung jeram (arung jeram Lubuk Resam, wisata suban air panas (Suban Lubuk Resam dan Suban Giri Nanto) dan lainnya dengan mempertahankan fungsi kawasannya.
 - Pembuatan zonasi dan alur kunjungan wisatawan yang jelas di masing-masing daya Tarik wisata, sebagai upaya perlindungan di lokasi yang memiliki fungsi ekologis.
 - Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas pariwisata.
 - Pengembangan program wisata edukatif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan.



- Kawasan pariwisata Pendidikan dan sejarah
 - Penataan dan pengembangan Kawasan pariwisata Pendidikan dan sejarah dan benda bersejarah lainnya dan Kawasan yang akan di tentukan menurut hasil kajian dan atau penelitian meliputi Meriam Kuno, Gerincing, Puyang Penjago dan Padang Periangin)
 - Pembangunan sarana penunjang lainnya
 - Pengembangan program edukatif berbasis sejarah
 - Pemeliharaan benda dan bangunan bersejarah
- Kawasan pariwisata religi
 - Renovasi objek yang di prioritaskan
 - Pembangunan sarana penunjang lainnya
 - Peningkatan fungsi dan kuantitas ruang terbuka hijau
 - Pengendalian kebersihan dengan pembuatan bak sampah, di berbagai titik
- Kawasan pariwisata khusus
 - Pembangunan sarana penunjang lainnya
 - Peningkatan fungsi dan kuantitas ruang terbuka hijau
 - Pengendalian kebersihan dengan pembuatan bak sampah di berbagai titik
 - Pengembangan fasilitas parkir terpadu untuk melayani pergerakan di dalam Kawasan.

Kawasan pengembangan Kabupaten Seluma di bagi menjadi 4 (empat) Kawasan, yaitu :

- Kawasan pertama yang mencakup Kecamatan Seluma, Seluma Utara, Seluma Selatan, Seluma Barat dan Seluma Timur.
- Kawasan Kedua yang mencakup Kecamatan Sukaraja, Air Periukan, Lubuk Sandi
- Kawasan Ketiga yang mencakup Kecamatan Talo, Ulu Talo, Ilir Talo dan Talo Kecil.
- Kawasan Keempat yang mencakup Kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Maras.

h) Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Seluma, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan



peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam.

- Sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha serta dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas yang ada di sekitarnya dan meningkatkan perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada.
- Perlu adanya pengaturan luas lahan terbangun dengan tak terbangun pada kawasan pengembangan permukiman.
- Perlu adanya penetapan tinggi bangunan pada kawasan pengembangan permukiman.

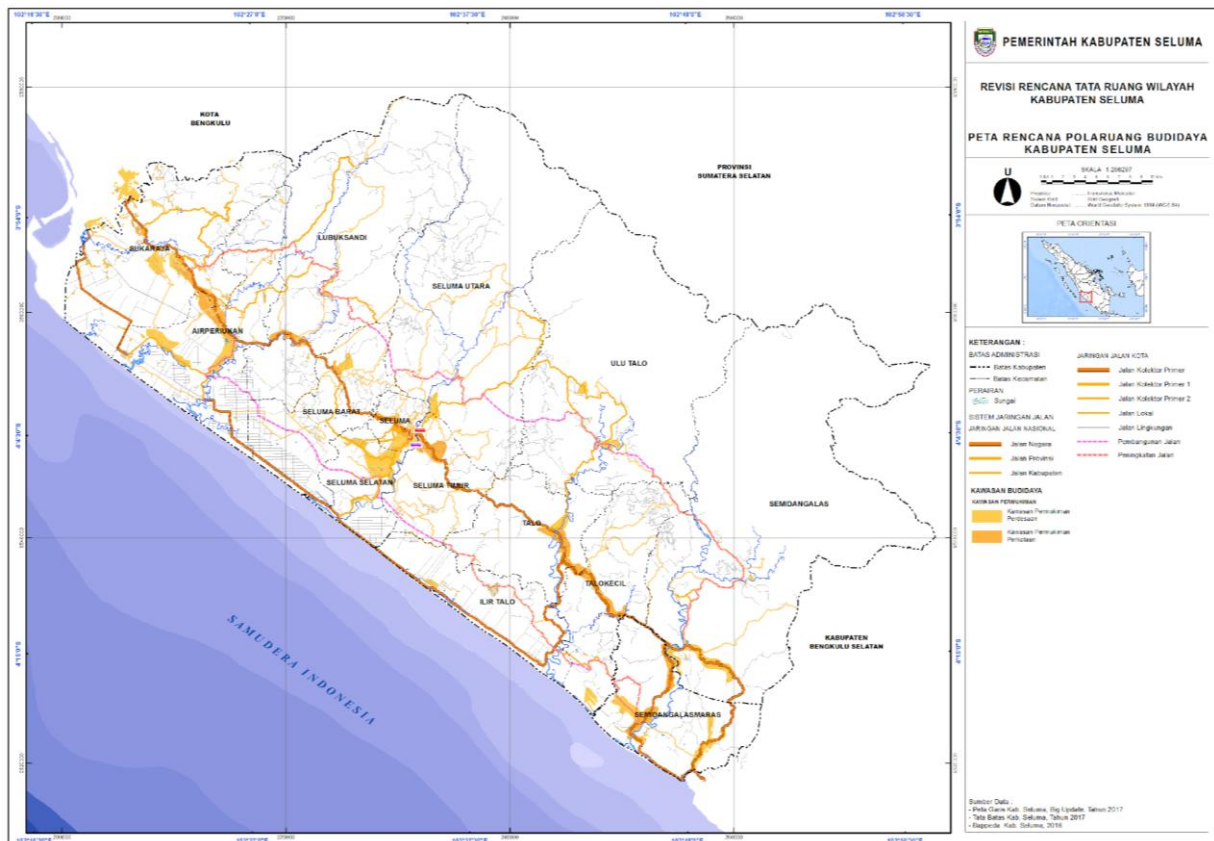
Rencana pengembangan permukiman dengan luas 11.311,49 Ha meliputi:

- Permukiman perkotaan meliputi :
 - Tais;
 - Masmambang;
 - Cahaya Negeri; dan
 - Rimbo Kedui.
- Permukiman perdesaan meliputi :
 - Kembang Mumpo;
 - Pajar Bulan;
 - Padang Cekur;
 - Sukamerindu;
 - Air Keruh;
 - Pagar Agung;
 - Selebar;
 - Puguk;
 - Dermayu; dan
 - Rena Panjang.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pengembangan peruntukan permukiman dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.8

Peta Rencana Pola Ruang Budidaya Kawasan Permukiman Kabupaten Seluma



i) Wilayah Rawan Bencana

Secara geomorfologi Provinsi Bengkulu mempunyai empat karakter utama, yaitu dataran pantai yang membentang dari Kabupaten Muko-Muko sampai Kabupaten Kaur, dataran alluvial dan zona vulkanik yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan dengan karakter pegunungan yang dikenal dengan Patahan Semangko. Dengan kondisi ini, maka Provinsi Bengkulu termasuk didalamnya Kabupaten Seluma wilayahnya rawan bencana,

Di Kabupaten Seluma terdapat beberapa kawasan rawan bencana. Oleh karena itu, penanganan terhadap rencana mitigasi bencana perlu dilakukan sejak dini. Laten gempa di wilayah Kabupaten Seluma berasal dari gempa tektonik dan gempa vulkanik dengan potensi pusat gempa (*episentrum*) berada di luar Kabupaten Seluma. Laten pusat gempa tektonik terletak di Samudera Indonesia, yang membentuk jalur gempa tektonik karena pertemuan 2 lempeng benua, yaitu Lempengan Indo-Australia dan Lempengan Eurasia. Gempa tektonik yang terjadi akan berdampak di daratan dan di dasar laut. Dampak di daratan adalah berupa

guncangan gempa yang dapat merusak infrastruktur, permukiman, dan bentangan lahan lainnya. Sementara dampaknya di lautan akan berpeluang menimbulkan gelombang pasang dan tsunami, yang selanjutnya berdampak ke pesisir daratan, seperti yang telah di alami di beberapa bagian di Pulau Sumatera. Adapun sebaran potensi rawan bencana di Kabupaten Seluma dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12

Sebaran Potensi Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Seluma

No	Kecamatan	Rawan gerakan tanah/longsor (ha)			Total (ha)
		Potensi terjadi gerakan tanah tinggi	Potensi terjadi gerakan tanah sedang	Potensi terjadi gerakan tanah rendah	
1	Sukaraja	-	4.610	19.470	24.080
2	Air Periukan	-	200	12.030	12.230
3	Lubuk Sandi	-	7.680	9.840	17.520
4	Seluma	-	370	1.810	2.180
5	Seluma Utara	1.650	20.890	18.550	41.090
6	Seluma Timur	-	4.030	2.420	6.450
7	Seluma Selatan	-	660	6.790	7.450
8	Seluma Barat	-	-	10.240	10.240
9	Talo	2.440	2.960	5.720	11.120
10	Talo Kecil	1.880	-	4.100	5.980
11	Ulu Talo	2.370	3.240	17.100	22.710
12	Ilir Talo	-	-	13.140	13.140
13	Semidang Alas	34.410	-	21.060	55.470
14	Semidang Alas Maras	1.150	-	9.220	10.370
	JUMLAH	43.900	44.640	151.490	240.030

Sumber : RTRW Kabupaten Seluma tahun 2012

Sedangkan untuk potensi bahaya rawan gempa relatif terjadi akibat tumbukan lempeng Hindia-Australia, dimana gempa yang ditimbulkan tersebut terkadang dapat menimbulkan dampak rawan tsunami, apabila tingkat kekuatan gempa hingga diatas 6SR.

Berkaitan dengan mitigasi bencana, Pemerintah Kabupaten Seluma telah menyiapkan peta detail tentang risiko bencana. Peta risiko bencana ini berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis mitigasi bencana seperti dimandatkan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004.

Tabel 2.13

Sebaran Potensi Rawan Banjir di Kabupaten Seluma

No	Kecamatan	Luas (ha)	Rawan banjir
1	Seluma	96,89	Potensi genangan
2	Seluma Utara	27,65	Potensi genangan
3	Seluma Timur	53,01	Potensi genangan
4	Seluma Selatan	777,65	Potensi genangan
5	Talo	3,65	Potensi genangan
6	Semidang Alas Maras	1569,62	Potensi genangan
7	Sukaraja	32,62	Potensi genangan
8	Air Periukan	463,99	Potensi genangan
9	Semidang Alas	2671,16	Potensi genangan
10	Ulu Talo	2995,61	Potensi genangan
11	Iilir Talo	2304,11	Potensi genangan

Sumber : RTRW Kabupaten Seluma tahun 2012

H. Demografi

Penduduk merupakan subyek pembangunan pada suatu wilayah, adanya pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya wilayah, salah satunya dipengaruhi oleh berbagai aktivitas penduduk dalam wilayah bersangkutan yang berinteraksi dengan penduduk lainnya di dalam maupun dengan wilayah di luarnya. Penduduk sebagai aktor dalam pembangunan merupakan potensi dalam keterlibatannya atau peran sertanya dalam pembangunan, namun disisi lain dapat menjadi faktor penghambat atau kendala dalam pembangunan. Demografi di Kabupaten seluma dapat dijabarkan sebagai berikut :

• Jumlah dan struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Seluma pada tahun 2010 sebesar 143.767 jiwa yang tersebar menurut masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan yang ada. Dengan jumlah kecamatan sebanyak 14 kecamatan, maka rata-rata setiap kecamatan berpenduduk sebesar 14.433 jiwa. Sedangkan data penduduk Kabupaten Seluma tahun 2017 yang diperoleh dari BPS Kabupaten Seluma adalah sebesar 189.874 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2017 adalah di Kecamatan Sukaraja dengan jumlah penduduk mencapai 34.273 Jiwa, sedangkan Kecamatan Ulu Talo merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Seluma dengan jumlah penduduk 5.161 jiwa. Hal ini dimungkinkan

karena adanya perbedaan adat istiadat, nilai dan norma dalam kehidupan disamping karena faktor lingkungan dan geografi.

Tabel 2.14

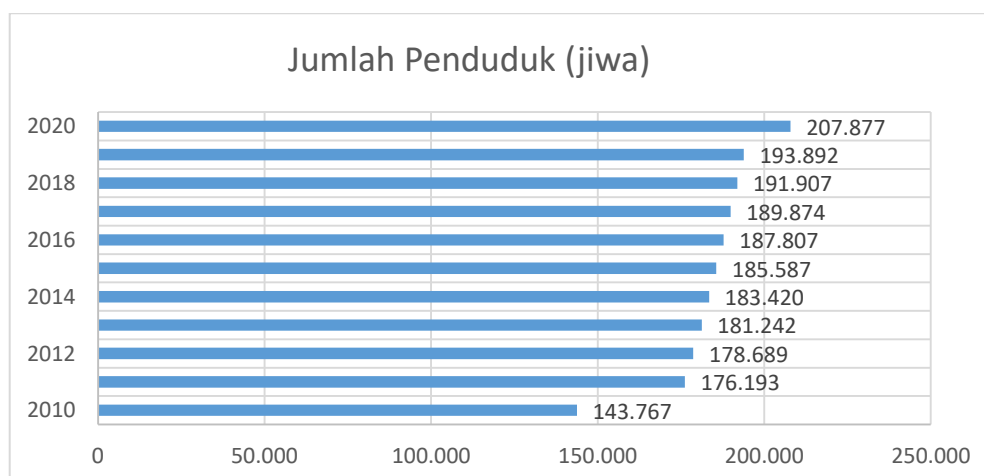
Jumlah Penduduk Kabupaten seluma tahun 2010-2020

No	Tahun	jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2016	187.807
2	2017	189.874
3	2018	191.907
4	2019	193.892
5	2020	207.877

Sumber : Seluma dalam angka tahun 2010-2020

Grafik 2.2

Grafik Jumlah Penduduk Per Tahun Kabupaten Seluma



Grafik 2.3

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per km2 Menurut Kecamatan (jiwa)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per km2 Menurut Kecamatan (jiwa)		
		Luas Kecamatan (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
		2019	2019	2019
1	Semidang Alas Maras	120,870	24.164	200
2	Semidang Alas	508,650	14.768	29
3	Talo	111,890	11.409	102
4	Iilir Talo	113,850	13.314	117
5	Talo Kecil	91,220	10.950	120
6	Ulu Talo	328,540	5.235	16



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per km2 Menurut Kecamatan (jiwa)		
		Luas Kecamatan (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
		2019	2019	2019
7	Seluma	27,410	10.473	382
8	Seluma Selatan	80,430	11.518	143
9	Seluma Barat	87,600	8.277	94
10	Seluma Timur	77,080	9.444	123
11	Seluma Utara	320,990	8.438	26
12	Sukaraja	189,460	35.483	187
13	Air Periukan	163,810	19.204	117
14	Lubuk Sandi	257,560	11.125	43
	KABUPATEN SELUMA	2479,360	193.802	78

Sumber : Seluma dalam angka tahun 2020

Grafik 2.4

Jumlah Penduduk Kabupaten seluma per kecamatan tahun 2016-2020

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (jiwa)				
		2020	2019	2018	2017	2016
1	Semidang Alas Maras	25.066	24.164	23.829	23.478	23.124
2	Semidang Alas	15.688	14.768	14.670	14.561	14.448
3	Talo	12.224	11.409	11.345	11.271	11.194
4	Ilir Talo	15.818	13.314	13.328	13.330	13.328
5	Talo Kecil	10.838	10.950	10.777	10.597	10.417
6	Ulu Talo	6.049	5.235	5.200	5.161	5.121
7	Seluma	10.111	10.473	10.240	10.004	9.770
8	Seluma Selatan	13.713	11.518	11.441	11.354	11.264
9	Seluma Barat	9.846	8.277	8.244	8.203	8.160
10	Seluma Timur	10.933	9.444	9.406	9.361	9.312
11	Seluma Utara	9.320	8.438	8.379	8.313	8.245
12	Sukaraja	32.981	35.483	34.888	34.273	33.658
13	Air Periukan	23.500	19.204	19.177	19.133	19.082
14	Lubuk Sandi	11.790	11.125	10.983	10.835	10.684
	KABUPATEN SELUMA	207.877	193.802	191.907	189.874	187.807

Sumber : seluma dalam angka tahun 2020



Grafik 2.5

Jumlah Penduduk Kabupaten seluma per kecamatan per jenis kelamin tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (jiwa)									
		Laki-laki					Perempuan				
		2020	2019	2018	2017	2016	2020	2019	2018	2017	2016
1	Semidang Alas Maras	12.896	12.286	12.114	11.938	11.763	12.170	11.878	11.715	11.540	11.361
2	Semidang Alas	8.107	7.662	7.611	7.555	7.500	7.581	7.106	7.059	7.006	6.948
3	Talo	6.278	5.810	5.777	5.741	5.704	5.946	5.599	5.568	5.530	5.490
4	Iilir Talo	8.184	6.795	6.802	6.804	6.805	7.634	6.519	6.526	6.526	6.523
5	Talo Kecil	5.591	5.598	5.509	5.419	5.329	5.247	5.352	5.268	5.178	5.088
6	Ulu Talo	3.175	2.754	2.736	2.716	2.696	2.874	2.481	2.464	2.445	2.425
7	Seluma	5.105	5.206	5.090	4.973	4.859	5.006	5.267	5.150	5.031	4.911
8	Seluma Selatan	7.072	5.875	5.835	5.792	5.748	6.641	5.643	5.606	5.562	5.516
9	Seluma Barat	5.068	4.249	4.232	4.212	4.191	4.778	4.028	4.012	3.991	3.969
10	Seluma Timur	5.594	4.781	4.761	4.739	4.716	5.339	4.663	4.645	4.622	4.596
11	Seluma Utara	4.917	4.439	4.408	4.374	4.340	4.403	3.999	3.971	3.939	3.905
12	Sukaraja	16.930	18.427	18.117	17.801	17.488	16.051	17.056	16.771	16.472	16.170
13	Air Periukan	12.123	9.803	9.788	9.767	9.745	11.377	9.401	9.389	9.366	9.337
14	Lubuk Sandi	6.176	5.801	5.726	5.650	5.574	5.614	5.324	5.257	5.185	5.110
	KABUPATEN SELUMA	107.216	99.486	98.506	97.481	96.458	100.661	94.316	93.401	92.393	91.349

Sumber : seluma dalam angka tahun 2020

Grafik 2.6

Jumlah Penduduk Kabupaten seluma per kecamatan per jenis kelamin tahun 2016-2019

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (jiwa)											
	Laki-laki				Perempuan				Jumlah			
	2019	2018	2017	2016	2019	2018	2017	2016	2019	2018	2017	2016
0 - 4	9931	9834	9734	9633	9416	9326	9226	9123	19347	19160	18960	18756
5-9	10014	9914	9811	9708	9356	9265	9165	9062	19370	19179	18976	18770
10-14	9465	9372	9274	9175	9034	8944	8847	8747	18499	18316	18121	17922
15 - 19	8807	8721	8633	8544	8094	8020	7935	7848	16901	16741	16568	16392
20 - 24	8317	8238	8157	8078	7714	7649	7573	7491	16031	15887	15730	15569
25 - 29	8895	8809	8719	8629	8715	8631	8540	8446	17610	17440	17259	17075
30 - 34	8729	8643	8551	8460	8371	8288	8198	8105	17100	16931	16749	16565
35 - 39	8069	7986	7901	7817	7571	7497	7415	7329	15640	15483	15316	15146
40 - 44	6934	6865	6793	6721	6203	6143	6077	6008	13137	13008	12870	12729
45 - 49	5719	5663	5603	5545	5460	5407	5349	5287	11179	11070	10952	10832
50 - 54	4634	4588	4540	4492	4309	4265	4219	4170	8943	8853	8759	8662
55 - 59	3490	3456	3419	3383	3178	3146	3111	3076	6668	6602	6530	6459
60 - 64	2535	2508	2482	2453	2398	2374	2346	2320	4933	4882	4828	4773

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (jiwa)											
	Laki-laki				Perempuan				Jumlah			
	2019	2018	2017	2016	2019	2018	2017	2016	2019	2018	2017	2016
65 - 69	1598	1583	1565	1548	1757	1737	1718	1696	3355	3320	3283	3244
70 - 74	1208	1196	1183	1169	1276	1262	1246	1231	2484	2458	2429	2400
75+	1141	1130	1116	1103	1464	1447	1428	1410	2605	2577	2544	2513
Jumlah	99486	98506	97481	96458	94316	93401	92393	91349	193802	191907	189874	187807

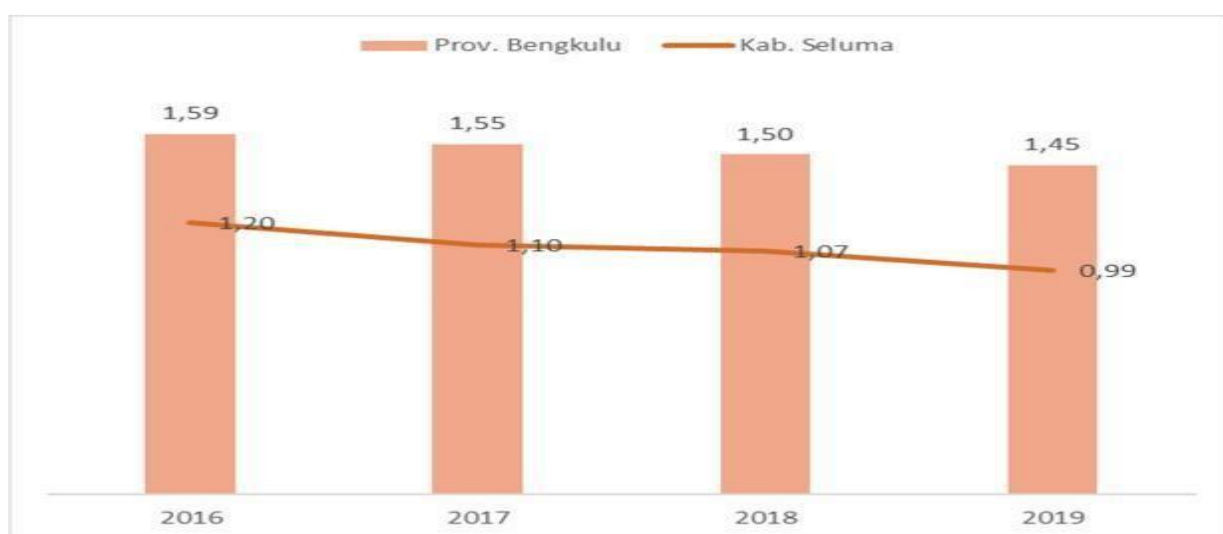
- **Laju pertumbuhan penduduk;**

Laju pertumbuhan penduduk yang biasanya dihitung berdasarkan hasil sensus penduduk menggambarkan dinamika penduduk di suatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu tertentu dipengaruhi 3 (tiga) komponen utama, yaitu: kelahiran, kematian dan migrasi. Laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk menentukan perkiraan jumlah penduduk pada tahun-tahun tertentu.

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menjadi sumber permasalahan kependudukan. Apabila suatu daerah mempunyai jumlah penduduk besar dengan laju pertumbuhan yang tinggi, maka beban untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya menjadi sangat berat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan perkembangan daya tampung serta daya dukung yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Grafik 2.7

**Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu
2016-2019 (data proyeksi)**





Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Seluma pada kurun waktu 2016-2019 cenderung menurun dari tahun ke tahun, mulai dari 1,20 persen hingga sebesar 0,99 persen pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu, yakni sebesar 1,45 persen pada tahun 2019, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Seluma tergolong relatif rendah. Angka-angka pada Gambar 2.1 menggambarkan bahwa pada kurun waktu 2016-2019 jumlah penduduk Kabupaten Seluma telah bertambah rata-rata 1,09 persen per tahun, sedangkan penduduk Provinsi Bengkulu bertambah rata-rata sebesar 1,52 persen per tahun. Dari data tersebut dapat disimpulkan Kabupaten Seluma menjadi salah satu kabupaten yang berkontribusi dalam menurunkan laju pertumbuhan Provinsi Bengkulu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Seluma cenderung mengalami penurunan yang cukup berarti. Penurunan laju pertumbuhan penduduk tersebut menggambarkan bahwa program pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Seluma dalam beberapa tahun terakhir cukup berhasil,

- **Proyeksi Penduduk;**

Perkiraan jumlah penduduk merupakan faktor penting dalam perencanaan, karena pada dasarnya perencanaan merupakan usaha pencapaian efisiensi penggunaan lahan serta lingkungan hidup yang lebih baik yang sangat tergantung pada perkembangan penduduk. Perkiraan jumlah penduduk umumnya dilakukan berdasarkan keadaan penduduk masa lalu dan saat ini, kecenderungan, serta sejarah perkembangan faktor-faktor setempat. Teknik atau metoda analisis kependudukan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, sehingga dalam penerapannya perlu dilakukan pemahaman terlebih dahulu terhadap kondisi kependudukan pada wilayah perencanaan, seperti pola pertumbuhan yang terjadi di masa lampau, ketersediaan data dan sebagainya

Berdasarkan hasil proyeksi kependudukan di Kabupaten Seluma pada tahun 2021 sebanyak 209.473 jiwa hingga pada akhir 2032 diperkirakan mencapai 234.887 jiwa yang artinya selama 10 tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat hingga hampir 250.000 jiwa yang bertambah. Sehingga dengan adanya perkiraan penambahan jumlah penduduk yang pesat ini perlu direncanakannya strategi dalam hal penekanan perkembangan penduduk yang disesuaikan dengan

kemampuan daya tampung Kabupaten Seluma terhadap ketersediaan lahan di wilayah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15

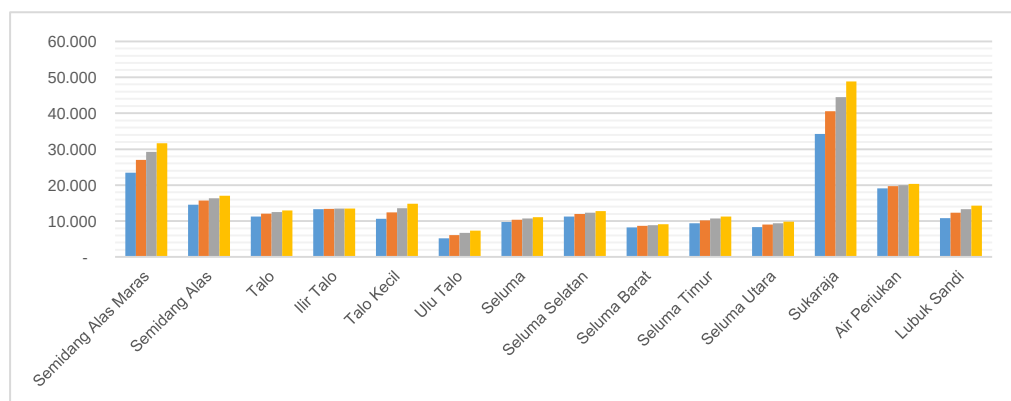
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Seluma Tahun 2017 – 2032

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			
		2017	2021	2026	2032
1	Semidang Alas Maras	23,478	27,049	29,263	31,658
2	Semidang Alas	14,561	15,702	16,374	17,074
3	Talo	11,271	12,050	12,506	12,980
4	Ilir Talo	13,330	13,416	13,464	13,512
5	Talo Kecil	10,597	12,426	13,575	14,831
6	Ulu Talo	5,161	6,087	6,672	7,312
7	Seluma	9,770	10,361	10,704	11,059
8	Seluma Selatan	11,264	11,945	12,341	12,750
9	Seluma Barat	8,203	8,642	8,896	9,158
10	Seluma Timur	9,361	10,209	10,713	11,242
11	Seluma Utara	8,313	8,999	9,405	9,829
12	Sukaraja	34,273	40,543	44,510	48,864
13	Air Periukan	19,133	19,691	20,008	20,331
14	Lubuk Sandi	10,835	12,352	13,285	14,288
Kabupaten Seluma		189,550	209,473	221,716	234,887

Sumber: Hasil Analisis Revisi RTRW Kabupaten Seluma, 2018

Grafik 2.8

Grafik Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Seluma



Pada tahun 2017 kepadatan Kabupaten Seluma mencapai 76 Jiwa/km² dengan Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Seluma dengan kepadatan mencapai 365 jiwa/km², untuk Kecamatan yang memiliki kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Ulu Talo dengan kepadatan hanya mencapai 16 Jiwa/km². Salah satu faktor penyebab tingkat kepadatan ini antara lain ditunjang dengan kelengkapan fasilitas yang tersedia baik berupa kegiatan pendidikan, kesehatan,

perdagangan dan lain-lain. Berdasarkan penyebaran tersebut terlihat bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Seluma masih dalam kategori sedang dimana pada tahun 2021 kepadatannya baru mencapai 84 jiwa/ha dan hingga tahun 2032 kepadatannya baru mencapai 95 jiwa/ha artinya jumlah tersebut masih kurang dari seratus. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling padat pada tahun 2032 yaitu kecamatan seluma dengan penduduk sebanyak 403 jiwa/ha sedangkan kecamatan dengan jumlah kepadatan penduduk paling sedikit yaitu kecamatan Ulu Talo dengan kepadatan sebesar 22 jiwa/ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16

Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Seluma Tahun 2017 – 2032

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Kepadatan (jiwa/ha)			
			2017	2021	2026	2032
1	Semidang Alas Maras	120.87	194	224	242	262
2	Semidang Alas	508.65	29	31	32	34
3	Talo	111.89	101	108	112	116
4	Iilir Talo	113.85	117	118	118	119
5	Talo Kecil	91.22	116	136	149	163
6	Ulu Talo	328.54	16	19	20	22
7	Seluma	27.41	356	378	391	403
8	Seluma Selatan	80.43	140	149	153	159
9	Seluma Barat	87.60	94	99	102	105
10	Seluma Timur	77.08	121	132	139	146
11	Seluma Utara	320.99	26	28	29	31
12	Sukaraja	189.46	181	214	235	258
13	Air Periukan	163.81	117	120	122	124
14	Lubuk Sandi	257.56	42	48	52	55
Kabupaten Seluma		2,479.36	76	84	89	95

Sumber: Hasil Analisis Revisi RTRW Kabupaten Seluma, 2018

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

• Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam analisis pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Mengingat pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada akhirnya akan menghasilkan balas jasa terhadap faktor



produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi akan meningkat.

Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

PDRB Kabupaten Seluma menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha. Pemecahan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seluma pada tahun 2019 mencapai 4,95 persen dan ini menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada tahun sebelumnya yang sebesar 4,80 persen. Perekonomian di Kabupaten Seluma masih didominasi oleh kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang kontribusinya mencapai 46,86 persen dari total PDRB Kabupaten Seluma.

Walaupun lapangan usaha pertanian masih merupakan yang terbesar, namun peranannya dalam perekonomian Kabupaten Seluma terus menurun dari tahun ke tahun. Dengan kontribusi yang hampir setengah dari total PDRB tersebut, tentunya kondisi sektor pertanian sangat mempengaruhi total perekonomian Kabupaten Seluma.

Selain itu, pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi perlu diperhatikan di Kabupaten Seluma. Tidak tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang ini cukup

menghambat perekonomian Kabupaten Seluma. Kabupaten Seluma antara lain memerlukan infrastruktur seperti terminal angkutan dan pasar harian yang hingga saat ini masih belum tersedia. Apabila infrastruktur penunjang perekonomian ini dapat disediakan oleh pemerintah, maka akan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seluma.

Sesungguhnya partisipasi masyarakat Seluma dalam pembangunan ekonomi cukup tinggi, namun karena keterbatasan kemampuan dan keterampilan serta perilaku ekonomi masyarakat yang belum mampu menggerakkan roda perekonomian sesuai dengan tuntutan, menyebabkan PDRB perkapita masing-masing penduduk relatif rendah. Pelaku ekonomi di daerah ini pada umumnya memiliki profil usaha kecil dan menengah, manajemen tradisional, orientasi lokal, penggunaan teknologi.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Seluma dalam kurun waktu 2016-2019 cenderung stabil di angka $\pm 5\%$. Namun semenjak pandemi COVID-19 merebak pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seluma mengalami kontraksi sebesar -0,01%.

Tabel 2.17**PDRB Kabupaten Seluma tahun 2010-2019**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Kabupaten Seluma ADHB Menurut Lapangan Usaha (Dalam Juta)	3.502.437,80	3.840.998,10	4.215.214,35	4.613.171,16	4 743 637,09
PDRB Kabupaten Seluma ADHK Menurut Lapangan Usaha (Dalam Juta)	2.490.698,90	2.610.517,22	2.735.842,65	2.870.668,33	2.870.324,63
Pertumbuhan Ekonomi	5,02	5,01	4,8	4,95	-0,01

Sumber : Seluma dalam angka tahun 2020



Tabel 2.18

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Seluma

No	Sektor		2016		2017		2018		2019		2020	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.268.661,33	50,9%	1.302.542,45	49,9%	1.336.630,34	48,86%	1.371.429,77	47,77%	1.377.249,80	47,98%
2	B	Pertambangan dan Penggalian	88.464,52	3,6%	91.223,21	3,5%	94.888,06	3,47%	99.050,25	3,45%	97.308,50	3,39%
3	C	Industri Pengolahan	216.776,24	8,7%	226.927,89	8,7%	237.126,31	8,67%	244.076,42	8,50%	235.958,39	8,22%
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.689,44	0,1%	2.816,82	0,1%	2.955,17	0,11%	3.043,86	0,11%	3.288,54	0,11%
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.851,47	0,2%	4.912,05	0,2%	5.039,76	0,18%	5.145,52	0,18%	5.200,20	0,18%
6	F	Konstruksi	115.019,29	4,6%	125.940,57	4,8%	138.043,82	5,05%	151.730,00	5,29%	151.537,48	5,28%
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	178.844,15	7,2%	195.448,30	7,5%	213.510,26	7,80%	232.850,87	8,11%	227.777,66	7,94%
8	H	Transportasi dan Pergudangan	53.350,25	2,1%	56.182,05	2,2%	59.305,72	2,17%	64.057,00	2,23%	64.980,90	2,26%
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34.006,81	1,4%	37.287,22	1,4%	40.920,04	1,50%	44.888,24	1,56%	45.073,69	1,57%
10	J	Informasi dan Komunikasi	23.128,84	0,9%	25.255,86	1,0%	27.577,46	1,01%	29.979,26	1,04%	32.568,30	1,13%
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.403,50	0,8%	20.080,74	0,8%	20.539,80	0,75%	21.258,44	0,74%	23.232,98	0,81%
12	L	Real Estate	102.625,90	4,1%	110.346,42	4,2%	119.526,45	4,37%	129.265,09	4,50%	130.466,70	4,55%
13	M,N	Jasa Perusahaan	2.886,59	0,1%	3.088,24	0,1%	3.325,95	0,12%	3.550,29	0,12%	3.505,70	0,12%
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	222.108,58	8,9%	238.233,02	9,1%	255.891,62	9,35%	275.873,40	9,61%	274.119,39	9,55%
15	P	Jasa Pendidikan	122.777,54	4,9%	131.625,82	5,0%	138.645,32	5,07%	148.794,91	5,18%	151.208,40	5,27%
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20.525,24	0,8%	22.426,94	0,9%	24.227,64	0,89%	26.340,33	0,92%	27.825,44	0,97%

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



No	Sektor		2016		2017		2018		2019		2020	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
17	R,S,T .U	Jasa lainnya	14.579,22	0,6%	16.179,62	0,6%	17.688,95	0,65%	19.334,70	0,67%	19.022,55	0,66%
		PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2.490.698,90		2.610.517,22		2.735.842,65		2.870.668,33		2.870.324,63	

Sumber : Hasil analisa Seluma dalam angka tahun 2020

Tabel 2.19

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Seluma

NO	Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 761 966,55	1 885 812,46	2 022 562,46	2 160 273,98	2 231 350,18
2	B	Pertambangan dan Penggalian	124 357,27	133 593,68	144 420,09	156 451,86	156 625,33
3	C	Industri Pengolahan	296 887,74	324 492,37	354 710,22	381 635,39	394 374,01
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	3 137,54	3 677,59	4 160,18	4 561,60	5 018,94
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6 044,96	6 501,68	7 032,53	7 547,30	7 865,16
6	F	Konstruksi	175 231,52	204 956,21	237 127,73	273 826,05	279 564,14
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	240 412,97	274 557,30	315 690,79	358 835,91	359 769,39
8	H	Transportasi dan Pergudangan	69 510,83	77 234,58	84 779,09	95 456,10	101 824,77
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49 435,17	57 393,73	65 767,18	75 401,15	78 174,58
10	J	Informasi dan Komunikasi	30 483,09	34 417,92	38 791,86	43 694,98	48 231,90
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	28 061,44	30 476,78	32 413,50	34 682,54	37 967,58
12	L	Real Estate	132 909,06	145 194,20	162 964,51	182 339,14	186 399,12
13	M,N	Jasa Perusahaan	3 937,15	4 423,77	4 997,27	5 561,74	5 541,21
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	363 535,88	413 552,18	469 314,28	527 410,70	534 331,32
15	P	Jasa Pendidikan	166 529,00	186 461,23	204 794,10	230 382,40	237 377,50
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28 844,93	32 874,79	37 350,83	42 710,14	46 192,44
17	R,S,T,U	Jasa lainnya	20 380,28	24 449,54	28 337,72	32 400,17	33 029,50
		PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3 501 665,37	3 840 069,99	4 215 214,35	4 613 171,16	4 743 637,09

Sumber : Seluma dalam angka tahun 2020



- **PDRB per Kapita**

PDRB Per kapita di Kabupaten Seluma terus menunjukkan peningkatan. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Hal ini berarti nilai rata-rata pendapatan masyarakat Seluma terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, PDRB Per Kapita Kabupaten Seluma adalah sebesar 18,6 juta rupiah pertahun, dan meningkat menjadi 22,8 juta rupiah pada tahun 2020.

Tabel 2.20

PDRB per Kapita Kabupaten Seluma 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Per Kapita ADHB (Rp)	18.649.133	20.229.195	21.964.881	23.792.478	22.819.456
PDRB Per Kapita ADHK (Rp)	13.262.013	13.748.682	14.256.086	14.805.502	n/a

- **Laju inflasi**

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Mengingat data laju inflasi di Kabupaten Seluma belum tersedia maka dipergunakan data dari kota Bengkulu.

Pada Februari 2021 Kota Bengkulu mengalami inflasi sebesar 0,14 persen, angka ini lebih tinggi dibanding kondisi Februari 2020 yang mengalami inflasi sebesar 0,09. Laju inflasi tahun kalender Februari 2021 sebesar 0,54 persen lebih tinggi dari bulan Februari 2020 dengan laju inflasi sebesar 0,23 persen. Sedangkan inflasi dari tahun ke tahun pada Februari 2021 sebesar 2,59 persen lebih rendah dari bulan Februari 2020 sebesar 2,59 persen

Tabel 2.21

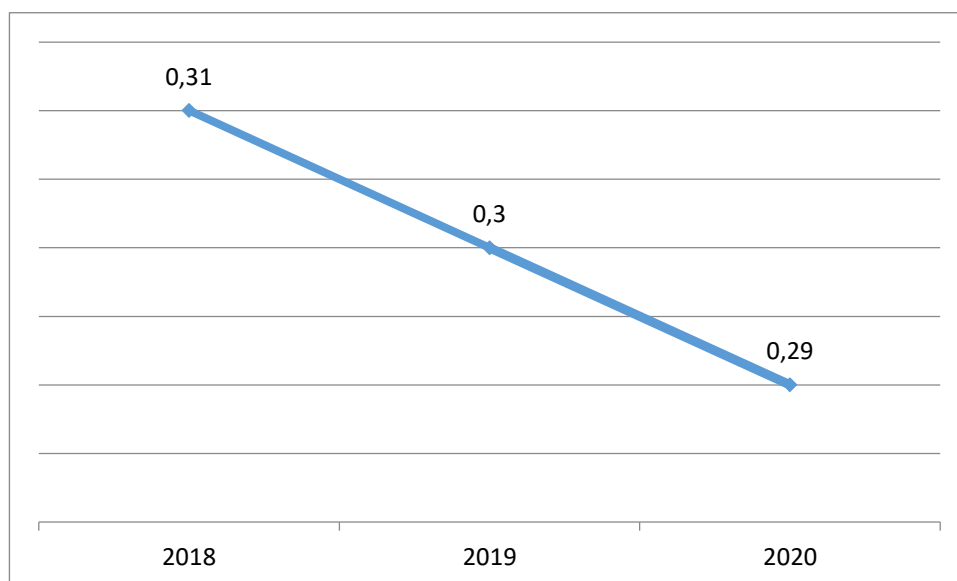
Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

No.	Kab/Kota	2017	2020
1	Bulanan (Februari)	0,09	0,14
2	Tahun Kalender (Januari 2021-Februari 2021)	0,23	0,54
3	Tahunan (Februari 2020-Februari 2021)	2,59	1,20

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

• Indeks Gini

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Indeks gini Kabupaten Seluma pada tahun 2020 sebesar 0,29 menurun sebesar 0,01 dari tahun 2019 yang sebesar 0,3.



• Kemiskinan

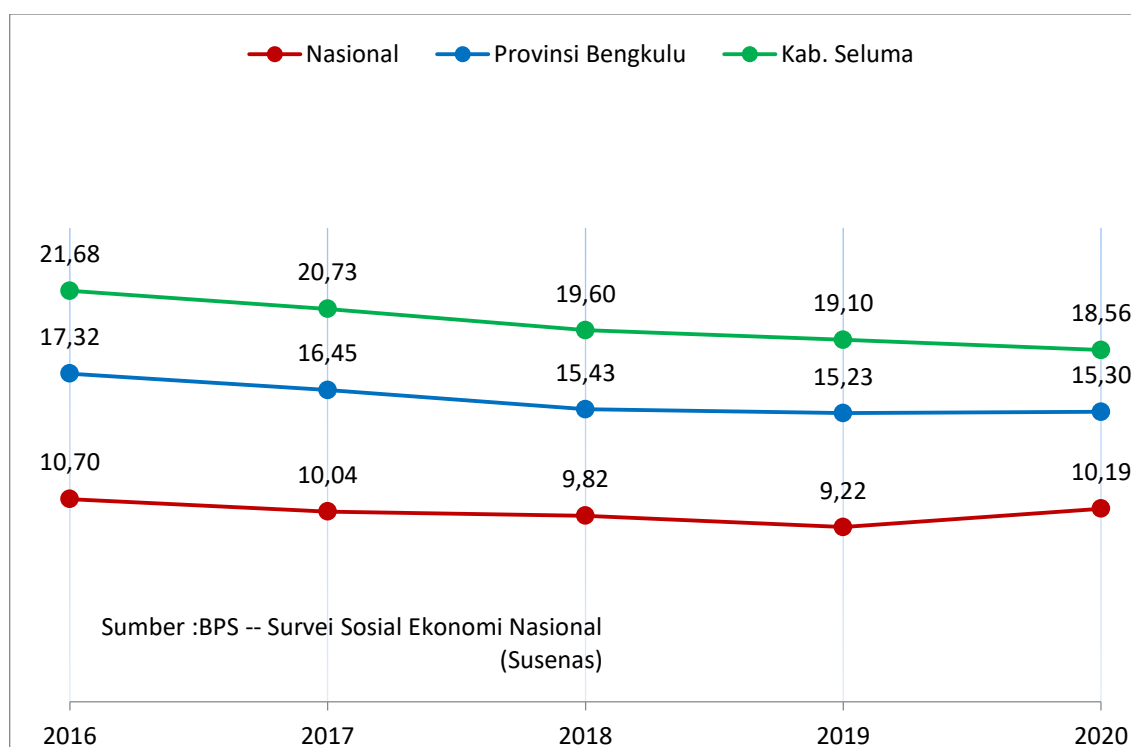
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Ukuran kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan adalah nilai rupiah pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum dalam rupiah untuk pengeluaran perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan.

Selanjutnya sejumlah rupiah untuk pengeluaran makanan dan bukan makanan disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Keberhasilan pengentasan penduduk miskin diukur dari penurunan proporsi penduduk miskin.

Secara umum, tingkat kemiskinan di Kabupaten Seluma menurun dari 21,68% pada tahun 2016 menjadi 18,56% pada tahun 2020. Lebih lanjut lagi, tingkat kemiskinan di Kabupaten Seluma masih diatas provinsi dan nasional.

Grafik 2.9

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Seluma 2016-2020



Tabel 2.22

Indeks Kemiskinan Kabupaten Seluma

Indeks Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan			
	2016	2017	2018	2019
Indeks Kedalaman Kemiskinan	4,12	3,98	3,22	2,71
Indeks Keparahan Kemiskinan	1,09	1,11	0,85	0,61

Sumber : Seluma dalam angka tahun 2020.

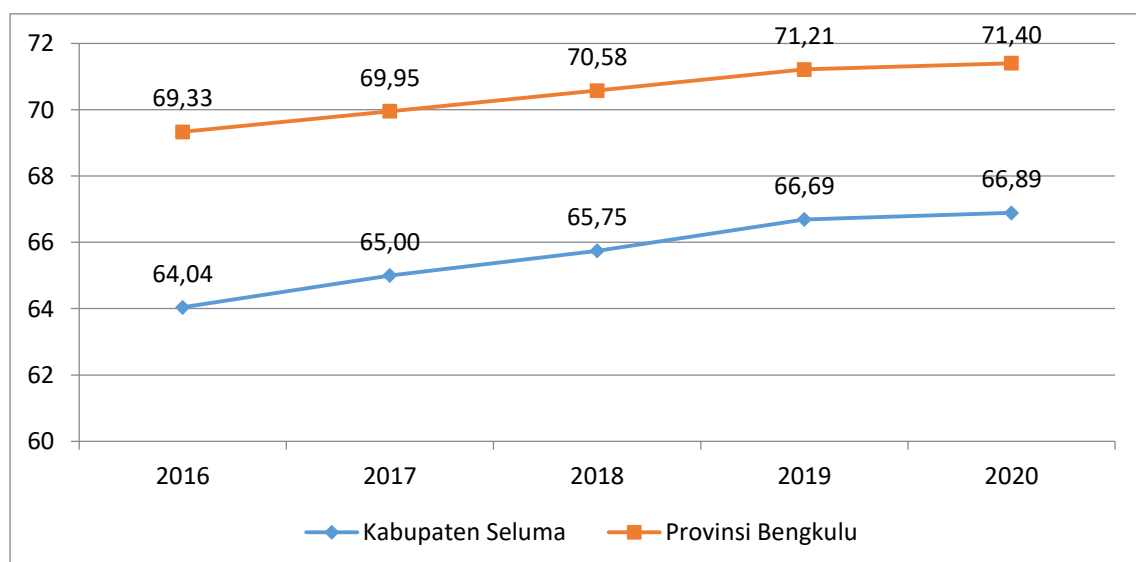
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selama lima tahun terakhir, kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Seluma menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Seluma tercatat sebesar 64,04. Angka ini menjadi 66,89 pada tahun 2020. Walaupun terjadi peningkatan setiap tahunnya, masih banyak yang harus dilakukan oleh Kabupaten Seluma mengingat capaian IPM dalam kurun waktu 2016-2020 selalu dibawah capaian rata-rata Provinsi Bengkulu.

IPM merupakan indeks komposit yang tersusun dari capaian masing-masing komponen IPM yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita.

Grafik 2.10

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Seluma tahun 2016-2020



• Tingkat Pengangguran Terbuka

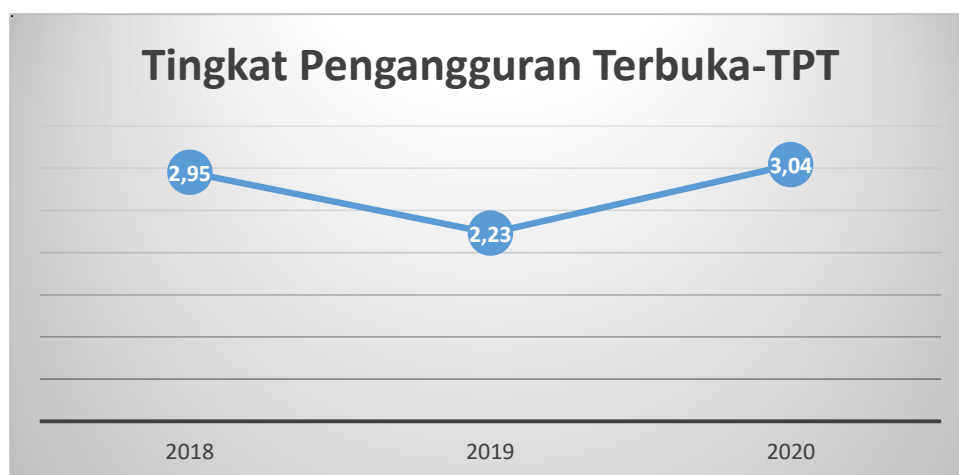
Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia, sebab mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Yang dimaksud dengan dimensi ekonomi di sini adalah tanpa adanya pekerjaan sebagai sumber penghasilan rumah tangga akan mengancam kelangsungan hidup anggota rumah tangganya, sedangkan yang dimaksud dengan dimensi sosial adalah makin banyaknya anggota masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau makin banyak penganggur akan menjadi potensi untuk melakukan tindak kejahatan atau tindakan lain yang akan mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan diantaranya: ketersediaan lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran, tingkat produktifitas, dan lain-lain.

Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Seluma diperkirakan sebesar 2,23 persen. Angka tersebut mengungkapkan bahwa untuk setiap 100 orang penduduk angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau menganggur sebanyak 1-2 orang. Ditinjau dari jenis kelamin, angka pengangguran penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Pada tahun 2019 TPT penduduk perempuan diperkirakan sebesar 3,70 persen, sedangkan TPT penduduk laki-laki sebesar 1,25 persen. Kabupaten Seluma bekerja di sektor pertanian. Sebanyak 68.781 orang bekerja di sektor pertanian atau sekitar 63,05 persen dari total penduduk yang bekerja. Sektor dengan jumlah pekerja terbanyak berikutnya yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan 15.013 pekerja atau sekitar 13,76 persen dari total penduduk yang bekerja

Salah satu cara untuk mengurangi jumlah pengangguran ini adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan atau berwiraswasta. Selama para pencari kerja masih berharap untuk mendapatkan kerja dari suatu perusahaan atau institusi, pengangguran akan tetap menjadi masalah pelik. Masalah pengangguran akan terpecahkan bila muncul keinginan untuk menciptakan lapangan usaha sendiri atau berwiraswasta

Grafik 2.11

Tingkat pengangguran terbuka kabupaten seluma tahun 2018-2020



Sumber: BPS, Kabupaten Seluma Dalam Angka 2020

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

• Angka melek huruf

Program pemerintah dalam memberantas buta huruf di Kabupaten Seluma sudah bisa dikatakan berhasil, yang terlihat dari tingginya persentase penduduk yang telah melek huruf. Angka melek huruf penduduk di Kabupaten Seluma relatif tinggi. Pada tahun 2019 angka melek huruf telah mencapai 97,27 persen. Angka tersebut mengungkapkan bahwa setiap 100 orang penduduk di sebanyak 97-98 orang telah melek huruf. Tingginya angka melek huruf di sisi lain menggambarkan bahwa angka tidak melek huruf atau buta huruf di relatif rendah sebesar 2,73 persen.

Tabel 2.23

Angka Melek Huruf di Kabupaten Seluma Tahun 2016-200

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angka melek huruf	%	n/a	96,22	97,26	97,27	97,11

Ditinjau menurut jenis kelamin, persentase terbesar penduduk yang buta huruf adalah penduduk berjenis kelamin perempuan, yakni 4,76 persen dari jumlah penduduk perempuan, sedangkan, jumlah penduduk laki-laki yang buta huruf tidak mencapai 1 persen dari jumlah penduduk laki-laki, yaitu sebesar 0,85 persen.

Tabel 2.24

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur (persen)

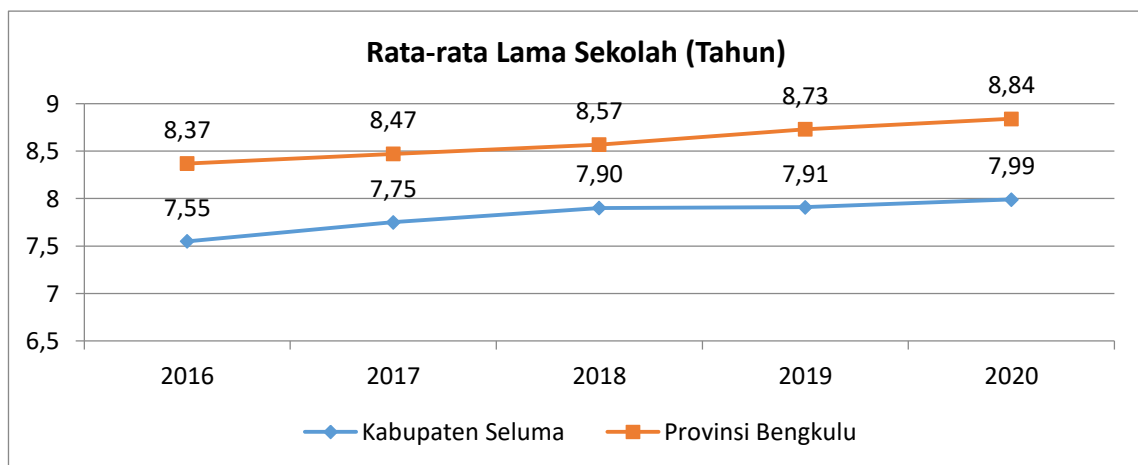
Kelompok Umur Melek Huruf	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur (persen)	
	2018	2019
15-19	100,00	100,00
20-24	100,00	100,00
25-29	100,00	99,44
30-34	100,00	100,00
35-39	100,00	100,00
40-44	98,89	99,73
45-49	100,00	98,90
50+	89,08	89,74
15-24	100,00	100,00
15-44	99,85	99,84
15+	97,26	97,27
45+	92,23	92,24

Sumber : Seluma dalam angka tahun 2020

- **Angka rata-rata lama sekolah**

Ukuran lain dari kualitas pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan formal yang telah dicapai oleh penduduk dewasa. Semakin besar nilai rata-rata sekolah penduduk dewasa mengungkapkan bahwa jenjang pendidikannya semakin tinggi. Pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah penduduk telah mencapai 7,91 tahun. Angka tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk dewasa masih berpendidikan belum tamat SLTP.

Dari segi Rata-rata Lama Sekolah (RLS), tren yang sama juga diperlihatkan oleh komponen ini yaitu meningkat dari 7,55 tahun pada 2016 menjadi 7,99 tahun pada 2020. Demikian halnya dengan IPM, RLS Kabupaten selalu berada dibawah rata-rata RLS Provinsi Bengkulu.



2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Pelayanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- **Pendidikan Dasar**

Angka Partisipasi Sekolah, Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Pada Tabel tampak bahwa APS usia 7-12 tahun telah mencapai 99,82 persen dan APS kelompok umur 13-15 tahun sebesar 96,84 persen. Sementara itu APS kelompok umur 16-18 adalah sebesar 80,68 persen.

Tabel 2. 25

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Seluma, 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
7-12	100	99,67	99,82
13-15	94,21	99,28	96,84

Sumber: BPS, Susenas 2019

APS penduduk laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan APS penduduk laki-laki hampir pada semua kelompok umur dan secara khusus pada kelompok umur 13-15 tahun serta 16-18 tahun. Fenomena itu mengungkapkan bahwa partisipasi penduduk perempuan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di daerah ini lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki pada kelompok umur tersebut.

Kelompok umur 7-12 tahun setara dengan jenjang pendidikan SD, kelompok umur 13-15 tahun setara dengan jenjang pendidikan SLTP, dan kelompok umur 16-18 tahun setara dengan jenjang pendidikan SLTA. Indikator APK dapat menggambarkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada tingkat pendidikan tertentu pada kelompok umur tertentu.

Tabel 2.26

Perkembangan APS Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020

Kab. Seluma	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Umur 7-12	n.a.	99,57	100,00	99,82	99,99
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Umur 13-15	92.62	94.48	96.47	96,84	95,99

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan menengah tahun di kabupaten seluma selalu meningkat tiap tahunnya. Hingga tahun 2020 Angka Partisipasi Sekolah untuk umur 7-12 adalah 99,99, untuk 13-15 tahun adalah sebesar 95,99 dan untuk umur 16-18 tahun sebesar 80,82. Besar nilai APS tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar remaja di Kabupaten Seluma sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.

Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat sekolah dasar mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Pada tahun 2016 APM tingkat sekolah dasar mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 7,1. APM tingkat Sekolah Dasar kembali meningkat ditahun-tahun berikutnya. Hingga Tahun 2020 nilai APM untuk tingkat Sekolah Dasar adalah sebesar 95,5.

Tabel 2. 27

**Perkembangan APM Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Seluma
Tahun 2016-2020**

Kab. Seluma	2016	2017	2018	2019	2020
APM Sekolah Dasar (SD) Sederajat	92.4	95.1	94.8	94.6	95.5
APM Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sederajat	74.3	76.2	80.3	81.8	81.5

Angka partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan menengah kabupaten Seluma mengalami kenaikan secara periode. Nilai APM pada tahun 2010 yaitu sebesar 77,09 untuk nilai APM Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) adalah sebesar 35,5.

Nilai APM SLTP tertinggi terjadi pada tahun 2015 meskipun pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan. Kenaikan nilai APM secara merata dialami pada tingkat SLTA, meskipun pada tahun 2012 dan 2015 mengalami sedikit penurunan. Hingga tahun 2020 tercatat nilai APM SLTP sebesar 81,05 dan APM SLTA sebesar 69,8.

Angka Partisipasi Kasar, Secara periode 5 tahunan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Seluma mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 APK untuk jenjang SD 1 adalah sebesar 105,93 sedangkan untuk tingkat SLTP sebesar 100,02.

Meningkatnya kesadaran akan perlu dan pentingnya pendidikan mendorong naiknya tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten seluma.

Tabel 2. 28

Perkembangan APK Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020

Kab. Seluma	2016	2017	2018	2019	2020
APK SD Sederajat	112.21	107.89	107,03	105,72	105.93
APK Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sederajat	99.07	97.79	104.1	98.64	100,02

Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar, Rasio kelas terhadap rombongan belajar menggambarkan kondisi kapasitas 1 unit kelas untuk menampung 1 rombongan belajar yang Pasal 24 Permendikbud No. 17 Tahun 2017 adalah 28 siswa untuk SD, 32 siswa untuk SMP. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini, dalam kurun waktu 2016-2020 Rasio Ruang Kelas / Rombel di Kabupaten Seluma berada dalam rentang 1 : 0.9 hingga 1 : 1.02. Dengan demikian dapat disimpulkan secara umum bahwa rata-rata sudah terdapat 1 ruang kelas SD untuk 1 rombongan belajar siswa SD.

Dilihat dari sisi sebaran per kecamatan, dari tabel terlihat pada tahun 2020 rasio tertinggi berada di kecamatan Seluma Barat (1 : 1.16) dan terendah ditemukan di Kecamatan Talo Kecil (1 : 0.62). Dengan kata lain, ruang kelas SD yang terdapat di Kecamatan Seluma Barat harus menampung lebih dari 1 rombel (1,16) atau padat. Sementara itu di Kecamatan Talo Kecil, Ruang Kelas SD hanya menampung 0,62 rombel atau dapat dikatakan ruang kelas tidak padat dengan siswa.

Tabel 2.29

Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar Tingkat SD

KECAMATAN	RASIO RUANG KELAS TERHADAP ROMBEL SD			
	2017	2018	2019	2020
Air Periukan	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 1.02	1 : 0.86
Ilir Talo	1 : 0.83	1 : 0.92	1 : 0.97	1 : 0.90
Lubuk Sandi	1 : 1.07	1 : 1.12	1 : 1.06	1 : 1.03
Seluma	1 : 0.93	1 : 0.96	1 : 0.94	1 : 0.99
Seluma Barat	1 : 1.10	1 : 1.02	1 : 1.16	1 : 1.16
Seluma Selatan	1 : 0.79	1 : 0.94	1 : 0.97	1 : 0.85
Seluma Timur	1 : 0.97	1 : 0.98	1 : 0.98	1 : 0.79



KECAMATAN	RASIO RUANG KELAS TERHADAP ROMBEL SD			
	2017	2018	2019	2020
Seluma Utara	1 : 0.88	1 : 1.00	1 : 1.00	1 : 1.01
Semidang Alas	1 : 1.10	1 : 1.07	1 : 1.08	1 : 0.98
Semidang Alas Maras	1 : 1.02	1 : 0.99	1 : 0.99	1 : 0.89
Sukaraja	1 : 0.97	1 : 1.05	1 : 1.02	1 : 0.89
Talo	1 : 0.94	1 : 1.04	1 : 1.00	1 : 0.84
Talo Kecil	1 : 0.74	1 : 0.98	1 : 0.98	1 : 0.62
Ulu Talo	1 : 0.94	1 : 1.18	1 : 1.09	1 : 0.94
Kabupaten Seluma	1 : 0.95	1 : 1.02	1 : 1.02	1 : 0.90

Untuk jenjang SMP, sebagaimana dirangkum dalam tabel dibawah ini, dalam kurun waktu 2016-2020 rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar tingkat SLTP di Kabupaten Seluma berada dalama rentang 1 : 0.90 hingga 1 : 1.02. Dengan kata lain terdapat 1 Ruang Kelas SMP untuk 1 rombongan belajar siswa SMP. Dilihat dari sisi sebaran per kecamatan, dari tabel terlihat pada tahun 2020 rasio tertinggi berada di kecamatan Seluma Barat (1 : 1.00) dan terendah ditemukan di Kecamatan Talo Kecil (1 : 0.50). Dengan kata lain, di Kecamatan Talo Kecil, Ruang Kelas SMP hanya menampung 0,50 rombel atau dapat dikatakan ruang kelas tidak padat dengan siswa.

Tabel 2.30

Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar Tingkat SMP

KECAMATAN	RASIO RUANG KELAS TERHADAP ROMBEL SMP			
	2017	2018	2019	2020
Air Periukan	1 : 0.75	1 : 0.75	1 : 0.95	1 : 0.83
Iilir Talo	1 : 0.75	1 : 0.75	1 : 0.88	1 : 0.84
Lubuk Sandi	1 : 0.75	1 : 0.75	1 : 1.50	1 : 0.84
Seluma	1 : 0.71	1 : 0.75	1 : 0.93	1 : 0.62
Seluma Barat	1 : 0.67	1 : 0.75	1 : 1.17	1 : 1.00
Seluma Selatan	1 : 0.67	1 : 0.75	1 : 1.00	1 : 0.85
Seluma Timur	1 : 0.67	1 : 0.50	1 : 1.00	1 : 0.86
Seluma Utara	1 : 0.67	1 : 0.75	1 : 1.00	1 : 0.89
Semidang Alas	1 : 0.75	1 : 0.75	1 : 0.89	1 : 0.87
Semidang Alas Maras	1 : 0.75	1 : 0.75	1 : 0.95	1 : 0.93
Sukaraja	1 : 0.75	1 : 0.75	1 : 0.94	1 : 0.83
Talo	1 : 0.75	1 : 0.75	1 : 1.00	1 : 0.83
Talo Kecil	1 : 0.75	1 : 0.75	1 : 0.68	1 : 0.50
Ulu Talo	1 : 0.75	1 : 0.75	1 : 0.67	1 : 0.67
Kabupaten Seluma	1 : 0.73	1 : 0.73	1 : 0.94	1 : 0.81



Rasio ketersediaan guru per murid pendidikan dasar, Pelayanan wajib pendidikan juga dapat dilihat pada data rasio guru terhadap siswa. Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam kurun waktu 2016-2020 rasio guru / murid di Kabupaten Seluma berada dalam rentang 1 : 12 hingga 1 : 18. Dengan kata lain terdapat 1 orang guru SD sederajat untuk 15 siswa.

Tabel 2.31

Rasio Guru Terhadap Murid Tingkat SD

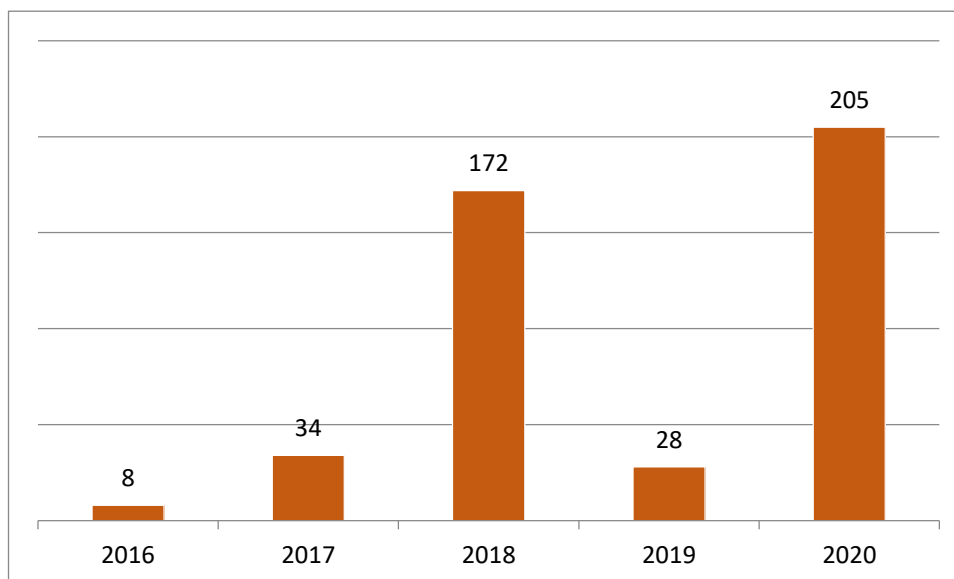
Kecamatan	Rasio Guru/Murid				
	SD/ MI				
(1)	2016	2017	2018	2019	2020
Semidang Alas Maras	1 : 21	1 : 16	1 : 16	1 : 14	1 : 14
Semidang Alas	1 : 23	1 : 14	1 : 13	1 : 11	1 : 10
Talo	1 : 11	1 : 9	1 : 11	1 : 10	1 : 8
Ilir Talo	1 : 25	1 : 16	1 : 19	1 : 15	1 : 15
Talo Kecil	1 : 22	1 : 15	1 : 14	1 : 12	1 : 12
Ulu Talo	1 : 16	1 : 10	1 : 10	1 : 8	1 : 7
Seluma	1 : 20	1 : 17	1 : 17	1 : 14	1 : 13
Seluma Selatan	1 : 32	1 : 20	1 : 20	1 : 17	1 : 15
Seluma Barat	1 : 18	1 : 12	1 : 14	1 : 13	1 : 12
Seluma Timur	1 : 18	1 : 13	1 : 14	1 : 14	1 : 14
Seluma Utara	1 : 17	1 : 11	1 : 12	1 : 9	1 : 8
Sukaraja	1 : 14	1 : 14	1 : 14	1 : 13	1 : 12
Air Periukan	1 : 19	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 16
Lubuk Sandi	1 : 12	1 : 11	1 : 12	1 : 9	1 : 9
Kabupaten Seluma	1 : 18	1 : 14	1 : 14	1 : 12	1 : 12

Murid Putus Sekolah, Kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan dapat mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah.

Perkembangan Murid Putus Sekolah Tingkat SD di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut. Jumlah murid putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2018 (172 anak) dan tahun 2020 (205 anak).

Grafik 2.12

Jumlah Murid Putus Sekolah Tingkat SD Tahun 2016-2020

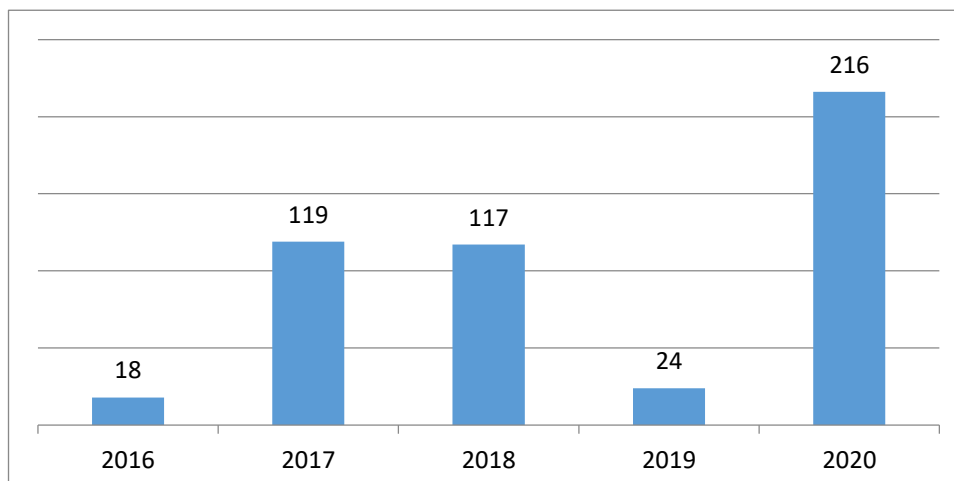


Perkembangan Murid Putus Sekolah Tingkat SMP di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut. Jumlah murid putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2017 (119 anak), tahun 2018 (117 anak) dan tahun 2020 (216 anak).

Masih tingginya angka putus sekolah pada pendidikan dasar kedepannya harus menjadi perhatian utama untuk dicarikan solusi. Capaian indikator ini akan mempengaruhi capaian indikator lainnya dan tentu saja sangat berpengaruh kepada anak murid yang putus sekolah tersebut.

Grafik 2.13

Jumlah Murid Putus Sekolah Tingkat SMP Tahun 2016-2020



Guru yang Sudah Sertifikasi, Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas guru ada melalui sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikasi guru di Provinsi Bengkulu pada setiap jenjang pendidikan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Perkembangan Guru yang Sudah Sertifikasi di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32

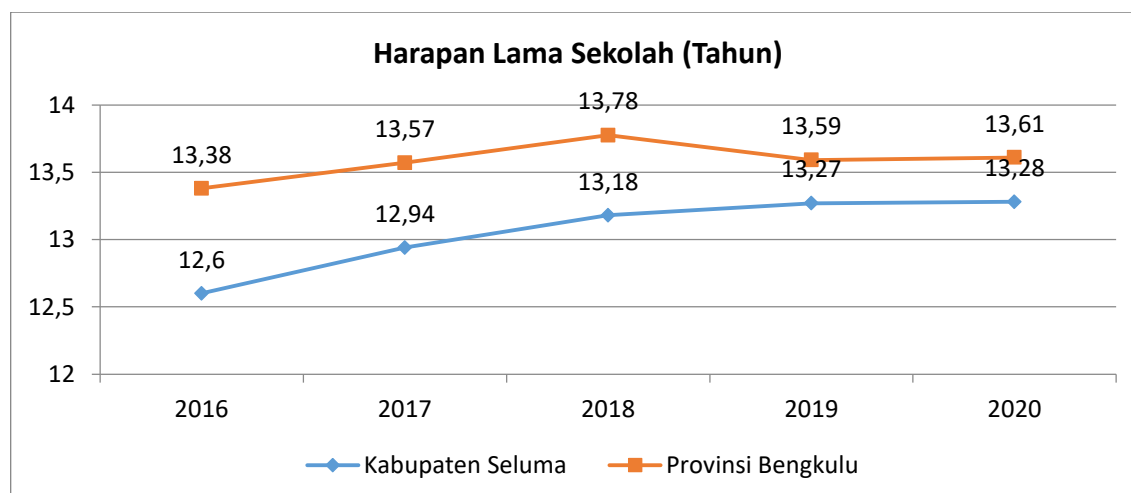
Persentase Guru SD dan SMP yang Sudah Sertifikasi Tahun 2017-2020

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020
Guru SD	%	37.96	44.65	52.53	55.16
Guru SMP	%	30.78	36.21	42.60	44.73

Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.14

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020



Jika dilihat dari angka harapan lama sekolah (HLS) tahun 2019 sebesar 13,27 tahun. Artinya, dengan pembangunan pendidikan yang ada sekarang, diharapkan penduduk dapat bersekolah rata-rata sampai dengan 13 hingga 14 tahun. Namun masih ada gap sekitar 7-12 tahun antara HLS dan RLS yang menyatakan masih ada jarak antara harapan dan kenyataan pembangunan pendidikan di Kabupaten Seluma.

Dari perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS), tren yang sama juga diperlihatkan oleh komponen ini yaitu meningkat dari 12,6 tahun pada 2016 menjadi 13,28 tahun pada 2020. Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, HLS Kabupaten selalu berada dibawah rata-rata HLS Provinsi Bengkulu.

Akreditasi Sekolah SMA dan SMK, Akreditasi sekolah bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu serta menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Pada tahun 2019, akreditasi sekolah pada setiap jenjang sudah semakin baik, yang dilihat dari makin sedikitnya sekolah yang belum melakukan akreditasi. Perkembangan Akreditasi Sekolah di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.33

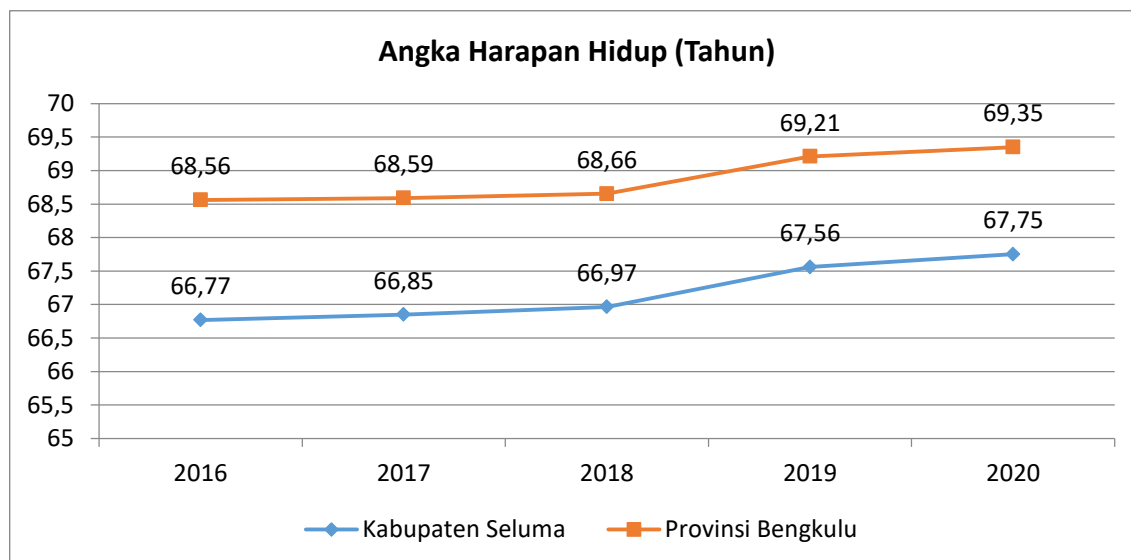
**Perkembangan SD dan SMP yang Telah mendapatkan Akreditasi A dan B
Tahun 2016- 2020**

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
SD	%	47.80	48.90	49.45	50.55	51.10
SMP	%	42.55	48.94	51.06	53.19	55.32

- **Kesehatan**

Angka Harapan Hidup, Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya Angka Harapan Hidup ($e_0 = AHH$). AHH adalah rata- rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Peningkatan angka harapan hidup dapat tercapai apabila membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan.

Dilihat dari segi Angka Harapan Hidup (AHH), tren yang sama juga diperlihatkan oleh komponen ini yaitu meningkat dari 66,77 tahun pada 2016 menjadi 67,75 tahun pada 2020. Demikian halnya dengan IPM, AHH Kabupaten selalu berada dibawah rata-rata AHH Provinsi Bengkulu.



Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup, Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.34

**Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Seluma
Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup	Nilai	12.28	11.38	23.76	4.12	6.17

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.

Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.35

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Nilai	179.75	149.79	154.89	117.82	123.49

Angka Stunting, Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Stunting didefinisikan sebagai masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.

Prevalensi balita stunting di Kabupaten Seluma mengalami tren penurunan, yaitu dari 12,07 persen pada tahun 2018 menjadi 6,18 persen pada tahun 2020.

Adapun perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Seluma Tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.36

Angka Stunting di Kabupaten Seluma Tahun 2018-2021

Indikator	Satuan	Tahun		
		2018	2019	2020
Persentase Stunting	Nilai	12.07	9.63	6.18

Sebaran prevalensi stunting dirangkum dalam tabel berikut. Pada tahun 2020, Kecamatan Semidang Alas, Kecamatan Seluma Utara dan Kecamatan Ulu Talo merupakan tiga kecamatan dengan angka stunting tertinggi yaitu secara berurutan masing-masing sebesar 18,0%, 14,7% dan 12,1%.

Tabel 2.37

Prevalensi Stunting Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2020

NO	KECAMATAN	2018	2019	2020
1	SEMIDANG ALAS MARAS	31.0	11.9	5.6
2	SEMIDANG ALAS	14.8	8.5	1.7
3	TALO	18.0	22.4	18.0
4	ILIR TALO	9.2	9.2	5.7
5	TALO KECIL	34.3	23.4	7.3
6	ULU TALO	31.2	12.3	12.1
7	SELUMA	2.9	2.2	0.8
8	SELUMA SELATAN	4.6	7.1	3.9
9	SELUMA BARAT	4.3	3.8	7.3
10	SELUMA TIMUR	0.3	0.2	0.9
11	SELUMA UTARA	27.3	7.9	14.7
13	SUKARAJA	2.4	2.8	5.1
14	AIR PERIUKAN	5.7	15.4	4.4
15	LUBUK SANDI	13.2	9.1	11.2
	JUMLAH	12.1	9.6	6.2

Fasiliitas Kesehatan, Jumlah fasilitas kesehatan ikut mempengaruhi perkembangan kesehatan masyarakat terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Seluma. Berikut merupakan tabel Jumlah fasilitas kesehatan Puskesmas yang ada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Seluma.



Tabel.38

Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2016-2021

Sarana Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Sakit (unit)	1	1	1	1	1
Puskesmas (unit)	22	22	22	22	22
Puskesmas Pembantu (unit)	49	49	50	37	43

Adapun sebaran fasilitas kesehatan pada tahun 2020 dirangkum dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2.38

Sebaran fasilitas kesehatan per kecamatan tahun 2020

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
Semidang Alas Maras		3	4
Semidang Alas		2	2
Talo		1	2
Ilir Talo		2	5
Talo Kecil		1	3
Ulu Talo		1	1
Seluma		1	1
Seluma Selatan		1	3
Seluma Barat		1	3
Seluma Timur	1	1	2
Seluma Utara		1	2
Sukaraja		3	8
Air Periukan		2	4
Lubuk Sandi		2	3
Kabupaten Seluma (2020)	1	22	43

• **Pekerjaan Umum**

Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap, Masalah utama terkait aspek infrastruktur di Kabupaten Seluma adalah kualitas permukaan jalan kabupaten masih didominasi oleh kondisi rusak ringan atau rusak berat. Kondisi ruas jalan kabupaten di Kabupaten Seluma cukup memprihatinkan. Dari total panjang 668,62 Km jalan kabupaten di Kabupaten Seluma, sebesar 28,10% dalam kondisi rusak berat, 37,35% dalam kondisi rusak ringan dan 21,32% dalam kondisi baik.

Dengan kata lain, persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan keseluruhan panjang jalan kabupaten) pada tahun 2021 adalah 34,55%. Adapun sebaran kondisi jalan

kabupaten dirangkum dalam peta dibawah ini. Pada umumnya jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat merupakan akses ke desa-desa tertinggal.

Struktur jalan di Kabupaten Seluma didominasi oleh jalan dengan jenis koral yaitu sepanjang 301,13 Km (45,04%). Jalan aspal di Kabupaten Seluma baru mencapai sepanjang 149,192 Km (22,42%). Di Kabupaten Seluma masih ditemukan jalan kabupaten dengan permukaan tanah yaitu sepanjang 110,95 km (16,59%).

Tabel 2.39

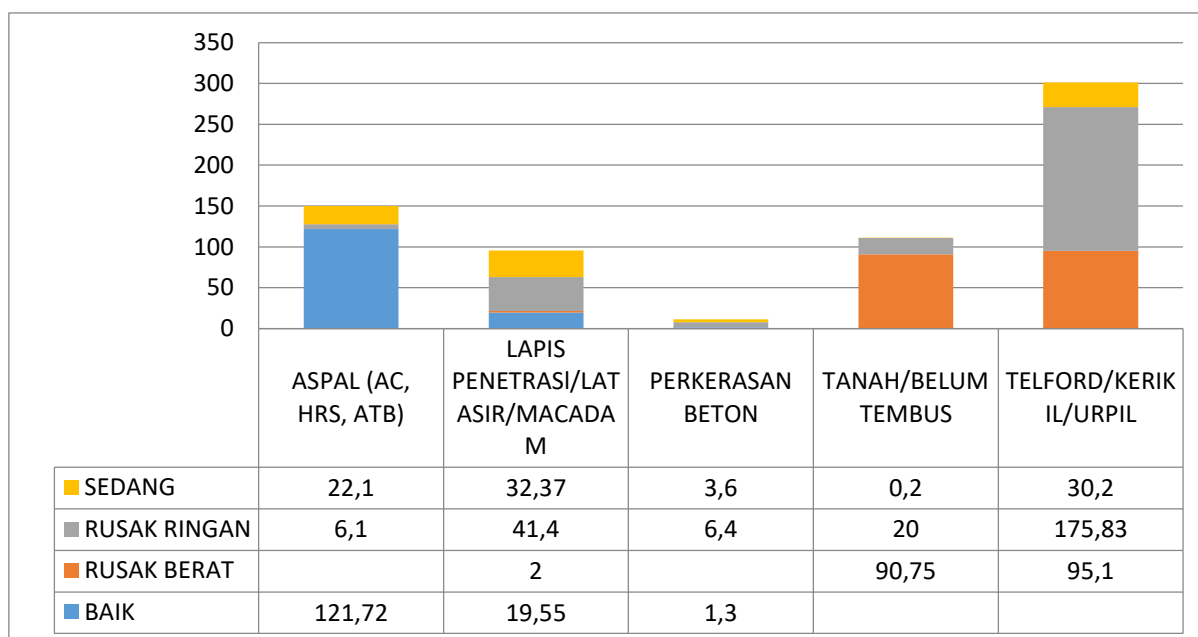
Kondisi Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Seluma Tahun 2021 (Km)

JENIS PERMUKAAN	BAIK	RUSAK BERAT	RUSAK RINGAN	SEDANG	Grand Total
ASPAL (AC, HRS, ATB)	121,72		6,1	22,1	149,92
LAPIS PENETRASI/LATASIR/MACADAM	19,55	2	41,4	32,37	95,32
PERKERASAN BETON	1,3		6,4	3,6	11,3
TANAH/BELUM TEMBUS		90,75	20	0,2	110,95
TELFORD/KERIKIL/URPIL		95,1	175,83	30,2	301,13
total	142,57	187,85	249,73	88,47	668,62

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seluma (2021)

Grafik 2.15

Kondisi Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Seluma Tahun 2021 (Km)

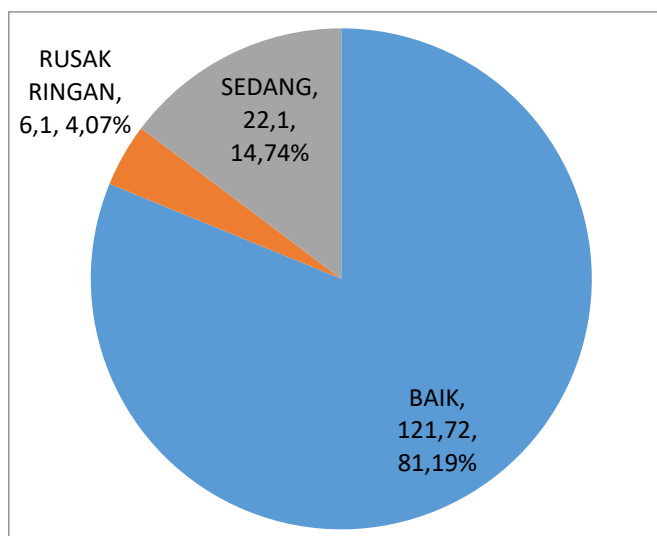


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seluma (2021)

Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Seluma menjadi salah satu permasalahan yang menghambat pembangunan di Kabupaten Seluma. Untuk jalan dengan jenis perkerasan aspal (AC, HRS, ATB) sepanjang 6,1 km (4,07%) berada dalam kondisi rusak ringan (lihat gambar dibawah ini).

Grafik 2.16

Kondisi Jalan Aspal (AC, HRS, ATB) di Kabupaten Seluma Tahun 2021 (km, %)

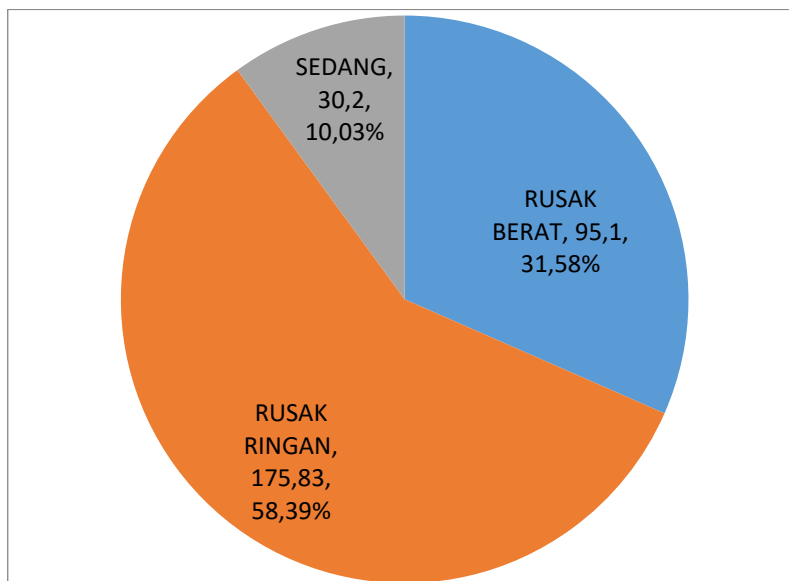


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seluma (2021), diolah

Disisi lain, untuk jalan dengan jenis Lapis Penetrasi/Latasir/Macadam sebagaimana dirangkum dalam gambar dibawah ini, masih didominasi oleh kondisi rusak ringan dan sedang yaitu masing-masing sepanjang 41,4 km (43,43%) dan 32,37 km (33,96%).

Grafik 2.17

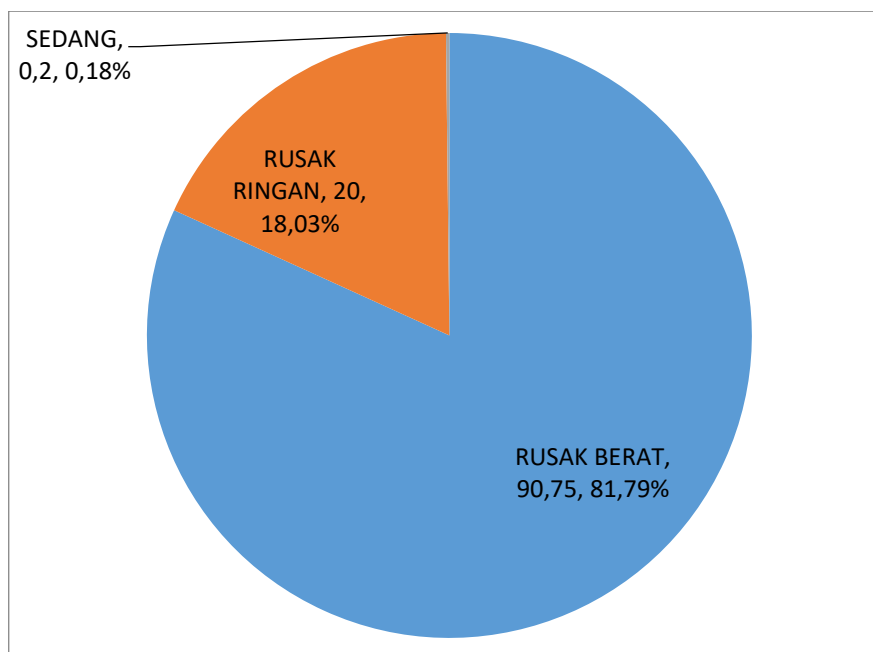
Kondisi Jalan dengan Jenis Permukaan Lapis Penetrasi/ Latasir/ Macadam



Sementara itu, untuk jalan dengan jenis telford / kerikil / Urpil sebagaimana dirangkum dalam gambar dibawah ini, masih didominasi oleh kondisi rusak ringan dan rusak berat yaitu masing-masing sepanjang 175,83 km (58,39%) dan 95,1 km (31,58%).

Grafik 2.18

Kondisi jalan dengan jenis telford / kerikil / Urpil



Kondisi Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Mantap, Perkembangan Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap yang menjadi kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 dirangkum dalam tabel sebagai berikut. Persentase Irigasi dalam kondisi mantap meningkat dari 40.38% pada tahun 2016 menjadi 49.57% pada tahun 2020.

Tabel 2.40

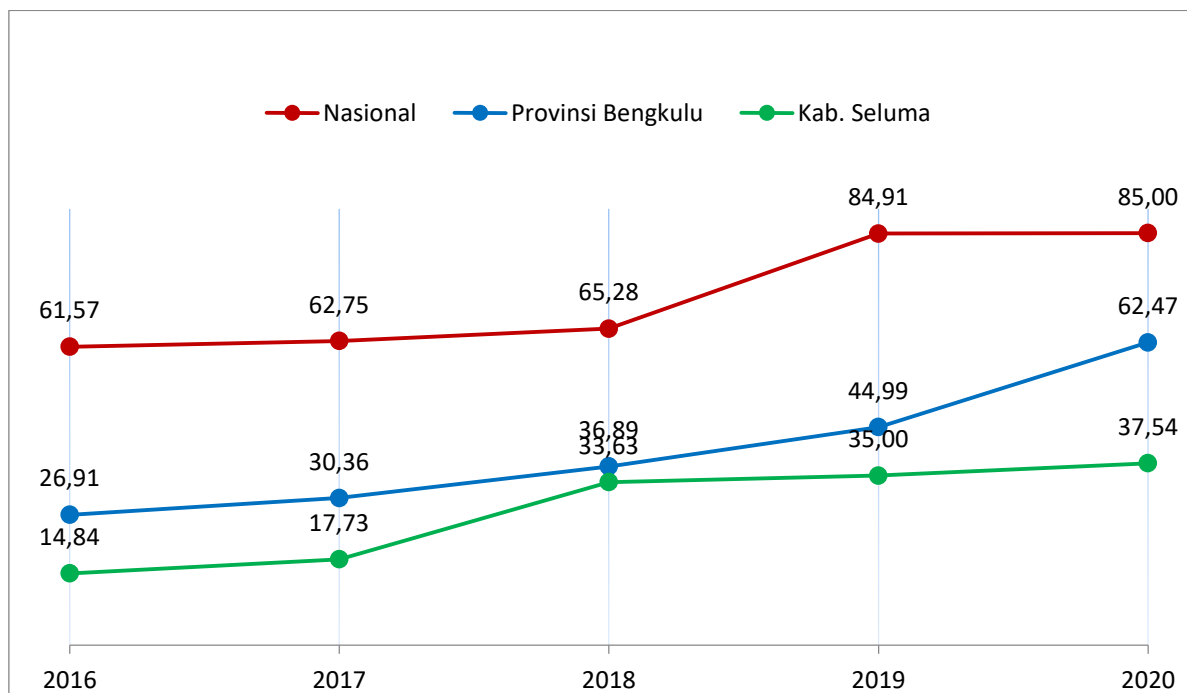
Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Mantap 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Irigasi dalam Kondisi Mantap	%	40.38	42.50	44.74	47.09	49.57

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak, Rumah tangga pengguna air bersih adalah persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan, air isi ulang dan sumur bor/pompa, sumur terlindung dengan jarak ke tempat pembuangan tinja lebih dari 10 M. Sedangkan Sumber Air Minum Layak adalah sumber air minum yang berasal dari leding, air hujan, dan sumur bor/pompa,

sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 M.

Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020, sebagaimana dirangkum dalam gambar dibawah ini, persentase rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Seluma pada tahun 2020 adalah sebesar 37,54%. Hal ini tentu saja membutuhkan perhatian serius untuk meningkatkan layanan air minum layak bagi masyarakat Kabupaten Seluma.



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu 2021, diolah

Keterangan:

Nilai capaian kabupaten Seluma 2016-2020 masih menggunakan metode perhitungan lama

Nilai capaian tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2020 merupakan metode perhitungan baru

Nilai capaian tingkat nasional 2016-2020 merupakan metode perhitungan baru

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak, Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh satu rumah tangga sendiri yang terhubung pada SPAL atau menggunakan tangki septik dengan jenis kloset leher angsa, yang disedot minimal 1x dalam jangka waktu 3-5 tahun dan dibuang ke IPLT. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat.



Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	18.49	19.46	24.56	28.89	36.46

Dengan kata lain, baru 36,46% dari total penduduk seluma yang mendapatkan akses sanitasi layak. Hal ini tentunya perlu mendapatkan penanganan yang serius dikarenakan sanitasi yang kurang baik dapat berakibat pada berbagai masalah Kesehatan, misalnya fenomena stunting yang memiliki keterkaitan dengan kurangnya sanitasi pada tempat tinggal.

- **Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Persentase Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni, Rumah tangga dikatakan menempati rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu, kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) minimal 7,2 per kapita, memiliki akses air minum dan sanitasi layak, serta memenuhi kriteria ketahanan bangunan (durable housing) yaitu atap terluas berupa beton, genteng, seng dan kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, anyaman bambu dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan dan semen/bata merah (BPS, 2019).

Perkembangan Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni di Kabupaten Seluma Tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

Indikator	Satuan	Tahun		
		2018	2019	2020
Persentase Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni	%	42.57	88.24	90.29

Luasan Kumuh di Kabupaten Seluma, Beberapa dimensi permukiman kumuh yang senantiasa harus mendapat perhatian serius adalah permasalahan prasarana dan sarana dasar, permasalahan sosial ekonomi, permasalahan sosial budaya, permasalahan tata ruang kota, permasalahan aksesibilitas. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah

mengamanahkan bahwa penyelenggaraan permukiman layak dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau setiap orang, untuk menjamin hak menempati lingkungan layak, sehat, aman, serasi dan teratur.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 470-341 Tahun 2020, Luas areal kumuh di Kabupaten Seluma adalah sebesar 94,98 Ha dengan sebaran sebagai berikut.

Tabel 2.41

Luas Areal Kumuh di Kabupaten Seluma

No.	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luas
1.	Pasar Tais	Seluma	10,75 Ha
2.	Puguk	Seluma Utara	10,29 Ha
3.	Tumbuan	Lubuk Sandi	11,7 Ha
4.	Talang Benuang Blok 1	Air Periukan	10,94 Ha
5.	Talang Benuang Blok 2	Air Periukan	14,39 Ha
6.	Air Periukan	Air Periukan	11,39 Ha
7.	Cahaya Negeri	Sukaraja	13,03 Ha
8.	Masmambang	Talo	12,49 Ha
JUMLAH			94,98 Ha

- **Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Penanganan Kasus Pelanggaran Perda, Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat atau kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan satu kesatuan frase yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan didaerah secara berkesinambungan. Perkembangan Penanganan Kasus Pelanggaran Perda di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.42

Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda	%	15	15	25	25	30

Cakupan pelayanan bencana kebakaran, Terkait dengan cakupan pelayanan bencana kebakaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma telah menempatkan 4 unit mobil pemadam kebakaran sampai dengan tahun 2020. Adapun perkembangan cakupan pelayanan bencana kebakaran dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.43

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun		
		2018	2019	2020
Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	14.29	21.43	28.57

• **Sosial**

Persentase PMKS yang ditangani, Terkait dengan capaian Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Ditangani (%), capaiannya pada tahun 2020 adalah 52,94% Adapun capaian penanganan PMKS dirangkum dalam tabel berikut. PMKS terbesar berasal dari jumlah warga sangat miskin, yaitu sebesar Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Tabel 2.44

Capaian Persentase PMKS yang ditangani

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PMKS yang ditangani	%	n/a	57.76	58.24	55.73	n/a



Indeks Resiko Bencana, Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko dilakukan dengan memerhatikan faktor Hazard, Vulnerability, dan Capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas (capacities).

Tabel 2.45

Indeks Resiko Bencana Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Resiko Bencana	Nilai	167.38	164.33	162.2	154.08	n/a

B. Pelayanan Umum Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

• Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Apabila tingginya TPAK disebabkan tingginya penduduk yang bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Sebaliknya, bila tingginya TPAK diiringi dengan rendahnya tingkat kesempatan kerja atau rendahnya persentase penduduk yang bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang tidak sehat. Kondisi ketenagakerjaan yang seperti itu mengindikasikan bahwa penduduk yang mencari pekerjaan tinggi, sehingga akan memicu tingginya. TPAK Kabupaten Seluma pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 76,45%. Angka itu menggambarkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk usia kerja sebanyak 76-77 orang diantaranya sudah dan siap masuk ke dalam pasar kerja.

Perkembangan TPAK di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.46

TPAK Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Seluma, 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	n/a	76.7	71.79	73.99	76.45

Sumber: BPS, Kabupaten Seluma Dalam Angka 2021

• **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Indeks Pembangunan Gender (IPG), Untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada para perempuan dan anak agar mereka terbebas dari kekerasan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Perkembangan IPG di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.47

Indeks Pembangunan Gender 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	n/a	85.2	85.28	85.32	85.65

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), indeks lain yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Dimensi dari Indeks Pemberdayaan Gender mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Perkembangan IDG di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.48
Indeks Pemberdayaan Gender 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	n/a	65.15	61.95	66.69	65.6

Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak dipermukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia sebagai obyek sekaligus sebagai subyek. Selain masalah utama Kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan.

Perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.49
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
- Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	kasus	n/a	116	66	46	51
- Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan	kasus	n/a	41	30	10	31
- Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak	kasus	n/a	75	36	36	20

• **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Tujuan Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma

Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

TFR (Total Fertility Rate) adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

TFR Kabupaten Seluma pada tahun 2020 sebesar 2,42. Dengan kata lain wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi).

Selain itu, pada tahun 2020 tercatat sebesar 5,59% keinginan Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia (unmeet need KB) sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Sementara itu, Angka Pemakaian Kontrasepsi adalah 74,19% pada tahun 2020.

Perkembangan kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.50

Capaian Indikator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
TFR	Angka	n/a	n/a	n/a	2.42	2.42
Unmeet Need KB	%	n/a	n/a	n/a	6.77	5.59
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR	%	82.12	80.63	72.9	73.79	74.19



• Lingkungan Hidup

Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Seluma, Digunakan proxy indikator Indeks Kualitas Udara. Perkembangan Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Seluma dirangkum dalam tabel berikut. Dalam kurun waktu 2018-2020, Indeks Kualitas udara di Kabupaten Seluma berada dalam rentang 92-95.

Tabel 2.51

Perkembangan Indeks Kualitas Udara Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	Tahun		
		2018	2019	2020
Indeks Kualitas Udara	Angka	94,93	91.37	92.09

• Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berdasarkan data yang dihimpun dari dinas/instansi terkait, persentase penduduk yang memiliki KTP-el di Kabupaten Seluma Tahun 2020 sudah mencapai 99,17%. Selain KTP-el, dokumen kependudukan yang harus dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan adalah Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran. Pada tahun 2020, cakupan kepemilikan KIA di Kabupaten Seluma sudah mencapai 94,54% dan kepemilikan Akta Kelahiran mencapai 98,63% pada tahun 2020.

Perkembangan kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.52

Kinerja urusan kependudukan dan Catatan Sipil

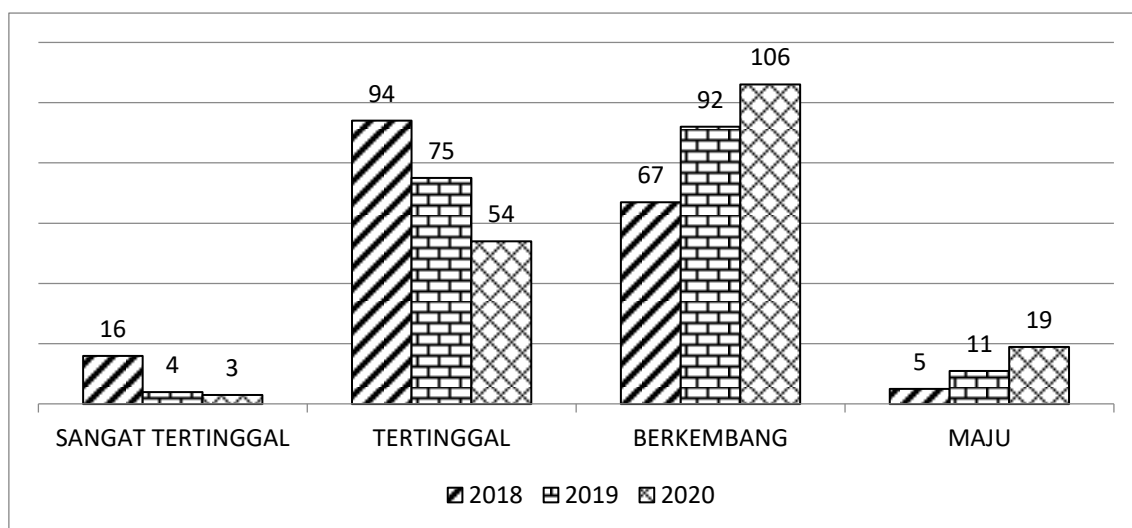
Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	83.03	91.76	86.73	98.8	99.17
Persentase penduduk usia anak yang memiliki KIA	%	19,41	36.39	49.95	88.35	94.54
Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran (Usia 0-18 trahun)	%	95.71	99.38	92.23	99.35	96.83

- **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Status Desa bersumber dari data Indeks Desa Membangun (IDM) yang perbaharui setiap tahun. Berdasarkan data IDM tahun 2018-2020 dirangkum dalam gambar dibawah ini, jumlah desa sangat tertinggal di Kabupaten Seluma menurun dari 16 desa pada tahun 2018 menjadi 3 desa pada tahun 2020. Pola yang sama juga diperlihatkan oleh perkembangan desa tertinggal, jumlah desa tertinggal menurun dari 94 desa pada tahun 2018 menjadi 54 desa pada tahun 2020. Sementara itu, jumlah desa berkembang mengalami peningkatan yang signifikan dari 67 desa pada tahun 2018 menjadi 106 desa pada tahun 2020. Demikian halnya dengan desa maju, pada tahun 2018 terdapat 5 desa maju di Kabupaten Seluma, pada tahun 2020 terdapat 19 desa yang berkategori desa maju. Sebaliknya, sampai dengan tahun 2020, belum ada desa yang berkategori mandiri.

Grafik 2.19

Perkembangan status desa tahun 2018-2020



Sumber : Data Indeks Desa Membangun 2018-2020

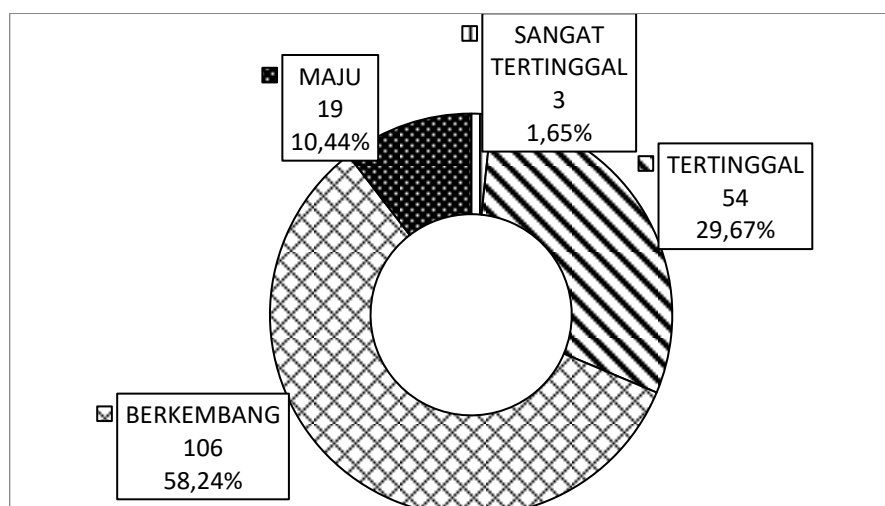
Secara lengkap, sebaran perkembangan jumlah desa sangat tertinggal, jumlah desa tertinggal, jumlah desa berkembang dan jumlah desa maju tingkat kecamatan dicantumkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.53
Sebaran Desa berdasarkan status desa menurut kecamatan
tahun 2018 dan 2020

KECAMATAN	SANGAT TERTINGGAL		TERTINGGAL		BERKEMBANG		MAJU	
	2018	2020	2018	2020	2018	2020	2018	2020
AIR PERIUKAN			1		11	10	3	5
ILIR TALO	1		7		7	15		
LUBUK SANDI	1		12	3	1	10		1
SELUMA BARAT	1		3	1	5	6		2
SELUMA SELATAN			2		6	7	1	2
SELUMA TIMUR			4		1	4		1
SELUMA UTARA	1		8	7		2		
SEMIDANG ALAS	8	2	14	12	1	9		
SEMIDANG ALAS MARAS	1		14	10	10	13		2
SUKARAJA			4	2	14	12	1	5
TALO			7	2	8	12		1
TALO KECIL	2	1	7	5	2	5		
ULU TALO	1		11	12	1	1		
TOTAL	16	3	94	54	67	106	5	19

Ditinjau dari segi persentase sebagaimana ditunjukkan oleh grafik-grafik dibawah ini, persentase desa sangat tertinggal pada tahun 2020 (lihat gambar dibawah ini) adalah 1.65% sedangkan persentase desa tertinggal sebesar 29.67%. Sementara itu, persentase desa berkembang dan desa maju adalah masing-masing secara berurutan sebesar 58,24% dan 10,44%.

Grafik 2.20
Komposisi Desa berdasarkan status desa Tahun 2020



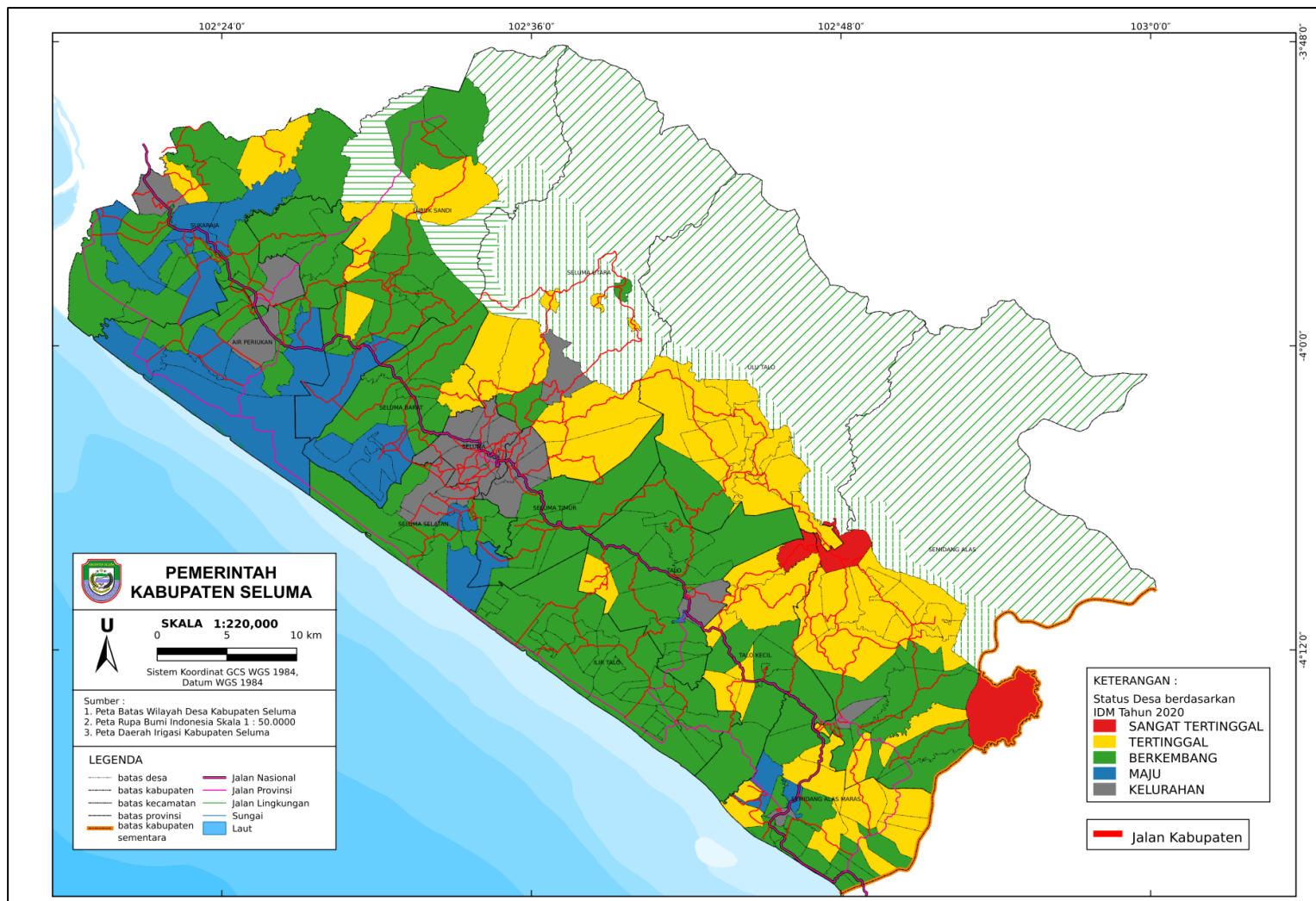


Adapun peta sebaran desa tertinggal di Kabupaten Seluma Tahun ditampilkan dalam gambar dibawah ini. Pada umumnya desa-desa tertinggal dan desa-desa sangat tertinggal berlokasi pada daerah perbukitan. Dan diperlukan dukungan infrastruktur jalan yang mantap untuk menunjang aksesibilitas desa-desa tersebut.



Gambar 2.9

Peta Sebaran Desa Tertinggal Kabupaten Seluma 2020



- **Komunikasi dan Informasi**

Pada tahun 2019, capaian Indeks SPBE Kabupaten Seluma adalah 1.19 poin. Dengan kata lain, capaian Indeks SPBE masih dikategorikan kurang. Berdasarkan hasil penilaian yang terangkum dalam tabel dibawah ini, maka masih banyak yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan capaian Indeks SPBE. Sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas, Tata Kelola SPBE merupakan Domain dengan capaian nilai terendah sehingga harus dilakukan perbaikan secara sistematis. Sementara itu, perbaikan juga harus diarahkan kepada dua domain lainnya.

Tabel 2.54

Rincian Capaian Indeks SPBE Kabupaten Seluma

Domain dan Aspek Penilaian	Nilai
Indeks SPBE	1.19
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	1.24
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	1.00
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	1.40
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	1.00
Aspek 3 - Kelembagaan	1.00
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	1.00
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.00
Domain 3 – Layanan SPBE	1.27
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.43
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	1.00

Sumber : Hasil Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019

- **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

UMKM setelah krisis ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini juga membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. UMKM juga terbukti menyerap tenaga kerja yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Dengan banyaknya pekerja yang terserap, sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Perkembangan indikator-indikator urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.55

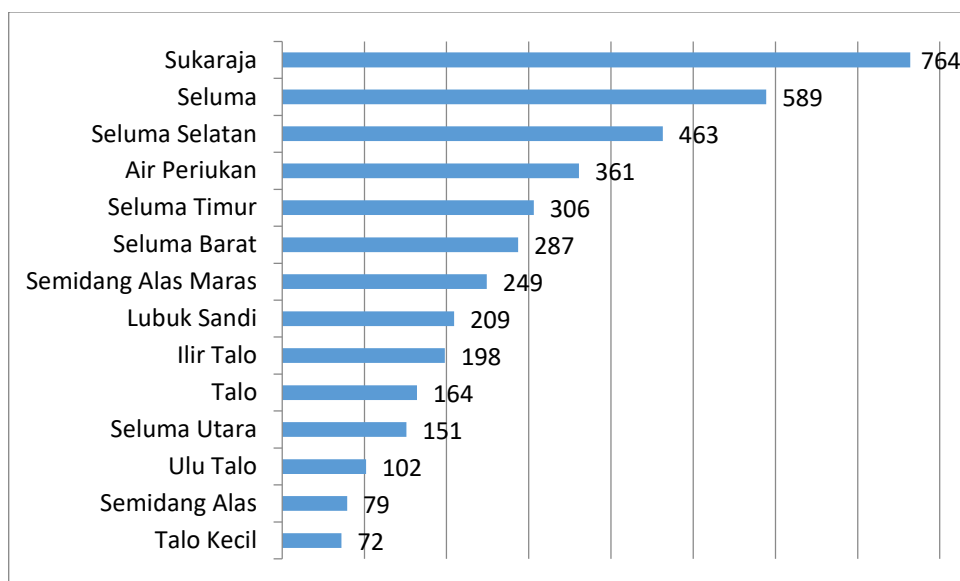
Perkembangan indikator-indikator urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah UMKM	UMKM	2,912	3,235	3,595	3,994	n/a
Jumlah Koperasi Aktif dan bersertifikat NIK	Koperasi	n/a	127	141	144	n/a
Volume Usaha Koperasi	Milyar Rupiah	n/a	30,01	33,34	34,01	n/a

Adapun sebaran UMKM berdasarkan kecamatan pada tahun 2019 dirangkum dalam grafik berikut ini. Sukaraja merupakan kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu mencapai 764 usaha. Dilain pihak, Talo Kecil merupakan kecamatan dengan jumlah UMKM paling sedikit yaitu 72 usaha.

Grafik 2.21

Sebaran UMKM berdasarkan kecamatan tahun 2019



• **Penanaman Modal**

Nilai investasi disuatu daerah sangat dipengaruhi oleh kemudahan ijin investasi. Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama

faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan.

Perkembangan kinerja urusan Penanaman Modal di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.56

Perkembangan indikator bidang penanaman modal

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat bidang perizinan	Nilai	80.38	83.04	77.52	79.64	79.87
- Nilai Investasi	Milyar Rupiah	21.01	71.32	27.29	1261.32	953.69
- Penanaman Modal Asing	Milyar Rupiah	21.01	71.32	1.61	0.43	18.87
- Penanaman Modal Dalam Negeri	Milyar Rupiah	n/a	n/a	25.68	1260.89	934.83

• **Kebudayaan**

Kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Seluma diwakili oleh indikator Persentase Sanggar seni/kelompok seni yang dibina. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini, capaian indikator ini menunjukkan peningkatan dari 18,74% (tahun 2018) dari keseluruhan kelompok seni yang dibina menjadi 21,67% pada tahun 2020. Perkembangan kinerja urusan Kebudayaan di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.57

**Perkembangan kinerja urusan Kebudayaan di Kabupaten Seluma
Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Sanggar seni/kelompok seni yang dibina	%	n/a	n/a	18.74	19.94	21.67

C. Pelayanan Umum Urusan Pilihan

• Kelautan dan Perikanan

Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Seluma memiliki potensi yang cukup besar. Namun sampai dengan tahun 2020 sektor ini belum berkontribusi besar terhadap perekonomian di Kabupaten Seluma. Salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya pelabuhan pendaratan ikan sehingga menyulitkan kapal ikan dengan ukuran besar untuk mendarat. Kedepannya perlu dicarikan solusi agar potensi ini memberikan peranan yang lebih besar kepada perekonomian seluma, menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi angka kemiskinan.

Perkembangan kinerja urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.58

kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2011	n/a	2121	2010	1794
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3135	3,550	3,601	3,651	3933
Jumlah Nelayan Tangkap	Orang	n/a	n/a	1557	1589	1621
Jumlah Pembudidaya Ikan	Orang	n/a	n/a	1515	1545	1577

• Pariwisata

Destinasi wisata di Kabupaten Seluma terdiri dari berbagai jenis wisata diantaranya wisata pantai, wisata air terjun, wisata bendungan, wisata minat khusus, wisata air panas, wisata goa dan wisata jagar budaya. Lokasi wisata tersebut terdapat di berbagai kecamatan di Kabupaten Seluma diantaranya dimana pantai banyak di daerah Kecamatan Semidang Alas Maras yang merupakan daerah pesisir. Sementara untuk wisata air terjun terdapat di Kecamatan Seluma Utara. Adapun perkembangan capaian kinerja bidang pariwisata Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :



Tabel 2.59

Perkembangan Pariwisata Kabupaten Seluma

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah wisatawan	orang	n/a	n/a	16,875	22,500	30,000

• Pertanian

Terkait dengan penduduk usia >15 tahun yang bekerja dan dikelompokkan berdasarkan lapangan pekerjaan, sebagian besar mereka yaitu sebanyak 68.781 jiwa bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Secara persentase komposisi pekerjaan, sebanyak 63,95% penduduk usia >15 bekerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Selain itu sektor ini memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Seluma yaitu sebesar 47,04% pada tahun 2020. Adapun perkembangan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Seluma dalam kurun waktu 2016-2021 dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.60

Data Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian

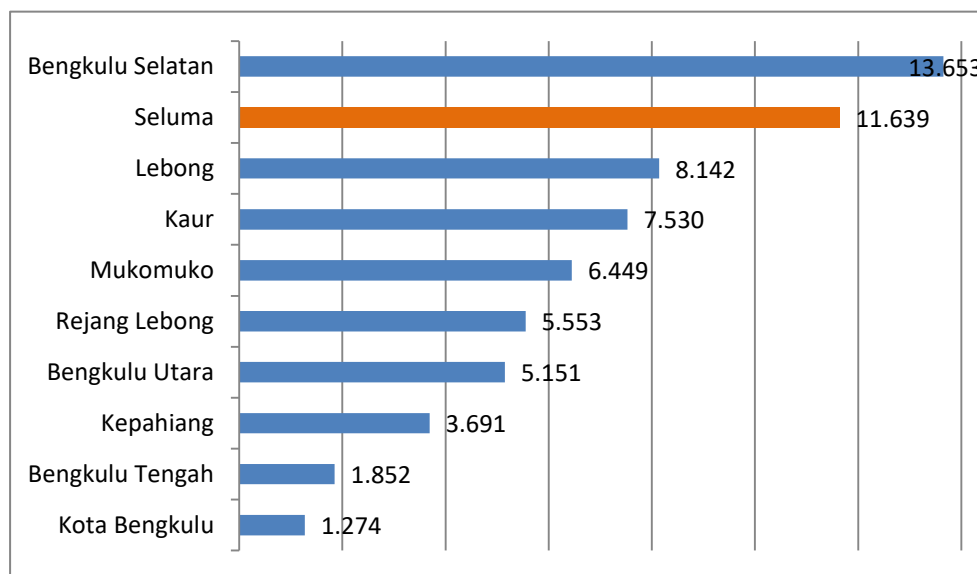
Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
- Produksi padi	Ton GKG	77,652	99,906	118,597	62,048	22,232
- Produksi jagung	TON PK	1,308	n/a	n/a	7,994	4,686
- Produksi cabai merah	Kwintal	1,763	5,697	7,715	3,251	4,153
- Produksi kopi	Ton	4,897	4,872	4,881	3,777	5,060
- Produksi karet	Ton	26,020	25,851	25,645	25,853	25,591
- Produksi Sawit	Ton	66,852	66,835	71,688	71,687	69,704
- Produksi Kelapa		1,320	1,332	8,986	914	1,446
- Jumlah populasi sapi	ekor	18,975	20,084	22,521	24,945	25,338
- Jumlah populasi kambing	ekor	110,113	127,686	145,038	50,775	50,750
- Jumlah populasi ayam broiler	ekor	744,522	760,737	750,712	1,868,990	1,866,082

Ketahanan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh ketahanan pangan. Daerah ketahanan pangan yang baik akan lebih bisa bertahan dalam menghadapi gejolak perekonomian terutama yang terkait dengan inflasi harga pangan. Kabupaten Seluma merupakan kabupaten di Provinsi Bengkulu yang

memiliki areal sawah menurut jenis pengairan yang terluas. Pada tahun 2020, tercatat seluas 11.639 hektar lahan sawah di Kabupaten Seluma yang diairi baik oleh irigasi, tadah hujan, pasang surut maupun lebak. Dengan luas panen padi yang terluas kedua di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Provinsi Bengkulu. Lebih jelas grafik dibawah ini akan menyajikan data luas panen padi menurut kabupaten/ kota di Provinsi Bengkulu.

Grafik 2.22

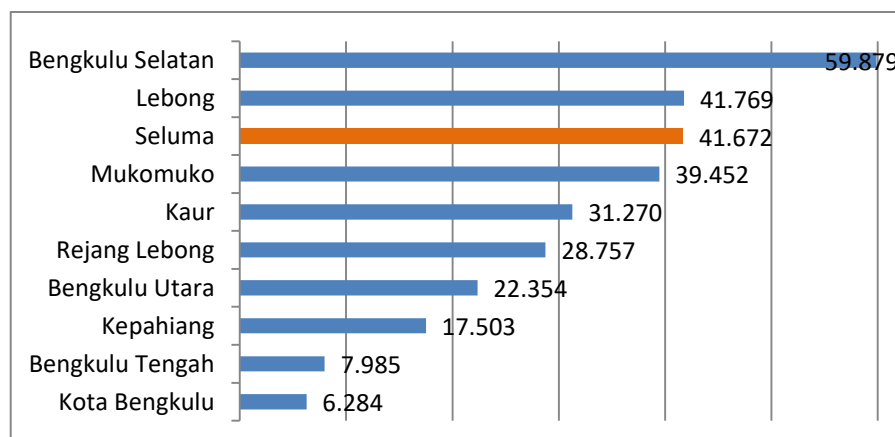
**Luas Panen Padi menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu (Ha)
Tahun 2020**



Pada tahun 2020, produksi padi di Kabupaten Seluma mencapai 41.672 ton yang menempatkannya di posisi ketiga sebagai kabupaten/ kota dengan jumlah produksi terbanyak di Provinsi Bengkulu.

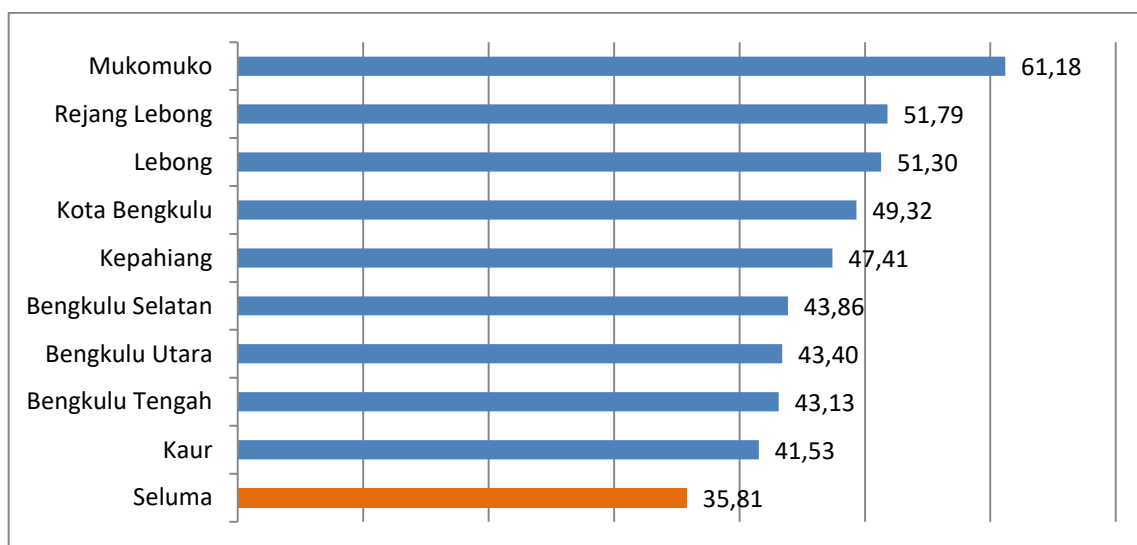
Grafik 2.23

Produksi Padi menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu (Ton)



Sementara itu, ditinjau dari produktivitas tanaman padi (ton/ha), Kabupaten Seluma menempati urutan terendah dari 10 Kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Bengkulu dengan kapasitas 35,81 ton/ha per tahun. Hal ini tentunya merupakan masalah sekaligus peluang bagi Kabupaten Seluma untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi sehingga dapat meningkatkan produksi padi di tahun-tahun mendatang.

Grafik 2.24
Produktivitas Tanaman Padi (ton/ ha) menurut kabupaten/ kota
di Provinsi Bengkulu



• Perindustrian

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah. Melalui sektor industri, barang mentah mendapatkan nilai tambah sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi pelakunya. Setiap wilayah memiliki potensi dan keunggulan sektoral yang menjadi basis perekonomian dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Adapun perkembangan kinerja urusan Perindustrian di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.61

Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2016-2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Industri Kecil Menengah	IKM	561	584	608	634	660

D. Pendukung Urusan Pemerintahan

• **Kesekretariatan Daerah**

Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan berbangsa dan bernegara. Indeks Reformasi birokrasi Kabupaten Seluma Tahun 2018 dengan nilai 46,1, tahun 2019 dengan nilai 36, 21 dan pada tahun 2020 dengan nilai 42,80.

Instrumen yang tidak terpisahkan dari masyarakat, karena dengan SAKIP akan menjadikan APBD lebih efektif, efisien, fokus, tepat sasaran, dan jelas berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Setelah APBD dijalankan secara efisien, tentunya yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat. Pada tahun 2017 sampai tahun 2018 Kabupaten Seluma masih berada pada nilai C dan kurun waktu 2018-2020 meningkat dengan nilai CC.

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 tahun. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah , dengan mengacu pada penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. LPPD yang dilaporkan sedapat mungkin menggambarkan kondisi nyata kinerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasai capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersbut. Perkembangan kinerja Kesetariatan Daerah Kurun Waktu 2016-2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.62

Perkembangan kinerja Kesetariatan Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	n/a	46,1	36,21	42,80
2.	Nilai SAKIP	n/a	41,92 (C)	46,48 (C)	58,74 (CC)	58,94 (CC)
3.	Nilai LPPD	2,7645 (tinggi)	2,5627 (tinggi)	2,6069 (tinggi)	2,8154 (sedang)	n/a

• Kesekretariatan DPRD

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu : Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dibantu Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Perkembangan kinerja urusan sekretariat DPRD di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.63

Jumlah Raperda yang Ditetapkan Menjadi Perda Kurun Waktu 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Raperda yang Ditetapkan Menjadi Perda	Perda	8	7	8	9	8

Dalam kurun waktu 2016-2020 terdapat beberapa Raperda yang ditetapkan menjadi Perda, yaitu sebanyak 40 Perda. Pada tahun 2016 terdapat 8 perda yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2017 terdapat 7 perda yang ditetapkan. Selanjutnya pada

tahun 2018 terdapat 8 perda yang ditetapkan. Setelah itu, pada tahun 2019 juga ditetapkan 9 Perda serta terdapat 8 Perda yang ditetapkan pada tahun 2020.

E. Penunjang Urusan Pemerintahan

• Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan prosesproses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (Planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan berjalan. Pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat dapat meningkat dalam jangka panjang. Jadi pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dengan menggunakan sumberdaya untu mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Oleh karena itu, perencanaan pembagunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Proses perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem tersebut merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat dari tingkat pusat sampai daerah.

Perkembangan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 .

Tabel 2.64

Kinerja Perencanaan Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perencanaan Kinerja	n/a	13,16	15,70	19,87	19,90
2.	Pengukuran Kinerja	n/a	8,71	10,42	12,92	12,97

• **Pengawasan**

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan". Tingkat maturitas pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diperoleh melalui proses penilaian SPIP. Kurun waktu tahun 2016-2020 tingkat maturasi SPIP masih berada pada level 2 (tingkat berkembang). Pada tingkat ini Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi.

Tingkat Kapabilitas APIP Kabupaten Seluma berada pada level dalam kurun waktu 2016-2020. Level 2 ini telah memiliki infrastruktur dan pedoman namun belum sesuai standar, mulai membangun kerangka kerja untuk melaksanakan praktik professional. Kedepannya pada periode RPJMD 2021-2026 ditargetkan tingkat maturasi SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP dapat berada di level 3.

Perkembangan kinerja urusan pengawasan Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.65

**Perkembangan kinerja urusan pengawasan Kabupaten Seluma
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Maturasi SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2

• **Keuangan**

Kabupaten Seluma dalam kurun waktu 2016-2020 opini terhadap laporan keuangan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini Kabupaten Seluma menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang

dikecualikan. Kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma berusaha dan berkomitmen untuk mewujudkan good governance.

Dari segi pendapatan, kabupaten seluma masih tergantung pada sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Secara umum Rasio Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 meningkat.

Tabel 2.66
Kinerja Urusan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Opini Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2.	Rasio PAD	3,34	6,02	6,51	2,68	7,36

Sumber : LRA Tahun 2016-2020, diolah

• **Kepegawaian**

Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Profesionalisme ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang ASN telah memenuhi kewajibannya berdasarkan tugas dan jabatannya. Pengukuran ini bermanfaat dilihat dari beberapa sudut pandang. Bagi Pemerintah, dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi hal ini dapat dilihat pada capaian kinerjanya. Bagi ASN sendiri, dapat digunakan sebagai pengembangan diri dalam rangka peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN dan bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya terhadap pelayanan publik yang diberikan pegawai tersebut.

Perkembangan kinerja urusan kepegawaian Kabupaten Seluma kurun waktu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.67

Perkembangan Kepegawaian Kabupaten Seluma Kurun Waktu 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Profesionalisme ASN	n/a	n/a	n/a	57, 83 (sangat Rendah)	n/a

Sumber : Evaluasi IP-ASN Kabupaten Seluma

• **Penelitian dan Pengembangan**

Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi. Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai landasan kinerja pembangunan berbasis inovasi. SIDa merupakan kerangka membangun sinergi antar pihak pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan segenap pemangku kepentingan terkait dalam pendayagunaan lptek dan inovasi dalam pembangunan daerah. Pada Tahun 2019 Kabupaten Seluma sebagai Kabupaten Sangat Inovatif dengan nilai 1.430 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 002.6-115 tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sebagai Kabupaten Sangat Inovatif dengan nilai 2.675 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 100-4672 tahun 2020.

Tabel 2.68

Perkembangan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Seluma

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Inovasi Daerah	n/a	n/a	n/a	1.430 (sangat Inovatif)	2,675 (sangat inovatif)

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Keterkaitan antara daya saing daerah dan kemampuan ekonomi daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan dampak bagi peningkatan daya saing daerah. Indikator yang mengukur Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah diwakili oleh indikator-indikator sebagai berikut :

- **Pengeluaran Per Kapita**

Pengeluaran per kapita dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran per kapita didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

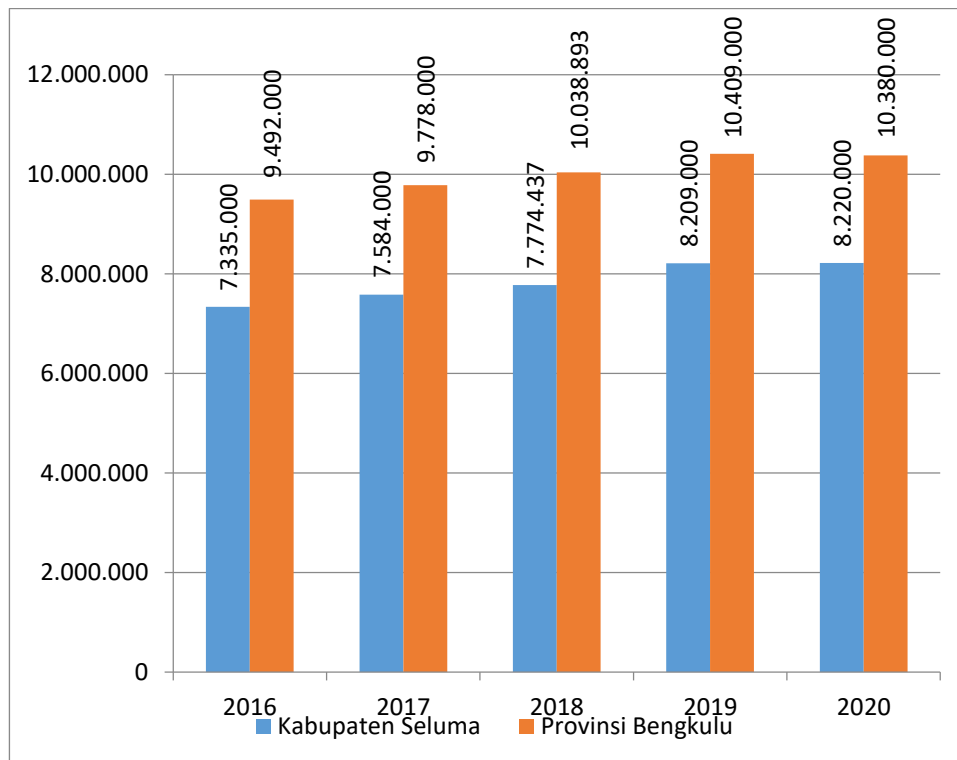
Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan.

Dari segi Pengeluaran per Kapita Kabupaten Seluma, sebagaimana diperlihatkan dalam grafik dibawah ini, terjadi peningkatan dari 7,33 juta pada tahun 2016 menjadi 8,22 juta pada tahun 2020. Namun demikian, Pengeluaran per Kapita Kabupaten Seluma selalu berada dibawah rata-rata Pengeluaran per Kapita Provinsi Bengkulu yang telah mencapai 10,38 juta pada tahun 2020.

Grafik 2.25

Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 (Rupiah)



• Fokus Iklim Investasi

Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi. Tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup (Asian Development Bank, 2005):

1. Kondisi ekonomi makro termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.
2. Kepemerintahan dan kelembagaan termasuk kejelasan dan efektivitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil.
3. Infrastruktur mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Selanjutnya menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Asia Foundation (2009), terkait dengan daya tarik investasi di suatu daerah, ada beberapa faktor dan variabel penentu daya tarik tersebut yaitu:



1. Faktor kelembagaan (kepastian hukum, keuangan daerah, aparatur: wewenang dan pelayanan, perda). (
2. Faktor sosial politik (sospol: stabilitas politik, konflik masyarakat, unjuk rasa, partisipasi masyarakat, keamanan, dan budaya).
3. Faktor ekonomi daerah (potensi ekonomi dan struktur ekonomi).
4. Faktor tenaga kerja dan produktivitas (biaya tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja, dan produktivitas tenaga kerja)
5. Faktor infrastruktur fisik (ketersediaan: pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan, telepon, dan listrik dan kualitas)

Pada tahun 2020, nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Seluma mencapai angka 1,35 juta dolar atau setara +/- 18,9 Milyar Rupiah (kurs Rp,14,000/dolar). Total proyek investasi di Kabupaten Seluma sebanyak 4 proyek. Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan yang merupakan sektor primer merupakan sektor tertinggi PMA.

Tabel 2.69

Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Berdasarkan Sektor Tahun 2016-2020

PMA	2016		2017		2018		2019		2020	
	Pro-yek	Investasi (US\$. Ribu)	Pro-yek	Investasi (US\$. Ribu)	Pro-yek	Investasi (US\$. Ribu)	Pro-yek	Investasi (US\$. Ribu)	Pro-yek	Investasi (US\$. Ribu)
Sektor Primer										
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	4	1448	2	5,089.4	1	114.8	1	0	1	31.6
Pertambangan	4	52.4	1	5.2	1	0.0	1	0	1	0,0
Total(Sektor)	6	1,500.4	3	5,094.6	2	114.8	2	0.0	2	31.6
Sektor Sekunder										
Industri Makanan	4	0.0	2	0.0	1	0.0	2	30.4	2	1316.1
Total(Sektor)	4	0.0	2	0.0	1	0.0	2	30.4	2	1,316.1
JUMLAH	12	1,500.4	5	5094,6	3	114.8	4	30.4	4	1,347.7

Sementara itu, untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dirangkum dalam tabel dibawah ini, dalam kurun waktu 2018-2020 angka tertinggi investasi di Kabupaten terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 1,26 Triliun Rupiah. Pada tahun 2020, investasi menurun menjadi 934,8 Milyar Rupiah. Sebagaimana

halnya PMA, sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan merupakan sektor tertinggi yang mendapatkan investasi.

Tabel 2.70

Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Berdasarkan Sektor Tahun 2016-2020

PMDN		2018		2019		2020	
		Proyek	Investasi (Rp.Juta)	Proyek	Investasi (Rp.Juta)	Proyek	Investasi (Rp.Juta)
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan			2	1,074,810.8	14	851377.9
	Perikanan			1	0	0	0
	Total(Sektor)			3	1,074,810.8	14	851,377.9
Sektor Sekunder	Industri Makanan			1	175645.0	6	44046.9
	Industri Karet dan Plastik					3	782.2
	Total(Sektor)			1	175,645.0	9	44,829.1
Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	1	25,679.7	1	10,438.9	5	38,618.4
	Total(Sektor)	1	25,679.7	1	10,438.9	5	38,618.4
Total		1	25,679.7	5	1,260,894.7	28	934,825.4

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Berikut ini adalah Tabel Angka Kriminalitas di Kabupaten Seluma dalam kurun waktu 2016-2021. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa angka kriminalitas menurun dari 161.9 kasus per 100.000 pada tahun 2016 menjadi 66,9 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2020.

Tabel 2.71

Angka Kriminalitas Tahun 2016-2020

Aspek Kriminal	2016	2017	2018	2019	2019
Kejahatan yang dilaporkan	304	164	253	153	139
Jumlah Penduduk	187,807	189,874	191,907	193,892	207,877
Angka Kriminalitas per 100.000 penduduk	161.9	86.4	131.8	78.9	66.9

Perkembangan Fokus Iklim Investasi di Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.72

Perkembangan indikator terkait fokus iklim investai

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pertumbuhan investasi	%	n/a	239.55	-61.74	4522.44	-24.39
Angka Kriminalitas	per 100.000 penduduk	161.9	86.4	131.8	78.9	66.9

• **Fokus Sumber Daya Manusia**

Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Tabel 2.73

Perkembangan Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	20	128	192	448	256
Persentase Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas	%	n/a	27.50	27.88	33.80	34.25



Adapun rincian jumlah tenaga kerja yang dilatih di Balai Latihan Kerja Kabupaten Seluma periode 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.74
Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih

NO	TAHUN	KEJURUAN	JUMLAH	JUMLAH PESERTA		TOTAL
				LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
1	2015	-	-	-	-	
2	2016	Menjahit	1	-	20	20
3	2017	Menjahit	6	-	96	96
		Otomotif	2	32	-	32
4	2018	Menjahit	4	-	64	64
		Otomotif	4	63	1	64
		Meubelair	2	32	-	32
		Computer	2	5	27	32
5	2019	Menjahit	11	175	1	176
		Otomotif	2	32	-	32
		Meubelair	3	29	3	32
		Tata Kecantikan	2	5	43	48
		Teknologi Informasi dan Komunikasi	10	71	89	160
6	2020	Menjahit	5	4	76	80
		Meubelair	1	16	-	16
		Tata Kecantikan	5	-	80	80
		Teknologi Informasi dan Komunikasi	5	32	48	80
Jumlah			65	496	548	1044



2.2 HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA TAHUN 2016-2020

Tabel 2.75

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Perbandingan Capaian	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1.1	Pertumbuhan PDRB	%	5,02	5,01	4,8	4,95	-0,01	Pertumbuhan ekonomi Provinsi -0,02	Baik
1.1.2	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp	3,502,438	3,840,998.10	4,215,214.35	4,613,171.16	4,743,637	Masih dibawah rata-rata Provinsi	Baik
1.1.3	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp	2,490,699	2,610,517.22	2,735,842.65	2,870,668.33	2,870,324.63	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
1.1.4	Laju Inflasi	%	n/a	2.87	3.4	0.45	1.2	Inflasi nasional 1,38 persen (2020)	Baik
1.1.5	Indeks Gini	Nilai	n/a	n/a	0.31	0.30	0.29	Indeks Gini Provinsi Bengkulu 0,323 (2020)	Baik
1.1.6	Persentase Penduduk Miskin	%	21.68	20.73	19.60	19.10	18.56	15,03% (2020) Provinsi Bengkulu	Kurang
1.1.7	Indeks Pembangunan Manusia	%	64.04	65.00	65.75	66.69	66.89	71,40 (2020) Provinsi Bengkulu	Kurang
1.1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	n/a	3.22	2.95	2.23	3.04	4,07% (Agustus 2020) Provinsi	Baik

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Perbandingan Capaian	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
								Bengkulu	
1.2	Kesejahteraan Sosial								
1.2.1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.37	8.47	8.61	8.73	8.84	8,48 (2020) Indonesia, Provinsi Bengkulu 8,84	Baik
1.3.5	Angka melek huruf	%	n/a	96.22	97,26	97,27	97,11	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2	Aspek Pelayanan Umum								
2.1	Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
2.1.1	<i>Pendidikan Dasar</i>								
	- APS Penduduk Umur 7-12	%	n.a.	99,57	100,00	99,82	99,99	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- APS Penduduk Umur 13-15	%	92.62	94.48	96.47	96,84	95,99	Semakin meningkat, semakin baik	
	- APM SD	%	92.4	95.1	94.8	94.6	95.5	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- APM SMP	%	74.3	76.2	80.3	81.8	81.5	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- APK SD	%	112.21	107.89	107,03	105,72	105.93	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- APK SMP	%	99.07	97.79	104.1	98.64	100,02	Semakin meningkat, semakin baik	Baik

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Perbandingan Capaian	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Rasio Kelas terhadap Rombel SD	Angka	n.a.	1 : 0.95	1 : 1.02	1 : 1.02	1 : 0.90	Semakin seimbang, semakin baik	Baik
	- Rasio Kelas terhadap Rombel SMP	Angka	n.a.	1 : 0.73	1 : 0.73	1 : 0.94	1 : 0.81	Semakin seimbang, semakin baik	Baik
	- Rasio Guru terhadap Murid SD	Angka	1 : 18	1 : 14	1 : 14	1 : 12	1 : 12	Semakin seimbang, semakin baik	Baik
	- Rasio Guru terhadap Murid SMP	Angka	1 : 14	1 : 13	1 : 13	1 : 12	1 : 11	Semakin seimbang, semakin baik	Baik
	- Murid Putus Sekolah SD	Siswa	8	34	172	28	205	Semakin menurun, semakin baik	Kurang
	- Murid Putus Sekolah SMP	Siswa	18	119	117	24	216	Semakin menurun, semakin baik	Kurang
	- Guru SD yang sudah sertifikasi	%	n.a.	37.96	44.65	52.53	55.16	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Guru SMP yang sudah sertifikasi	%	n.a.	30.78	36.21	42.60	44.73	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Angka Harapan Lama Sekolah	%	12.60	12.94	13.18	13.27	13.28	12,98 tahun (Harapan Lama Sekolah nasional, 2020) dan 13,61 Tingkat Provinsi	Baik
	- Persentase SD yang sudah terakreditasi (A dan B)	%	47.80	48.90	49.45	50.55	51.10	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Persentase SMP yang sudah terakreditasi (A dan B)	%	42.55	48.94	51.06	53.19	55.32	Semakin meningkat, semakin baik	Baik

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Perbandingan Capaian	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.2	Kesehatan								
	- AKB	Nilai	12.28	11.38	23.76	4.12	6.17	Semakin menurun semakin baik	Baik
	- AKI	Nilai	179.75	149.79	154.89	117.82	123.49	Semakin menurun semakin baik	Cukup
	- Angka Harapan Hidup	Tahun	66.77	66.85	66.97	67.56	67.75	71,47 (Angka Harapan Hidup Indonesia, 2020), Provinsi Bengkulu 69,35	Cukup
	- Persentase Stunting	%	n.a.	n.a.	12.07	9.63	6.18	27,67 (Stunting Indonesia, 2019), Provinsi Bengkulu 26,86	Cukup
	- Jumlah Puskesmas	Unit	22	22	22	22	22	4 puskesmas perawatan	Baik
	- Jumlah Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	1	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Jumlah Rumah Sakit yang sudah akreditasi	Unit	1	1	1	1	1	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	- Persentase jalan kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap	%	28.54	30.05	31.63	33.29	36.99	Semakin meningkat, semakin baik	Kurang
	- Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap	%	40.38	42.50	44.74	47.09	49.57	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Perbandingan Capaian	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	16.67	17.73	33.63	35.29	37.54	Semakin meningkat, semakin baik	Kurang
	- Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	18.49	19.46	24.56	28.89	36.46	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
2.1.4	<i>Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>								
	- Persentase Rumah Tangga yang menempati RLH	%	n/a	n/a	42.57	88.24	90.29	59,54 (Nasional, 2020)	Cukup
	- Luasan areal kawasan kumuh	%							Cukup
2.1.5	<i>Kentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>								
	- Persentase Penanganan kasus pelanggaran Perda/Perbup	%	15	15	25	25	30	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	n/a	n/a	14.29	21.43	28.57	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.1.6	<i>Sosial</i>								
	- Persentase PMKS yang ditangani	%	n/a	57.76	58.24	55.73	n/a	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Indeks Resiko Bencana	Nilai	167.38	164.33	162.2	154.08	n/a	Semakin rendah, semakin baik	Kurang
2.2	Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
2.2.1	<i>Ketenagakerjaan</i>								

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Perbandingan Capaian	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	n/a	76.7	71.79	73.99	76.45	67,26 (TPAK Indonesia 2018), Provinsi Bengkulu 78.83 (2020)	Baik
2.2.2	<i>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>								
	- IPG	%	n/a	85.2	85.28	85.32	85.65	91,06 (IPG Indonesia 2020), Provinsi Bengkulu 91 (2020)	Cukup
	- IDG		n/a	65.15	61.95	66.69	65.6	75,57 (IDG Indonesia 2020), Provinsi Bengkulu 70,48 (2020)	Cukup
	- Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	kasus	n/a	116	66	46	51	Semakin menurun, semakin baik	Baik
	- Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan	kasus	n/a	41	30	10	31	Semakin menurun, semakin baik	Baik
	- Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak	kasus	n/a	75	36	36	20	Semakin menurun, semakin baik	Baik
2.2.3	<i>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>								
	- TFR	Angka	n/a	n/a	n/a	2.42	2.42	2,1 (standar TFR Nasional)	Cukup
	- Unmet Need KB	%	n/a	n/a	n/a	6.77	5.59	10,5 (Unmet Need KB Nasional)	Baik

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Perbandingan Capaian	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR	%	82.12	80.63	72.9	73.79	74.19	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
2.2.4	<i>Lingkungan Hidup</i>								
	- Indeks Kualitas Udara	Angka	n/a	n/a	94,93	91.37	92.09	Semakin meningkat, semakin baik, Provinsi Bengkulu 90,52	Baik
2.2.5	<i>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</i>								
	- Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	83.03	91.76	86.73	98.8	99.17	Provinsi Bengkulu, 99,9 (2020)	Baik
	- Persentase penduduk usia anak yang memiliki KIA	%	19,41	36.39	49.95	88.35	94.54	Provinsi Bengkulu, 49,5 (2020)	Baik
	- Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran (Usia 0-18 trahun)	%	95.71	99.38	92.23	99.35	96.83	Provinsi Bengkulu, 97,83 (2020)	Baik
2.2.6	<i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>								
	- Indeks Desa Membangun	Nilai	n/a	n/a	0.5811	0.6104	0.6235	0,566 (rata-rata nasional), 0.6417 (Provinsi Bengkulu, 2020)	Baik
	- Jumlah Desa Tertinggal	Desa	n/a	n/a	94	75	54	Semakin menurun, semakin baik	Baik
	- Jumlah Desa Sangat Tertinggal	Desa	n/a	n/a	16	4	3	Semakin menurun, semakin baik	Baik

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Perbandingan Capaian	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.7	<i>Komunikasi dan Informasi</i>								
	- Indeks SPBE	Nilai	n/a	n/a	n/a	1.9 (kurang)	n/a	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.2.8	<i>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>								
	- Jumlah UMKM	UMKM	2,912	3,235	3,595	3,994	n/a	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Jumlah Koperasi Aktif dan bersertifikat NIK	Koperasi	n/a	127	141	144	n/a	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Volume Usaha Koperasi	Rupiah	n/a	30,010,559,715	33,345,066,350	34,011,967,677	n/a	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.2.9	<i>Penanaman Modal</i>								
	- Indeks Kepuasan Masyarakat bidang perizinan	Nilai	80.38	83.04	77.52	79.64	79.87	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Nilai Investasi	Milyar Rupiah	21.01	71.32	27.29	1261.32	953.69	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Penanaman Modal Asing	Milyar Rupiah	21.01	71.32	1.61	0.43	18.87		
	- Penanaman Modal Dalam Negeri	Milyar Rupiah	n/a	n/a	25.68	1260.89	934.83		
2.2.10	<i>Kepemudaan dan Olahraga</i>								
	- Jumlah Nomor Lomba Olahraga yang dimenangkan tingkat nasional	Nomor	0	0	0	1	n/a	Semakin meningkat, semakin baik	Baik

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Perbandingan Capaian	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.11	Kebudayaan								
	- Persentase Sanggar seni/keompok seni yang dibina (%)	%	n/a	n/a	18.74	19.94	21.67	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.3	Pelayanan Urusan Pilihan								
2.3.1	Kelautan dan Perikanan								
	- Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2011	n/a	2121	2010	1794	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
	- Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3135	3,550	3,601	3,651	3933	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
	- Jumlah Nelayan Tangkap	Orang	n/a	n/a	1557	1589	1621	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Jumlah Pembudidaya Ikan	Orang	n/a	n/a	1515	1545	1577	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.3.2	Pariwisata								
	- Jumlah wisatawan	orang	n/a	n/a	16,875	22,500	30,000	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
2.3.3	Pertanian								
	- Produksi padi	Ton GKG	77,652	99,906	118,597	62,048	22,232	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
	- Produksi jagung	TON PK	1,308	n/a	n/a	7,994	4,686	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Produksi cabai merah	Kwintal	1,763	5,697	7,715	3,251	4,153	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Perbandingan Capaian	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Produksi kopi	Ton	4,897	4,872	4,881	3,777	5,060	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Produksi karet	Ton	26,020	25,851	25,645	25,853	25,591	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Produksi Sawit	Ton	66,852	66,835	71,688	71,687	69,704	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Produksi Kelapa		1,320	1,332	8,986	914	1,446		
	- Jumlah populasi sapi	ekor	18,975	20,084	22,521	24,945	25,338	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Jumlah populasi kambing	ekor	110,113	127,686	145,038	50,775	50,750	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Jumlah populasi ayam broiler	ekor	744,522	760,737	750,712	1,868,990	1,866,082	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
	- Jumlah populasi ayam kampung	ekor	999,591	1,074,822	1,229,450	954,831	955,880	Semakin meningkat, semakin baik	
2.3.4	<i>Perindustrian</i>								
	- Jumlah Industri Kecil Menengah	IKM	561	584	608	634	660	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.4	Pendukung Urusan Pemerintahan								
2.4.1	<i>Kesekretariatan Daerah</i>								
	- Nilai SAKIP	Angka	n/a	41,92 (C)	46,48 (C)	58,74 (CC)	58,94 (CC)	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
	- Nilai LPPD	Angka	2,7645 (tinggi)	2,5627 (tinggi)	2,6069 (tinggi)	2,8154 (sedang)	n/a	Semakin meningkat, semakin baik	Baik

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Perbandingan Capaian	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	n/a	n/a	46,1	36,21	42,80	60,00 (katagori B)	Kurang
2.4.2	Kesekretariatan DPRD								
	- Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	Raperda	8	7	8	9	8	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.5	Penunjang Urusan Pemerintahan								
2.5.1	Perencanaan								
	- Nilai Perencanaan Kinerja	Angka	n/a	13,16	15,70	19,87	19,90	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
	- Nilai Pengukuran Kinerja	Angka	n/a	8,71	10,42	12,92	12,97	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
2.5.2	Pengawasan								
	- Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.5.3	Keuangan								
	- Opini Laporan Keuangan	Predikat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP		Cukup
	- Nilai PAD	Rupiah	3,34	6,02	6,51	2,68	7,36	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
2.5.4	Kepegawaian								
	- Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	n/a	n/a	n/a	57, 83 (sangat Rendah)	n/a	81-90 (tinggi)	Kurang
2.5.5	Penelitian dan								

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Perbandingan Capaian	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	<i>Pengembangan</i>								
	- Nilai Indeks Inovasi Daerah	Nilai	n/a	n/a	n/a	1.430 (sangat Inovatif)	2,675 (sangat inovatif)	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.5.6	<i>Kesatuan Bangsa dan Politik</i>								
	- Jumlah konflik di Kabupaten Seluma	Nilai	0	0	0	0	0	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
3	Aspek Daya Saing Daerah								
3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
	- Pengeluaran per Kapita	x 000 rupiah	7,335	7,584	7,774	8,209	8,220	11.013 (Nasional, 2020), Provinsi Bengkulu 10380	Kurang
3.2	Fokus Iklim Investasi								
	- Persentase pertumbuhan investasi	%	n/a	239.55	-61.74	4522.44	-24.39	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Angka Kriminalitas	per 100.000 penduduk	161.9	86.4	131.8	78.9	66.9	Semakin menurun, semakin baik	Baik
3.3	Fokus Sumber Daya Manusia								
	- Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	20	128	192	448	256	Semakin meningkat, semakin baik	Baik

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Perbandingan Capaian	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Persentase Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas	%	n/a	27.50	27.88	33.80	34.25	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup



2.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kabupaten Seluma dalam mendukung pencapaian *goals* SDG's dengan melibatkan banyak aspek pada tahun 2018 telah merampungkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Seluma yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021 (RAD-TBP/SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs).

Analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapai Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017. Implementasi TPB/SDGs di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan pengembangan indikator TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Penilaian dan analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Seluma dikategorikan dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target
3. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA
4. Indikator TPB yang bukan kewenangan

Pemetaan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Kabupaten Seluma didasarkan pada metadata tujuan pembangunan berkelanjutan nasional, metadata tujuan pembangunan berkelanjutan Propinsi Bengkulu, selanjutnya metadata tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Seluma, disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.76

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Seluma Tahun 2020

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
1	Tujuan TPB 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun						
1.2.	Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.2.1.	Persentase Kemiskinan	Badan Pusat Statistik Seluma	%	8.00	18.56	-10.56	2
1.3.	Target Global : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1.(a)	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan Seluma	%	95.00	71.99	-23.01	2
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Dinas Sosial Seluma	%	17.12	5.00	-12.12	2
1.3.1.(d)	Jumlah orang yang Menerima Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial (orang)	Dinas Sosial Seluma	Orang	-	100.00	-	1
1.4.	Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
1.4.1.(a)	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Seluma	%	70.00	87.70	17.70	1
1.4.1.(b)	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Dinas Kesehatan Seluma	%	63.00	67.04	4.04	1
1.4.1.(c)	Persentase Rasio Akseptor KB	Dinas P3APKB Seluma	%	65.00	75.35	10.35	1
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga berakses air bersih	Dinas PUPR Seluma	%	100.00	37.54	-62.46	2
1.4.1.(e)	Persentase Akses sanitasi layak	Dinas PUPR Seluma	%	100.00	36.46	-63.54	2
1.4.1.(g)	Angka partisipasi murni (APM) SD	Badan Pusat Statistik Seluma	%	94.78	95.50	0.72	1
1.4.1.(h)	Angka partisipasi murni (APM) SLTP	Badan Pusat Statistik Seluma	%	82.20	81.50	-0.70	2
1.4.1.(j)	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seluma	%	77.40	96.83	19.43	1



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
1.4.1.(k)	Rasio Elektrifikasi	Badan Pusat Statistik Seluma	%	100.00	97.54	-2.46	2
1.5.	Target Global : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
1.5.1.(a)	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	BPBD	Desa	meningkat	14.00	-	1
1.5.1.(b)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina, direhab, dan dilayani	Dinas Sosial Seluma	Orang	meningkat	15.00	-	1
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana Alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	BPBD	Orang	meningkat	15	-	1
1.5.1.(e)	Indeks Resiko Bencana	BPBD	nilai	118.60	154.08	-35.48	2
2	Tujuan TPB 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan						
2.1.	Target Global : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
2.1.1.(a)	Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang	Dinas Kesehatan Seluma	%	17.00	1.92	15.08	1



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
2.2.	Target Global : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
2.2.2.(c)	Nilai Skor PPH	Dinas Ketahanan Pangan	nilai	92.50	82.70	-9.80	2
2.2.1.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	Dinas Kesehatan Seluma	%	28.00	6.42	21.58	1
2.2.2.(a)	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet FE	Dinas Kesehatan Seluma	%	-	100.00	-	1
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Badan Pusat Statistik Seluma	%	50.00	95.44	45.44	1
3	Tujuan TPB 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia						
3.1.	Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan Seluma	%	85.00	68.85	-16.15	2
3.1.1.	Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Seluma	per 100.000 kelahiran hidup	306.00	123.49	182.51	1



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
3.1.2.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan Seluma	%	95.00	96.22	1.22	1
3.2.	Target Global : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.						
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Seluma	per 1000 kelahiran hidup	24.00	6.17	17.83	1
3.2.2.(b)	Persentase kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan Seluma	%	95.00	78.57	-16.43	2
3.2.1.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Seluma	per 1000 kelahiran hidup	29.50	26.00	3.50	1
3.2.2.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan Seluma	per 1000 kelahiran hidup	13.50	11.15	2.35	1
3.3.	Target Global : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV	Dinas Kesehatan Seluma	%	<0.5	N.A	-	3

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
3.3.2.(a)	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan Seluma	per 100.000 penduduk	245.00	57.42	187.58	1
3.3.3	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan Seluma	Kejadian per 1000 orang	300.00	0.63	299.37	1
3.3.3.(a)	Jumlah desa mencapai eliminasi malaria (desa)	Dinas Kesehatan Seluma	Desa	-	39.00	-	1
3.3.4.(a)	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan Seluma	%	80.00	N.A	n.a.	3
3.3.5.(a)	Jumlah Kecamatan Tidak Ditemukan Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	Dinas Kesehatan Seluma	Kecamatan	-	11.00	-	1
3.3.5.(b)	Jumlah kecamatan dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan Seluma	Kecamatan	-	14.00	-	1
3.3.5.	Jumlah Kasus Kusta + Angka Kesakitan Filariasis	Dinas Kesehatan Seluma	Kasus	-	3.00	-	1
3.4.	Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
3.4.1.(b)	Persentase Penderita Penyakit Hipertensi Usia > 18 Th (%) yg mendapat pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan Seluma	%	24.30	34.36	10.06	1
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan Seluma	%	15.40	4.80	10.60	1
3.4.2.(a)	Jumlah Kecamatan yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan Seluma	Kecamatan	-	10.00	-	1
3.7.	Target Global : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas P3APPKB Seluma	%	98.45	98.29	-0.16	2
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas P3APPKB Seluma	%	66.00	75.35	9.35	1
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Dinas P3APPKB Seluma	%	23.50	12.91	-10.59	2
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas P3APPKB Seluma	%	2.28	2.34	-0.06	2

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
3.7.2.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas P3APKB Seluma	%	38.00	(blank)	n.a.	3
3.8.	Target Global : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan Seluma	%	95.00	71.99	-23.01	2
3.8.2.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Dinas Kesehatan Seluma	Jiwa	779.00	719.90	-59.10	2
3.a.	Target Global : Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat						
3.a.1.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Badan Pusat Statistik Seluma	%	22.54	26.33	-3.79	2
3.b.	Target Global : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua						

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan Seluma	%	90.00	90.91	0.91	1
3.c.	Target Global : Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.						
3.c.1.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan Seluma	(blank)	0.23	0.06	-0.17	2
3.5.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.						
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan Seluma	%	0.02	n.a.	-	3
4	Tujuan TPB 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua						
4.1.	Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
4.1.1.(a)	Persentase SD yang ter-akreditasi	Dinas Pendidikan Seluma	%	84.20	51.10	-33.10	2
4.1.1.(b)	Persentase SLTP yang ter-akreditasi	Dinas Pendidikan Seluma	%	81.00	55.32	-25.68	2



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Badan Pusat Statistik Seluma	%	114.09	105.93	-8.16	2
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Badan Pusat Statistik Seluma	%	106.94	100.02	-6.92	2
4.1.1.(g)	Angka Rata-rata Lama sekolah	Dinas Pendidikan Seluma	%	8.80	7.99	-0.81	2
4.2.	Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.						
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Badan Pusat Statistik Seluma	%	77.20	21.67	-55.53	2
4.5.	Target Global : Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.						
4.5.1.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat;	Badan Pusat Statistik Seluma	(blank)	1.00	0.94	-0.06	2
4.6.	Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Badan Pusat Statistik Seluma	%	96.10	97.05	0.95	1
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	Badan Pusat Statistik Seluma	%	99.54	100.00	0.46	1
4.a.	Target Global : Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.						
4.a.1.	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Dinas Pendidikan Seluma	(blank)	60.33	60.28	-0.05	2
4.c.	Target Global : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.						
4.c.1.	Persentase Guru SD dan SMP Tersertifikasi	Dinas Pendidikan Seluma	%	77.20	49.94	-27.26	2
5	Tujuan TPB 5 : Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan						
5.2.	Target Global : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
5.2.1.(a)	Jumlah kekerasan terhadap anak	Dinas P3APPKB Seluma	Kasus	menurun	36.00	-	1
5.2.2.(a)	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	Dinas P3APPKB Seluma	%	70.00	64.75	-5.25	2
5.5.	Target Global : Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						
5.5.1.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Sekretariat Dewan Kabupaten Seluma	%	meningkat	13.33	-	1
5.5.2.	Persentase perempuan yang duduk di jabatan publik	BPSDM Kabupaten Seluma	%	meningkat	5.66	-	1
5.6.	Target Global : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.						
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas P3APPKB Seluma	%	9.91	5.59	4.32	1
5.b.	Target Global : Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan						



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
5.b.1.	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Badan Pusat Statistik Seluma	%	54.31	52.92	-1.39	2
5.1.	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun						
5.1.1.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas P3APKB Seluma	kebijakan	-	-	-	2
6	Tujuan TPB 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua						
6.1.	Target Global : Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga berakses air bersih	Dinas PUPR Seluma	%	82.74	37.54	-45.20	2
6.2.	Target Global : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
6.2.1.(b)	Persentase Akses sanitasi layak	Dinas PUPR Seluma	%	73.83	36.46	-37.37	2
6.2.1.(c)	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan Seluma	Desa	meningkat	32.00	-	1



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
6.2.1.(d)	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan Seluma	Desa	-	32	-	1
6.3.	Target Global : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.						
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas PUPR Seluma	%	0.32	2.83	2.51	1
6.3.2.(b)	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup Seluma	nilai	-	n/a	n.a.	3
7	Tujuan TPB 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua						
7.1.	Target Global : Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.						
7.1.1.	Rasio Elektrifikasi	Badan Pusat Statistik Seluma	%	96.60	97.54	0.94	4
8	Tujuan TPB 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua						
8.1.	Target Global : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.						



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	Badan Pusat Statistik Seluma	Juta Rupiah	50.00	4.74		-45.26
8.1.1.	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	Badan Pusat Statistik Seluma	%	4.10	2.75		-1.35
8.3.	Target Global : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Badan Pusat Statistik Seluma	%	50.00	21.43		-28.57
8.3.1.(c)	Persentase Pertumbuhan Kelompok Usaha Baru (KUB)/Wira Usaha Baru (WUB)	Dinas Koperasi dan UKM	%	17.80	8.47		-9.33
8.3.1.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Badan Pusat Statistik Seluma	%	44.67	37.43		7.24
8.5.	Target Global : Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	Badan Pusat Statistik Seluma	%	7.55	27.21		-19.66



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
8.5.2.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik Seluma	%	5.20	3.04		2.16
8.6.	Target Global : Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.						
8.6.1.	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	Badan Pusat Statistik Seluma	%	21.81	35.44		-13.63
8.9.	Target Global : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Disarpورا	Orang	meningkat	30000.00		-
9	Tujuan TPB 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi						
9.1.	Target Global : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						
9.1.1.(a)	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik/sedang	Dinas PUPR Seluma	%	98.00	36.99	-61.01	2



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
9.2.	Target Global : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas.	Badan Pusat Statistik Seluma	%	4.30	-3.33	-7.63	2
9.c.	Target Global : Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.						
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Badan Pusat Statistik Seluma	%	53.73	34.88	-18.85	2
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Badan Pusat Statistik Seluma	%	54.31	52.92	-1.39	2
10	Tujuan TPB 10 : Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara						
10.1.	Target Global : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
10.1.1.(a)	Persentase Kemiskinan	Badan Pusat Statistik Seluma	%	8.00	18.56	-10.56	2
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seluma	Desa	menurun	54.00	-	1



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seluma	Desa	meningkat	0.00	-	1
10.1.1.	Koefisien Gini	Badan Pusat Statistik Seluma	nilai	0.36	0.29	0.07	1
11	Tujuan TPB 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan						
11.1.	Target Global : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh						
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Badan Pusat Statistik Seluma	%	59.54	90.29	30.75	1
11.5.	Target Global : Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.						
11.5.1.(b)	Jumlah desa tangguh bencana	BPBD Seluma	Desa	(blank)	14.00	-	1
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD Seluma	unit	ada	2.00	-	1
11.6.	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.						



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup Seluma	%	80.00	(blank)	n.a.	3
11.b.	Target Global : Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.						
11.b.2.	Jumlah Dokumen Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	BPBD Seluma	Dokumen	(blank)	1	-	1
12	Tujuan TPB 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan						
12.4.	Target Global : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.						
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas Lingkungan Hidup Seluma	Kali	meningkat	15	-	1
13	Tujuan TPB 13 : Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan Dampaknya						
13.1.	Target Global : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.						
13.1.1.	Tersedianya Dokumen Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	BPBD Seluma	Dokumen	ada	ada	-	1



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
14	Tujuan TPB 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan						
14.b.	Target Global : Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.						
14.b.1.(a)	Jumlah nelayan yang difasilitasi akses permodalan	Dinas Kelautan dan Perikanan Seluma	Orang	(blank)	50.00	-	1
14.b.1.(b)	jumlah nelayan yang mendapatkan asuransi Nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan Seluma	Orang	(blank)	50	-	1
15	Tujuan TPB 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, mengelola Bhutan Secara lestari, Menghentikan Penggurunan, memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keragaman Hayati						
15.9.	Target Global : Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.						
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dinas Lingkungan Hidup Seluma	%	-	n/a	-	3
16	Tujuan TPB 16 : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif di Semua Tingkatan						
16.1.	Target Global : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.						

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
16.1.3.(a).	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Polres Seluma	%	1.00	0.07	0.93	1
16.10.	Target Global : Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.						
16.10.1.(b)	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan	Dinas P3APPKB Seluma	%	70.00	64.75	-5.25	2
16.2.	Target Global : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.						
16.2.1.(b)	Jumlah kekerasan terhadap anak	Dinas P3APPKB Seluma	Kasus	menurun	36.00	-	1
16.6.	Target Global : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.						
16.6.1.(a)	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	predikat	WTP	WDP	-	2
16.6.1.(b)	Persentase SKPD Kabupaten yang memperoleh nilai SAKIP minimal B	Inspektorat Seluma	%	meningkat	40.54	-	1

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
16.6.1.(c)	Persentase penyelenggaraan lelang secara elektronik	Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Seluma	%	80.00	90.00	10.00	1
16.6.1.(d)	Persentase SKPD Kabupaten yang memperoleh nilai reformasi birokrasi baik	Inspektorat Seluma	%	meningkat	n/a	-	3
16.7.	Target Global : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.						
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Sekretariat Dewan Kabupaten Seluma	%	meningkat	13.33	-	1
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BPSDM Kabupaten Seluma	%	meningkat	5.66	-	1
16.9.	Target Global : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
16.9.1.(b)	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seluma	%	85.00	96.83	11.83	1
17	Tujuan TPB 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan						
17.8.	Target Global : Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.						

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target/ Capaian Nasional 2020	Capaian TPB 2020	GAP	Kategori Capaian TPB
17.8.1.	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Badan Pusat Statistik Seluma	%	53.73	34.88	2	
17.18.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.						
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Badan Pusat Statistik Seluma	%	100.00	80.00	-20.00	2
17.19.	Target Global : Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Orang	-	700.00	-	1
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Badan Pusat Statistik Seluma	%	85.00	99.33	14.33	1
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	Badan Pusat Statistik Seluma	%	-	n/a	n.a.	3

Seluma Alap



Rpjmd Kab Seluma 2021-2026

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat,



serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan. Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Seluma dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD (Tahun 2015-2020)

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan

Untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Seluma secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran



2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, pasca adanya perubahan akibat dikeluarkannya kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi wabah Covid-19. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Perkiraan proyeksi selama 5 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai antisipasi dampak adanya wabah Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan, Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.2 Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian perhitungan proyeksi selama 5 tahun ke depan (dari tahun 2021 s.d tahun 2026) akan dijelaskan pada sub bab tersendiri.

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Pendapatan Transfer; c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Seluma Tahun 2015-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	% capaian	+/(-)
1	2016	937,873,048,808.31	857,107,574,903.20	91.39	(80,765,473,905.11)
2	2017	939,993,118,336.00	898,894,826,263.17	95.63	(41,098,292,072.83)
3	2018	916,611,738,336.00	892,245,826,658.71	97.34	(24,365,911,677.29)
4	2019	1,027,557,749,005.00	976,184,302,438.42	95.00	(51,373,446,566.58)
5	2020	910.383.421.310,84	893.145.505.931,97	98,00	(17.237.915.378,87)

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Seluma

Adapun rincian target dan realisasi untuk masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut:



Tabel 3.2

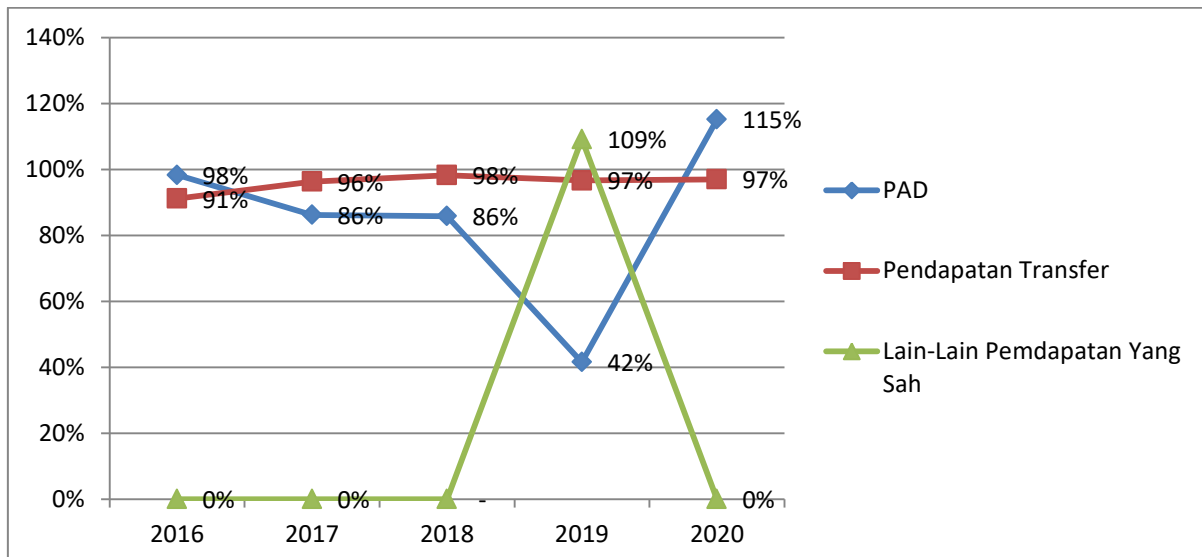
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Daerah Tahun 2016			
a.	PAD	29.142.532.000,00	28.643.738.976,33	98%
b.	Pendapatan Transfer	908.730.516.808,31	828.463.835.926,87	91%
c.	Lain-Lain Pendapatan Sah	-	-	0%
	Jumlah	937.873.048.808,31	857.107.574.903,20	91%
2	Pendapatan Daerah Tahun 2017			
a.	PAD	62.808.632.000,00	54.153.900.889,18	86%
b.	Pendapatan Transfer	877.184.486.336,00	844.740.925.373,99	96%
c.	Lain-Lain Pendapatan Sah	-	-	0%
	Jumlah	939.993.118.336,00	898.894.826.263,17	96%
3	Pendapatan Daerah Tahun 2018			
a.	PAD	67.625.167.000,00	58.041.128.143,40	86%
b.	Pendapatan Transfer	848.986.571.336,00	834.204.698.515,31	98%
c.	Lain-Lain Pendapatan Sah	-	-	-
	Jumlah	916.611.738.336,00	892.245.826.658,71	97%
4	Pendapatan Daerah Tahun 2019			
a.	PAD	63.077.514.005,00	26.206.268.537,97	42%
b.	Pendapatan Transfer	821.428.128.000,00	793.812.540.900,45	97%
c.	Lain-Lain Pendapatan Sah	143.052.107.000,00	156.165.493.000,00	109%
	Jumlah	1.027.557.749.005,00	976.184.302.438,42	95%
5	Pendapatan Daerah Tahun 2020			
a.	PAD	57.072.353.584,84	65.710.514.890,42	115%
b.	Pendapatan Transfer	853.311.067.726	827.408.582.042	97%
c.	Lain-Lain Pendapatan Sah	0	26.409.000	
	Jumlah	910.383.421.310,84	893.145.505.931,97	

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Seluma

Grafik 3.1.

Efektivitas Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Seluma dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020



Dari data di atas menggambarkan bahwa, secara umum, kinerja pendapatan daerah terlihat relatif stabil selama tahun 2016 hingga 2020, yang terlihat dari mendatarinya garis grafik pendapatan daerah. Namun, secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Seluma tidak dapat mencapai target terutama pada Pendapatan Asli Daerah. Pencapaian kinerja pendapatan daerah terbaik Kabupaten Seluma terjadi pada tahun 2018, yaitu dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 97,34 % dari target.

Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah tertinggi pada tahun 2020 yaitu 115 %, Pendapatan Transfer tertinggi pada tahun 2018 yaitu 98,26 % dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tertinggi pada tahun 2019 yaitu 109,17 %. Komponen terbesar penyumbang pendapatan dari Pendapatan Transfer Pusat dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 56,50 % dari total Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma. Kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan bahwa kinerja realisasi Pendapatan Kabupaten Seluma selalu tidak dapat mencapai target dan Pendapatan yang memiliki kontribusi adalah pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Seluma masih sangat tergantung pada transfer Pusat. Oleh karena itu, dikurun waktu 2021-2026 perlu dilakukan upaya untuk memaksimalkan potensi dan pencapaian



Pendapatan Asli Daerah sehingga secara Kabupaten Seluma dapat mandiri atas keuangan Daerah.

Untuk dapat menghitung proyeksi pendapatan daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Seluma untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel 3.3 berikut:



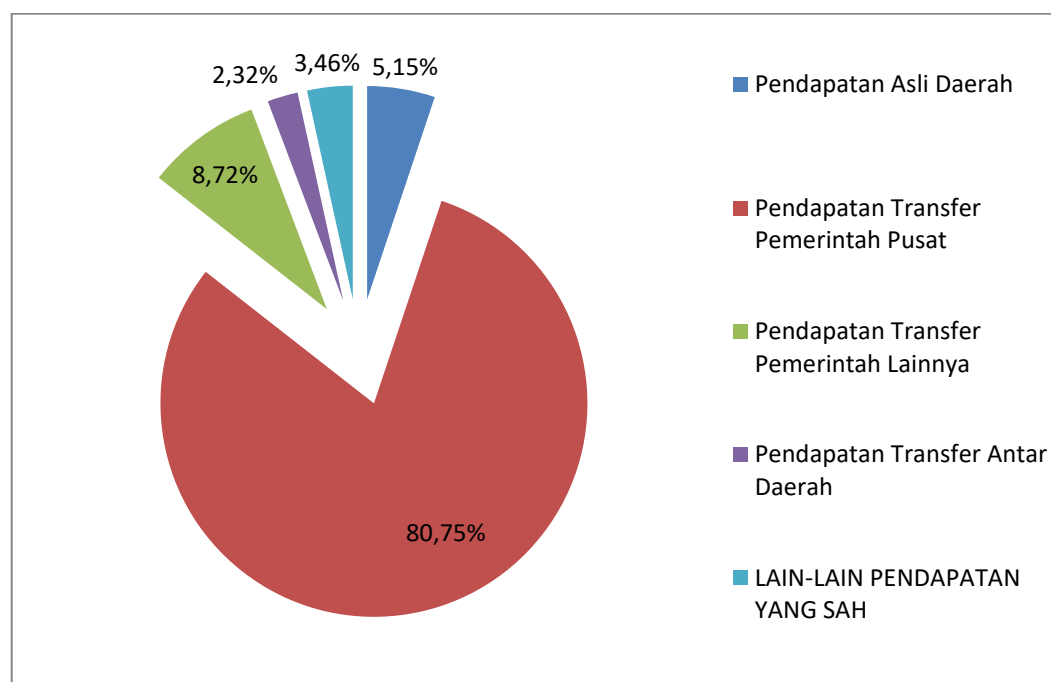
Tabel 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020

No	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016 (n-5)	2017 (n-4)	2018 (n-3)	2019 (n-2)	2020 (n-1)	
4	PENDAPATAN DAERAH	857.107.574.903,20	898.894.826.263,17	892.245.826.658,71	976.184.302.438,42	893.145.505.931,97	3,52%
4,1	Pendapatan Asli Daerah	28.643.738.976,33	54.153.900.889,18	58.041.128.143,40	26.206.268.537,97	65.710.514.890,42	39,29%
4.1.1	Pajak Daerah	6.799.569.487,00	9.123.753.989,75	11.156.895.264,50	14.763.982.720,50	10.258.560.366,90	14,79%
4.1.2	Retribusi Daerah	1.231.082.200,00	845.958.105,00	634.525.100,00	957.001.320,00	502.160.600,00	-14,95%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.263.550.439,31	2.604.473.433,60	2.165.126.815,26	1.668.086.879,61	1.623.568.623,38	-5,05%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17.349.536.850,02	41.579.715.360,83	44.084.580.963,64	8.817.197.617,86	53.326.225.300,14	113,78%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	828.463.835.926,87	844.740.925.373,99	834.204.698.515,31	793.812.540.900,45	827.408.582.041,55	2,60%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	806.945.376.692,00	820.155.831.104,00	807.902.156.525,00	774.851.169.399,00	813.965.160.249,00	2,78%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	806.945.376.692,00	820.155.831.104,00	807.902.156.525,00	774.851.169.399,00	813.965.160.249,00	2,78%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.256.161.046,00	16.791.948.975,00	18.055.609.934,00	16.020.250.753,00	14.793.951.010,00	-12,21%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	503.986.041.000,00	495.442.190.000,00	497.868.275.000,00	519.867.852.000,00	475.498.288.000,00	0,82%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	174.012.269.646,00	168.435.458.129,00	165.274.694.591,00	238.963.066.646,00	164.609.047.239,00	14,83%
4.2.01.05	Dana Alokasi Desa	109.690.905.000,00	139.486.234.000,00	126.703.577.000,00		141.085.233.000,00	10,58%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.518.459.234,87	24.585.094.269,99	26.302.541.990,31	18.961.371.501,45	13.443.421.792,55	-3,71%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	21.518.459.234,87	24.585.094.269,99	26.302.541.990,31	18.961.371.501,45	13.443.421.792,55	-3,71%
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	156.165.493.000,00	26.409.000,00	-99,98%
4.3.01	Pendapatan Hibah				13.113.386.000,00		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				143.052.107.000,00	26.409.000,00	-99,98%

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Seluma

Berdasarkan data selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Seluma dapat diketahui rata-rata pertumbuhan mengalami positif dan negatif. Dari pendapatan Asli Daerah pendapatan yang berasal dari pajak dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menunjukkan pertumbuhan positif dan pada Pendapatan yang berasal retribusi mengalami pertumbuhan dan, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami pertumbuhan negatif. Pada Pendapatan Transfer Pendapatan dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa menunjukkan pertumbuhan positif dan pendapatan Dana Transfer Pusat Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pajak menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif.

Gambar 3.1
Struktur Pendapatan Asli Daerah dari APBD Kabupaten Seluma
Tahun 2016-2020



Jika kita melihat pada realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan data, struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seluma kurun waktu tahun 2016-2020 kontribusi Pendapatan Daerah terbesar berasal dari Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 80,75 % yang berasal dari DBH Pajak, DBH bukan pajak/ SDA, DAU, dan DAK, sedangkan Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi 5,15 % dari total Pendapatan Daerah kurun waktu 2016-2020.



3.2.2 Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penerimaan daerah terdiri dari realisasi pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan. Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pembiayaan hanya pada pos Penggunaan SiLPA dan Penerimaan Kembali Pinjaman. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah dan penerimaan daerah selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel 3.4 di bawah ini :



Tabel 3.4

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah Kabupaten Seluma selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020

No	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016 (n-5)	2017 (n-4)	2018 (n-3)	2019 (n-2)	2020 (n-1)	
6	PEMBIAYAAN						
6,1	Penerimaan Pembiayaan	62.710.718.162,22	18.400.596.262,42	38.042.545.792,44	43.623.819.959,15	62.356.432.200,00	21,20%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.710.718.162,22	18.400.596.262,42	38.042.545.792,44	43.623.819.959,15	62.356.432.200,00	21,20%
	Penerimaan Kembali Pinjaman						-100,00%
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	2.700.000.000,00	-	8.106.990.363,00	3.856.960.000,00	5,86%
6.2.1	Pembayaran Pokok Utang				8.106.990.363,00	3.856.960.000,00	-52,42%
6.2.3	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	2.700.000.000,00				35,00%

Sumber : Diolah dari LRA Pemerintah Kabupaten Seluma



3.3 Kinerja Realisasi Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terbagi menjadi belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Meskipun demikian, dalam sistematika APBD, pengeluaran pembiayaan masuk dalam pembiayaan daerah, bersama penerimaan pembiayaan. Secara garis besar, sistematika APBD tersusun dari pendapatan dikurangi belanja menghasilkan surplus dan defisit. Surplus dan defisit tersebut kemudian dimanfaatkan atau ditutup dengan pembiayaan sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA). SILPA akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang masuk dalam penerimaan pembiayaan tahun berikutnya.

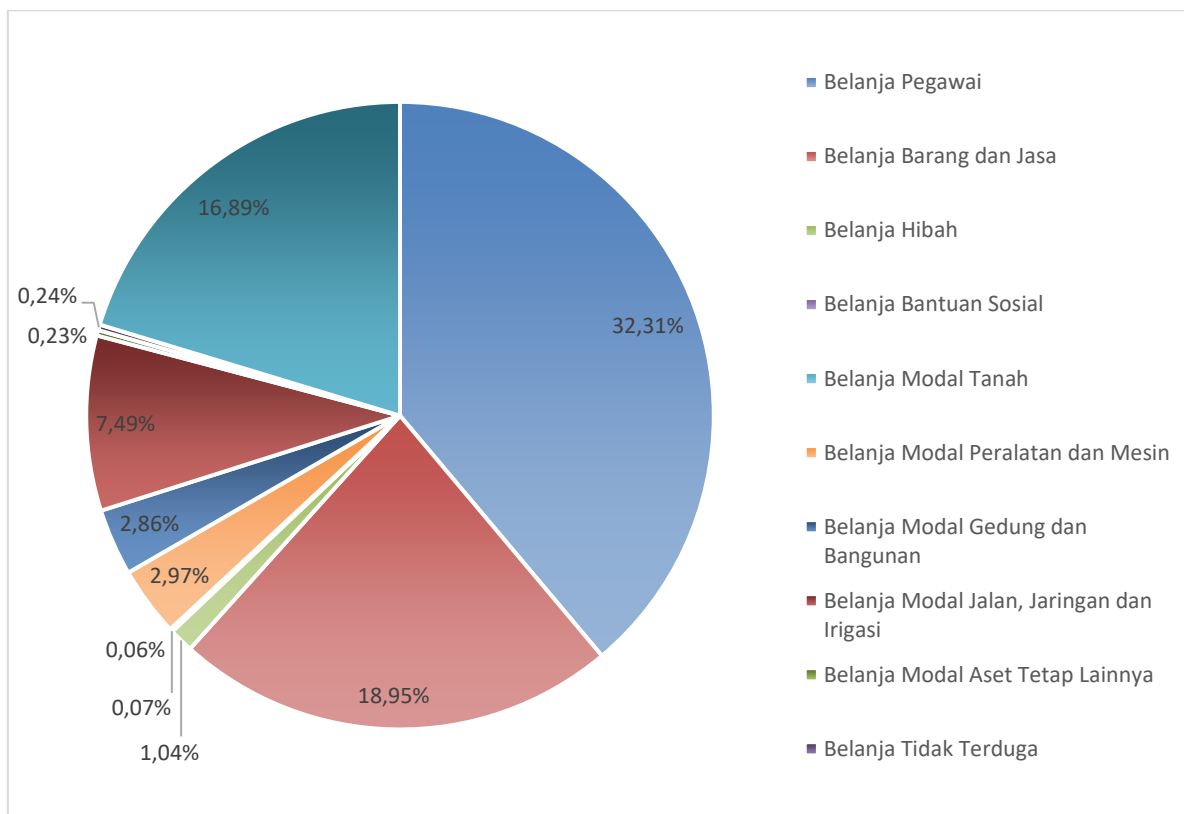
3.3.1 Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.

Jikakita melihat pada realisasi Belanja Daerah berdasarkan kelompok jenis Belanja Daerah, struktur Belanja Daerah Seluma kurun waktu tahun 2016-2020 didominasi oleh belanja dari jenis Belanja Pegawai sebesar 32,31 %, kemudian Belanja Barang dan Jasa sebesar 18,95 %, Belanja Bantuan Keuangan 16,89 %, dan Belanja Modal Jalan, Ijaringan dan Irigasi sebesar 7,49 % sebagaimana tersaji pada Gambar 3.2

Gambar 3.2

Struktur Belanja Daerah Kabupaten Seluma Kurun Waktu Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Kabupaten Seluma diolah

Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Seluma kurun waktu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.5

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Seluma Selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2016 s.d Tahun 2020

No	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016 (n-5)	2017 (n-4)	2018 (n-3)	2019 (n-2)	2020 (n-1)	
5	BELANJA	900.417.696.803,00	876.754.476.118,15	886.663.362.071,00	948.016.150.929,00	920.396.577.539,00	4,37%
5,1	Belanja Operasi	531.196.805.500,00	555.434.177.503,75	586.398.246.050,00	580.290.119.200,00	602.468.019.924,00	4,19%
5.1.01	Belanja Pegawai	364.046.946.683,00	339.329.385.469,00	350.345.432.842,00	377.113.321.731,00	330.867.823.612,00	0,07%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.415.658.817,00	213.489.592.034,75	230.696.633.208,00	198.213.707.469,00	227.531.996.312,00	11,91%
5.1.03	Belanja Hibah	3.706.200.000,00	2.579.200.000,00	5.283.680.000,00	4.873.090.000	40.527.200.000,00	143,77%
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	28.000.000,00	36.000.000,00	72.500.000,00	90.000.000	3.541.000.000,00	777,96%
5,2	Belanja Modal	206.470.008.526,00	128.734.499.848,40	121.010.535.778,00	171.068.156.240,00	115.512.700.467,00	-1,94%
5,3	Belanja Tidak Terduga	-	579.646.036,00	472.308.921,00	25.670.000,00	11.887.011.311,00	-71,03%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		579.646.036,00	472.308.921,00	25.670.000,00	11.887.011.311,00	-71,03%
5,4	Belanja Transfer	162.750.882.777,00	192.006.152.730,00	178.782.271.322,00	196.632.205.489,00	190.528.845.837,00	16,98%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil						
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	162.750.882.777,00	192.006.152.730,00	178.782.271.322,00	196.632.205.489,00	190.528.845.837,00	16,98%

Sumber : LRA Kabupaten Seluma diolah

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 untuk realisasi belanja operasi setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 4,19 %. Demikian juga untuk belanja transfer setiap tahunnya juga mengalami kenaikan lebih besar rata-rata pertahunnya, yaitu sebesar 16,98 %. Sedangkan, belanja tidak terduga mengalami pertumbuhan negatif atau penurunan. Dari sisi jenis belanja operasi terlihat bahwa Belanja Bantuan Sosial tumbuh cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 777,96 % diikuti dengan belanja hibah sebesar 143,77 %.

Jika dilihat dari proporsi realisasi belanja dan rata-rata pertumbuhan kedua belanja tersebut, menunjukkan adanya keberpihakan kebijakan anggaran dari Pemerintah Seluma untuk lebih memprioritaskan peningkatan pembangunan daerah dan gedung untuk pelayanan publik. Pada proyeksi pendapatan, perhitungan proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan perlu mempertimbangkan dan memperhatikan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam APBD Tahun 2020. Apalagi, adanya penyesuaian akibat dampak wabah Covid-19 sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

3.3.2 Kinerja Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Informasi realisasi pengeluaran pembiayaan untuk melihat seberapa besar pengeluaran pemerintah yang sifatnya mengikat untuk dipenuhi oleh surplus anggaran yang ada. Bersama dengan belanja daerah, pengeluaran pembiayaan merupakan komponen pengeluaran daerah. Tabel berikut merupakan data realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Seluma selama 3 tahun terakhir dan pertumbuhannya.

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Kurun Waktu 2016-2020 digunakan untuk membayar pokok hutang Rp 8.106.990.363,00 pada tahun 2019 dan penyertaan modal investasi Pemerintah Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.700.000.000,00 sebagaimana tabel 3.6.



Tabel 3.6

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Seluma selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun 2020

No	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016 (n-5)	2017 (n-4)	2018 (n-3)	2019 (n-2)	2020 (n-1)	
6	PEMBIAYAAN						
6,1	Penerimaan Pembiayaan	62.710.718.162,22	18.400.596.262,42	38.042.545.792,44	43.623.819.959,15	62.356.432.200,00	21,20%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.710.718.162,22	18.400.596.262,42	38.042.545.792,44	43.623.819.959,15	62.356.432.200,00	21,20%
	Penerimaan Kembali Pinjaman						-100,00%
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	2.700.000.000,00	-	8.106.990.363,00	3.856.960.000,00	5,86%
6.2.1	Pembayaran Pokok Utang				8.106.990.363,00	3.856.960.000,00	-52,42%
6.2.3	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	2.700.000.000,00				35,00%



3.4 Neraca

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan good government governance dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah. Berikut ini tabel 3.7 perkembangan Neraca Daerah selama 5 tahun terakhir dan rata-rata pertumbuhannya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan.



Tabel 3.7

Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dan Rata-rata Pertumbuhannya

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata pertumbuhan
Aset						
Aset Lancar						
Kas di Kas Daerah	35.603.400.163,19	17.366.337.732,42	41.670.871.715,90	59.550.548.568,32	29.402.672.935,04	20,25%
Kas di Bendebara Pengeluaran	677.849.371,00	641.925.998,00	174.500,00	744.102,00	744.714,00	55,31%
Setara Kas	-	-	-	-	-	
Kas di Bendebara BLUD	1.018.626.206,00	-	1.276.367.027,00	847.565.023,00	1.045.717.658,00	-36,74%
Kas di Bendebara JKN	586.607.242,25	419.541.315,00	682.526.434,25	660.293.807,90	685.044.438,15	8,67%
KAS Di Bendebara BOS	198.932.185,00	507.740.117,00	172.130.042,00	1.342.497.274,00	139.437.393,00	169,86%
Kas di Bendebara Penerimaan	-	-	-	-	-	
Kas Lainnya			-	245.446.443,00	-	-100,00%
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
Piutang Pajak Daerah	11.527.404.829,85	8.263.613.998,00	14.778.293.546,85	17.072.722.430,85	16.453.697.583,85	15,61%
Piutang Retribusi Daerah	276.024.239,00	276.024.239,00	276.024.239,00	276.024.239,00	276.024.239,00	0,00%
Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	2.604.473.433,60	-	-	-	-100,00%
Pitang Lain-Lain PAD yang sah	713.230.100,00	442.543.500,00	917.299.800,00	1.671.007.700,00	-	12,87%
Piutang Dana Bagi Hasil dari Pusat	9.959.214.147,00	3.951.749.753,00	8.795.760.508,00	11.197.922.702,00	16.452.432.514,00	34,12%
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	-	5.019.614.931,63	7.530.362.219,20	14.240.610.410,74	8.571.977.595,74	33,11%

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata pertumbuhan
Piutang Lain-Lain	175.145.488,00	150.504.400,00	156.600.000,00	128.799.700,00	107.150.000,00	-11,15%
Akumulasi Penyisihan Piutang	(6.899.335.305,64)	(5.725.746.345,00)	(8.509.863.676,57)	(9.607.776.987,94)	(9.464.187.256,22)	10,76%
Beban DiBayar Dimuka	469.131.649,95	-	414.742.782,73	9.945.205,48	-	-99,20%
Persediaan	2.423.325.536,00	3.745.686.053,00	3.276.405.335,00	5.234.555.896,00	6.227.475.613,00	30,19%
Jumlah Aset Lancar	56.729.555.851,60	37.664.009.125,65	71.437.694.473,36	102.870.906.514,35	69.898.187.427,56	17,00%
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	
Investasi Jangka Panjang Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	16.912.409.594,13	14.212.409.594,13	16.912.409.594,13	16.912.409.594,13	16.912.409.594,13	0,76%
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	16.912.409.594,13	14.212.409.594,13	16.912.409.594,13	16.912.409.594,13	16.912.409.594,13	0,76%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	16.912.409.594,13	14.212.409.594,13	16.912.409.594,13	16.912.409.594,13	16.912.409.594,13	0,76%
ASET TETAP						
Tanah	115.467.932.485,00	116.692.796.425,00	124.391.788.485,00	126.016.795.942,00	126.345.820.092,00	2,31%
Peralatan dan Mesin	279.073.885.435,76	253.057.428.698,98	295.107.840.505,34	330.814.671.194,12	360.257.687.406,30	7,07%
Gedung dan Bangunan	407.110.183.751,51	380.444.736.614,51	437.734.108.688,51	493.658.584.651,51	534.070.624.542,51	7,37%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	965.872.796.252,60	862.467.048.942,60	1.044.806.428.497,60	1.193.228.548.262,20	1.252.334.138.622,81	7,40%
Aset Tetap Lainnya	31.404.190.025,40	27.396.543.086,40	33.793.991.775,40	36.577.396.179,40	39.410.518.911,40	6,64%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	93.058.806.492,60	130.397.760.707,60	93.657.724.708,60	31.226.877.380,00	2.626.387.633,39	-36,57%

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata pertumbuhan
Akumulasi Penyusutan	(470.314.674.399,82)	(443.488.180.144,00)	(551.060.881.450,12)	(640.690.569.198,24)	(729.360.139.395,97)	12,16%
JUMLAH ASET TETAP	1.421.673.120.043,05	1.326.968.134.331,09	1.478.431.001.210,33	1.570.832.304.410,99	1.585.685.037.812,44	2,99%
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	
Aset Lainnya						
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	
Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	
Jumlah Ganti Rugi	2.310.935.431,00	2.310.935.431,00	2.310.935.431,00	2.310.935.431,00	2.310.935.431,00	0,00%
Aset Tidak Terwujud	25.720.000,00	25.720.000,00	25.720.000,00	25.720.000,00	25.720.000,00	0,00%
Tagihan Perjanjian Pengelolaan Pasar dan Parkir	126.914.250,00	126.914.250,00	126.914.250,00	126.914.250,00	126.914.250,00	0,00%
Aset Lainnya	28.434.338.871,57	33.411.322.642,81	27.182.424.102,57	22.377.281.545,47	32.675.294.382,30	6,80%
JUMLAH ASET LAINNYA	30.897.908.552,57	35.874.892.323,81	29.645.993.783,57	24.840.851.226,47	35.138.864.063,30	6,00%
JUMLAH ASET	1.526.212.994.041,35	1.414.719.445.374,68	1.596.427.099.061,39	1.715.456.471.745,94	1.707.634.498.897,43	3,13%
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	359.890.734,00	27.208.783,00	45.216.575,00	45.216.575,00	45.216.575,00	-6,56%
Utang Bunga	-	-	-	-	-	
Utang Pajak	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	89.186.494,67	144.838.421,00	35.500.544,32	32.905.291,78	52.585.300,05	9,85%
Utang Beban						3,85%

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata pertumbuhan
	646.102.640,00	649.519.211,00	1.480.806.047,00	357.718.131,00	224.350.186,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.713.159.070,00	6.361.647.093,60	4.460.303.855,09	6.831.335.070,00	731.991.908,00	17,11%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.808.338.938,67	7.183.213.508,60	6.021.827.021,41	7.267.175.067,78	1.054.143.969,05	1,91%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Uang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	3.808.338.938,67	7.183.213.508,60	6.021.827.021,41	7.267.175.067,78	1.054.143.969,05	1,91%
EKUITAS						
EKUITAS	1.522.404.655.102,68	1.407.536.231.866,08	1.590.405.272.039,98	1.708.189.296.678,16	1.700.180.354.928,38	3,10%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.526.212.994.041,35	1.414.719.445.374,68	1.596.427.099.061,39	1.715.456.471.745,94	1.707.634.498.897,43	3,13%

Sumber : Diolah dari Neraca Kabupaten Seluma



Tabel 3.8

Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Seluma dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
A.	RASIO LIQUIDITAS					
	Persediaan	2,423,325,536.00	3,745,686,053.00	3,276,405,335.00	5,234,555,896.00	6,227,475,613.00
	Aset Lancar	56,729,555,851.60	37,664,009,125.65	71,437,694,473.36	102,870,906,514.35	69,898,187,427.56
	Kewajiban Jangka Pendek	3,808,338,938.67	7,183,213,508.60	6,021,827,021.41	7,267,175,067.78	1,054,143,969.05
1	Rasio Lancar	14.90	5.24	11.86	14.16	66,308
2	Rasio Cepat	15.53	5.76	12.41	14.88	60,40
B.	Rasio Solvabilitas					
	Total Aset	1,526,212,994,041.35	1,414,719,445,374.68	1,596,427,099,061.39	1,715,456,471,745.94	1,707,634,498,897.43
	Total Hutang	3,808,338,938.67	7,183,213,508.60	6,021,827,021.41	7,267,175,067.78	1,054,143,969.05
	Total Ekuitas	1,522,404,655,102.68	1,407,536,231,866.08	1,590,405,272,039.98	1,708,189,296,678.16	1,700,180,354,928.38
1	DAR	0.25	0.51	0.38	0.42	0,00061
2	DER	0.25	0.51	0.38	0.43	0,00062

Sumber : Diolah dari Neraca Kabupaten Seluma

Rasio Liquiditas dihitung menggunakan Rasio Lancar dan Rasio cepat. Rasio Lancar dihitung dengan membandingkan antara asset lancar dengan kewajiban lancar. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 nilai rasio lancar lebih dari 1 hal ini menunjukkan bahwa penggunaan asset lancar tidak efisien, akan tetapi hal ini dianggap lebih baik jika dibandingkan dengan rasio yang bernilai dibawah 1. Jika nilai rasio di bawah 1 menunjukkan bahwa keadaan mengalami kendala atau kesulitan dalam membayar hutang tentu saja kondisi ini tidak sehat sehingga akan menjadi pertimbangan calon investor. Bahkan pada tahun 2020 jumlah Rasio Lancar 66,308 hal ini dipengaruhi karena total kewajiban lancar yang turun atau lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Sementara itu Rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara asset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 nilai rasio lebih dari 1 hal ini menunjukkan bahwa asset lancar setelah pengurangan persediaan lebih tinggi dari kewajiban lancar, sehingga asset lancar dapat digunakan untuk melunasi kewajiban lancar. Apalagi pada tahun 2020 Kewajiban lancar Kabupaten Seluma turun, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai Rasio Cepat. Rasio ini juga secara tidak langsung memberitahukan bahwa Kabupaten Seluma sehat secara Finansial.

Rasio Solvabilitas digunakan untuk menilai dan menghitung kemampuan dalam membayar hutang yang dimiliki. Jika memiliki hutang lebih besar daripada modal yang dimiliki hal ini dinilai kurang baik karena akan menambah beban sehingga dapat menyebabkan pailit. Cara menghitung Rasio Solvabilitas dengan menggunakan Debt to equity Rasio (DER) dan Debt to Asset Rasio (DAR). Debt to Asset Rasio (DAR) dinilai dengan cara membandingkan Jumlah hutang dan Jumlah asset. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 nilai DAR dibawah 1 hal ini menunjukkan bahwa asset yang dibiayai oleh modal sendiri karena nilai DAR yang kecil lebih baik. Selisih yang sangat terlihat dari tahun-tahun sebelumnya terjadi pada tahun 2020, dimana nilai DAR berjumlah 0,00061. Ini merupakan hal yang sangat baik karena total hutang yang semakin berkurang.

Untuk Debt to Equity Rasio (DER) Kabupaten Seluma dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bernilai dibawah 1 hal ini menunjukkan bahwa hutang lebih kecil daripada modal. Perbedaan antara tahun 2019 dan tahun 2020 dimana jumlah

hutang rendah jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya tahun 2020 memiliki nilai hutang yang rendah atau berkurang jauh. Nilai ideal DER adalah dibawah 1, jika nilai DER lebih dari satu menunjukkan hutang lebih besar daripada modal sehingga harus melakukan penelitian terhadap nilai DER yang tinggi.

3.5 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Seluma merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Berikut analisis kedua kebijakan tersebut akan dijelaskan.

3.5.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Seluma selama 3 tahun terakhir. Tabel berikut akan menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini.

Tabel 3.9

Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Seluma selama 3 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2020

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020(Rp)
A	Total Belanja	886.663.362.071,00	948.016.150.929,00	920.396.577.539,00
B	Total Pengeluaran	350.345.432.842,00	377.113.321.731,00	330.867.823.612,00
1	Total Realisasi Belanja Aparatur	350.345.432.842,00	377.113.321.731,00	330.867.823.612,00
2	Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Apratur Terhadap Total Pengeluaran (%)	39,51%	39,78%	35,95%

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun memperlihatkan fluktuatif. Pada tahun 2018, porsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 39,78 % dari total realisasi pengeluaran daerah. Kemudian realisasinya Meningkat pada tahun 2019 menjadi hanya sebesar 39,78 % dan menurun pada tahun selanjutnya menjadi sebesar 35,95 % di tahun 2020. Proporsi di tahun 2019 menjadi proporsi paling tinggi selama 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan belanja untuk pemenuhan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebagaimana tindaklanjut Korsubgah KPK RI.

3.5.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan daerah Kabupaten Seluma berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan daerah Kabupaten Seluma adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang. Analisis realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, beserta proyeksinya sudah dibahas dan dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya, masuk dalam kategori penerimaan

daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab ini akan dibahas lebih mendalam pada komponen dalam Pembiayaan, misalnya analisis Penutup Defisit Anggaran, analisis SiLPA, dan analisis Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran.

Jika dilihat dari tabel 3.10 di bawah, diketahui bahwa penggunaan SiLPA relatif mengalami peningkatan. Sedangkan, pada sisi pengeluaran pembiayaan sebagaimana telah disajikan dalam Tabel 3.9 di atas, diketahui bahwa dalam 3 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Seluma melakukan kebijakan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran Pokok Hutang pada Tahun 2019 dan penyertaan modal investasi Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Tabel 3.10

Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Seluma dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020

NO	URAIAN	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	892.245.826.658,71	976.184.302.438,42	893.145.505.932
4,1	Pendapatan Asli Daerah	58.041.128.143,40	26.206.268.537,97	65.710.514.890
4.1.1	Pajak Daerah	11.156.895.264,50	14.763.982.720,50	10.258.560.367
4.1.2	Retribusi Daerah	634.525.100,00	957.001.320,00	502.160.600
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.165.126.815,26	1.668.086.879,61	1.623.568.623
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	44.084.580.963,64	8.817.197.617,86	53.326.225.300
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	834.204.698.515,31	793.812.540.900,45	827.408.582.042
2	BELANJA	886.663.362.071,00	948.016.150.929,00	920.396.577.539
A	Surplus/(Defisit)	5.582.464.587,71	28.168.151.509,42	(27.251.071.607,03)
3	PEMBIAYAAN			-
1,1	Penerimaan Pembiayaan	38.042.545.792,44	43.623.819.959,15	62.356.432.200
1.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.042.545.792,44	43.623.819.959,15	62.356.432.200
	Penerimaan Kembali Pinjaman			-
1,2	Pengeluaran Pembiayaan	-	8.106.990.363,00	3.856.960.000
1.2.1	Pembayaran Pokok Utang		8.106.990.363,00	3.856.960.000
1.2.3	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah			-
B	Pembiayaan Netto	38.042.545.792,44	35.516.829.596,15	58.499.472.200,00
A+B	SILPA	43.625.010.380,15	63.684.981.105,57	31.248.400.592,97

Sumber : LRA Kabupaten Seluma diolah

Pada tabel 3.10 di atas menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir terjadi surplus pada realisasi anggaran pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 terjadi surplus riil sebesar 5.582.464.587,71 ditambah pembiayaan netto sebesar Rp 38.042.545.792,44 sehingga SILPA yang terbentuk menjadi sebesar Rp 43.625.010.380,15. Pada tahun 2019 terjadi realisasi surplus lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 28.168.151.509.42, ditambah pembiayaan netto sebesar Rp 35.516.829.596.15 sehingga SILPA menjadi sebesar



Rp 63,684,981,105.57. Terakhir pada tahun 2020 terjadi defisit sebesar Rp (27.251.071.607,03) ditambah dengan pembiayaan netto Rp 58.499.472.200,00 , sehingga SILPA sebesar Rp 31.248.400.592,97. Besaran SILPA yang muncul dikarenakan tidak terealisasinya belanja terutama belanja yang berasal dari sumber Dana Alokasi Khusus.

3.6 Kerangka Pendanaan

3.6.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah bertindak sebagai *Chief Financial Officer (CFO)* yang dibantu lembaga berupa badan, dinas, kantor. Kepala Satuan Kerja bertindak sebagai *Chief Operation Officer (COO)*. Prinsip pemisahan ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya *checks and balances* serta mendorong peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Inti dari pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah. Agar perekonomian daerah tidak sekedar tumbuh, tetapi dapat mengakomodasi masa depan sesuai dengan perubahan yang terjadi pada aspek lingkungan, maka strategi Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2021-2026 dalam aspek pendapatan daerah adalah:

1. Koordinasi lintas sektoral instansi pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Monitoring pelaksanaan pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Evaluasi secara rutin dan berkesinambungan;
4. Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan program Intensifikasi melalui :
 - a. Monitoring realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan
 - b. Evaluasi untuk memecahkan permasalahan yang ada dilapangan melalui rapat koordinasi secara berkala;
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bimbingan teknis; serta
6. Menggali sumber-sumber PAD yang baru dan mendatangkan investor.



Dengan strategi ini, kemampuan daerah dalam penyediaan fasilitas pelayanan umum dan infrastruktur lainnya diharapkan akan meningkat. Hasil akhirnya, pemerintah daerah akan dapat menarik investasi dalam maupun luar negeri, yang berdampak terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dikategorikan sebagai kegiatan *investatif* berdimensi dalam waktu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Dikarenakan masih belum begitu tingginya kemampuan fiskal kabupaten Seluma di dalam membiayai pembangunan daerah, maka perlu diambil kebijakan-kebijakan guna meningkatkan pendapatan daerah seperti :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun sumber-sumber penerimaan baru.
2. Kebijakan dalam meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak.
3. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyaman dan sederhana.
4. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparatur.
5. Meningkatkan dana dari Pusat diluar DAU dan DAK ke Daerah.

Dengan adanya dampak krisis ekonomi akibat adanya wabah Covid-19 tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD maupun Dana Transfer dari Pemerintah. Oleh karena itu, dalam menentukan angka proyeksi perlu dilakukan penyesuaian agar diperoleh angka yang lebih realistis dan tidak terlalu optimistik. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan perencanaan keuangan lebih mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian. Apalagi jika dilihat dari pertumbuhan setiap jenis pendapatan per tahunnya, masih sangat fluktuatif, bahkan beberapa pos pendapatan mengalami kecenderungan pertumbuhan negatif. Penetapan angka pertumbuhan untuk menentukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan hanya mengakui angka



pertumbuhan sebesar 2 %, serta mempertimbangkan informasi-informasi kebijakan Pemerintah dan kondisi terkini terkait adanya dampak wabah Covid-19. Penyesuaian terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah juga telah dilakukan serta penurunan dan relaksasi terhadap penerimaan dari Pendapatan Transfer juga perlu dipertimbangkan. Penurunan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah serta bagi hasil pajak provinsi juga harus diperhitungkan. Penerimaan Dana Alokasi Umum juga diperkirakan akan terjadi pada ke depan hanya 2 %. Selain itu, tahun dasar menggunakan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2020 setelah dilakukan penyesuaian APBD akibat adanya wabah Covid-19 yang tertuang dalam Perubahan APBD TA 2020. Adanya wabah nasional dan dunia berupa pandemi covid 19 (virus corona) yang menyebabkan terjadinya bencana kesehatan dunia dan nasional, telah berdampak pada kondisi ekonomi dunia dan nasional yang sedang mengalami krisis yang sangat berat, selain ancaman korban jiwa yang semakin banyak. Oleh karena itu, selain tentu pastinya akan terjadi penurunan kapasitas fiskal, juga perlu adanya kebijakan yang cepat dan tepat untuk mengadakan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan, termasuk keuangan daerah, untuk mengatasi dan menanggulangi wabah beserta dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat.

Untuk proyeksi tahun 2021 menggunakan data yang sudah diproyeksikan dalam APBD Kabupaten Seluma Tahun 2021. Berdasarkan asumsi dan kebijakan di atas, maka perhitungan proyeksi penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Daerah dan Belanja disajikan dalam tabel 3.10 sebagai berikut :



Tabel 3.11

Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma selama 5 Tahun Mendatang dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbu- han	Proyeksi (Rp)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	3.52%	936,892,546,652.00	943,249,272,581.43	947,444,839,644.07	963,572,031,776.95	980,021,767,752.49	996,800,498,447.54
4.1	Pendapatan Asli Daerah	39.29%	34,984,463,402.00	35,217,837,073.15	35,617,366,870.18	36,329,714,207.58	37,056,308,491.74	37,797,434,661.57
4.1.1	Pajak Daerah	14.79%	11,967,880,572.00	12,201,254,243.15	12,419,656,694.11	12,668,049,827.99	12,921,410,824.55	13,179,839,041.04
4.1.2	Retribusi Daerah	-14.95%	940,000,000.00	940,000,000.00	948,930,000.00	967,908,600.00	987,266,772.00	1,007,012,107.44
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-5.05%					-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	113.78%	22,076,582,830.00	22,076,582,830.00	22,248,780,176.07	22,693,755,779.60	23,147,630,895.19	23,610,583,513.09
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.60%	871,627,683,250.00	877,751,035,508.27	881,547,072,773.89	896,356,309,569.37	911,461,731,100.75	926,869,261,062.77
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.78%	819,768,901,000.00	827,817,600,902.76	833,467,503,927.04	847,315,149,345.58	861,439,747,672.49	875,846,837,965.94
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.78%	819,768,901,000.00	827,817,600,902.76	833,467,503,927.04	847,315,149,345.58	861,439,747,672.49	875,846,837,965.94
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	-12.21%	15,984,439,000.00	14,033,138,902.76	14,202,939,883.49	14,486,998,681.16	14,776,738,654.78	15,072,273,427.88
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0.82%	468,190,986,000.00	478,190,986,000.00	482,115,022,099.55	491,757,322,541.54	501,592,468,992.37	511,624,318,372.22
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	14.83%	194,508,243,000.00	194,508,243,000.00	196,064,308,944.00	199,985,595,122.88	203,985,307,025.34	208,065,013,165.84
4.2.01.05	Dana Alokasi Desa	10.58%	141,085,233,000.00	141,085,233,000.00	141,085,233,000.00	141,085,233,000.00	141,085,233,000.00	141,085,233,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-3.71%	51,858,782,250.00	49,933,434,605.51	48,079,568,846.85	49,041,160,223.79	50,021,983,428.27	51,022,423,096.83
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	-3.71%	51,858,782,250.00	49,933,434,605.51	48,079,568,846.85	49,041,160,223.79	50,021,983,428.27	51,022,423,096.83
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-99.98%	30,280,400,000.00	30,280,400,000.00	30,280,400,000.00	30,886,008,000.00	31,503,728,160.00	32,133,802,723.20
4.3.01	Pendapatan Hibah							
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-99.98%	30,280,400,000.00	30,280,400,000.00	30,280,400,000.00	30,886,008,000.00	31,503,728,160.00	32,133,802,723.20
5	BELANJA	4.37%	985,904,744,811.00	980,792,464,466.24	981,527,541,174.26	996,484,795,929.23	980,021,767,752.49	996,800,498,447.54
5.1	Belanja Operasi	4.19%	662,276,615,185.00	623,375,172,657.68	616,146,880,664.66	688,102,936,505.87	654,169,347,432.26	627,780,193,903.35
5.1.01	Belanja Pegawai	0.07%	383,647,774,692.00	391,365,768,605.00	383,909,877,527.93	385,829,426,915.57	387,758,574,050.14	389,697,366,920.39
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.91%	260,223,616,825.00	227,599,084,052.68	227,826,683,136.73	256,863,189,590.31	262,000,453,382.11	233,672,506,982.96
5.1.03	Belanja Hibah	143.77%	14,062,204,000.00	3,910,320,000.00	3,910,320,000.00	44,910,320,000.00	3,910,320,000.00	3,910,320,000.00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	777.96%	4,343,019,668.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
5.2	Belanja Modal	-1.94%	119,164,670,341.00	152,001,123,018.28	159,555,108,011.30	101,563,671,001.09	118,021,743,255.52	160,156,889,064.18

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



No	Uraian	Rata-Rata Pertumbu- han	Proyeksi (Rp)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.3	Belanja Tidak Terduga	-71.03%	5,047,844,680.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-71.03%	5,047,844,680.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	16.98%	199,415,614,605.00	204,416,168,790.28	204,825,552,498.30	205,818,188,422.27	206,830,677,064.72	207,863,415,480.01
5.4.01	Belanja Bagi Hasil							
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	16.98%	199,415,614,605.00	204,416,168,790.28	204,825,552,498.30	205,818,188,422.27	206,830,677,064.72	207,863,415,480.01
6	PEMBIAYAAN							
6.1	Penerimaan Pembiayaan	21.20%	32,499,581,718.00	-	-	-	-	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.20%	32,499,581,718.00					
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-100.00%						
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.86%	-	-	-	-	-	-
6.2.1	Pembayaran Pokok Utang	-52.42%						
6.2.3	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	35.00%						

Sumber : Hasil Analisis



3.6.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Dalam kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang berakhir tahun 2025, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi pendapatan daerah ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total penerimaan riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 tahun mendatang.

Berikut perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Seluma tahun 2021 s.d tahun 2026 disajikan pada tabel 3.12 berikut.



Tabel 3.12

Proyeksi Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi (Rp)					Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kapasitas Riil	327,427,220,721.00	314,326,559,095.15	318,112,742,449.77	292,247,298,658.68	348,684,545,991.77	362,306,590,578.02
5	BELANJA	985,904,744,811.00	980,792,464,466.24	981,527,541,174.26	996,484,795,929.23	980,021,767,752.49	996,800,498,447.54
5.1	Belanja Operasi	662,276,615,185.00	623,375,172,657.68	616,146,880,664.66	688,102,936,505.87	654,169,347,432.26	627,780,193,903.35
5.1.01	Belanja Pegawai	383,647,774,692.00	391,365,768,605.00	383,909,877,527.93	385,829,426,915.57	387,758,574,050.14	389,697,366,920.39
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260,223,616,825.00	227,599,084,052.68	227,826,683,136.73	256,863,189,590.31	262,000,453,382.11	233,672,506,982.96
5.1.03	Belanja Hibah	14,062,204,000.00	3,910,320,000.00	3,910,320,000.00	44,910,320,000.00	3,910,320,000.00	3,910,320,000.00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	4,343,019,668.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
5.2	Belanja Modal	119,164,670,341.00	152,001,123,018.28	159,555,108,011.30	101,563,671,001.09	118,021,743,255.52	160,156,889,064.18
5.3	Belanja Tidak Terduga	5,047,844,680.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,047,844,680.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	199,415,614,605.00	204,416,168,790.28	204,825,552,498.30	205,818,188,422.27	206,830,677,064.72	207,863,415,480.01
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	199,415,614,605.00	204,416,168,790.28	204,825,552,498.30	205,818,188,422.27	206,830,677,064.72	207,863,415,480.01

Sumber : Hasil Analisis



Tabel 3.13

**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma
Tahun 2021-2026**

No	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	936,892,546,652.00	943,249,272,581.43	947,444,839,644.07	963,572,031,776.95	980,021,767,752.49	996,800,498,447.54
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai perda)						
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32,499,581,718.00	-	-	-	-	-
	Total Penerimaan	969,392,128,370.00	943,249,272,581.43	947,444,839,644.07	963,572,031,776.95	980,021,767,752.49	996,800,498,447.54
	Dikurangi						
1	Total Belanja dan Pengeluaran yang Wajib mengikat	641,964,907,649.00	628,922,713,486.28	629,332,097,194.30	671,324,733,118.27	631,337,221,760.72	634,493,907,869.52
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	327,427,220,721.00	314,326,559,095.15	318,112,742,449.77	292,247,298,658.68	348,684,545,991.77	362,306,590,578.02

Sumber : Hasil Analisis



Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 5 tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJMD. Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar;
- b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati (Janji Bupati) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
- c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Berikut rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Seluma tahun 2021 s.d tahun 2025 disajikan pada tabel 3.14 berikut.



Tabel 3.14

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi (Rp)					2026
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	327,427,220,721.00	314,326,559,095.15	318,112,742,449.77	292,247,298,658.68	348,684,545,991.77	362,306,590,578.02
1	Prioritas I	52,950,633,340.50	55,598,165,007.52	58,378,073,257.90	61,296,976,920.79	64,361,825,766.83	67,579,917,055.17
2	Prioritas II	119,164,670,341.00	152,001,123,018.28	159,555,108,011.30	101,563,671,001.09	118,021,743,255.52	160,156,889,064.18
3	Prioritas III	155,311,917,039.50	106,727,271,069.35	100,179,561,180.57	129,386,650,736.80	166,300,976,969.42	134,569,784,458.67

Sumber : Hasil Analisis

Seluma Alap



Seluma Alap

Rpjd Kab Seluma 2021-2026

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Seluma merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data existing condition, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

4.1 Permasalahan Daerah

4.1.1 Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

- Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan
- Belum meratanya tenaga pendidik
- Belum seluruh sekolah terakreditasi
- Masih terdapat guru SD maupun SMP yang belum memenuhi kompetensi dan memiliki sertifikasi

B. Kesehatan

- Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting.
- Cakupan pelayanan untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan anak masih perlu ditingkatkan sesuai standar.
- Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan sesuai standar.
- Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah belum tercapai secara optimal
- Optimalisasi upaya preventif dan promotif terhadap pandemi Covid-19 guna menurunkan dampak dari pandemi tersebut.



- Tingkat pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit masih rendah (Semakin tingginya warga usia produktif yang menderita penyakit degeneratif)
 - Masih banyak Masyarakat Kabupaten Seluma yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.
- C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
- Masih banyaknya jalan kabupaten dan jembatan dalam kondisi rusak
 - Masih rendahnya persentase penduduk yang memiliki akses air bersih
 - Masih rendahnya persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi
- D. Perumahan dan Kawasan Permukiman**
- Masih adanya rumah tidak layak huni
 - Masih perlunya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman
- E. Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**
- Masih adanya temuan pelanggaran peraturan.
 - Masih terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
 - Masih kurangnya standar dalam masalah kebakaran.
 - Masih kurangnya partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan.
 - Masih adanya warga yang belum berperan untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dalam masa Pandemi Covid 19
- F. Sosial**
- Tingkat kemiskinan masih tinggi
 - Perlunya update pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkala melalui sistem yang terintegrasi serta update pendataan masyarakat terdampak COVID-19, agar bantuan sosial tepat sasaran.
 - Kurang optimalnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
 - Belum optimalnya program penanganan PMKS, dilihat dari banyaknya PMKS usia produktif yang dilatih/dibina yang belum berproduksi.



4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak
- Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.
- Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal

B. Ketahanan Pangan

- Masih ditemukannya bahan pangan segar beredar dinyatakan tidak aman karena rendahnya kesadaran masyarakat.
- Masih adanya sampel makanan yang belum memenuhi syarat keamanan makanan.
- Kurang optimalnya ketahanan pangan masyarakat, terutama dalam menghadapi pandemi covid-19.
- Belum optimalnya program penanaman pekarangan untuk pemenuhan pangan keluarga
- Masih adanya daerah rawan pangan

C. Pertanahan

- Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya

D. Lingkungan Hidup

- Belum optimalnya pemanfaatan TPS dan TPA
- Sarana dan prasana penunjang operasional TPA belum ada
- Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R
- Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Sarana dan prasarana pelayanan kependudukan yang masih kurang
- Masih adanya penduduk lahir yang belum memperoleh akte kelahiran
- Masih adanya penduduk meninggal yang belum memperoleh akte kematian
- Masih adanya warga yang belum bisa mengakses layanan secara online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- Belum semua warga Kabupaten Seluma yang wajib ber-KTP memiliki KTP
- Kualitas dan kuantitas SDM di bidang pelayanan masih kurang
- F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
 - Masih adanya Desa tertinggal dan sangat tertinggal
 - Masih adanya desa yang tidak tertib administrasi
 - Masih adanya temuan permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa
 - Belum optimalnya BUMDes
- G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
 - Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan adanya peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi
 - Masih adanya pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan KB (unmeet need)
 - Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun
- H. Perhubungan**
 - Belum optimalnya operasional Balai Uji Kendaraan
 - Belum adanya terminal Kabupaten
 - Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas
 - Rambu-rambu jalan belum seluruhnya tersedia
- I. Komunikasi dan Informatika**
 - Masih adanya daerah blank spot
 - Belum meratanya pemanfaatan teknologi informasi oleh desa
 - Masih perlunya peningkatan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk menunjang sistem informasi
- J. Penanaman Modal**
 - Masih kurang optimalnya pengelolaan data investasi serta data potensi investasi Kabupaten Seluma yang dapat dipromosikan untuk menunjang peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Seluma
 - Masih kurang optimalnya pertumbuhan ijin realisasi investasi
 - Masih perlunya peningkatan sistem pelayanan investasi yang berbasis TIK, yang terintegrasi secara nasional.



- K.** Kepemudaan dan Olahraga
- Kurang meratanya sarana prasarana olah raga yang tersedia dan dalam kondisi baik, terutama pada kampung-kampung padat penduduk
 - Masih diperlukannya pembinaan dan pengembangan tenaga atlit dan pelatih profesional.
- L.** Statistik
- Masih adanya data penunjang perencanaan dan hasil pembangunan yang masih perlu validasi
- M.** Kebudayaan
- Masih ada bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan baik, karena pelibatan pemilik/pengelola cagar budaya dalam pengembangan kawasan sejarah/cagar budaya masih belum optimal
 - Masih adanya kelompok seni terdaftar yang belum layak tampil.
 - Belum adanya ruang publik yang belum menampilkan budaya lokal
 - Masih belum optimalnya upaya penguatan budaya lokal dan upaya yang mendorong nilai-nilai kebangsaan.
- N.** Perpustakaan
- Masih kurang optimalnya kapasitas perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lembaga lainnya guna mendorong minat baca masyarakat
 - Masih belum optimalnya pengelolaan perpustakaan digital, guna mendorong minat baca masyarakat, dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal.
- O.** Kearsipan
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan
 - Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum ada
- P.** Kelautan dan Perikanan
- Masih belum optimalnya pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan
 - Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan oleh pembudidaya perikanan serta belum optimalnya pengolahan produk unggulan hasil perikanan
 - Pengelolaan TPI belum optimal



Q. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Masih belum optimalnya pemanfaatan fasilitasi akses permodalan untuk usaha mikro
- Masih ada produk usaha mikro yang belum layak diuji mutukan dan belum memiliki sertifikasi merk, halal dan ijin edar Badan POM
- Masih ada koperasi belum berklasifikasi AAB dan kurang optimalnya pertumbuhan anggota koperasi serta peningkatan volume usaha koperasi
- Jenis usaha koperasi yang kurang variatif dan masih rendahnya minat masyarakat untuk bergabung dalam keanggotaan sebuah lembaga koperasi
- Masih diperlukan upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal

4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Pariwisata

- Potensi Objek Wisata masuk dalam kawasan cagar Alam dan Hutan Lindung
- Sarana dan Prasana objek wisata yang belum memadai
- Belum optimalnya pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata

B. Pertanian

- Jalan usaha tani masih ada dalam kondisi tidak sesuai standar
- Belum optimalnya pembudidayaan, distribusi dan pemasaran pertanian (urban farming), peternakan dan perikanan sebagai peningkatan ketahanan pangan
- Masih kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya tanaman pangan dan hortikulturabinaan
- Masih terdapat pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang belum mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna dalam proses budidaya
- Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan
- Masih terdapat pembudidaya ternak binaan yang belum menggunakan Teknologi Tepat Guna.

C. Perdagangan

- Masih adanya UMKM yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya



- Masih adanya sentra dan pasar yang belum beroperasi secara optimal
- Masih kurangnya minat masyarakat terhadap produk lokal UMKM karena kurang promosi dan pemasaran terhadap produk-produk tersebut.

D. Transmigrasi

- Pengelolaan kawasan transmigrasi yang belum optimal

4.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

- Konsistensi Dokumen Perencanaan belum Optimal
- Sumber daya manusia perencana belum memadai
- Masih ada kegiatan yang belum berbasis program
- Belum sepenuhnya kegiatan menunjang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama Daerah
- Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan tahunannya belum berkualitas

B. Kepegawaian

- Belum meratanya tenaga kesehatan dan pendidik
- Belum terbangunnya sistem pengembangan pola karir dan kompetensi pegawai.

C. Keuangan

- Opini Atas Laporan Keuangan masih WDP
- Pengelolaan Aset yang belum optimal
- Masih adanya piutang pendapatan daerah yang belum tertagih
- Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan
- Belum optimalnya pendapatan dari dana Perimbangan dikarenakan keterlambatan dan petunjuk teknis yang senantiasa berubah.

D. Penelitian dan Pengembangan

- Belum optimalnya pelaksanaan Laboratorium Inovasi
- Sumber Daya Manusia dalam hal penelitian dan pengembangan masih rendah

E. Pengawasan

- Tindak lanjut atas LHP BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti

- Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah
- Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah.

4.2 Isu-Isu Strategis

4.2.1 Isu Internasional

A. Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
- 2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 4) Menurunkan angka kematian anak;
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu;
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
- 7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;

- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
- 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 12) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 13) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 14) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 15) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
- 16) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

B. Kesadaran Aksi Global terkait Climate Action (Aksi Iklim)

Konferensi Tingkat Tinggi Aksi Iklim (climate action) oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 2019 telah berhasil menyepakati roadmap untuk pijakan aksi bersama. Roadmap ini berfungsi sebagai pedoman dalam mendorong negara-negara dan stake holders lainnya untuk berbuat lebih banyak sejak roadmap disepakati. Kesadaran global akan aksi iklim ini lahir dari kenyataan bahwa tanpa akselerasi upaya perbaikan kondisi lingkungan secara bersama sama maka dunia

berisiko tidak mampu menghindari perubahan iklim yang tak terkendali dengan konsekuensi bencana bagi manusia dan semua sistem alam yang menopang keberlanjutan hidup umat manusia.

Pemanasan Global atau Global Warming yang terjadi saat ini bukanlah suatu masalah yang dapat diselesaikan dengan cepat. Perlu kesadaran bersama untuk menyelesaikan masalah yang akan dirasakan dampaknya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak perubahan iklim, seperti naiknya permukaan laut, akan menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Naiknya suhu laut mengakibatkan hasil perikanan akan menurun. Naiknya suhu udara akan meningkatkan berkembangnya penyakit. Peningkatan curah hujan akan meningkatkan banjir dan longsor, juga perubahan musim tanam, dan peningkatan penguapan serta peningkatan intensitas badai tropis akan menyebabkan rawan transportasi.

Sesuai roadmap terbaru yang telah disepakati oleh PBB, maka sangat diharapkan mulai tahun 2020 secara global harus mulai terjadi proses dekarbonisasi dimana salah satu sumber utama dari emisi karbon berasal dari aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan tantangan utama dalam aksi iklim ini, mengingat selalu ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan emisi karbon yang dihasilkan. Perlindungan terhadap ekosistem merupakan salah satu alternatif upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh semua negara, serta upaya untuk lebih beradaptasi untuk masa depan terkait pola hidup rendah emisi. Berdasarkan roadmap tersebut semua negara diharapkan mengurangi lebih banyak emisi berdasarkan Perjanjian Paris. Semua negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam aksi ini, dan terutama negara ekonomi terkemuka yang tergabung dalam G20 (Group of Twenty). Indonesia yang tergabung dalam negara-negara G20 dipastikan akan menjadi bagian dari negara negara utama yang diharapkan berperan lebih aktif dalam aksi iklim ini.

Ada tiga strategi yang harus dikembangkan dalam meminimalisasi dampak pemanasan global. Pertama, strategi kembali ke alam (back to nature) dengan menjaga kondisi alam agar tetap terpelihara dengan baik,. Kedua, strategi penyadaran masyarakat melalui kampanye, penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan terhadap lingkungan. Ketiga, strategi advokasi kebijakan pembangunan sehingga aspek pemanasan global masuk dalam kebijakan dan strategi pembangunan nasional, sehingga melalui kebijakan dan langkah nyata mampu menggerakkan aparat pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Dengan strategi-strategi yang dapat dilakukan bersama-sama oleh semua bagian masyarakat dapat menghasilkan keberhasilan Indonesia dalam melakukan adaptasi pemanasan global yang akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia. Karena posisi Indonesia yang sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi alam terbesar, diharapkan dapat mendukung program-program nasional maupun internasional dalam memerangi pemanasan global.

Perubahan Iklim dapat menyebabkan terjadinya bencana, terjadinya penurunann penurunan produksi pertanian dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator perubahan iklim yaitu suhu dan curah hujan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan potensi terjadinya bencana alam seperti lonsor maupun banjir. Kabupaten seluma memiliki area potensi banjir disepanjang sungai di 11 Kecamatan (Seluma, Seluma Utara, Seluma Timur , Seluma Selatan, Talo, Semidang Alas Maras, Sukaraja, Air Periukan, Semidang Alas, Ulu Talo dan Ilir Talo) dan potensi lonsor berada pada daerah yang berbatasan dengan bukit barisan. Kabupaten Seluma memiliki garis panjang pantai sepanjang 70 km, perubahan suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, hal ini menyebabkan beberapa desa sering terjadinya banjir rop. Perubahan suhu dan pola hujan dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman sehingga produksi menurun. Perekonomian Kabupaten Seluma sebagian besar berasal dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

C. Kesenjangan Global dalam Pembangunan Manusia (Global Inequality Human Development)

Perubahan paradigma dan pemahaman mengenai kesenjangan dalam pembangunan manusia (human development) merupakan salah satu hal utama yang ditekankan dalam laporan “Human Development Report 2019” oleh PBB. Lebih lanjut lagi diperlukan perspektif yang lebih menyeluruh dan luas terkait pemahaman kesenjangan dalam pembangunan manusia. Kesenjangan diharapkan tidak lagi dilihat hanya sebagai indikator yang hanya memiliki dimensi tunggal. Kerangka pikir terbaru dalam melihat kesenjangan mengharuskan pemangku kepentingan melihat kesenjangan. Pertama, lebih dari sekedar melihat kesenjangan pendapatan (ekonomi) sebagai indilator utama. Kedua, kesenjangan arus dilihat lebih dari hanya sekedar angka jauh tidaknya dari nilai rata-rata kondisi umum. Sedangkan ketiga, kesenjangan tidak bisa dilihat dari sudut pandang statik yang didasari kondisi saat

ini, tetapi harus mulai dilihat dengan sudut pandang dinamik, utamanya dampak perubahan-perubahan yang terjadi dimasa depan dan pengaruhnya terhadap upaya penanganan kesenjangan (Human Development Reports, 2020).

Pemahaman yang tepat terkait masalah kesenjangan akan sangat membantu kemajuan yang diterima sebagai hasil dari proses pembangunan. Laporan terakhir dari PBB menunjukkan bahwa, secara global, kemajuan pembangunan manusia terhambat sebesar hampir 20% sebagai akibat berbagai kesenjangan yang ada. Kesenjangan tersebut antara lain; pelayanan pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang tidak merata, serta kesenjangan dalam kualitas standar hidup. Selain itu laporan tersebut juga memprediksi bahwa dengan cara penanganan kesenjangan seperti saat ini maka setidaknya diperlukan waktu 100 tahun agar terwujud kesetaraan gender.

Secara umum, setidaknya hingga 2018, dampak kesenjangan di Indonesia terhadap berkurangnya nilai Human Development Index (HDI) masih lebih baik bila dibanding dengan rata-rata dunia. Akan tetapi bila dilihat dari tren jangka panjang terlihat bahwa tren yang terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir relatif stagnan sedangkan tren dunia mengalami penurunan. Selain itu dikawasan Asia timur dan Pasifik, secara rata-rata, terlihat tren yang terus menurun dengan signifikan dan bahkan sejak tahun 2017 mampu menunjukkan hasil yang lebih baik daripada kondisi di Indonesia. Dalam konteks persaingan global tentunya hal ini perlu mendapat perhatian serius bagi pemerintah Indonesia dan khususnya daerah-daerah di Indonesia yang berencana untuk bersaing secara global dan menjadi bagian dalam perekonomian global.

D. Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 sudah di depan mata, diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup populasi di seluruh dunia dan diperkirakan hal ini akan membuat pergeseran lanskap bisnis dan sosial. Selain mendorong terbukanya pasar yang baru, Revolusi industri keempat pada era digital ini juga menjanjikan keuntungan jangka panjang berupa efisiensi dan produktivitas. Proses bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa akan menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk itu perusahaan harus memanfaatkan teknologi baru dan berkembang untuk dapat mencapai tingkat efisiensi produksi dan konsumsi yang lebih tinggi, dan ekspansi ke pasar-pasar baru.



Pada bidang ekonomi pengaruh disruption ini sangat jelas terlihat. Bidang pekerjaan baru bermunculan dan sebagian pekerjaan lama berangsur hilang. Banyak pekerjaan biasanya dilakukan oleh tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin atau robot, yang berakibat kepada hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang-bidang tersebut. Akan tetapi disisi lain memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya. Pada saat ini sudah mulai bermunculan pekerjaan baru seperti; data miner, analis big data, ilmuwan kecerdasan buatan (artificial intelligence), cyber security, application designer, gene designer, dan lain lain. Pada bidang organisasi dan institusi publik, disruption ini memaksa bidang tersebut untuk memikirkan ulang dan beradaptasi terkait bagaimana seharusnya mereka beroperasi di era ini. Pada masa revolusi industri sebelumnya, seorang pengambil keputusan baik pada pemerintahan maupun organisasi bisnis dan sosial memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan menganalisa sebuah masalah yang muncul dan memutuskan respon yang diperlukan. Hal tersebut tidak berlaku lagi untuk era revolusi industri 4.0. Dalam era ini respon serta pengambilan keputusan harus cepat, sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisa big data dan perlu bantuan dari kecerdasan buatan.

Pada bidang sosial kemasyarakatan revolusi industri 4.0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efeknegatif. Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat mampu untuk, disatu sisi, menyerap, menampung dan menerima modernitas baru tetapi disisi lain, tetap bisa mengamalkan kepercayaan dan nilai-nilai luhur yang mereka percayai. Hal ini berdampak pada munculnya kegalauan tersediri bagi masyarakat/komunitas tertentu. Fenomena lain yang muncul dalam era ini sebagai dampak dari proses digitalisasi adalah “me-centered emergency” (berfokus dan mementingkan diri sendiri) dalam masyarakat. Secara lebih luas dampak dari revolusi industri terlihat pada perubahan tingkah laku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan sebagainya.

Bila disikapi dengan positif maka era ini sebenarnya membawa harapan, peluang dan juga tantangan. Peluang terbesar secara makro ekonomi adalah proses otomatisasi dan digitalisasi berpeluang meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi salah satu tantangan terbesar dari sisi makro ekonomi terkait

dengan masalah ketenagakerjaan, terutama karena akan hilangnya berbagai jenis pekerjaan tradisional karena digantikan dengan sistem, aplikasi dan mesin/robot. Hal ini tentunya harus mulai dipikirkan dan diantisipasi agar mampu meredam dampak negatif yang timbul.

Revolusi Industri 4.0 mempunyai implikasi yang luar biasa dalam tatanan pembangunan wilayah khususnya Kabupaten Seluma sehingga sumber daya manusia di Kabupaten Seluma sekarang harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi global. Dampak revolusi Industri 4.0 antara lain berdampak pada optimalisasi lahan pertanian, komputerisasi GIS berkembang pesat dan data spasial berkembang sehingga muncul impact assessment, perubahan Tata ruang. Selain itu, dampak virtual space yaitu kebutuhan ruang fisik berubah dan penataan ruang juga pun berubah.

Revolusi industri diikuti oleh pergeseran cara pandang, pergeseran pendekatan dan manajemen termasuk dalam pengembangan wilayah. Revolusi 4.0 memberikan berbagai kemudahan pada manusia untuk mengimplementasikan konsep pengembangan wilayah berkelanjutan berdasar tiga unsur utama yaitu keseimbangan ekologi, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial. Tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah berbasis revolusi industri 4.0 yaitu lambatnya memfasilitasi dan regulasi, pergeseran tenaga kerja dimana tenaga kerja manusia mulai tergantikan oleh kinerja komputer dan robot yang lebih efisien dan efektif, manajemen keberlimpahan data di publik.

4.2.2 Isu-Isu Strategis Nasional

A. RPJMN 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Visi diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa



6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
7. Seluruh Warga Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
8. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Arah presiden dalam pelaksanaan Nawacita :

1) Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global.

2) Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3) Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4) Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5) Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pandemi COVID-19 telah menyebar ke hampir semua negara di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun demikian waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat gangguan, serta kemampuan negara-negara didunia untuk



meresponsnya sangat bervariasi. Negara yang lebih besar dan maju umumnya memiliki sumber daya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk menghadapi pandemi sehingga memberikan kemampuan recovery yang lebih cepat. Namun bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk negara berkembang ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) memulai pandemi dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang kurang memadai dan hal ini menambah tingkat resiko serta dampaknya terhadap bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Sejak diumumkan covid-19 menjadi wabah atau pandemi global oleh World Healty Organisation (WHO) tanggal 11 Maret 2020, covid-19 menjadi sangat menakutkan bagi semua Negara karena penyebarannya yang sangat cepat. Berdasarkan pengumuman WHO tersebut banyak Negara yang akhirnya melakukan tindakan untuk mencegah semakin banyaknya korban dari Covid19 dari menjaga jarak (Social distancing) sampai dengan lockdown (tidak boleh meninggalkan tempat tinggal sama sekali). Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah, menjaga jarak, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurunnya berbagai sektor ekonomi akibat virus corona.

Sektor pertanian merupakan kebutuhan pangan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik hasil pertanian pangan dan perkebunan, peternakan, sayuran dan buahbuahan. Apalagi mewabahnya Covid-19 ini menuntut masyarakat untuk meningkatkan imunitas dengan antara lain mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi. Meskipun demikian, kondisi saat ini justru menjadi sebuah dilema bagi sektor pertanian. Walaupun peluang pasar produk pangan tetap terbuka lebar tetapi distribusi hasil pertanian terkendala karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan social distancing. Hal ini menyebabkan lesunya permintaan dan menurunnya harga produk pertanian dan peternakan di masa panen raya.

Penurunan harga komoditas di Indonesia berkaitan dengan dampak virus corona di China. Hal ini dikarenakan China merupakan eksportir terbesar di dunia termasuk Indonesia. Kondisi di Indonesia dipengaruhi oleh buruknya perdagangan di China, seperti adanya permintaan bahan baku di Cina. Terganggunya pasokan bahan baku sangat mempengaruhi para pelaku usaha yang akhirnya menutup usahanya sementara waktu karena ketidakmampuan membiayai kegiatan operasional perusahaan.



Penerimaan pajak juga mengalami penurunan akibat melemahnya kegiatan ekonomi dan harga minyak dunia yang terus turun. Pajak memiliki fungsi yaitu sebagai salah satu sumber dana pemerintahan pusat dan daerah untuk melaksanakan pembangunan. Penurunan pajak juga di perparah karena adanya perlambatan aktivitas ekonomi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemberian stimulus dan fasilitas serta penurunan harga komoditas. Sektor yang paling merasakan akibat dari virus corona adalah pariwisata. Saat ini sudah banyak Hotel dan restaurant yang menutup usahanya sementara waktu, baik dari kelas melati sampai dengan hotel berbintang karena tidak adanya pemasukan. Tempat wisata dan biro perjalanan juga melakukan hal yang sama. Padahal pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar bagi Negara. Seperti Bali, pemasukan utamanya adalah wisatawan dan china adalah penyumbang wisatawan terbanyak. Akibat penurunan pendapatan sektor pariwisata, banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga menyebabkan penurunan penghasilan masyarakat dan menambah pengangguran.

Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemic Covid-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah perfect storm yang setidaknya memberi tiga dampak besar bagi perekonomian. Dampak pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Dampak kedua yaitu pandemic menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Tidak berbeda dengan ekonomi dunia dan Indonesia, ekonomi Kabupaten Seluma juga terkena dampak negatif Covid-19. Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seluma ikut terdampak dimana pada Triwulan IV 2020 tumbuh minus -0,01%.

Menghadapi tantangan tersebut, ketahanan merupakan kebutuhan vital. Masalah jangka pendek pengelolaan kas untuk likuiditas dan solvabilitas jelas merupakan hal yang terpenting. Tetapi segera setelah itu, bisnis perlu bertindak berdasarkan rencana ketahanan yang lebih luas karena guncangan mulai meningkatkan struktur industri yang sudah mapan, mengatur ulang posisi kompetitif selamanya. Sebagian besar penduduk akan mengalami ketidakpastian dan tekanan

keuangan pribadi. Pimpinan sektor publik, swasta, dan sosial perlu membuat keputusan "melalui siklus" yang sulit yang menyeimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial, mengingat kohesi sosial sudah berada di bawah tekanan berat dari populisme dan tantangan lain yang ada sebelum virus korona.

4.2.3 Isu-Isu Strategis Daerah

Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Seluma merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu- strategis di level internasional, nasional dan regional Bengkulu. Isu Strategis merupakan jangkar (anchor) sebagai pengendali, dan sekaligus sebagai petunjuk arah (compass) yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Seluma pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPJMD. Isu Strategis Kabupaten Seluma dalam rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

A. Perlambatan Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam analisis pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Mengingat pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada akhirnya akan menghasilkan balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi akan meningkat.

Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi



penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

Dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan tren penurunan dimana pada tahun 2016 5 %, Tahun 2017 4,81 %, Tahun 2018 4.80 %, Tahun 2019 4,93 % dan Tahun 2020 -0.01 %. Walaupun lapangan usaha pertanian masih merupakan yang terbesar, namun peranannya dalam perekonomian Kabupaten Seluma terus menurun dari tahun ke tahun. Dengan kontribusi yang hampir setengah dari total PDRB tersebut, tentunya kondisi sektor pertanian sangat mempengaruhi total perekonomian Kabupaten Seluma. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu terus memberikan perhatian yang khusus untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian sehingga pertumbuhan output sektor ini semakin berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Revitalisasi sektor pertanian juga perlu dilakukan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi penduduk pedesaan, meningkatkan perizinan, serta mengurangi timpang tondol kebijakan antara pusat dan daerah akan memperbaiki struktur ongkos investasi industri dan ini menjadi daya tarik bagi para investor.

Selain itu, pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi perlu diperhatikan di Kabupaten Seluma. Tidak tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang ini cukup menghambat perekonomian Kabupaten Seluma. Kabupaten Seluma antara lain memerlukan infrastruktur seperti terminal angkutan dan pasar harian yang hingga saat ini masih belum tersedia. Apabila infrastruktur penunjang perekonomian ini dapat disediakan oleh pemerintah, maka akan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seluma.

Sesungguhnya partisipasi masyarakat Seluma dalam pembangunan ekonomi cukup tinggi, namun karena keterbatasan kemampuan dan keterampilan serta perilaku ekonomi masyarakat yang belum mampu menggerakkan roda perekonomian sesuai dengan tuntutan, menyebabkan PDRB perkapita masing-masing penduduk relatif rendah. Pelaku ekonomi di daerah ini pada umumnya memiliki profil usaha kecil dan menengah, manajemen tradisional, orientasi lokal, penggunaan teknologi



Tabel 4.1
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Kabupaten Seluma Tahun 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.70	2.67	2.62	2.60	0.42
B	Pertambangan dan Penggalian	2.81	3.12	4.02	4.39	-1.76
C	Industri Pengolahan	7.39	4.68	4.49	2.93	-3.33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.30	4.74	4.91	3.00	8.04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.17	1.25	2.60	2.10	1.06
F	Konstruksi	9.08	9.50	9.61	9.91	-0.13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.93	9.28	9.24	9.06	-2.18
H	Transportasi dan Pergudangan	6.73	5.31	5.56	8.01	1.44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.73	9.65	9.74	9.70	0.41
J	Informasi dan Komunikas	8.53	9.20	9.19	8.71	8.64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.50	3.49	2.29	3.50	9.26
L	Real Estate	8.73	7.52	8.32	8.15	0.93
M,N	Jasa Perusahaan	8.08	6.99	7.70	6.75	-1.26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.20	7.26	7.41	7.81	-0.64
P	Jasa Pendidikan	8.00	7.21	5.33	7.32	1.62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.76	9.27	8.03	8.72	5.64
,S,T,U	Jasa lainnya	9.12	10.98	9.33	9.30	-1.61
Produk Domestik Regional Bruto		5.00	4.81	4.80	4.93	-0.01
Produk Domestik Regional Bruto Non-Migas		5.00	4.81	4.80	4.93	-0.01

Sumber :BPS(PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016-2020), 2020

Berdasarkan jumlah PDRB pada harga konstan di Kabupaten Seluma pada tahun 2017 sektor pembentuk tertinggi yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar Rp 1.268.120,30 atau sebesar 50% dari total seluruh sektor, diikuti oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar Rp 222.108,60 atau sebesar 8,92% dari total seluruh sektor. Sedangkan sektor pembentuk paling rendah yaitu berada pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan jumlah sebesar Rp 88.464,50 atau sebesar 0.11%. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

PDRB Kabupaten Seluma Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017

No	SEKTOR	Jumlah (Juta Rupiah)	Persentase (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,268,120.30	50.90
B	Pertambangan dan Penggalian	88,464.50	3.55
C	Industri Pengolahan	216,689.20	8.70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,689.40	0.11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,822.70	0.19
F	Konstruksi	115,862.80	4.65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobi dan Sepeda Motor	178,844.10	7.18
H	Transportasi dan Pergudangan	53,350.20	2.14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34,006.80	1.37
J	Informasi dan Komunikasi	23,128.80	0.93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19,400.40	0.78
L	Real Estate	103,005.20	4.13
M,N	Jasa Perusahaan	2,886.60	0.12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	222,108.60	8.92
P	Jasa Pendidikan	122,777.50	4.93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20,525.20	0.82
R, S, T,U	Jasa Lainnya	14,579.20	0.59
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2,491,261.50	100.00

Sumber: Kabupaten Seluma Dalam Angka, 2018

Grafik 4.1

Grafik Struktur Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Seluma



Analisis LQ

Analisis Location Quotion (LQ) merupakan suatu indeks analisis yang digunakan untuk membandingkan komoditas di suatu sub-wilayah dalam aktivitas kegiatan ekonomi di wilayah yang lebih tinggi.

Teknik analisis LQ membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi 2 golongan. Adapun interpretasi dari hasil perhitungan rumus LQ diatas yaitu:

- Apabila hasil $LQ > 1$ artinya sektor ekonomi basis, yaitu kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah atau disebut sebagai *regional industry*.
- Apabila hasil $LQ < 1$ artinya sektor ekonomi non-basis, yaitu kegiatan ekonomi yang melayani pasar didalam daerah tersebut atau biasa disebut sebagai *local industry*.

Berdasarkan analisis LQ yang telah dilakukan, sektor basis yang terdapat di Kabupaten Seluma pada tahun 2017 yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; serta Administrasi Pemerintahan dan Pertanahan dan Jaminan Wajib Sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Analisis Shife Share

Analisis Shift Share (SSA) merupakan salah satu teknik analisis untuk memahami pergeseran struktur aktifitas di suatu lokasi tertentu dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas dalam dua titik waktu. Struktur aktifitas dari hasil analisis shift share



menjelaskan kemampuan berkompetisi suatu aktifitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktifitas dalam cakupan wilayah yang lebih besar. Terdapat 3 komponen yang mempengaruhi dalam analisis shift share, yaitu:

- **Komponen Laju Pertumbuhan (*Share*)**
Komponen ini menyatakan pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu yang menunjukkan dinamika total wilayah
- **Komponen Pergeseran Proporsional (*Proportional Shift*)**
Komponen ini menyatakan pertumbuhan total aktifitas tertentu secara relative, dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah yang menunjukkan dinamika sektor total dalam wilayah
- **Komponen Diferensial (*Differential Shift*)**
Komponen ini menjelaskan bagaimana tingkat kompetisi suatu sektor dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor tersebut dalam wilayah

Berdasarkan hasil analisis SSA yang telah dilakukan diketahui bahwa di Kabupaten Seluma pada yang bertumbuh cepat serta memiliki daya saing pada tahun 2017 terapat 6 sektor yaitu meliputi sektor Konstruksi dengan jumlah SSA 0.10, diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 0.05, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0.10, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 0.09, sektor Jasa Perusahaan sebesar 0.07, serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0.07. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.3

Hasil Analisis LQ PDRB Berdasarkan Harga Berlaku di Kabupate Seluma Pada Tahun 2017

No	SEKTOR	PRODUKSI KABUPATEN		PRODUKSI PROVINSI		ANALISIS LQ		RATA-RATA	INTERPRETASI
		2016	2017	2016	2017	2016	2017		
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,268,120.30	1,308,254.20	11,551,500.00	11,929,500.00	1.77	1.76	1.77	Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	88,464.50	91,109.80	1,472,900.00	1,487,800.00	-	-	-	Non basis
C	Industri Pengolahan	216,689.20	225,470.00	2,517,800.00	2,626,600.00	1.38	1.38	1.38	Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,689.40	2,816.80	36,300.00	38,700.00	1.19	1.17	1.18	Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,822.70	4,849.20	88,300.00	91,900.00	-	-	-	Non basis
F	Konstruksi	115,862.80	127,327.70	1,792,800.00	1,889,600.00	1.04	1.08	1.06	Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobi dan Sepeda Motor	178,844.10	194,077.80	5,976,300.00	6,496,000.00	0.48	0.48	0.48	Non basis
H	Transportasi dan Pergudangan	53,350.20	56,170.60	3,158,400.00	3,321,400.00	0.27	0.27	0.27	Non basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34,006.80	37,287.20	627,000.00	684,000.00	0.87	0.88	0.87	Non basis
J	Informasi dan Komunikasi	23,128.80	25,140.20	1,737,600.00	1,878,000.00	0.22	0.23	0.23	Non basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19,400.40	20,232.60	1,400,900.00	1,400,100.00	0.22	0.23	0.23	Non basis
L	Real Estate	103,005.20	112,093.30	1,808,200.00	1,891,200.00	0.92	0.95	0.93	Non basis
M,N	Jasa Perusahaan	2,886.60	3,088.20	899,700.00	952,700.00	0.05	0.05	0.05	Non basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	222,108.60	238,233.00	3,513,500.00	3,702,500.00	1.02	1.04	1.03	Basis
P	Jasa Pendidikan	122,777.50	131,625.80	2,572,000.00	2,679,100.00	0.77	0.79	0.78	Non basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20,525.20	22,336.90	625,900.00	682,500.00	0.53	0.53	0.53	Non basis
R, S, T, U	Jasa Lainnya	14,579.20	15,946.30	300,700.00	333,600.00	0.78	0.77	0.77	Non basis
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2,491,261.50	2,616,059.60	40,079,800.00	42,085,200.00				

Sumber: Hasil Perhitungan, 2018



Tabel 4.4

Hasil Analisis Shift Share PDRB Berdasarkan Harga Konstan di Kabupaten Seluma Tahun 2017

No	SEKTOR	PRODUKSI KABUPATEN		PRODUKSI PROVINSI		ANALISIS SHIFT SHARE					
		2016	2017	2016	2017	A	B	Interpretasi	C	Interpretasi	Jumlah SSA
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,268,120.30	1,308,254.20	11,551,500.00	11,929,500.00	0.05	(0.02)	Tumbuh Lambat	(0.001)	Tidak memiliki daya saing	0.03
B	Pertambangan dan Penggalian	88,464.50	91,109.80	1,472,900.00	1,487,800.00	0.05	(0.04)	Tumbuh Lambat	-	Tidak memiliki daya saing	0.01
C	Industri Pengolahan	216,689.20	225,470.00	2,517,800.00	2,626,600.00	0.05	(0.01)	Tumbuh Lambat	(0.003)	Tidak memiliki daya saing	0.04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,689.40	2,816.80	36,300.00	38,700.00	0.05	0.02	Tumbuh Cepat	(0.019)	Tidak memiliki daya saing	0.05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,822.70	4,849.20	88,300.00	91,900.00	0.05	(0.01)	Tumbuh Lambat	-	Tidak memiliki daya saing	0.04
F	Konstruksi	115,862.80	127,327.70	1,792,800.00	1,889,600.00	0.05	0.00	Tumbuh Cepat	0.045	Memiliki daya saing	0.10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobi dan Sepeda Motor	178,844.10	194,077.80	5,976,300.00	6,496,000.00	0.05	0.04	Tumbuh cepat	(0.002)	Tidak memiliki daya saing	0.09
H	Transportasi dan Pergudangan	53,350.20	56,170.60	3,158,400.00	3,321,400.00	0.05	0.00	Tumbuh Cepat	0.001	Memiliki daya saing	0.05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34,006.80	37,287.20	627,000.00	684,000.00	0.05	0.04	Tumbuh cepat	0.006	Memiliki daya saing	0.10
J	Informasi dan Komunikasi	23,128.80	25,140.20	1,737,600.00	1,878,000.00	0.05	0.03	Tumbuh Cepat	0.006	Memiliki daya saing	0.09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19,400.40	20,232.60	1,400,900.00	1,400,100.00	0.05	(0.05)	Tumbuh Lambat	0.043	Memiliki daya saing	0.04
L	Real Estate	103,005.20	112,093.30	1,808,200.00	1,891,200.00	0.05	(0.00)	Tumbuh Lambat	0.042	Memiliki daya saing	0.09
M,N	Jasa Perusahaan	2,886.60	3,088.20	899,700.00	952,700.00	0.05	0.01	Tumbuh cepat	0.011	Memiliki daya saing	0.07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	222,108.60	238,233.00	3,513,500.00	3,702,500.00	0.05	0.00	Tumbuh Cepat	0.019	Memiliki daya saing	0.07
P	Jasa Pendidikan	122,777.50	131,625.80	2,572,000.00	2,679,100.00	0.05	(0.01)	Tumbuh Lambat	0.030	Memiliki daya saing	0.07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20,525.20	22,336.90	625,900.00	682,500.00	0.05	0.04	Tumbuh Cepat	(0.002)	Tidak memiliki daya saing	0.09
R, S, T, U	Jasa Lainnya	14,579.20	15,946.30	300,700.00	333,600.00	0.05	0.06	Tumbuh cepat	(0.016)	Tidak memiliki daya saing	0.09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2,491,261.50	2,616,059.60	40,079,800.00	42,085,200.00						

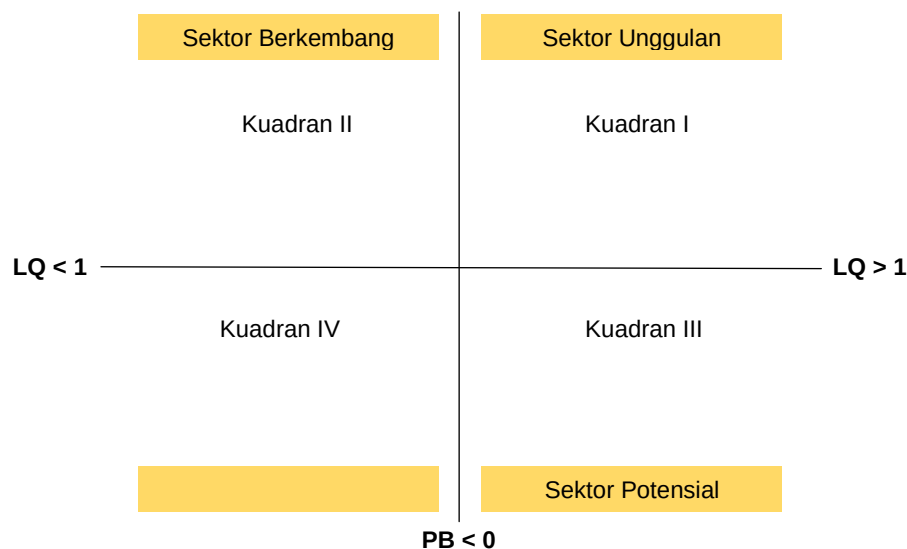
Sumber: Hasil Perhitungan, 2018

Analisis Kuadran

Berdasarkan analisis kuadran atau analisis pergerakan bersih (PB) yang telah dilakukan dapat ditentukan apakah sektor tersebut termasuk kedalam sektor unggulan, potensial, berkembang ataupun terbelakang. Penentuan kategori tersebut didasarkan pada parameter kuadran dengan melihat nilai LQ dan nilai PB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi dibawah ini.

Grafik 4.2

Grafik Ilustrasi Kuadran Pergerakan Bersih



Keterangan:

- Kuadran I

Apabila $LQ > 1$ dan $PB > 0$ artinya sektor tersebut termasuk sektor unggulan, kategori ini berarti bahwa kegiatan sektor di Kabupaten Seluma sangat dominan baik dalam hal pertumbuhannya maupun dari kontribusinya.

- Kuadran II

Apabila $LQ < 1$ dan $PB > 0$ artinya sektor tersebut termasuk sektor berkembang, kategori ini menunjukkan bahwa kegiatan sektor di Kabupaten Seluma sangat dominan pertumbuhannya namun dari kontribusinya masih kecil. Sektor ini dapat ditingkatkan kontribusinya untuk dipicu menjadi sektor yang dominan

- Kuadran III



Apabila $LQ > 1$ dan $PB < 0$ artinya sektor tersebut termasuk sektor potensial, Kategori ini menyatakan bahwa kegiatan sektor di Kabupaten Seluma pertumbuhannya kecil tetapi memiliki kontribusi yang besar. Sektor ini bisa jadi merupakan sektor yang sedang mengalami penurunan

- Kuadran IV

Apabila $LQ < 1$ dan $PB < 0$ artinya sektor tersebut termasuk sektor terbelkangan, Kategori ini berarti bahwa kegiatan sektor di Kabupaten Seluma baik dalam hal pertumbuhan maupun kontribusinya sangat kecil. Sektor ini merupakan sektor yang strateginya harus segera dievaluasi dan dirubah

Berdasarkan hasil analisis kuadran yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat 6 sektor yang berada dalam kuadran I artinya termasuk ke dalam kategori sektor unggulan yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Kontruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Lainnya. Sedangkan pada mayoritas sektor-sektor lainnya berada pada sektor berkembang seperti Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan sebagainya. Selain itu, terdapat 1 sektor yang berada di posisi sektor terbelakang yaitu sektor Jasa dan Keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.5

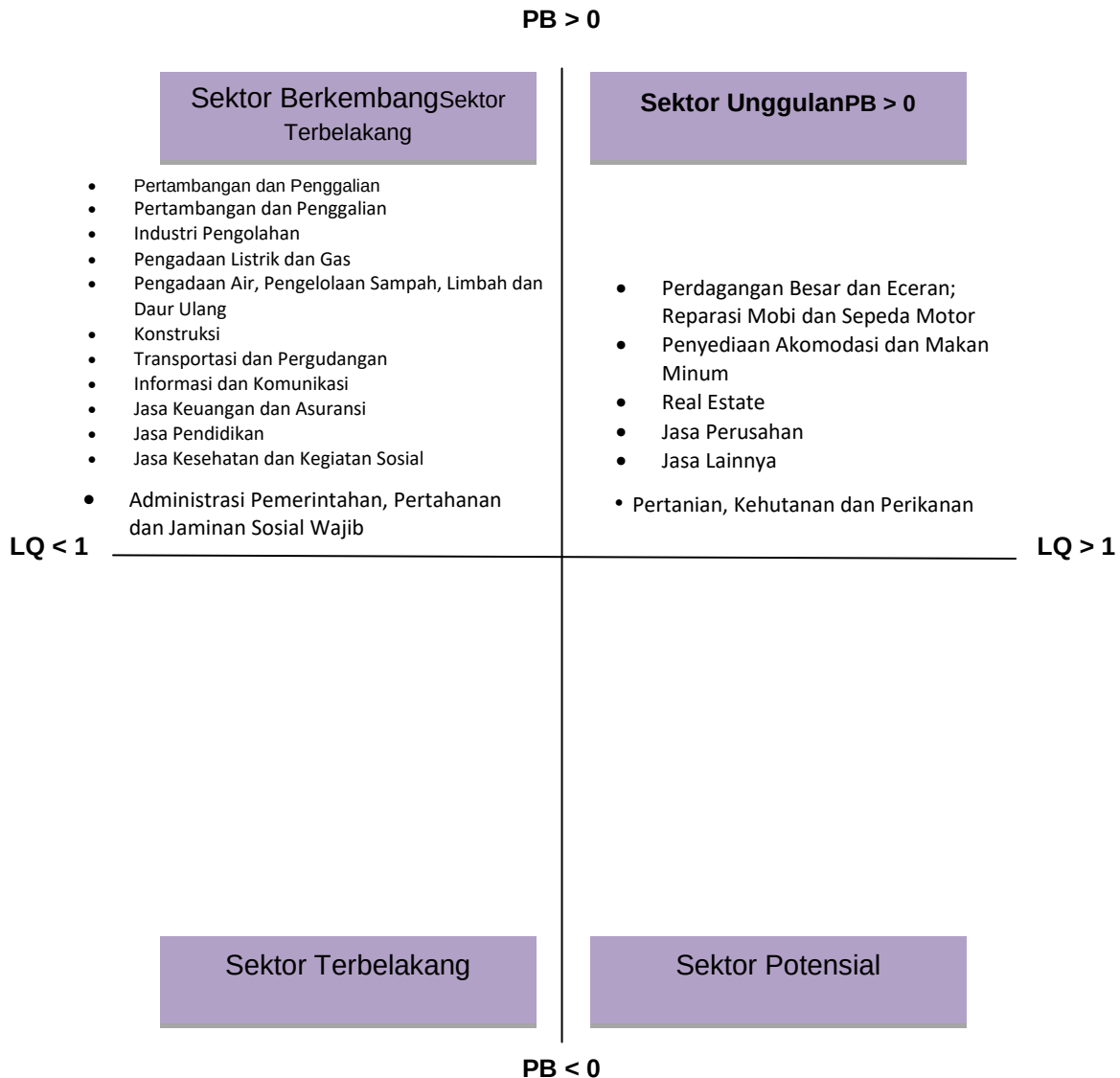
Hasil Analisis Pergerakan Bersih PDRB Berdasarkan Harga Konstan di Kabupaten Seluma Tahun 2017

No	SEKTOR	LQ	Interpretasi	PB	Interpretasi	Kesimpulan
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.89	LQ>1	0.03	Progresif	Sektor Potensial
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	LQ<1	0.01	Progresif	Sektor Berkembang
C	Industri Pengolahan	0.34	LQ<1	0.04	Progresif	Sektor Berkembang
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.02	LQ<1	0.07	Progresif	Sektor Berkembang
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	LQ<1	0.04	Progresif	Sektor Berkembang
F	Konstruksi	0.33	LQ<1	0.05	Progresif	Sektor Berkembang
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobi dan Sepeda Motor	1.02	LQ>1	0.09	Progresif	Sektor Unggulan
H	Transportasi dan Pergudangan	0.27	LQ<1	0.05	Progresif	Sektor Berkembang
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.35	LQ>1	0.09	Progresif	Sektor Unggulan
J	Informasi dan Komunikasi	0.12	LQ<1	0.08	Progresif	Sektor Berkembang
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.12	LQ<1	(0.00)	Mundur	Sektor Berkembang
L	Real Estate	1.44	LQ>1	0.05	Progresif	Sektor Unggulan
M,N	Jasa Perusahaan	1.27	LQ>1	0.06	Progresif	Sektor Unggulan
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.84	LQ<1	0.05	Progresif	Sektor Terbelakang
P	Jasa Pendidikan	0.83	LQ<1	0.04	Progresif	Sektor Berkembang
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.63	LQ<1	0.09	Progresif	Sektor Berkembang
R, S, T,U	Jasa Lainnya	1.59	LQ>1	0.11	Progresif	Sektor Unggulan

Sumber: Hasil Perhiungan, 2018



Grafik 4.3
Grafik Hasil Analisis Kuadran PDRB Berdasarkan Harga Konstan di Kabupaten Seluma



B. Infrastruktur dasar yang kurang memadai

Infrastruktur dasar merupakan salah satu permasalahan utama di Kabupaten Seluma. Masih banyak ditemukan jalan dan jembatan dalam kondisi rusak. Selain itu cakupan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan masih sangat rendah. Infrastruktur dasar bukan hanya difokuskan kepada jalan dan jembatan namun juga



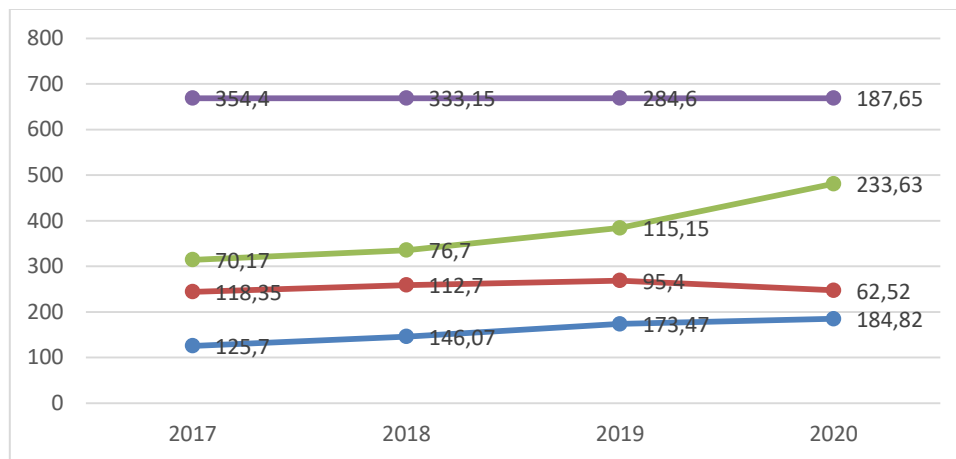
harus dapat meningkatkan infrastruktur dasar lainnya yang mencakup air bersih, sanitasi dan persampahan. Beberapa variabel yang mengilustrasikan isi ini, antara lain :

- Masih banyaknya jalan kabupaten dan jembatan dalam kondisi rusak
- Masih rendahnya persentase penduduk yang memiliki akses air bersih
- Masih rendahnya persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi

Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Wewenang pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/bupati. Selain jalan kabupaten, pemerintah kabupaten pun berwenang atas penyelenggaraan jalan desa.

Grafik 4.4

Kondisi jalan Kabupaten Seluma Tahun 2017-2020



Tabel 4.6

Kondisi jalan Kabupaten Seluma Tahun 2017-2020

NO	KONDISI JALAN	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi baik	125,7	146,07	173,47	184,82
2	kondisi sedang	118,35	112,7	95,4	62,52
3	kondisi rusak ringan	70,17	76,7	115,15	233,63
4	kondisi rusak berat	354,4	333,15	284,6	187,65

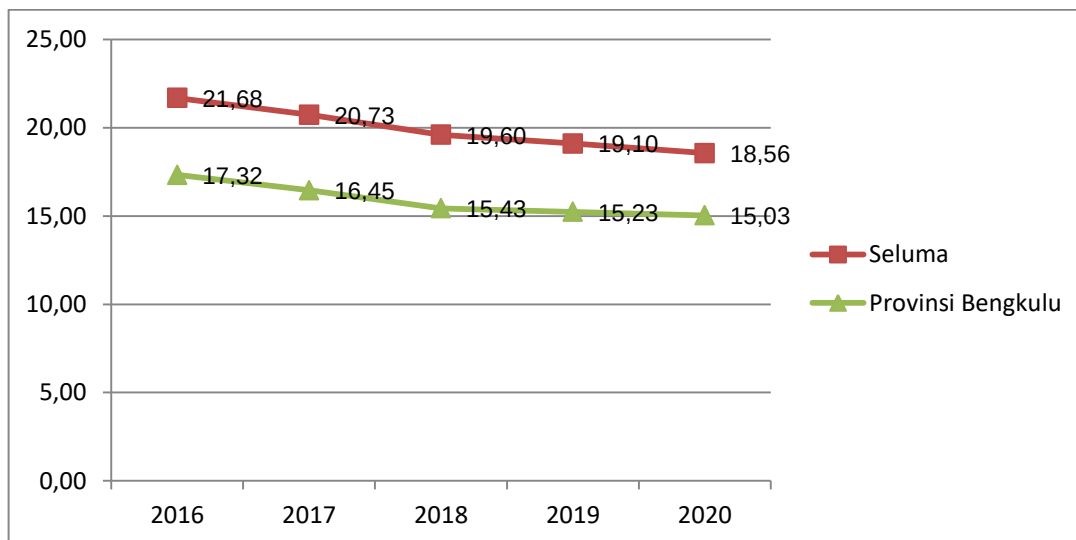
Sumber : SIPDJ Kementerian PUPR, 2021

c. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi

Dalam kurun waktu 2016-2020 Kabupaten Seluma tingkat kemiskinan berada diatas Provinsi Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Seluma merupakan Kabupaten tingkat kemiskinan tinggi dalam kurun waktu tersebut.

Grafik 4.5

**Grafik Angka Kemiskinan Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu
kurun waktu 2016-2020**



**D. Masih adanya desa tertinggal dan sangat tertinggal**

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal social. Pada tahun 2020 status indeks Desa Membangun yang tertinggal sebanyak 54 Desa dan Sangat Tertinggal sebanyak 3 Desa.

E. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Bermartabat

- Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik secara merata
- Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata
- Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka stunting
- Belum Optimalnya pelayanan dibidang kesehatan
- Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak bencana covid 19



F. Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

- Belum optimalnya pencapaian nilai SAKIP
- Opini BPK yang belum optimal, terkait dengan pengelolaan aset daerah dan tindak lanjut temuan BPK
- Belum optimalnya konsistensi dokumen perencanaan
- Menyederhanakan birokrasi, kemudahan dan kecepatan layanan public melalui inovasi berbasis Information and Communication Technology (ICT)
- Sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum optimal



Rajmd Kab Seluma 2021-2026

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi Pembangunan

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) sebagai suatu komitmen atau janji kepada masyarakat. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang daerah. Berbagai isu strategis di Kabupaten Seluma diantaranya seperti perlambatan pertumbuhan PDRB, infrastruktur dasar yang kurang memadai dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi menjadi isu strategis yang mendorong terciptanya visi Kepala Daerah. Maka Visi Kabupaten Seluma untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut: **“MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP”**

Dalam bahasa Serawai “Mila Besamo Untuk Seluma ALAP” dapat diartikan “Mari Bersama Untuk Seluma Elok”. Untuk formulasi dari rumusan **ALAP** tersebut dapat dijabarkan berikut :

Maksud dari **A** adalah **AKSESIBILITAS**

Maksud dari **L** adalah **LAPANGAN KERJA**

Maksud dari **A** adalah **ADAT**

Maksud dari **P** adalah **PEREKONOMIAN**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 daerah yang ingin dicapai. Melalui visi pembangunan Kabupaten Seluma selama lima tahun diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Seluma secara bersama-sama mengoptimalkan kapasitasnya untuk terwujudnya Kabupaten Selumamenjadi ALAP. Untuk mewujudkan Seluma yang ALAP dijelaskan dalam pokok-pokok visi sebagai berikut :



TABEL 5.1
Perumusan Penjelasan Visi Kabupaten Seluma 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Mila Besamo Untuk Seluma Alap	Mewujudkan Kemantapan Infrastruktur	Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, begitu pula di Kabupaten Seluma. Infrastruktur yang memadai akan sangat membantu berkembangnya masyarakat di suatu wilayah, kegiatan usaha, ekonomi dan sosial di suatu wilayah semakin berkembang seiring dengan semakin baiknya ketersediaan infrastruktur. Kondisi infrastruktur di Kabupaten Seluma kurang memadai masih banyaknya jalan kabupaten dan jembatan dalam kondisi rusak, masih rendahnya persentase penduduk yang memiliki akses air bersih, masih rendahnya persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi. Maka, selama lima tahun ke depan pembangunan infrastruktur untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkesinambungan.



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Mewujudkan Desa Maju	Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinanDesa. Dari data IDM Tahun 2020 Kabupaten Seluma dari 182 Desa terdapat 19 Desa. Oleh Karena itu, selama lima tahun kedepan akan penguatan pembangunan akan diarahkan untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan untuk mewujudkan Seluma ALAP
	Mewujudkan Kemudahan Berinvestasi	Perbaikan perlu dilakukan pada layanan birokrasi perizinan di daerah. Dukungan teknologi yang melekat dalam reformasi kelembagaan diyakini akan mampu mempermudah implementasi perbaikan proses layanan perizinan di daerah, rasionalisasi izin-izin usaha melalui penyederhanaan persyaratan, penggabungan, dan penghapusan izin-izin yang tidak diperlukan. Pelayanan perizinan yang baik akan mengundang investor untuk dapat berinvestasi di Kabupaten Seluma



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik	Pembangunan Kabupaten Seluma dalam 5 tahun kedepan diharapkan pelayanan publik kabupaten Seluma meningkat. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat, akuntabilitas kinerja dan keuangan dapat meningkat.
	Pelestarian Budaya	Kebudayaan merupakan asset penting dalam kontribusi pembangunan. Melestarikan dan mendayagunakan kebudayaan dapat menjadi hal yang efektif dalam mendorong ekonomi. Melestarikan dan mendayagunakan kebudayaan dapat menjadi hal yang efektif dalam mendorong ekonomi

5.2. Misi Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma tahun 2021-2026 berorientasi pada pemantapan infrastruktur dasar, desa maju, kemudayan berinvestasi, pelayanan publik, seluma yang beragama dan berbudaya sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Seluma yang ALAP. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD yang dikembangkan telah memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 disusun untuk memperjelas yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi periode Tahun 2021-2026. Sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan RPJMD Kabupaten Seluma, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Seluma 2021-2026 sebagai berikut:



5.2.1 Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang permukiman, bidang sosial serta memajukan bidang kebudayaan

Keunggulan potensi sumberdaya alam di Kabupaten Seluma, tidaklah bernilai ekonomis tinggi serta berjalan dengan baik tanpa didukung oleh infrastruktur daerah yang berkualitas. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur menjadi sentra dalam pengembangan ekonomi suatu daerah. Peningkatan kualitas infrastruktur menjadi penting dalam pembangunan lima tahun kedepan. Selain infrastruktur Kabupaten Seluma juga akan berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan Rumah Layak Huni, dan pelestarian budaya.

5.2.2 Optimalisasi sumber daya daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif

Selain potensi SDM, Kabupaten Seluma juga memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Secara geografis Kabupaten Seluma memiliki karakteristik kondisi geografis yang mendukung investasi daerah dan peningkatan perekonomian daerah. Potensi alam yang melimpah dan berkarakteristik di Kabupaten Seluma harus dapat mewujudkan perekonomian daerah yang progresif, mandiri dan berwawasan lingkungan. Kebijakankebijakan strategis didalam mewujudkan daya saing perekonomian daerah dan investasi yang kondusif dilakukan melalui peningkatan investasi PMA dan PDM, peningkatan ekonomi sector unggulan, peningkatan sosial ekonomi desa, dan peningkatan pemanfaatan lingkungan berkelanjutan.

5.2.3 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi

Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan yang ALAP di Kabupaten Seluma, maka birokrasi harus menjalankan fungsinya sebagai pelayan bagi masyarakat Kabupaten Seluma. Pembangunan pemerintahan harus dilaksanakan secara bersih dan transparan serta mewujudkan dari prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Seluma melakukan



kebijakan-kebijakan strategis meliputi meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kinerja laporan keuangan, meningkatkan kinerja reformasi birokrasi, meningkatkan AKIP dan meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan berbasis teknologi dan informasi.

5.3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Seluma yang telah disusun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Seluma. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran menurut masing-masing misi dalam RPJMD.

a. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang permukiman, bidang sosial serta memajukan bidang kebudayaan

Misi 1 memiliki tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengentaskan kemiskinan, mengurangi resiko bencana. Tujuan misi ini di ukur dengan indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, indeks resiko bencana. Misi 1 memiliki sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Untuk Menunjang Pemenuhan Pelayanan Dasar
2. Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan
3. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan
4. Berkembangnya Kebudayaan Seluma
5. Menjamin Perlindungan Sosial
6. Mengurangi Pengangguran Terbuka
7. Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap bencana



b. Optimalisasi sumber daya daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif

Misi 2 memiliki tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Tujuan misi ini diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Misi 2 memiliki sasaran yaitu :

1. Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan
2. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN
3. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan sosial desa

c. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi

Misi 3 memiliki tujuan meningkatkan nilai kepuasan masyarakat atas layanan publik. Tujuan misi ini diukur dengan indeks reformasi birokrasi. Misi 3 ini memiliki sasaran yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah.



Tabel 5.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab
Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang permukiman, bidang sosial serta memajukan bidang kebudayaan								
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Untuk Menunjang Pemenuhan Pelayanan Dasar	Indeks Infrastruktur	Meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Meningkatnya kualitas jaringan jalan kabupaten	Persentase panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Perentase Panjang Jalan Kondisi baik kabupaten dalam kondisi sedang	
				Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	
				Terpenuhinya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Persentase cakupan layanan akses sanitasi layak	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang terakses MCK	
							Persentase Rumah Tangga yang terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	
							Persentase Rumah Tangga yang terakses Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
				Meningkatkan Aksesibilitas Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi Masyarakat	Persentase Wilayah Kabupaten Seluma yang terjangkau internet	Mengurangi wilayah blankspot di Kabupaten Seluma	Persentase penurunan wilayah blankspot di Kabupaten Seluma	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
				Meningkatkan Pemenuhan Pengembangan dan Pelayanan Transportasi	Persentase Pemenuhan Pengembangan Pelayanan Transportasi	Peningkatan Pemenuhan Pengembangan Pelayanan Transportasi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi	Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Perhubungan

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab
		Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan	Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	
							Angka Partisipasi Murni (APM) SD	
							Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	
							Persentase penduduk	
							tidak sekolah mengikuti	
							Pendidikan Non Formal	
				Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Persentase Pendidikan Dasar berakreditasi Minimal B	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SD	
							Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SMP	
							Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik PAUD yang berKualifikasi S1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
							Persentase tenaga pendidik SD yang sudah tersertifikasi	
							Persentase tenaga pendidik SMP yang sudah tersertifikasi	
				Peningkatan Kreatifitas pemuda dan prestasi olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Meningkatkan kreatifitas pemuda dalam pembangunan daerah	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	"Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	"Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab
				Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat	Persentase Kegiatan Keagamaan dan kesra yang difasilitasi	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat	Persentase Kegiatan Keagamaan dan kesra yang difasilitasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Indeks Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Menurunnya angka kematian	Angka Kematian Kasar (AKK)	Dinas Kesehatan
							Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	
							Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran	
							Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup	
						Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan	
							Prevalensi Stunting	
				Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang pelayanan Kesehatan	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Pelayanan Kesehatan dari Kemenpan-RB	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang pelayanan Kesehatan	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Pelayanan Kesehatan dari Kemenpan-RB	Rumah Sakit Umum Daerah
		Berkembangnya Kebudayaan Seluma	Indeks Kebudayaan	Meningkatkan Kebudayaan Seluma	Indeks Kebudayaan	Meningkatnya Kebudayaan Seluma	Perentase budaya seluma yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Mengentaskan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Menjamin Perlindungan Sosial	1. Indeks Kedalaman Kemiskinan 2. Indeks Keparahan Kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Meningkatnya perubahan perilaku penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang merubah perilaku	Dinas Sosial

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab
				sosial (PMKS)				
				Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Berpenghasilan rendah	Persentase Penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan
				Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Permukiman Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	Menurunkan persentase Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Permukiman Layak Huni	Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Perhubungan
						Menurunkan Luasan Kawasan Kumuh	Persentase Pengurangan Luas kawasan permukiman kumuh	
						Menangani Rumah Korban Bencana	Persentase Perbaikan Rumah Akibat Bencana	
						Penangan Rumah Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Pemerintah	Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah	
				Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Predikat Kabupaten Seluma Layak Anak	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Persentase penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	
				Meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Tersedianya cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
						Meningkatnya kawasan mandiri pangan	Jumlah desa mandiri pangan	
		Mengurangi Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks pembangunan ketenagakerjaan	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab
Mengurangi Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Menghindari terjadinya bencana dan mengurangi resiko bencana mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana.	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatkan kesiap siagaan terhadap bencana	1. Desa Tangguh Bencana 2. Persentase Sekolah aman bencana di kawasan rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana
						Meningkatkan pelayanan tanggap darurat	Cakupan korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	
						Meningkatkan pelayanan pasca bencana	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	
				Meningkatkan kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Meningkatnya jumlah sarana Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
				Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup	1. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)	Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
						Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau	Persentase RTH yang dikelola dengan baik	
				Mengurangi Potensi Terjadinya Konflik di Kabupaten Seluma	Persentase Konflik yang ditangani	Meningkatkan Deteksi Dini terhadap Potensi Konflik	Persentase Potensi Konflik yang ditangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Misi 2 :Optimalisasi sumber daya daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif								
Peningkatan Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan PDRB Sektor	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor	Meningkatnya pertumbuhan sub	Persentase pertumbuhan sub	Meningkatnya produksi dan	Jumlah produksi komoditi tanaman	Dinas Pertanian

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab
Ekonomi dan investasi		Unggulan	Unggulan	sektor pertanian, perkebunan dan peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	sektor Pertanian terhadap PDRB	Produktivitas Tanaman Pangan Unggulan	pangan : a. Tanaman Padi (ton) b. Jagung (ton)	
						Meningkatnya produksi komoditas perkebunan unggulan	Jumlah produksi komoditi utama tanaman perkebunan : a. Kelapa Sawit (ton) b. Karet (ton) c. Kopi (ton)	
						Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak : a. Sapi; b. Kerbau; c. Kambing ; d. Ayam Ras; e. Ayam Buras	
				Meningkatkan kualitas jaringan irigasi kabupaten	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi mantap	Meningkatkan Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)	Dinas Perikanan
							Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	
				Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerahperdagangan	Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat	Persentase pasar tipe c dalam kondisi baik	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Meningkatkan ekonomi masyarakat dibidang kepariwisataan	Lama kunjungan Wisata	Meningkatnya kunjungan wisnusdan wisman	jumlah wisman	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
							jumlah wisnus	
						meningkatnya pelaku	jumlah pelaku	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab
						ekonomi kreatif berbasis seni dan kuliner dan produk ekonomi kreatif	ekonomi kreatif berbasis seni dan kuliner dan produk ekonomi kreatif	
		Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Daerah (PMA)	Meningkatnya Investasi	Nilai investasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Rasio daya serap tenaga kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Nilai Investasi Daerah (PMDN)				Persentase peningkatan investasi	
		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi	Indeks Desa Membangun	Mewujudkan desa yang mandiri dan maju	Persentase Desa Tertinggal (%)	Meningkatnya peran lembaga ekonomi	Bumdes yang aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase Desa Sangat Tertinggal (%)		LPM yang aktif	
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki Produk unggulan	
Misi III : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi								
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang berkualitas	Nilai Komponen perencanaan dan pengukuran pada SAKIP Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai perencanaan kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai pengukuran kinerja	
				Meningkatkan tata kelola kinerja OPD	Nilai evaluasi SAKIP OPD	Meningkatkannya tata kelola kinerja OPD	Nilai evaluasi SAKIP OPD	Seluruh OPD
				Meningkatnya Penegakan perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola keuangan	Nilai komponen evaluasi kinerja pada SAKIP daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola keuangan	Nilai komponen evaluasi kinerja pada SAKIP daerah	Sekretariat Daerah
				Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola	Peningkatan nilai indeks RB	Meningkatnya reformasi birokrasi	Persentase OPD yang menyampaikan laporan RB tepat	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab
				kinerja Pemerintah Daerah			waktu pada 8 area perubahan	
				Meningkatkan pengelolaan pelayanan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase Pelaksanaan pengelolaan pelayanan pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pemilihan penyedia	Persentase pelaksanaan pengelolaan paket PBJ melalui pemilihan penyedia	
				Meningkatkan pengelolaan pelayanan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase Pelaksanaan pengelolaan pelayanan pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)	Persentase pelayanan pengelolaan LPSE	
				Meningkatkan pengendalian dan pelaporan pembangunan	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan APBD	Meningkatnya pengendalian dan pelaporan pembangunan	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan APBD	
				Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	
				Meningkatnya efektifitas kebijakan perekonomian daerah dan SDA	Persentase peningkatan efektifitas kebijakan perekonomian daerah dan SDA	Meningkatnya pembinaan dan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian	Persentase pembinaan dan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya capaian kesepakatan propempera	Prosentase kesepakatan rancangan peraturan daerah	
						Meningkatnya tata kelola pelaksanaan rapat-rapat Dewan	Prosentase ketepatan waktu dan bahan rapat	Sekretariat DPRD
				Meningkatkan Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan Profesionalitas Pegawai	Indeks Profesionalitas ASN	
					Meningkatkan Kualitas Informasi Kepegawaian	Indeks kepuasan ASN Terhadap pelayanan Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab
				Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan dari Kemenpan-RB	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan dari Kemenpan-RB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mampu Mencapai Kepuasan Masyarakat	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Ketepatan waktu penyelesaian dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan	Rasio kepatuhan IMB	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan	1. Rasio kepatuhan IMB 2. Implementasi SIMBG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Terselenggaranya Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	
				Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase Konflik Tanah yang diselesaikan (Tanah Aset Pemda)	Menyelesaikan Konflik Pertanahan	Persentase Konflik Tanah yang diselesaikan (Tanah Aset Pemda)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
				Meningkatnya Pengembangan dan sistem administrasi Kearsipan	Jumlah arsip yang terkumpul, diselamatkan dan dilestarikan	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan	Persentase unit kearsipan yang tertib arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Persentase Tingkat ketersediaan arsip	
				Meningkatkan kualitas pelayanan public	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	ketepatan waktu penyelesaian dokumen izin pelayanan terpadu di Kecamatan	14 Kecamatan
							Persentase pengaduan masyarakat yang	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab
							ditindaklanjuti	
							Persentase Ketepatan waktu penyelesaian dokumen evaluasi RAPBdes	
			Opini BPK	Meningkatnya kualitas tata kelola pelaporan keuangan	Persentase PD laporan keuangannya sesuai dengan SAP	Meningkatnya kualitas tata kelola pelaporan keuangan	Persentase PD laporan keuangannya sesuai dengan SAP	Badan Keuangan Daerah
				Meningkatnya kualitas tata kelola aset daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola dengan akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola aset daerah	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik	
				Meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan internal	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan internal	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD	Badan Pendapatan Daerah
			Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK Daerah	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas kelitbangan	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Nilai SPBE	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Elektronik (e-Government)	Nilai SPBE	Meningkatnya Tata Kelola SPBE	Nilai Tata Kelola SPBE pelaksanaan SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik



Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 terdiri dari 5 (lima) Tujuan dan 11 (sebelas) sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Seluma. Pencapaian Indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi indikator kinerja utama (IKU) daerah yang didukung oleh indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Dengan demikian, target pencapaian pembangunan kedepan jelas dan dapat diukur.



Tabel 5.2

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PRORAM DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
VISI : MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP										
1	MISI 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang permukiman, bidang sosial serta memajukan bidang kebudayaan	Tujuan 1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	67.94	68.68	69.42	70.16	70.9	71.63	71,63
		Sasaran 1.1.1 :Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Untuk Menunjang Pemenuhan Pelayanan Dasar	Indeks Infrastruktur	44.93	47.18	49.53	52.01	54.61	57.34	57,34
		Sasaran 1.1.2 :Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan	Indeks Pendidikan	79.83	81.03	82.24	83.48	84.73	86	86,00
		Sasaran 1.1.3: Meningkatkan kualitas dan akses kesehatan	Indeks Kesehatan	76.25	77.17	78.1	79.03	79.98	80.94	80,94
		Sasaran 1.1.4 :Berkembangnya Kebudayaan Seluma	Indeks Pembangunan Kebudayaan	59.95	61.15	61.77	62.38	63.01	63.64	63,64
		Tujuan 1.2 : Mengentaskan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	17.57	16.78	16.00	15.21	14.42	13.63	13.63
		Sasaran 1.2.1 : Menjamin Perlindungan Sosial	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,57	2,45	2,32	2,21	2,10	1,99	1,99
			Indeks Keparahan Kemiskinan	2.85	2.62	2.41	2.22	2.04	1.88	1.88
		Sasaran 1.2.2 : Mengurangi Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran terbuka	2.42	2.29	2.17	2.04	1.92	1.79	1.79
		Tujuan 1.3 : Mengurangi resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	133	130	127	125	120	117	117
		Sasaran 1.3.1 : Meningkatkan Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Bencana	0,5	0,55	0,6	0,7	0,75	0,8	0,8
2	MISI 2 : Optimalisasi sumber daya daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif	Tujuan 2.1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	0.92	3.14	4.71	4.88	5.02	5.89	5,89
		Sasaran 2.1.1 :Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.42	1.71	2.57	2.66	2.73	3.21	3,21
			Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Jasa Lainnya	-1,61	3,34	5,02	5,19	5,35	6,27	6,27
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Makan Minum (unggulan)	0,93	5,03	7,56	7,82	8,05	9,44	9,44
			Laju Pertumbuhan PDRB	-2.18	3.82	5.75	5.95	6.12	7.19	7,19

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



NO	MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PRORAM DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Sektor Perdagangan Besar dan Receran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor							
		Sasaran 2.1.2 : Meningkatkan nilai investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Daerah (PMA) dan PMDN	1987.68	2007.557	2027.632	2047.909	2068.388	2089.072	2089.072
		Sasaran 2.1.3 Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan sosial desa	Indeks Desa Membangun	0.6898 (ber-kembang)	0,711 (Maju)	0,7322 (Maju)	0,7534 (Maju)	0,7746 (Maju)	0,7958 (Maju)	0,7958
3	MISI 3 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi	Tujuan 3.1 :Meningkatkan Nilai Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	CC	CC	CC	CC	CC
		Sasaran 3.1.1 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	CC	B	BB	BB	BB	BB	B
			Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Inovasi Daerah	2.675 (sangat Inovatif)	2.727	2.76	2.793	2.827	2.827	2.827
			Nilai SPBE	Kurang (1,19)	1.23	1.25	1.26	1.28	1.29	1,29

5.4 Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 memuat program prioritas pembangunan Kabupaten Seluma yang mendukung pelaksanaan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026. Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, maka untuk jangka menengah selama 5 (lima) tahun dalam RPJMD Kabupaten Seluma menetapkan 5 (lima) Prioritas Daerah ditambah dengan prioritas dalam penanganan dan pemulihan dampak covid-19.

1. Prioritas Pembangunan 1 : Seluma Seribu Jalan Mulus

Infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Seluma pada saat ini masih di dominasi oleh kondisi rusak ringan dan berat. Dari total panjang 668,62 Km jalan kabupaten di Kabupaten Seluma, sebesar 28,10% dalam kondisi rusak berat, 37,35% dalam kondisi rusak ringan dan 21,32% dalam kondisi baik, dengan kata lain, persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan keseluruhan panjang jalan kabupaten) pada tahun 2021 adalah 34,55%. Struktur jalan di Kabupaten Seluma terdiri dari jalan koral yaitu sepanjang 301,13 Km (45,04%), jalan aspal sepanjang 149,192 Km (22,42%), dan masih ditemukan jalan kabupaten dengan permukaan tanah yaitu sepanjang 110,95 km (16,59%).

Oleh karena itu prioritas pembangunan yang pertama ini di tujukan untuk Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai wujud dari pengurangan ketimpangan wilayah dan pemerataan pembangunan melalui Program Peningkatan Kualitas jalan dan jembatan untuk menunjang mobilitas penduduk, barang dan jasa, program peningkatan kualitas jalan dan jembatan menuju fasilitas kesehatan dan program peningkatan kualitas jalan dan jembatan menuju fasilitas pendidikan.

Program prioritas daerah yang merupakan penjabaran pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1 Kerangka Prioritas Pembangunan Kabupaten Seluma Pertama



2. Prioritas Pembangunan 2 : Seluma Desa Maju

Pembangunan Desa diberlakukan untuk memperkuat pondasi perekonomian, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang. Kabupaten Seluma memiliki 182 desa yang tersebar pada 13 Kecamatan, dengan jumlah desa sangat tertinggal 1 desa, 48 desa tertinggal dan 105 desa berkembang.

Dalam mewujudkan prioritas pembangunan yang ke dua ini maka perlu dilakukan pengoptimalisasian dari berbagai sektor seperti Kualitas pendidikan, Kualitas Pelayanan Kesehatan, ekonomi kreatif, penanganan air bersih dan sanitasi untuk mendorong ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan bagi desa.

Gambar 5.2. Kerangka Prioritas Pembangunan Kabupaten Seluma Kedua



3. Prioritas Pembangunan 3 : Seluma Mudah Berinvestasi

Kabupaten Seluma memiliki potensi alam dan potensi lainnya yang dapat mendorong peningkatan ekonomi. Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan peningkatan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, serta selaras dengan fokus peningkatan daya saing perekonomian daerah.

Pada prioritas ketiga ini dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modal di Kabupaten seluma baik modal asing dan modal dalam negeri. Upaya tersebut melalui penyederhanaan regulasi perizinan dan peningkatan investasi PMA dan PMDN.

Gambar 5.3 Kerangka Prioritas Pembangunan Kabupaten Seluma Ketiga



4. *Prioritas Pembangunan 4 : Seluma melayani*

Seluma melayani merupakan perwujudan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi. Apabila terdapat ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan yang bertanggung jawab adalah penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggaraan. Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayan terpadu. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan.

Pada prioritas keempat ini dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan pelayanan yang baik melalui pelayanan kecamatan terpadu, peningkatan inovasi pelayanan publik, peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dan penataan birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah dan penerapan e-government.

Gambar 5.4 Kerangka Prioritas Pembangunan Kabupaten Seluma Keempat

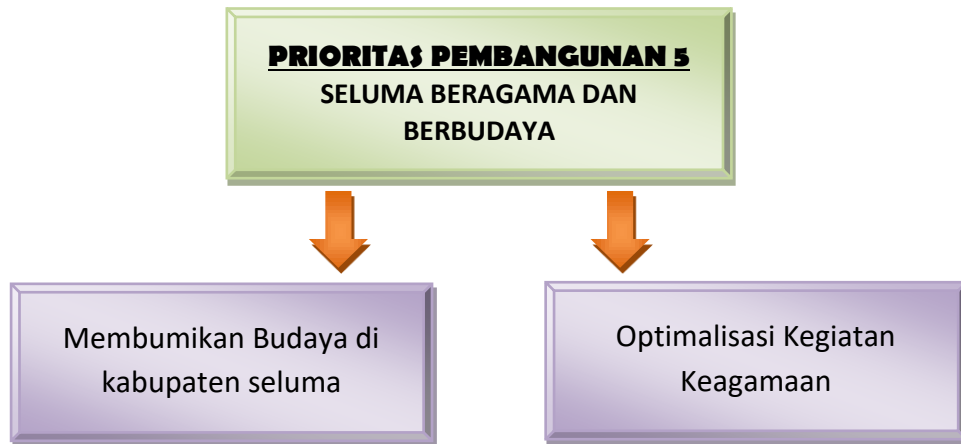


5. Prioritas Pembangunan 5 :Seluma Beragama Dan Berbudaya

Kebudayaan dan keagamaan merupakan aset penting yang berkontribusi terhadap pembangunan. Pembangunan bukanlah hanya terkait dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tapi juga peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Peran seni budaya dan beragama adalah pembangunan karakter untuk terus mendidik dan mengajarkan tentang kearifan-kearifan lokal pada generasi dengan dasar kesenangan dan kebutuhan untuk memahami seni budaya sebagai identitas. Pembangunan budaya ditujukan untuk melestarikan budaya dan mempertahankan jati diri ditengah semakin derasnya pengaruh negatif terhadap informasi dan budaya luar. Melestarikan dan mendayagunakan kebudayaan dapat menjadi hal yang efektif dalam mendorong ekonomi.

Pada program prioritas kelima ini diharapkan budaya serawai dan budaya suku lainnya dapat membumi dalam pembangunan.

Gambar 5.5 Kerangka Prioritas Pembangunan Kabupaten Seluma Kelima



6. *Prioritas Pembangunan untuk Penanganan dan Pemulihan Dampak Covid-19*

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2021 memberikan dampak cukup signifikan pada kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat Seluma. Secara makro kondisi perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19 ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah. Secara umum, pandemi ini mengakibatkan penurunan pendapatan hampir seluruh kelompok masyarakat yang berpotensi antara lain menurunkan daya beli masyarakat, bahkan muncul penduduk miskin baru, dan pengangguran baru akibat PHK. Kondisi ini juga dapat memberikan dampak pada tingkat kondusivitas wilayah, dimana mulai diindikasikan adanya peningkatan kasuskasus kriminalitas di masyarakat. Upaya yang akan dilakukan untuk mempercepat pemulihan dampak Covid-19 yaitu peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dalam penanganan Covid-19 kepada masyarakat, penyebaran informasi terkait Covid-19 dan melakukan pendataan bagi masyarakat seluma baik yang sudah atau belum menerima vaksinasi.

5.5 Hubungan Isu Strategis, Prioritas Daerah Dan Program Prioritas

Adapun Keterkaitan antara isu strategis, prioritas daerah dan program prioritas daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Keterkaitan antara Isu Strategis,
Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah

ISU STRATEGIS	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
Infrastruktur dasar yang kurang memadai	Seluma desa maju	Pengentasan Daerah Blank Spot/Sinyal lemah
		Peningkatan Akses Air minum Layak
		Peningkatan Akses Sanitasi Layak
		Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana (bencana alam, konflik sosial)
	Seluma melayani	Pelayanan Transportasi
		Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau
Masih adanya desa tertinggal dan sangat tertinggal	Seluma seribu jalan mulus	1. Peningkatan Kualitas jalan dan jembatan untuk menunjang mobilitas penduduk, barang dan jasa
		2. Peningkatan Kualitas jalan dan jembatan menuju fasilitas kesehatan
		3. Peningkatan Kualitas jalan dan jembatan menuju fasilitas pendidikan
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Seluma desa maju	Pengembangan Desa Wisata
		Pengembangan Ekonomi Kreatif
		Peningkatan Peran BUMDES
		Implementasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan)
		Penataan hukum dan Peraturan Daerah
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah dan penerapan e-government
Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan bermartabat	Seluma melayani	Peningkatan inovasi pelayanan publik
		Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Penataan Birokrasi
		Peningkatan penyelenggaraan bangunan gedung, penataan tanah, bangunan dan lingkungan
		Membumikan Budaya di kabupaten seluma
		Optimalisasi Kegiatan Keagamaan
		Pembudayaan gemar membaca
	Seluma beragama dan berbudaya	Peningkatan Kreativitas Pemuda

ISU STRATEGIS	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
Perlambatan pertumbuhan PDRB	Seluma desa maju	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		Peningkatan Kualitas pendidikan
		Pemberdayaan UMKM dan IKM
		Pengembangan Desa Wisata
	Seluma mudah berinvestasi	Pengembangan Ekonomi Kreatif
		Peningkatan Produksi dan nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan
Tingkat kemiskinan yang masih tinggi	Seluma desa maju	Peningkatan Investasi PMA dan PMDN
		Penyederhanaan regulasi Perizinan
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja
		Penanganan rumah tidak layak huni
		Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana (bencana alam, konflik sosial)
	Seluma melayani	Peningkatan Ketahanan Pangan
		Rehabilitasi Perlindungan, Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Prioritas daerah disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis daerah, dengan memperhatikan potensi yang dimiliki Kabupaten Seluma untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026. Selain itu, dalam mewujudkan sinkronisasi dengan pemerintah pusat, prioritas daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Tabel 5.4

Keterkaitan 5 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma dengan Misi RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026, Prioritas Pembangunan Daerah Propinsi Tahun 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	Keterkaitan Dengan Misi RPJMD Seluma 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Propinsi Tahun 2021-2026	Keterkaitan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional
1.	Seluma Seribu Jalan Mulus	Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang permukiman, bidang sosial serta memajukan bidang kebudayaan (MISI 1)	Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta perluasan konektivitas untuk pemerataan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)
2.	Seluma Desa Maju	Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang permukiman, bidang sosial serta memajukan bidang kebudayaan (MISI 1)	Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta perluasan konektivitas untuk pemerataan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)
			Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)
			Percepatan pengentasan Kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)
			Bengkulu Natural (Pengembangan pariwisata yang integratif dan kompetitif) dan ekonomi kreatif	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)



No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	Keterkaitan Dengan Misi RPJMD Seluma 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Propinsi Tahun 2021-2026	Keterkaitan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional
3.	Seluma Mudah Berinvestasi	Optimalisasi sumber daya daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif (MISI 2)	Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)
4.	Seluma Melayani	Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang permukiman, bidang sosial serta memajukan bidang kebudayaan (MISI 1)	Inovasi dan tata kelola Pemerintahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)
		Optimalisasi sumber daya daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif (MISI 2)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
		Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi (MISI 3)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)
5.	Seluma Beragama Dan Berbudaya	Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang permukiman, bidang sosial serta memajukan bidang kebudayaan (MISI 1)		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)

Rpjmd Kab Seluma 2021-2026



BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

6.1 Strategi Pembangunan

Visi dan misi pembangunan daerah sesungguhnya merupakan untai harapan masa depan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Harapan yang akan diraih harus realistis sesuai dengan situasi dan kondisi daerah yang sudah, sedang terjadi dan kecenderungan perkembangan masa depan. Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi, kebijakan dan program pembangunan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang telah ditetapkan. Perumusan Strategi dan arah kebijakan merupakan pendekatan komprehensif untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan perencanaan strategidan arah kebijakan dapat menjadi acuan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen dari bagian yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana misi, tujuan dan sasaran akan diwujudkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Seluma

VISI : MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
MISI 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang permukiman, bidang sosial serta memajukan bidang kebudayaan		
Tujuan 1.1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Untuk Menunjang Pemenuhan Pelayanan Dasar	Strategi 1.1.1.1 : Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
		Strategi 1.1.1.2 : Peningkatan akses terhadap air minum
		Strategi 1.1.1.3 : Peningkatan akses terhadap sanitasi layak
		Strategi 1.1.1.4 : Peningkatan penyelenggaraan rumah swadaya
	Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan	Strategi 1.1.2.1 : Peningkatan kualitas akses pelayanan pendidikan
		Strategi 1.1.2.2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
	Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Strategi 1.1.3.1 : Peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas
		Strategi 1.1.3.2 : Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
		Strategi 1.1.3.3 : Peningkatan upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan
	Sasaran 1.1.4 : Berkembangnya Kebudayaan Seluma	Strategi 1.1.4.1 : Penguatan pembangunan Kebudayaan
Tujuan 1.2 : Mengentaskan Kemiskinan	Sasaran 1.2.1 : Menjamin Perlindungan Sosial	Strategi 1.2.1.1 : Pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan



VISI : MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Strategi 1.2.1.2 : Peningkatan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial
	Sasaran 1.2.2 : Mengurangi Pengangguran Terbuka	Strategi 1.2.2.1 : Peningkatan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja
Tujuan 1.3 : Mengurangi Resiko Bencana	Sasaran 1.3.1 : Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap bencana	Strategi 1.3.1.1 : Meningkatkan Kesiapsiagaan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana
MISI 2 : Optimalisasi sumber daya daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif		
Tujuan 2.1 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	Sasaran 2.1.1 : Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan	Strategi 2.1.1.1 : Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan
		Strategi 2.1.1.2 : Peningkatan daya saing destinasi wisata
	Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Strategi 2.1.2.1 : Peningkatan kepastian investasi dan iklim usaha yang kondusif
	Sasaran 2.1.3 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan sosial desa	Strategi 2.1.3.1 : Peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial bagi desa mandiri, dan tertinggal menuju desa maju dan berkembang
MISI 3 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi		
Tujuan 3.1 : Meningkatkan Nilai Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik	Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Strategi 3.1.1.1 : Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau dan terpadu tingkat kecamatan
		Strategi 3.1.1.2 : Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan perencanaan



VISI : MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Strategi 3.1.1.3 : Pembinaan dan peningkatan SDM ASN
		Strategi 3.1.1.4 : Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah
		Strategi 3.1.1.5 : Peningkatan rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
		Strategi 3.1.1.6 : Peningkatan dan pembinaan manajemen Pemerintah Desa
		Strategi 3.1.1.7 : Peningkatan kualitas inovasi daerah
		Strategi 3.1.1.8 : Pengintegrasian dan peningkatan kualitas SPBE

6.2 Strategi Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi pembangunan daerah Kabupaten Seluma tahun 2021-2026, dirumuskan strategi pencapaian Misi. Strategi pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Strategi Pencapaian Misi Pertama : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang permukiman, bidang sosial serta memajukan bidang kebudayaan.**

Pada misi pertama RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2021-2026 terdapat tiga tujuan yaitu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi resiko bencana.

Pada tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan indikator yaitu indeks pembangunan manusia, memiliki tiga sasaran. Sasaran pertama adalah

meningkatnya kapasitas infrastruktur untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar dengan strategi yaitu peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan akses terhadap air minum, peningkatan akses terhadap sanitasi layak dan peningkatan penyelenggaraan rumah swadaya. Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas dan akses pendidikan dengan strategi peningkatan kualitas akses pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas dan akses kesehatan dengan strategi peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan peningkatan upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan. Sasaran keempat adalah berkembangnya kebudayaan seluma dengan strategi penguatan pembangunan kebudayaan.

Pada tujuan mengentaskan kemiskinan dengan indikator yaitu angka kemiskinan, memiliki dua sasaran. Sasaran pertama menjamin perlindungan sosial dengan strategi pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sasaran kedua mengurangi pengangguran terbuka dengan strategi peningkatan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja.

Pada tujuan mengurangi resiko bencana dengan indikator indeks resiko bencana, memiliki sasaran meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dengan strategi meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana.

Pencapaian Misi Pertama ini dilakukan melalui pelaksanaan Prioritas Pembangunan, yaitu :

- a. Prioritas pembangunan pertama, seluma seribu jalan mulus dengan program prioritas yaitu :
 - Peningkatan Kualitas jalan dan jembatan untuk menunjang mobilitas penduduk, barang dan jasa
 - Peningkatan Kualitas jalan dan jembatan menuju fasilitas kesehatan
 - Peningkatan Kualitas jalan dan jembatan menuju fasilitas pendidikan
- b. Prioritas pembangunan kedua, seluma desa maju dengan program prioritas yaitu :
 - Peningkatan Akses Sanitasi Layak
 - Peningkatan Akses Air minum Layak



- Peningkatan Kualitas pendidikan
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengentasan Daerah Blank Spot/Sinyal lemah
 - Rehabilitasi Perlindungan, Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
 - Peningkatan Ketahanan Pangan
 - Penanganan rumah tidak layak huni
 - Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana (bencana alam, konflik sosial)
 - Peningkatan kompetensi tenaga kerja
 - Pembudayaan gemar membaca
 - Peningkatan Kreatifitas Pemuda
- c. Prioritas pembangunan keempat, seluma melayani dengan program prioritas yaitu :
- Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau
 - Rehabilitasi Perlindungan, Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
 - Pelayanan Transportasi
- d. Prioritas pembangunan kelima, seluma berbudaya dan beragama dengan program prioritas yaitu :
- Optimalisasi Kegiatan Keagamaan
 - Membumikan Budaya di kabupaten seluma

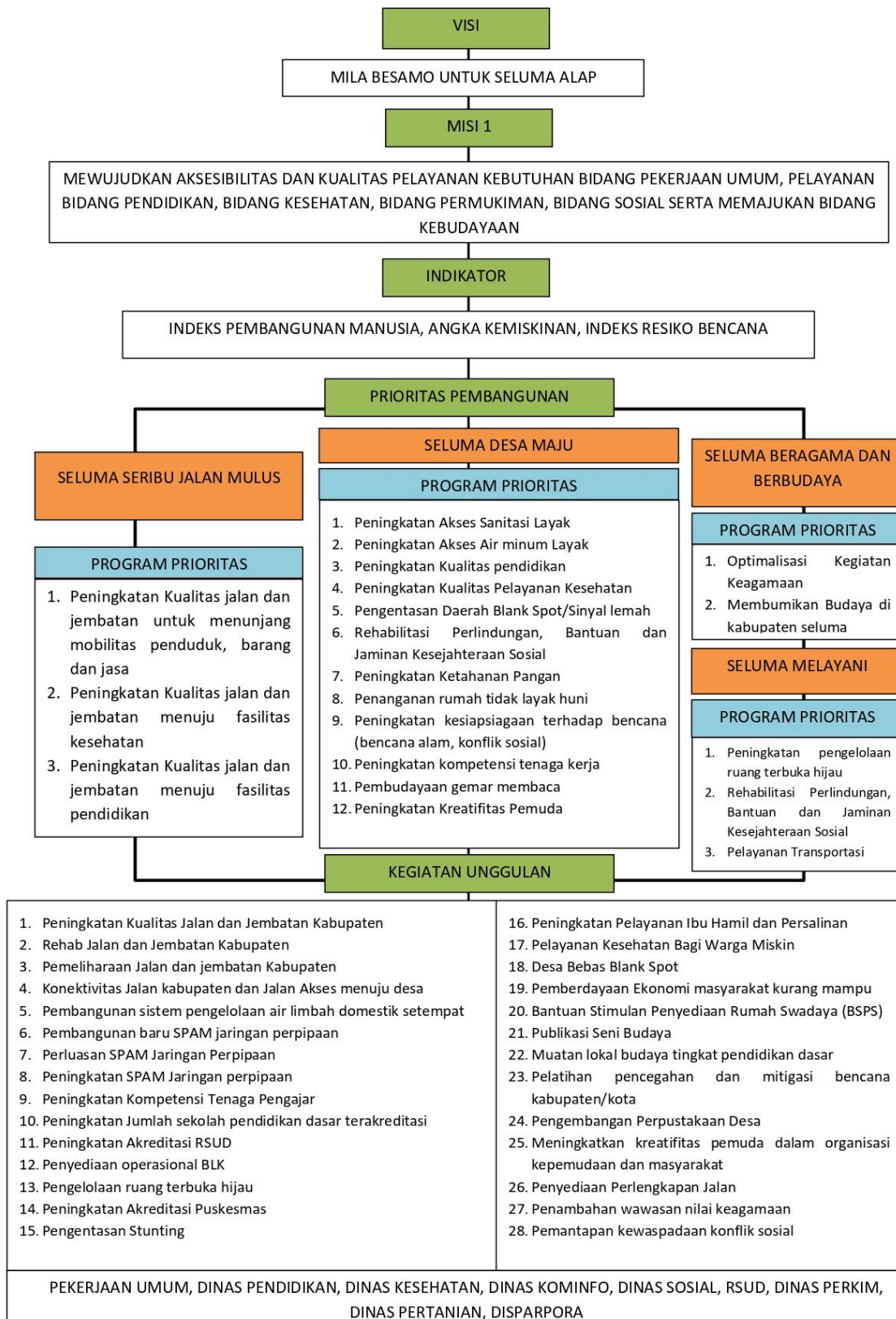
Pelaksanaan operasional dari strategi pencapaian Misi Pertama RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026, yang dimulai dari tujuan, sasaran, indikator, strategi, prioritas pembangunan dan program prioritas, terdapat kegiatan-kegiatan unggulan. Kegiatan-kegiatan unggulan tersebut menjadi tools dalam pencapaian Misi pertama, yaitu;

- Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten
- Rehab Jalan dan Jembatan Kabupaten
- Pemeliharaan Jalan dan jembatan Kabupaten
- Konektivitas Jalan kabupaten dan Jalan Akses menuju desa
- Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat
- Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan



- Peningkatan SPAM Jaringan perpipaan
- Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengajar
- Peningkatan Jumlah sekolah pendidikan dasar terakreditasi
- Peningkatan Akreditasi RSUD
- Penyediaan operasional BLK
- Pengelolaan ruang terbuka hijau
- Peningkatan Akreditasi Puskesmas
- Pengentasan Stunting
- Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil dan Persalinan
- Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin
- Desa Bebas Blank Spot
- Pemberdayaan Ekonomi masyarakat kurang mampu
- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya (BSPS)
- Publikasi Seni Budaya
- Muatan lokal budaya tingkat pendidikan dasar
- Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota
- Pengembangan Perpustakaan Desa
- Meningkatkan kreatifitas pemuda dalam organisasi kepemudaan dan masyarakat
- Penyediaan Perlengkapan Jalan
- Penambahan wawasan nilai keagamaan
- Pemantapan kewaspadaan konflik social

Perangkat Daerah yang terlibat dalam pencapaian misi ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik, Dinas Sosial, RSUD, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, dan Dinas Pertanian. Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Pertama RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada gambar berikut :





Pada misi kedua RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2021-2026 terdapat satu tujuan yaitu, peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi. Sasaran pertama dari tujuan tersebut yaitu Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan dengan strategi Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan daya saing destinasi wisata. Sasaran kedua yaitu meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN dengan strategi peningkatan kepastian investasi dan iklim usaha yang kondusif. Sasaran ketiga yaitu meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial desa dengan strategi peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial bagi desa mandiri, dan tertinggal menuju desa maju dan berkembang.

Pencapaian Misi kedua ini dilakukan melalui pelaksanaan Prioritas Pembangunan, yaitu :

- a. Prioritas pembangunan kedua, seluma desa maju dengan program prioritas yaitu :
 - Peningkatan Produksi dan nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan
 - Pemberdayaan UMKM dan IKM
 - Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - Pengembangan Desa Wisata
 - Peningkatan Peran BUMDES
- b. Prioritas pembangunan ketiga, seluma mudah berinvestasi dengan program prioritas yaitu :
 - Penyederhanaan regulasi Perizinan
 - Peningkatan Investasi PMA dan PMDN

Pelaksanaan operasional dari strategi pencapaian Misi kedua RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026, yang dimulai dari tujuan, sasaran, indikator, strategi, prioritas pembangunan dan program prioritas, terdapat kegiatan-kegiatan unggulan. Kegiatan-kegiatan unggulan tersebut menjadi tools dalam pencapaian Misi kedua, yaitu;

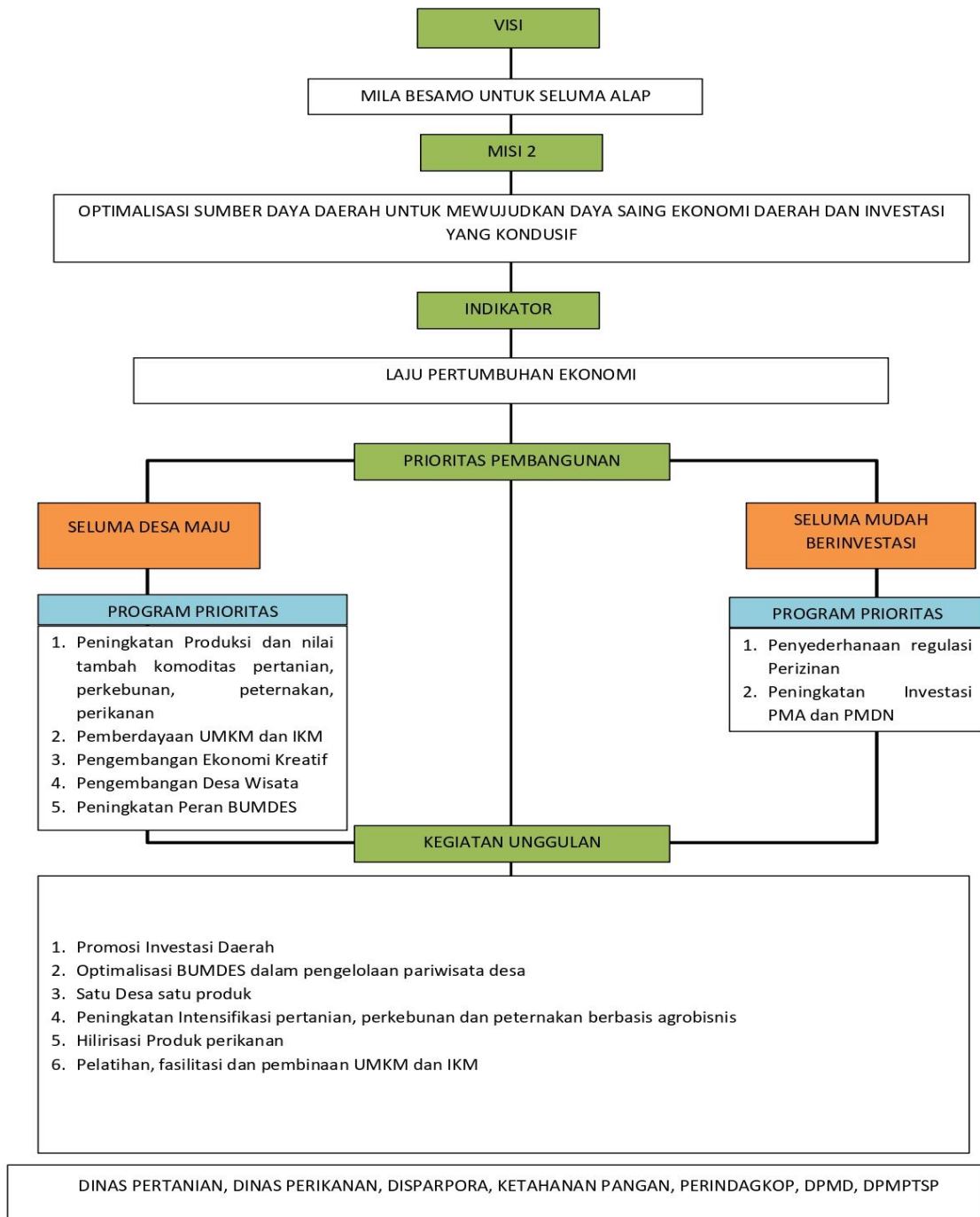
- Promosi Investasi Daerah
- Optimalisasi BUMDES dalam pengelolaan pariwisata desa



- Satu Desa satu produk
- Peningkatan Intensifikasi pertanian, perkebunan dan peternakan berbasis agrobisnis
- Hilirisasi Produk perikanan
- Pelatihan, fasilitasi dan pembinaan UMKM dan IKM

Perangkat Daerah yang terlibat dalam pencapaian misi ini adalah Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kecamatan. Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi kedua RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6.2
Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Kedua RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026





3. Strategi Pencapaian Misi Ketiga : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi

Pada misi ketiga RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2021-2026 terdapat satu tujuan yaitu, Meningkatkan Nilai Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Sasaran dari tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah dengan strategi pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau dan terpadu tingkat kecamatan, peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan perencanaan, pembinaan dan peningkatan SDM ASN, peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah, peningkatan rasio PAD terhadap pendapatan daerah, peningkatan dan pembinaan manajemen pemerintah desa, peningkatan kualitas inovasi daerah, pengintegrasian dan peningkatan kualitas SPBE.

Pencapaian Misi ketiga ini dilakukan melalui pelaksanaan Prioritas Pembangunan, yaitu :

- a. Prioritas pembangunan keempat, seluma melayani dengan program prioritas yaitu :
 - Peningkatan inovasi pelayanan publik
 - Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Penataan Birokrasi
 - Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah dan penerapan e-government
 - Penataan hukum dan Peraturan Daerah
 - Peningkatan penyelenggaraan bangunan gedung, penataan tanah, bangunan dan lingkungan
 - Implementasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan)

Pelaksanaan operasional dari strategi pencapaian Misi ketiga RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026, yang dimulai dari tujuan, sasaran, indikator, strategi, prioritas pembangunan dan program prioritas, terdapat kegiatan-kegiatan unggulan. Kegiatan-kegiatan unggulan tersebut menjadi tools dalam pencapaian Misi kedua, yaitu;

- Satu OPD satu inovasi
- Pendidikan dan pelatihan ASN
- Evaluasi Capaian Kinerja OPD

- Perangkat Daerah yang terlibat dalam pencapaian misi ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, dan Sekretariat Daerah. Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi ketiga RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada gambar berikut :

```
graph TD;
    A[VISI] --> B[MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP];
    B --> C[MISI 3];
    C --> D[Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi];
    D --> E[INDIKATOR];
    E --> F[INDEKS REFORMASI BIROKRASI];
    F --> G[PRIORITAS PEMBANGUNAN];
    G --> H[SELUMA MELAYANI];
    H --> I[PROGRAM PRIORITAS];
    I --> J[KEGIATAN UNGGULAN];
    J --> K[1. Satu OPD satu inovasi  
2. Pendidikan dan pelatihan ASN  
3. Evaluasi Capaian Kinerja OPD  
4. Penerapan Transaksi Non Tunai  
5. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK  
6. Penataan bangunan gedung, tanah dan lingkungan  
7. Pelayanan kependudukan tingkat kecamatan  
8. Pelayanan pajak dan retribusi tingkat kecamatan];
```

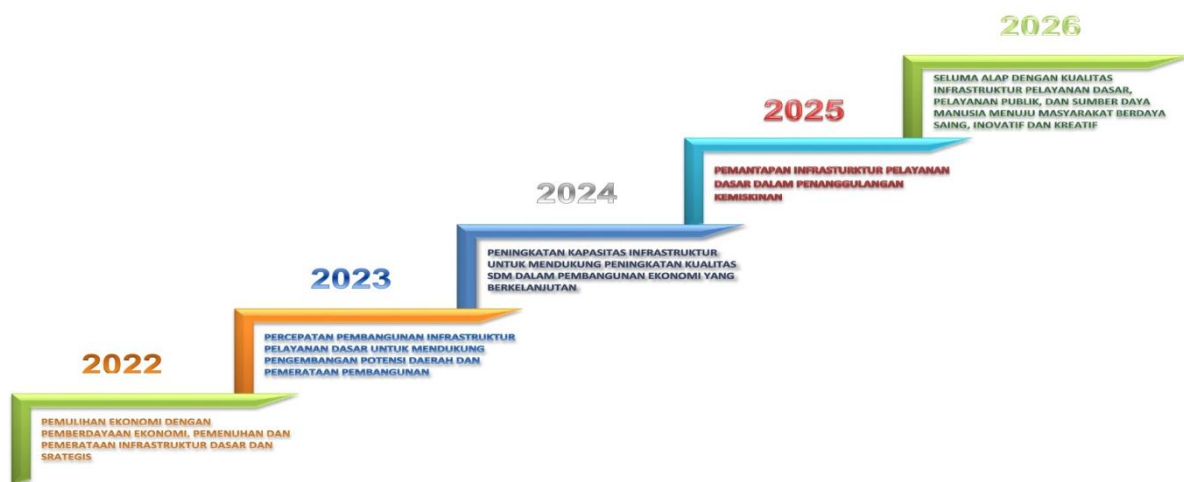
The flowchart illustrates the 3-Mission Strategy for the Bureaucracy Reform Index (IKBI) in the District of Gunungkidul. It begins with the Vision (VISI) of 'MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP', leading to Mission 3 (MISI 3), which is to 'Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi'. This mission is supported by an Indicator (INDIKATOR) and the Bureaucracy Reform Index (INDEKS REFORMASI BIROKRASI). The strategy then focuses on Construction Priorities (PRIORITAS PEMBANGUNAN), which are implemented through 'SELUMA MELAYANI' (Serving the Community) via Priority Programs (PROGRAM PRIORITAS). These programs include: 1. Increasing public service innovation, 2. Increasing Competency of Human Resources Apparatus and Bureaucracy, 3. Increasing accountability of government performance and e-government application, 4. Law and Regulation Arrangement, 5. Increasing the management of buildings, land, and environment, and 6. Implementing PATEN (Integrated District Administration Service). The final step is Outstanding Activities (KEGIATAN UNGGULAN), which include: 1. One OPD one innovation, 2. Education and training for ASN, 3. OPD Performance Evaluation, 4. Non-Cash Transaction Application, 5. Follow-up of BPK Audit Report, 6. Building, land, and environment arrangement, 7. District-level population service, and 8. District-level tax and contribution service.

BAPPEDA, BALITBANG, BKD, BKPSDM, INSPEKTORAT, SEKRETARIAT DAERAH, KECAMATAN, DINAS PERKIM

6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021-2026

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Seluma lima tahun kedepan, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dalam lima tahun. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021-2026 sebagaimana gambar berikut:



1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Seluma lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk “Pemulihan ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi, pemenuhan dan pemerataan infrastruktur dasar dan strategis”, dengan prioritas diarahkan pada:

- Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan di desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
- Optimalisasi pemanfaatan PDAM dan Penguatan Struktur PDAM
- Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni
- Meningkatkan akses pendidikan PAUD, SD dan SMP
- Peningkatan kualitas layanan tenaga kesehatan
- Meningkatkan pencegahan dan penanganan Covid-19
- Pengentasan Stunting



- Pemetaan kebudayaan daerah
- Peningkatan kualitas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)
- memfasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian dan perikanan
- Membentuk atraksi dan even wisata
- Penyederhanaan perizinan
- Pengentasan desa sangat tertinggal
- Penyederhanaan sistem pelayanan terpadu di tingkat kecamatan
- Meningkatkan kualitas perencanaan
- Penerapan SDM ASM berbasiskan kinerja
- Penyelesaian Asset Daerah
- Intensifikasi pendapatan asli daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah
- Peningkatan perencanaan terpadu Pembangunan Desa
- Peningkatan indeks persepsi masyarakat
- Pembangunan infrastruktur jalan alternatif bencana

2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Seluma lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk “Percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk mendukung pengembangan potensi daerah dan pemerataan pembangunan” dengan prioritas diarahkan pada :

- Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan di desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan
- peningkatan akses terhadap air minum
- Meningkatkan kesadaran terhadap sanitas layak
- Pemberian RTLH yang tertintegrasi dengan program lainnya
- Meningkatkan akses pendidikan PAUD, SD dan SMP
- Meningkatkan kapasitas SDM pendidikan
- Peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit
- Meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi
- Meningkatkan pencegahan dan penanganan Covid-19
- Meningkatkan gerakan masyarakat sehat (germas) masyarakat



- Peningkatan status cagar budaya
- Pemaduserasian data penanggulangan kemiskinan OPD
- Meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi PMKS
- Pemanfaatan Bursa tenaga kerja bagi pencari kerja
- Meningkatkan kualitas sumber daya pertanian dan perikanan
- meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata serta aksesibilitas destinasi wisata
- Peningkatan Perizinan tingkat kecamatan dan pelimpahan wewenang perizinan kecamatan
- meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang pro kepada investasi
- Pengentasan desa sangat tertinggal
- Menyederhanakan prosedur layanan publik
- Meningkatkan kualitas pengawasan perencanaan
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah
- Optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan daerah yang dipisahkan
- Penerapan inovasi daerah berbasis web
- Pemaduserasian portal website OPD

3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Seluma lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk “Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan” dengan prioritas diarahkan pada :

- Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan kabupaten kondisi mantap per ruas jalan
- Meningkatkan Kerjasama PDAM dengan penyedia air minum lainnya
- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan PAUD, SD dan SMP
- Memperkuat pengendalian mutu pendidikan
- Peningkatan kualitas tenaga kesehatan RSUD
- Optimalisasi Puskesmas Perawatan



- Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam rangka strategi penanggulangan kemiskinan
- Pemanfaatan balai latihan kerja dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja
- Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dan perikanan
- Meningkatkan kualitas kelompok sadar wisata
- Penerapan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung investasi
- Peningkatan Desa tertinggal menjadi desa berkembang
- meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah
- Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur keuangan yang berlaku
- Pengembangan satu desa satu bisnis
- Peningkatan kesiapsiagaan bencana

4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Seluma lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk “Pemantapan infrastruktur pelayanan dasar dalam penanggulangan kemiskinan ” dengan prioritas diarahkan pada :

- Meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan
- Membentuk unit reaksi cepat penanganan jalan
- Perluasan akses air minum
- Meningkatkan kesadaran terhadap sanitas layak
- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan PAUD, SD dan SMP
- Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan
- Peningkatan kualitas manajemen RSUD
- Pembangunan cagar budaya
- Meningkatkan peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial
- Penguatan manajemen cadangan pangan
- Meningkatkan strategi promosi wisata yang efektif
- Memperluas akses jaringan pemasaran UMKM
- Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi



- Peningkatan kualitas dan produk BUMDES
- Peningkatan kualitas SDM ASN
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi terpadu di SPBE

5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Seluma lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 ditujukan untuk “Seluma Alap dengan kualitas infrastruktur pelayanan dasar, pelayanan publik, dan sumber daya manusia menuju masyarakat berdaya saing, inovatif dan kreatif” dengan prioritas diarahkan pada :

- Meningkatkan kualitas kualitas jembatan
- Membentuk unit reaksi cepat penanganan jembatan
- Perluasan akses air minum
- Meningkatkan kesadaran terhadap sanitas layak
- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan PAUD, SD dan SMP
- Meningkatkan kapasitas SDM pendidikan
- Peningkatan kualitas puskesmas perawatan
- Melakukan kerjasama di bidang pemasaran dengan pelaku usaha wisata
- Peningkatan kerjasama antar bumdes dan badan usaha lainnya

Tabel 6.2

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Seluma

ARAH KEBIJAKAN				
2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan di desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan di desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan kabupaten kondisi mantap per ruas jalan	Meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan	Meningkatkan kualitas kualitas jembatan
Optimalisasi pemanfaatan PDAM dan Penguatan Struktur PDAM	peningkatan akses terhadap air minum	Meningkatkan Kerjasama PDAM dengan penyedia air minum lainnya	Membentuk unit reaksi cepat penanganan jalan	Membentuk unit reaksi cepat penanganan jembatan



ARAH KEBIJAKAN				
2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni	Meningkatkan kesadaran terhadap sanitas layak	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan PAUD, SD dan SMP	Perluasan akses air minum	Perluasan akses air minum
Meningkatkan akses pendidikan PAUD, SD dan SMP	Pemberian RTLH yang tertintegrasi dengan program lainnya	Memperkuat pengendalian mutu pendidikan	Meningkatkan kesadaran terhadap sanitas layak	Meningkatkan kesadaran terhadap sanitas layak
Peningkatan kualitas layanan tenaga kesehatan	Meningkatkan akses pendidikan PAUD, SD dan SMP	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan RSUD	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan PAUD, SD dan SMP	
Meningkatkan pencegahan dan penanganan Covid-19	Meningkatkan kapasitas SDM pendidikan	Optimalisasi Puskesmas Perawatan	Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan PAUD, SD dan SMP
Pengentasan Stunting	Peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit	Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan kualitas manajemen RSUD	Meningkatkan kapasitas SDM pendidikan
Pemetaan kebudayaan daerah	Meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam rangka strategi penanggulangan kemiskinan	Pembangunan cagar budaya	Peningkatan kualitas puskesmas perawatan
Peningkatan kualitas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	Meningkatkan pencegahan dan penanganan Covid-19	Pemanfaatan Balai latihan kerja dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial	Melakukan kerjasama di bidang pemasaran dengan pelaku usaha wisata
memfasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian dan perikanan	Meningkatkan gerakan masyarakat sehat (germas) masyarakat	Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dan perikanan	Penguatan manajemen cadangan pangan	Peningkatan kerjasama antar bumdes dan badan usaha lainnya
Membentuk atraksi dan even wisata	Peningkatan status cagar budaya	Meningkatkan kualitas kelompok sadar wisata	Meningkatkan strategi promosi wisata yang efektif	
Penyederhanaan perizinan	Pemaduserasian data penanggulangan kemiskinan OPD	Penerapan Pelayanan Terpadu Kecamatan	Memperluas akses jaringan pemasaran UMKM	
Pengentasan desa sangat tertinggal	Meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi PMKS	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung investasi	Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	
Penyederhanaan sistem pelayanan	Pemanfaatan Bursa tenaga kerja bagi	Peningkatan Desa tertinggal menjadi	Peningkatan kualitas dan	



ARAH KEBIJAKAN				
2022	2023	2024	2025	2026
terpadu di tingkat kecamatan	pencari kerja	desa berkembang	produk BUMDES	
Meningkatkan kualitas perencanaan	Meningkatkan kualitas sumber daya pertanian dan perikanan	meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Peningkatan kualitas SDM ASN	
Penerapan SDM ASM berbasis kinerja	meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata serta aksesibilitas destinasi wisata	Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur keuangan yang berlaku	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi terpadu di SPBE	
Penyelesaian Asset Daerah	Peningkatan Perizinan tingkat kecamatan dan pelimpahan wewenang perizinan kecamatan	Pengembangan satu desa satu bisnis		
Intensifikasi pendapatan asli daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah	meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang pro kepada investasi	Peningkatan kesiapsiagaan bencana		
Peningkatan perencanaan terpadu Pembangunan Desa	Pengentasan desa sangat tertinggal			
Peningkatan indeks persepsi masyarakat	Menyederhanakan prosedur layanan publik			
Pembangunan infrastruktur jalan alternatif bencana	Meningkatkan kualitas pengawasan perencanaan			
	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah			
	Optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan daerah yang dipisahkan			
	Penerapan inovasi daerah berbasis web			
	Pemaduserasian portal website OPD			



6.4 Program Pembangunan Tahun 2021-2026

Tahapan rumusan pembangunan daerah merupakan suatu tahapan dalam penyusunan dokumen RPJMD, dari perumusan ini nantinya dapat menghasilkan perencanaan yang kongkrit serta menjawab semua kebutuhan pembangunan daerah dalam bentuk program-program prioritas. Perumusan program daerah merupakan inti dari perencanaan strategis selama 5 (lima) tahun ke depan.

1. Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang permukiman, bidang sosial serta memajukan bidang kebudayaan.
 - a. Program penyelenggaraan jalan
 - b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
 - c. Program Kawasan Permukiman
 - d. Program pengelolaan pendidikan
 - e. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
 - f. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
 - g. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - h. Program pengembangan kebudayaan
 - i. Program pengembangan kesenian tradisional
 - j. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
 - k. Program perlindungan dan jaminan sosial
 - l. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - m. Program rehabilitasi sosial
 - n. Program penanganan bencana
 - o. Program penempatan tenaga kerja
 - p. Program hubungan industrial
 - q. Program Penanggulangan Bencana
2. Misi 2 : Optimalisasi sumber daya daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif
 - a. Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
 - b. Program penyediaan dan pengembangan sarana dan pertanian perikanan
 - c. Program penyuluhan pertanian



- d. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
 - e. Program pemasaran pariwisata
 - f. Program pengembangan iklim penanaman modal
 - g. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
 - h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - i. Program administrasi pemerintahan desa
 - j. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
3. Misi 3 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi
- a. Program pendaftaran penduduk
 - b. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - c. Program pengelolaan keuangan daerah
 - d. Program pengelolaan pendapatan daerah
 - e. Program pelayanan penanaman modal
 - f. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - g. Program penyelenggaraan pengawasan
 - h. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
 - i. Program kepegawaian daerah
 - j. Program pengelolaan keuangan daerah
 - k. Program pengelolaan barang milik daerah
 - l. Program pengelolaan pendapatan daerah
 - m. Program administrasi pemerintahan desa
 - n. Program penelitian dan pengembangan daerah
 - o. Program pengelolaan aplikasi informatika
 - p. Program pengelolaan informasi dan komunikasi public
 - q. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



TABEL 6.3. PROGAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021-2026

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PRORAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
				2022		2023		2024		2025		2026					
				target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)		
	VISI : MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP																
1	MISI 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang permukiman, bidang sosial serta memajukan bidang kebudayaan																
	TUJUAN 1.1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	67,939	68,678		69,417		70,156		70,895		71,634		71,63		
	SASARAN 1.1.1	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Untuk Menunjang Pemenuhan Pelayanan Dasar	Indeks Infrastruktur	44,93	47,18		49,53		52,01		54,61		57,34		57,34		
		Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	40	48	121.090.000.000	58	119.000.000.000	65	79.000.000.000	72	98.896.778.461	75	110.552.733.362	75	528.539.511.822	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	17	25,66	4.213.873.000	27,58	4.213.873.000	29,51	3.500.000.000	31,43	3.500.000.000	33,35	3.500.000.000	33,35	18.927.746.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5,97%	6,65	7.292.541.000	7,32	7.292.541.000	8	7.292.541.000	8,67	7.292.541.000	9,34	7.292.541.000	9,34	36.462.705.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Program Kawasan Permukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (persen)	19,77	19,84	2.946.125.800	19,72	2.946.125.800	19,69	3.554.125.800	19,64	3.754.125.800	19,77	4.254.125.800	19,77	17.454.629.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	SASARAN 1.1.2	Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan	Indeks Pendidikan	79,82975	81,0272		82,2426		83,4762		84,7284		85,9993		86	17.454.629.000	
		Program pengelolaan pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	47,5	47,73	75.093.716.772	47,73	75.982.390.250	47,96	75.982.390.250	48,2	75.093.716.772	48,45	75.593.716.772	48,45	377.745.930.816	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93,3	93,81		93,81		94,27		94,75		95,22				
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	74,2	74,53		74,53		74,91		75,28		75,66				

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PRORAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	7,4	7,48		7,48		7,52		7,56		7,59		7,59		
	SASARAN 1.1.3	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Indeks Kesehatan	76,2542	77,1693		78,0953		79,0324		79,9808		80,9406		80,94		
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	100	100	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	40.000.000	DINAS KESEHATAN
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74	74,41	58.916.173.600	74,82	58.916.173.600	75,23	53.916.173.600	75,64	53.916.173.600	76,06	53.916.173.600	76,06	279.580.868.000	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19,4	19,51	19,61		19,72		19,83		19,94		19,94				
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	25	25,14	25,28		25,41		25,55		25,7		25,7				
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9	9,45	9,92		10,42		10,94		11,49		11,49				
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100				
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100				
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	6,31	7,25	8,34		9,59		11,03		12,68		12,68				
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	80	90	95		95		95		95		95				
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92,8	93,3	93,8		94,3		94,8		95,3		95,3				
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	88,93	89,43	89,93		90,43		90,93		91,43		91,43				
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	64,3	64,8	65,3		65,8		66,3		66,8		66,8				
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	68	68,5	69		69,5		70		70,5		70,5				
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100	100	100		100		100		100		100				
	SASARAN 1.1.4	Berkembangnya Kebudayaan Seluma	Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,95	61,155				61,7665				62,3842				

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PRORAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
					2022		2023		2024		2025		2026					
					target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)		target
		Program pengembangan kebudayaan	Persentase lembaga adat yang aktif	21,43	28,57	-	35,71	-	42,86	200.000.000	50	250.000.000	57,14	250.000.000	0,57	700.000.000	DINAS PENDIDIK AN DAN KEBUDAY AAN	
		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	0,34	0,37	40.000.000	0,41	40.000.000	0,45	100.000.000	0,5	100.000.000	63,81	100.000.000	63,81	380.000.000	DINAS PENDIDIK AN DAN KEBUDAY AAN	
	TUJUAN 1.2	Mengentaskan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	18,56	17,575 2		17,57 52		17,57 52		17,57 52		17,57 52		17,58			
	SASARAN 1.2.1	Menjamin Perlindungan Sosial	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,5745	2,4457 8		2,323 49		2,207 31		2,096 95		1,992 1		1,99			
			Indeks Keparahan Kemiskinan	0,5978	0,5858 4		0,574 13		0,562 64		0,551 39		0,540 36		0,54			
		Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	4,03	5	129.573.000	5,75	129.573.000	6,61	329.573.000	7,6	79.573.000	8,75	329.573.000	8,75	997.865.000	Dinas Sosial	
			Persentase Pemanfaatan Data BDT dan kerjasama dengan OPD lain	25	75		100		100		100		100					
			Program rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	0,0403	5	129.573.000	5,75	129.573.000	6,612 5	329.573.000	7,604 38	79.573.000	8,745 03	329.573.000	8,75	997.865.000	Dinas Sosial
			Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	100	530.000.000	100	500.000.000	100	1.730.000.000	Dinas Sosial
	SASARAN 1.2.2	Mengurangi Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran terbuka	2,545	2,419		2,293		2,167		2,041		1,915		1,92			
		Program penempatan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	3,79	3,79	100.000.000	3,79	100.000.000	3,79	50.000.000	3,79	50.000.000	3,79	50.000.000	3,79	350.000.000	Dinas Ketenagak erajaan dan Transmigr asi	
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3,8	3,99		4,19		4,4		4,62		4,85					
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	0	100		100		100		100		100					
			Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja dengan pendidikan S1	5,76	5,88		5,99		6,11		6,23		6,36					
			Program hubungan industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	18,18	18,54	20.000.000	18,91	20.000.000	28,37	80.000.000	42,56	90.000.000	63,84	80.000.000	63,84	290.000.000	Dinas Ketenagak erajaan dan Transmigr asi

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PRORAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
					2022		2023		2024		2025		2026					
					target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)		target
	TUJUAN 1.3	Mengurangi Resiko Bencana	Indeks resiko bencana	133	130		127		125		120		117		117		Badan Penanggul angan Bencana	
	SASARAN 1.3.1	Mengurangi resiko Bencana	Indeks Ketahanan Bencana	0,5	0,55		0,6		0,6		0,75		0,8		0,8			
		Program penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1615	1777	188.251.950	1954	188.251.950	2150	188.251.950	2365	188.251.950	2601	188.251.950	2601	188.251.950		
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	868	955		1050		1155			1398		1398				
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100	100		100		100				100		100				
2	MISI 2 : Optimalisasi sumber daya daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif																	
	TUJUAN 2.1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	0,918	3,135		4,714		4,875		5,02		5,89		5,89		Dinas Pertanian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	SASARAN 2.1.1	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,42	1,7075 2		2,567 54		2,655 23		2,734 2		3,208 06		3,21			
			Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Jasa Lainnya	-1,61	3,3399		5,022 1		5,193 63		5,348 1		6,274 97		6,27			
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Makan Minum	0,93	5,0269 3		7,558 83		7,816 99		8,049 5		9,444 53		9,44			
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Makan Minum	0,41	2,2949		3,450 77		3,568 63		3,674 77		4,311 63		4,31			
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Receran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,18	3,8248 4		5,751 29		5,947 71		6,124 62		7,186 06		7,19			
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100,4	100,6	20.000.000	100,8	20.000.000	101	22.370.000	101,2 1	22.370.000	101,4 1	22.370.000	101,4 1	107.110.000		Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap kabupaten/kota	2113	2219	82.263.900	2330	82.263.900	2446	82.263.900	2568	82.263.900	2697	82.263.900	2.696, 78	411.319.500		Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/kota	3933	4091,8 9	334.235.600	4173, 73	334.235.600	4257, 21	334.195.600	4342, 35	334.195.600	4342, 35	334.195.600	4342, 35	1.671.058.000		Dinas Perikanan
		Program penyuluhan pertanian	Cakupan peningkatan pemberdayaan kelompok tani	25	37,5	138.800.000	56,25	138.800.000	64,69	148.319.900	67,92	148.319.900	69,28	148.319.900	69,28	722.559.700		Dinas Pertanian
		Program pemasaran pariwisata	Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	1272	1285	158.412.300	1298	158.412.300	1311	158.412.300	1324	158.412.300	1337	158.412.300	1.337	792.061.500		
		Tingkat hunian akomodasi	12,62	12,87	13,13		13,39		13,66		13,93							
	SASARAN 2.1.2	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Daerah (PMA)	1987,68	2007,5 6		2027, 63		2047, 91		2068, 39		2089, 07		2.089, 07			
			Nilai Investasi Daerah (PMDN)	0,13635	0,1377 1		0,139 09		0,140 48		0,141 89		0,143 31		0,14			

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PRORAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	
		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	350.000.000	DINAS PENANA MAN MODAL DAN PELAYAN AN TERPADU SATU PINTU
	SASARAN 2.1.3	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan sosial desa	Indeks Desa Membangun	0,6235 (berkempa ng)	0,6256		0,637 3		0,651 4		0,665 82		0,680 56		0,68		
		Program administrasi pemerintahan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	35,85	38,46	2.622.621.106	38,46	1.918.073.106	41,18	1.918.073.106	44	1.918.073.106	46,93	2.918.073.106	46,93	11.294.913.530	Dinas Pemberda yaan Masyarakat t Desa
			Persentase peningkatan status desa mandiri	19,04	20,19		20,19		21,36		22,55		23,76		23,76		
3	MISI 3 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi																
	TUJUAN 3.1	Meningkatkan Nilai Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C		CC		CC		CC		CC		CC		
	SASARAN 3.1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	CC	CC		B		B		B		B		B		
			Opini BPK	WDP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
			Indeks Inovasi Daerah	2,675 (sangat Inovatif)	2,695		2,727		2,76		2,793		2,827		2,83		
			Nilai SPBE	Kurang (1,19)	1,23		1,245 25		1,260 69		1,276 33		1,292 15		1,29		
		Program pendaftaran penduduk	Perekaman KTP elektronik (%)	98,8	98,9	1.262.687.800	99	1.262.687.800	99,1	1.104.565.700	99,2	1.104.565.700	99,29	1.104.565.700	99,29	5.839.072.700	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATA TAN SIPIL
			Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	94,53	94,62		94,72		94,81		94,91		95		95		
			Kepemilikan akta kelahiran (%)	99,34	99,44		99,538 8		99,638 3		99,738		99,837 7		99,837 7		
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100	100	738.629.200	100	738.629.200	100	705.778.200	100	705.778.200	100	705.778.200	100	3.594.593.000	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATA TAN SIPIL
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	350.000.000	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATA TAN SIPIL
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen RPJMD, Renstra dan RKPD	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	840.000.000	DINAS KEPENDU DUKAN DAN PENCATA TAN SIPIL
		Program penyelenggaraan pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	2	453.796.800	2	453.796.800	3	1.009.732.800	3	1.009.732.800	3	1.009.732.800	3	3.936.792.000	INSPEKT ORAT

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PRORAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	2	187.870.000	2	187.870.000	3	292.925.000	3	292.925.000	3	292.925.000	3	1.254.515.000	INSPEKT ORAT
		Program kepegawaian daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	58,6	58,717 2	799.320.500	58,83 46	799.320.500	58,95 23	799.320.500	59,07 02	1.503.487.900	59,18 84	1.099.320.500	59,18 84	5.000.769.900	BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEM BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1,0142543 86	1,0213 5	95		95		95		95						
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat	100	100	100		100		100		100						
		Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)															
		Program pengelolaan keuangan daerah	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	12,7	12,67	325.000.000	12,65	325.000.000	12,62	400.000.000	12,6	419.194.000	12,57	419.194.000	12,57	1.888.388.000	BADAN KEUANGA N DAERAH
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-5	-5	-5		-5		-5		-5						
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	15	15	15		15		15		15						
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja	6,3	6,3	6,3		6,3		6,3		6,3						
		dalam APBD tahun sebelumnya															
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	60,7	60,7	60,7		60,7		60,7		60,7						
		Program pengelolaan barang milik daerah	Manajemen Aset	1	1	99.962.400	1	99.962.400	1	138.734.500	1	138.734.500	1	138.734.500	1	616.128.300	BADAN KEUANGA N DAERAH
		Program pengelolaan pendapatan daerah	Rasio PAD	1,36	1,37	300.000.000	1,37	300.000.000	1,38	300.000.000	1,39	300.000.000	1,39	300.000.000	1,39	1.500.000.000	Badan Pendapata n Daerah
		Program administrasi pemerintahan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	35,85	38,46	1.918.073.106	41,18	1.918.073.106	44	1.918.073.106	46,93	2.918.073.106	46,93	2.622.621.106	46,93	11.294.913.530	Dinas Pemberda yaan Masyaraka t Desa
		Persentase peningkatan status desa mandiri	19,04	20,19	21,36		22,55		23,76		23,76						
		Persentase penerapan desa digital dan kecamatan digital	12	13,8	17,25		51,75		77,63		81,51		81,51				
		Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase OPD yang memiliki Inovasi	53,57	60,71	161.011.480	67,86	161.011.480	71,43	201.011.480	89,29	261.011.480	96,43	161.011.480	96,43	945.057.400	Badan Penelitian dan Pengemban gan
		Program Aplikasi Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	19,51	20,49	1.222.513.000	21,51	1.222.513.000	32,26	1.222.513.000	48,4	1.222.513.000	72,6	1.222.513.000	72,6	6.112.565.000	DINAS KOMUNIK ASI, INFORMA TIKA, PERSAND IAN DAN STATISTI K

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PRORAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026				
					target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	target	(Rp)	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase kepuasan DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	95	95	15.439.442.600	95	15.439.442.600	95	18.439.442.600	95	18.439.442.600	95	18.439.442.600	95	86.197.213.000	Sekretariat DPRD



Rpjmd Kab Seluma 2021-2026

BAB VII.

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu Indikatif sesuai tahun periode RPJMD ini.

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026, sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan di tiap perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Seluma. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masingmasing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain.



Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2021-2026 Kabupaten Seluma

No	Uraian	Proyeksi (Rp)					Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kapasitas Riil	327,427,220,721.00	314,326,559,095.15	318,112,742,449.77	292,247,298,658.68	348,684,545,991.77	362,306,590,578.02
5	BELANJA	985,904,744,811.00	980,792,464,466.24	981,527,541,174.26	996,484,795,929.23	980,021,767,752.49	996,800,498,447.54
5.1	Belanja Operasi	662,276,615,185.00	623,375,172,657.68	616,146,880,664.66	688,102,936,505.87	654,169,347,432.26	627,780,193,903.35
5.1.01	Belanja Pegawai	383,647,774,692.00	391,365,768,605.00	383,909,877,527.93	385,829,426,915.57	387,758,574,050.14	389,697,366,920.39
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260,223,616,825.00	227,599,084,052.68	227,826,683,136.73	256,863,189,590.31	262,000,453,382.11	233,672,506,982.96
5.1.03	Belanja Hibah	14,062,204,000.00	3,910,320,000.00	3,910,320,000.00	44,910,320,000.00	3,910,320,000.00	3,910,320,000.00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	4,343,019,668.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
5.2	Belanja Modal	119,164,670,341.00	152,001,123,018.28	159,555,108,011.30	101,563,671,001.09	118,021,743,255.52	160,156,889,064.18
5.3	Belanja Tidak Terduga	5,047,844,680.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,047,844,680.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	199,415,614,605.00	204,416,168,790.28	204,825,552,498.30	205,818,188,422.27	206,830,677,064.72	207,863,415,480.01
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	199,415,614,605.00	204,416,168,790.28	204,825,552,498.30	205,818,188,422.27	206,830,677,064.72	207,863,415,480.01

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.01.2.22.0.00.01.0.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				262.242.660.191,96		262.242.660.191,96		261.931.301.298,96		262.481.301.298,96		263.966.899.207,96		1.312.864.822.189,80	
1.01.2.22.0.00.01.0.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				261.992.660.191,96		261.992.660.191,96		261.681.301.298,96		262.231.301.298,96		263.766.899.207,96		1.311.664.822.189,80	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	60,51	61,72	185.924.528.526,96	64,81	185.924.528.526,96	68,05	186.241.584.526,96	71,45	186.241.584.526,96	75,02	186.241.584.526,96	75,02	930.573.810.634,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	47,5	47,73	75.982.390.250,00	47,96	75.982.390.250,00	48,20	75.093.716.772,00	48,45	75.593.716.772,00	48,69	77.129.314.681,00	48,69	379.781.528.725,00	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93,3	93,81		94,27		94,75		95,22		95,70		95,70	0,00	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	74,2	74,53		74,91		75,28		75,66		76,03		76,03	0,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	7,4	7,48		7,52		7,56		7,59		7,63		7,63	0,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase lembaga adat yang aktif	21,43	28,57	0,00	35,71	0,00	42,86	200.000.000,00	50,00	250.000.000,00	57,14	250.000.000,00	57,14	700.000.000,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Perentase Sanggar Tradisional yang dibina	50,0	52,5	45.741.415,00	55,13	45.741.415,00	57,88	46.000.000,00	60,78	46.000.000,00	63,81	46.000.000,00	63,81	229.482.830,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	0,34	0,37	40.000.000,00	0,41	40.000.000,00	0,45	100.000.000,00	0,50	100.000.000,00	0,55	100.000.000,00	0,55	380.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0001	UPTD Pendidikan Seluma				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	60,5	61,72	50.000.000,00	64,81	50.000.000,00	68,05	50.000.000,00	71,45	50.000.000,00	75,02	50.000.000,00	75,02	250.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD Pendidikan Sukaraja				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	60,5	61,72	50.000.000,00	64,81	50.000.000,00	68,05	50.000.000,00	71,45	50.000.000,00	75,02	50.000.000,00	75,02	250.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD Pendidikan Talo				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	60,5	61,72	50.000.000,00	64,81	50.000.000,00	68,05	50.000.000,00	71,45	50.000.000,00	75,02	50.000.000,00	75,02	250.000.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01.2.22.000.01.0004	UPTD Pendidikan Semidang Alas Maras				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	60,5	61,72	50.000.000,00	64,81	50.000.000,00	68,05	50.000.000,00	71,45	50.000.000,00	75,02	50.000.000,00	75,02	250.000.000,00	
1.01.2.22.000.01.0005	Sanggar Kegiatan Belajar				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	60,5	61,72	50.000.000,00	64,81	50.000.000,00	68,05	50.000.000,00	71,45	50.000.000,00	75,02	50.000.000,00	75,02	250.000.000,00	
1.02.0.00.000.02.0000	Dinas Kesehatan				109.962.794.017,00		109.962.794.017,00		107.303.040.581,00		107.303.040.581,00		107.303.040.581,00		541.834.709.777,00	
1.02.0.00.000.02.0000	Dinas Kesehatan				108.781.197.557,00		108.781.197.557,00		106.123.040.581,00		106.123.040.581,00		106.123.040.581,00		535.931.516.857,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,86	52,35	49.310.913.957,00	54,97	49.310.913.957,00	57,72	51.632.756.981,00	60,61	51.632.756.981,00	63,64	51.632.756.981,00	63,64	253.520.098.857,00	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,0	74,41	58.916.173.600,00	74,82	58.916.173.600,00	75,23	53.916.173.600,00	75,64	53.916.173.600,00	76,06	53.916.173.600,00	76,06	279.580.868.000,00	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19,4	19,51		19,61		19,72		19,83		19,94		19,94	0,00	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	25,0	25,14		25,28		25,41		25,55		25,70		25,70	0,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9,0	9,45		9,92		10,42		10,94		11,49		11,49	0,00	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	0,00	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	0,00	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	6,3	7,25		8,34		9,59		11,03		12,68		12,68	0,00	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	80,0	90,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0	0,00	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92,8	93,3		93,8		94,3		94,8		95,3		95,3	0,00	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	88,9	89,4		89,9		90,4		90,9		91,4		91,4	0,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	64,3	64,8		65,3		65,8		66,3		66,8		66,8	0,00	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	68,0	68,5		69,0		69,5		70,0		70,5		70,5	0,00	
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	0,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	100,0	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	50.000.000,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Izin Toko Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan minuman yang terawasi	92,80	93,03	469.110.000,00	93,26	469.110.000,00	93,50	489.110.000,00	93,73	489.110.000,00	93,97	489.110.000,00	93,97	2.405.550.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		375.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0 001	Puskesmas Babatan														0,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0 002	Puskesmas Cahaya Negeri														0,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.0.00.0.00.02.0.003	Puskesmas Riak Siabun													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0.004	PUSKESMAS DERMAYU													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	70.000.000,00	54,97	70.000.000,00	57,72	70.000.000,00	60,61	70.000.000,00	63,64	70.000.000,00	63,64	350.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0.005	Puskesmas Air Periukan															
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0.006	Puskesmas Dusun Tengah															
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0.007	PUSKESMAS TUMBUAN													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0.008	Puskesmas Talang Tinggi													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.0.00.0.00.02.0.009	Puskesmas Kota Tais													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0.010	Puskesmas Rimbo Kedui													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0.011	Puskesmas Puguk													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0.012	Puskesmas Seluma Timur													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0.013	Puskesmas Ulu Talo													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0.014	Puskesmas Masmambang													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	70.000.000,00	54,97	70.000.000,00	57,72	70.000.000,00	60,61	70.000.000,00	63,64	70.000.000,00	63,64	350.000.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.0.00.0.00.02.0.015	Puskesmas Penago II													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0.016	Puskesmas Ilir Talo													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0.017	Puskesmas Suka Merindu													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0.018	Puskesmas Pajar Bulan													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	70.000.000,00	54,97	70.000.000,00	57,72	70.000.000,00	60,61	70.000.000,00	63,64	70.000.000,00	63,64	350.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0.019	Puskesmas Kembang Mumpo													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	70.000.000,00	54,97	70.000.000,00	57,72	70.000.000,00	60,61	70.000.000,00	63,64	70.000.000,00	63,64	350.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0.020	Puskesmas Gunung Kembang													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.0.00.0.00.02.0 021	Puskesmas Renah Gajah Mati													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	50.000.000,00	54,97	50.000.000,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	250.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0 022	Puskesmas Muara Maras													0,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	49,9	52,35	51.596.460,00	54,97	51.596.460,00	57,72	50.000.000,00	60,61	50.000.000,00	63,64	50.000.000,00	63,64	253.192.920,00	
1.02.0.00.0.00.3...00 00	Rumah Sakit Umum Daerah															
1.02.0.00.0.00.3...00 00	Rumah Sakit Umum Daerah				22.747.008.377,00		22.747.008.377,00		25.507.010.377,00		25.507.010.377,00		25.507.010.377,00		122.015.047.885,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	60,0	63,0	16.093.971.601,00	64,3	16.093.971.601,00	65,6	18.853.973.601,00	66,9	18.853.973.601,00	68,2	18.853.973.601,00	68,2	88.749.864.005,00	RSUD
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,00048	0,00048	6.630.738.776,00	0,00048	6.630.738.776,00	0,00048	6.630.738.776,00	0,00048	6.630.738.776,00	0,00048	6.630.738.776,00	0,00048	33.153.693.880,00	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	0,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Tenaga Kesehatan RSUD sesuai dengan kompetensi	47,9	48,8	22.298.000,00	53,7	22.298.000,00	59,1	22.298.000,00	62,0	22.298.000,00	71,3	22.298.000,00	71,3	111.490.000,00	
1.03.0.00.0.00.04.0 000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.03.0.00.0.00.04.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			447,6	145.469.477.643,00	461,2	143.379.477.643,00	477,4	103.107.990.643,00	488,7	123.554.769.103,82	496,1	139.160.724.004,57	496,1	654.672.439.037,38	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	30,43	51,7	6.453.935.283,00	54,3	6.453.935.283,00	62,5	6.866.535.283,00	65,6	6.916.535.283,00	68,9	6.866.535.283,00	68,9	33.557.476.415,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ko ta yang dilayani oleh jaringan irigasi	51,8	52,8	6.092.756.860,00	53,9	6.092.756.860,00	55,0	6.092.756.860,00	56,1	6.092.756.860,00	57,2	8.092.756.860,00	57,2	32.463.784.300,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ko ta	17,00	25,66	4.213.873.000,00	27,58	4.213.873.000,00	29,51	3.500.000.000,00	31,43	3.500.000.000,00	33,35	3.500.000.000,00	33,35	18.927.746.000,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5,97%	6,65	7.292.541.000,00	7,32	7.292.541.000,00	8,00	7.292.541.000,00	8,67	7.292.541.000,00	9,34	7.292.541.000,00	9,34	36.462.705.000,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	95,0	95,0	0,00	95,0	0,00	95,0	0,00	95,0	500.000.000,00	95,0	2.500.000.000,00	95,0	3.000.000.000,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	40,0	48,0	121.090.000.000,00	58,0	119.000.000.000,00	65,0	79.000.000.000,00	72,0	98.896.778.460,82	75,0	110.552.733.361,57	75,0	528.539.511.822,38	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasann ya tanpa kecelakaan konstruksi	100,0	100,0	221.972.500,00	100,0	221.972.500,00	100,0	221.972.500,00	100,0	221.972.500,00	100,0	221.972.500,00	100,0	1.109.862.500,00	
		Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	90,0	90,0		90,0		90,0		90,0		90,0		90,0	0,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW	100,0	100,0	104.399.000,00	100,0	104.399.000,00	100,0	134.185.000,00	100,0	134.185.000,00	100,0	134.185.000,00	100,0	611.353.000,00	
1.04.2.15.2.10.05.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan															
1.04.2.15.2.10.05.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan				7.392.578.469,00		7.392.578.469,00		9.308.986.469,00		9.548.986.469,00		10.048.986.469,00		43.692.116.345,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	40,4	50,5	2.804.083.269,00	55,5	2.804.083.269,00	61,1	3.207.491.269,00	67,2	3.207.491.269,00	73,9	3.207.491.269,00	73,9	15.230.640.345,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perbaikan rumah korban bencana	100,0	100,0	25.000.000,00	100,0	25.000.000,00	100,0	300.000.000,00	100,0	300.000.000,00	100,0	300.000.000,00	100,0	950.000.000,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (persen)	8,8	7,8	2.946.125.800,00	6,8	2.946.125.800,00	5,9	3.554.125.800,00	4,9	3.754.125.800,00	3,9	4.254.125.800,00	3,9	17.454.629.000,00	
		Persentase penanganan kawasan kumuh	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	0,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100,0	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	500.000.000,00	100,0	500.000.000,00	100,0	500.000.000,00	100,0	1.500.000.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100,0	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100,0	100,0	60.000.000,00	100,0	60.000.000,00	100,0	170.000.000,00	100,0	210.000.000,00	100,0	210.000.000,00	100,0	710.000.000,00	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Jumlah Tanah Ulayat													0,00	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah Tanah Kosong yang Dikelola													0,00	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100,0	100,0	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00		0,00		0,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100,0	100,0	25.000.000,00	100,0	25.000.000,00	100,0	25.000.000,00	100,0	25.000.000,00		25.000.000,00		125.000.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelayanan uji berkala	25,0	50,0	1.532.369.400,00	50,0	1.532.369.400,00	65,0	1.552.369.400,00	65,0	1.552.369.400,00	75,0	1.552.369.400,00	75,0	7.721.847.000,00	
1.05.0.00.0.00.07.0 000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran															
1.05.0.00.0.00.07.0 000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				6.317.760.101,00		6.317.760.101,00		7.846.760.101,00		7.885.524.501,00		7.826.760.101,00		36.194.564.905,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	52,9	55,5	6.146.833.901,00	63,9	6.146.833.901,00	73,5	7.655.833.901,00	77,1	7.694.598.301,00	77,5	7.655.833.901,00	77,5	35.299.933.905,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,0	100,0	120.926.200,00	100,0	120.926.200,00	100,0	140.926.200,00	100,0	120.926.200,00	100,0	120.926.200,00	100,0	624.631.000,00	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	85,0	85,0		85,0		95,0		95,0		95,0		95,0	0,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,0	100,0	50.000.000,00	100,0	50.000.000,00	100,0	50.000.000,00	100,0	70.000.000,00	100,0	50.000.000,00	100,0	270.000.000,00	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	15,0	15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0	0,00	
1.05.0.00.0.00.09.0 000	Badan Penanggulangan Bencana															

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.0.00.0.00.09.000	Badan Penanggulangan Bencana				2.845.969.593,00		2.845.969.593,00		2.845.969.593,00		2.845.969.593,00		2.845.969.593,00		14.229.847.965,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP OPD	BB	BB	2.845.969.593,00	BB	2.845.969.593,00	A	2.845.969.593,00	A	2.845.969.593,00	A	2.845.969.593,00	A	14.229.847.965,00	Badan Penanggulan n Bencana
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.615,0	1.615,0	188.251.950,00	1.615,0	188.251.950,00	1.615,0	188.251.950,00	1.615,0	188.251.950,00	8.075,0	188.251.950,00	8.075,0	941.259.750,00	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	868,0	868,0		868,0		868,0		868,0		4.340,0		4.340,0	0,00	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	0,00	
1.06.0.00.0.00.08.000	Dinas Sosial															
1.06.0.00.0.00.08.000	Dinas Sosial				3.418.208.934,00		3.418.208.934,00		4.068.208.934,00		3.798.208.934,00		4.068.208.934,00		18.771.044.670,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	61,5	64,6	2.846.587.934,00	67,8	2.846.587.934,00	71,2	2.846.587.934,00	74,7	2.846.587.934,00	78,5	2.846.587.934,00	78,5	14.232.939.670,00	Dinas Sosial

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	4,03	5,0	216.907.500,00	5,8	216.907.500,00	6,6	216.907.500,00	7,6	216.907.500,00	8,7	216.907.500,00	8,7	1.084.537.500,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	4,03	5,0	125.140.500,00	5,8	125.140.500,00	6,6	125.140.500,00	7,6	125.140.500,00	8,7	125.140.500,00	8,7	625.702.500,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	4,03	5,0	129.573.000,00	5,8	129.573.000,00	6,6	329.573.000,00	7,6	79.573.000,00	8,7	329.573.000,00	8,7	997.865.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Pemanfaatan Data BDT dan kerjasama dengan OPD lain	25,0	75,0		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	0,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ko ta	100,0	100,0	100.000.000,00	100,0	100.000.000,00	100,0	500.000.000,00	100,0	530.000.000,00	100,0	500.000.000,00	100,0	1.730.000.000,00	
XXXX	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlwan Dalam Kondisi Baik	100,0	100,0	0,00	100,0	0,00	100,0	50.000.000,00	100,0	0,00	100,0	50.000.000,00	100,0	100.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.07.3.32.000.10.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi															
2.07.3.32.000.10.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi				2.950.088.260,00		2.950.088.260,00		3.155.088.260,00		3.165.088.260,00		3.155.088.260,00		15.375.441.300,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	B	B	2.820.088.260,00	B	2.820.088.260,00	BB	3.015.088.260,00	BB	3.015.088.260,00	A	3.015.088.260,00	A	14.685.441.300,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme pengelolaan	40,0	40,0	100.000.000,00	45,0	100.000.000,00	50,0	50.000.000,00	55,0	50.000.000,00	60,0	50.000.000,00	60,0	350.000.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		informasi pasar kerja.														
															0,00	
0,08822917	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,0	0,0	0,00	10,0	0,00	10,0	0,00	15,0	0,00	20,0	0,00	20,0	0,00	
0,08821759	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0,0	0,0	0,00	1 kegiatan	5.000.000,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	5.000.000,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	90,0	90,0	20.000.000,00	95,0	20.000.000,00	100,0	80.000.000,00	100,0	90.000.000,00	100,0	80.000.000,00	100,0	290.000.000,00	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang mandiri	100,0	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	50.000.000,00	
2.09.0.00.0.00.12.0000	Dinas Ketahanan Pangan															
2.09.0.00.0.00.12.0000	Dinas Ketahanan Pangan				3.489.729.530,00		3.489.729.530,00		3.601.829.530,00		3.601.829.530,00		3.601.829.530,00		17.784.947.650,00	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	50,1	52,6	3.209.987.730,00	60,5	3.209.987.730,00	69,5	3.317.087.730,00	73,0	3.317.087.730,00	76,7	3.317.087.730,00	76,7	16.371.238.650,00	Dinas Ketahanan Pangan

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	82,7	84,4	245.318.000,00	86,0	245.318.000,00	86,5	245.318.000,00	86,9	245.318.000,00	87,3	245.318.000,00	87,3	1.226.590.000,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,1	0,2	9.423.800,00	0,4	9.423.800,00	0,6	9.423.800,00	1,1	9.423.800,00	1,8	9.423.800,00	1,8	47.119.000,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	85,0	86,7	25.000.000,00	88,4	25.000.000,00	90,2	30.000.000,00	92,0	30.000.000,00	93,8	30.000.000,00	93,8	140.000.000,00	
2.11.0.00.0.00.13.0 000	Dinas Lingkungan Hidup															
2.11.0.00.0.00.13.0 000	Dinas Lingkungan Hidup				3.603.886.495,00		3.603.886.495,00		4.017.886.495,00		4.017.886.495,00		4.217.886.495,00		19.461.432.475,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	58,2	61,2	3.459.785.295,00	64,2	3.459.785.295,00	67,4	3.873.785.295,00	70,8	3.873.785.295,00	74,3	4.073.785.295,00	74,3	18.740.926.475,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Yang disusun	100,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	300.000.000,00	100,0	300.000.000,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100,0	100,0	20.000.000,00	100,0	20.000.000,00	100,0	20.000.000,00	100,0	20.000.000,00	100,0	20.000.000,00	100,0	100.000.000,00	
															0,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPI /HGB	46,0	58,0	49.101.200,00	72,0	49.101.200,00	86,0	49.101.200,00	100,0	49.101.200,00		49.101.200,00		245.506.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3	10 keg/usaha	10 keg/usaha	15.000.000,00	11 keg/usaha	15.000.000,00	12 keg/usaha	15.000.000,00	12 keg/usaha	15.000.000,00	12 keg/usaha	15.000.000,00	57 keg/usaha	75.000.000,00	
														0,00		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi	100,0	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	50.000.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	21,0		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00	
2.12.0.00.0.00.14.0.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2.12.0.00.0.00.14.0.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				5.663.450.503,00		5.879.450.503,00		5.664.977.403,00		5.664.977.403,00		5.664.977.403,00		28.537.833.215,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	60,6	63,7	3.572.133.503,00	66,8	3.788.133.503,00	70,2	3.803.133.503,00	73,7	3.803.133.503,00	77,4	3.803.133.503,00	77,4	18.769.667.515,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP elektronik (%)	98,8	98,9	1.262.687.800,00	99,0	1.262.687.800,00	99,1	1.104.565.700,00	99,2	1.104.565.700,00	99,3	1.104.565.700,00	99,3	5.839.072.700,00	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	94,5	94,6		94,7		94,8		94,9		95,0		95,0	0,00	
		Kepemilikan akta kelahiran (%)	99,3	99,4		99,5		99,6		99,7		99,8		99,8	0,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP elektronik (%)	98,8	98,9	90.000.000,00	99,0	90.000.000,00	99,1	51.500.000,00	99,2	51.500.000,00	99,3	51.500.000,00	99,3	334.500.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	94,5	94,6		94,7		94,8		94,9		95,0		95,0	0,00	
		Kepemilikan akta kelahiran (%)	99,3	99,4		99,5		99,6		99,7		99,8		99,8	0,00	
		Persentase akte perkawinan	50,0	55,0		60,5		66,6		73,2		80,5		80,5	0,00	
		Persentase akta kematian	50,0	55,0		60,5		66,6		73,2		80,5		80,5	0,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100,0	100,0	738.629.200,00	100,0	738.629.200,00	100,0	705.778.200,00	100,0	705.778.200,00	100,0	705.778.200,00	100,0	3.594.593.000,00	
2.13.0.00.0.00.15.0.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2.13.0.00.0.00.15.0.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				5.397.899.666,00		5.397.899.666,00		5.487.236.666,00		6.563.485.666,00		6.268.033.666,00		29.114.555.330,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	37,0	64,8	2.928.768.460,00	68,0	2.928.768.460,00	71,4	2.928.768.460,00	75,0	2.928.768.460,00	78,7	2.928.768.460,00	78,7	14.643.842.300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	35,9	38,46	1.918.073.106,00	41,18	1.918.073.106,00	44,0	1.918.073.106,00	46,93	2.918.073.106,00	46,93	2.622.621.106,00	46,93	11.294.913.530,00	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	19,0	20,19		21,36		22,55		23,76		23,76		23,76	0,00	
		Persentase penerapan desa digital dan kecamatan digital	12,0	13,8		17,3		51,8		77,6		81,5		81,5	0,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif	50,0	62,5 551.058.100,00	68,8 551.058.100,00	85,9 640.395.100,00	86,4 716.644.100,00	90,7 716.644.100,00	90,7 3.175.799.500,00							
2.14.2.08.000.11.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
2.14.2.08.000.11.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				8.823.950.973,00		8.823.950.973,00		8.965.949.653,00		8.965.949.653,00		8.965.949.653,00		44.545.750.905,00	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	55,3	58,0 4.555.562.973,00	60,9 4.555.562.973,00	64,0 4.687.561.653,00	67,2 4.687.561.653,00	70,5 4.687.561.653,00	70,5 23.173.810.905,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,0	0,0 380.145.000,00	0,0 380.145.000,00	0,0 380.145.000,00	0,0 380.145.000,00	0,0 380.145.000,00	0,0 1.900.725.000,00							
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0	0,0 15.000.000,00	0,0 15.000.000,00	0,0 15.000.000,00	0,0 15.000.000,00	0,0 15.000.000,00	0,0 75.000.000,00							
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100,0	100,0 35.000.000,00	100,0 35.000.000,00	100,0 35.000.000,00	100,0 35.000.000,00	100,0 35.000.000,00	100,0 175.000.000,00							
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,4	2,4 24.901.000,00	2,3 24.901.000,00	2,3 24.901.000,00	2,2 24.901.000,00	2,2 24.901.000,00	2,2 124.505.000,00							

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5,6	5,5	3.803.342.000,00	5,4	3.803.342.000,00	5,3	3.803.342.000,00	5,2	3.803.342.000,00	5,1	3.803.342.000,00	5,1	19.016.710.000,00	
2.14.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5,6	5,5	10.000.000,00	5,4	10.000.000,00	5,3	20.000.000,00	5,2	20.000.000,00	5,1	20.000.000,00	5,1	80.000.000,00	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	74,2	74,9		75,7		76,4		77,2		78,0		78,0	0,00	
2.16.2.20.2.21.16.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik															
2.16.2.20.2.21.16.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				4.973.957.121,00		4.973.957.121,00		5.204.357.121,00		5.252.037.121,00		5.252.037.121,00		25.656.345.605,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	67,1	70,4	3.088.112.821,00	74,0	3.088.112.821,00	77,7	3.308.512.821,00	81,5	3.308.512.821,00	85,6	3.308.512.821,00	85,6	16.101.764.105,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	19,5	20,5	631.985.000,00	21,5	631.985.000,00	32,3	631.985.000,00	48,4	679.665.000,00	72,6	679.665.000,00	72,6	3.255.285.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ko ta	19,5	20,5	1.222.513.000,00	21,5	1.222.513.000,00	32,3	1.222.513.000,00	48,4	1.222.513.000,00	72,6	1.222.513.000,00	72,6	6.112.565.000,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,0	100,0	21.346.300,00	100,0	21.346.300,00	100,0	21.346.300,00	100,0	21.346.300,00	100,0	21.346.300,00	100,0	106.731.500,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	30,0	34,0	10.000.000,00	50,0	10.000.000,00	64,0	20.000.000,00	74,0	20.000.000,00	94,0	20.000.000,00	94,0	80.000.000,00	
2.17.3.30.3.31.22.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
2.17.3.30.3.31.22.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				5.498.407.460,00		5.498.407.460,00		5.429.960.260,00		5.429.960.260,00		5.429.960.260,00		27.286.695.700,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	62,9	66,0	2.923.164.460,00	69,3	2.923.164.460,00	72,8	2.854.717.260,00	76,5	2.854.717.260,00	80,3	2.854.717.260,00	80,3	14.410.480.700,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	2,0	2,1	2.500.243.000,00	5,0	2.500.243.000,00	5,3	2.500.243.000,00	10,0	2.500.243.000,00	10,5	2.500.243.000,00	10,5	12.501.215.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	10,3	10,9	30.000.000,00	11,4	30.000.000,00	12,0	30.000.000,00	12,6	30.000.000,00	13,2	30.000.000,00	13,2	150.000.000,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase kenaikan pendapatan Pasar terhadap PAD	14,3	14,6	20.000.000,00	14,9	20.000.000,00	15,2	20.000.000,00	15,5	20.000.000,00	15,8	20.000.000,00	15,8	100.000.000,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100,0	100,0	25.000.000,00	100,0	25.000.000,00	100,0	25.000.000,00	100,0	25.000.000,00	100,0	25.000.000,00	100,0	125.000.000,00	
2.18.0.00.0.00.17.0 000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu															
2.18.0.00.0.00.17.0 000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu				4.714.947.810,00		4.714.947.810,00		4.554.947.810,00		4.579.411.810,00		4.554.947.810,00		23.119.203.050,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	55,9	58,7	4.088.825.810,00	61,6	4.088.825.810,00	64,7	4.088.825.810,00	68,0	4.113.289.810,00	71,4	4.088.825.810,00	71,4	20.468.593.050,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ko ta	5,0	5,0	50.000.000,00	5,0	50.000.000,00	5,0	50.000.000,00	5,0	50.000.000,00	5,0	50.000.000,00	5,0	250.000.000,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ko ta	5,0	5,0	150.000.000,00	5,0	150.000.000,00	5,0	40.000.000,00	5,0	40.000.000,00	5,0	40.000.000,00	5,0	420.000.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ko ta	5,0	5,0	326.122.000,00	5,0	326.122.000,00	5,0	326.122.000,00	5,0	326.122.000,00	5,0	326.122.000,00	5,0	1.630.610.000,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	100,0	100,0	100.000.000,00	100,0	100.000.000,00	100,0	50.000.000,00	100,0	50.000.000,00	100,0	50.000.000,00	100,0	350.000.000,00	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	95,0	95,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0	0,00	
2.23.2.24.0.00.19.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan															
2.23.2.24.0.00.19.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				2.951.564.680,00		2.951.564.680,00		2.951.564.680,00		2.951.564.680,00		2.951.564.680,00		14.757.823.400,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	59,3	61,7	2.634.909.680,00	64,2	2.634.909.680,00	66,7	2.634.909.680,00	69,4	2.634.909.680,00	72,2	2.634.909.680,00	72,2	13.174.548.400,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,3	0,3	256.655.000,00	0,3	256.655.000,00	0,3	256.655.000,00	0,3	256.655.000,00	0,3	256.655.000,00	0,3	1.283.275.000,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100,0	100,0	30.000.000,00	100,0	30.000.000,00	100,0	30.000.000,00	100,0	30.000.000,00	100,0	30.000.000,00	100,0	150.000.000,00	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	32,6	46,5	20.000.000,00	79,1	20.000.000,00	93,0	20.000.000,00	100,0	20.000.000,00	100,0	20.000.000,00	100,0	100.000.000,00	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase perizinan arsip tertutup yang terlayani	100,0	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	50.000.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.25.0.00.0.00.20.0 000	Dinas Perikanan															
3.25.0.00.0.00.20.0 000	Dinas Perikanan				3.452.642.954,00		3.452.642.954,00		3.452.602.954,00	2.788,0	3.452.602.954,00		3.452.602.954,00		17.263.094.770,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	52,2	60,0	2.978.642.654,00	63,0	2.978.642.654,00	66,2	2.978.642.654,00	72,8	2.978.642.654,00	80,1	2.978.642.654,00	80,1	14.893.213.270,00	Dinas Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap kabupaten/ko ta	2.113,0	2.218,7	82.263.900,00	2.329,6	82.263.900,00	2.446,1	82.263.900,00	2.568,4	82.263.900,00	2.696,8	82.263.900,00	12.259,4	411.319.500,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/ko ta	3.933,0	4091,89	334.235.600,00	4173,73	334.235.600,00	4257,21	334.195.600,00	4342,35	334.195.600,00	4342,35	334.195.600,00	21.207,5	1.671.058.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang diawasi	25,0	30,0	11.562.200,00	36,0	11.562.200,00	43,2	11.562.200,00	51,8	11.562.200,00	62,2	11.562.200,00	62,2	57.811.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan	25,0	50,0	45.938.600,00	75,0	45.938.600,00	85,0	45.938.600,00	95,0	45.938.600,00	100,0	45.938.600,00	100,0	229.693.000,00	
3.26.2.19.0.00.18.0 000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga															
3.26.2.19.0.00.18.0 000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga				4.340.880.354,00		4.340.880.354,00		4.340.880.354,00		4.440.880.354,00		4.440.880.354,00		21.904.401.770,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	50,7	58,3	3.306.468.054,00	61,2	3.306.468.054,00	64,3	3.306.468.054,00	67,5	3.306.468.054,00	70,8	3.306.468.054,00	70,8	16.532.340.270,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	50,7	51,7	700.000.000,00	52,8	700.000.000,00	53,8	700.000.000,00	54,9	700.000.000,00	56,0	700.000.000,00	56,0	3.500.000.000,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional / internasional	2,0	1,0	76.000.000,00	1,0	76.000.000,00	1,0	76.000.000,00	1,0	176.000.000,00	6,0	176.000.000,00	6,0	580.000.000,00	
3.26.04	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	20,0	20,0	108.412.300,00	20,0	108.412.300,00	20,0	108.412.300,00	20,0	108.412.300,00	20,0	108.412.300,00	20,0	542.061.500,00	
3.26.05	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	0,0	5,0	100.000.000,00	5,0	100.000.000,00	5,0	100.000.000,00	5,0	100.000.000,00	5,0	100.000.000,00	5,0	500.000.000,00	
3.26.06	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif dan kelompok sadar wisata	5,0	10,0	50.000.000,00	15,0	50.000.000,00	20,0	50.000.000,00	25,0	50.000.000,00	30,0	50.000.000,00	30,0	250.000.000,00	
3.27.0.00.0.00.21.0000	Dinas Pertanian															
3.27.0.00.0.00.21.0000	Dinas Pertanian				12.704.968.573,00		12.704.968.573,00		12.802.860.373,00		12.852.860.373,00		12.802.860.373,00		63.868.518.265,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	50,7	63,3	12.293.370.473,00	66,4	12.293.370.473,00	69,8	12.345.470.473,00	73,3	12.345.470.473,00	76,9	12.345.470.473,00	76,9	61.623.152.365,00	Dinas Pertanian
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100,4	100,6	20.000.000,00	100,8	20.000.000,00	101,0	22.370.000,00	101,2	22.370.000,00	101,4	22.370.000,00	101,4	107.110.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	75,0	75,0	0,00	75,0	0,00	75,0	0,00	75,0	50.000.000,00	75,0	0,00	75,0	50.000.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	20,0	20,0	24.293.000,00	20,0	24.293.000,00	20,0	20.041.200,00	20,0	20.041.200,00	20,0	20.041.200,00	20,0	108.709.600,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang terkendaikan	100,0	100,0	182.605.200,00	100,0	182.605.200,00	100,0	227.668.400,00	100,0	227.668.400,00	100,0	227.668.400,00	100,0	1.048.215.600,00	
3.27.05	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	100,0	100,0	45.899.900,00	100,0	45.899.900,00	100,0	38.990.400,00	100,0	38.990.400,00	100,0	38.990.400,00	100,0	208.771.000,00	
3.27.06	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan peningkatan pemberdayaa n kelompok tani	25,0	37,5	138.800.000,00	56,3	138.800.000,00	64,7	148.319.900,00	67,9	148.319.900,00	69,3	148.319.900,00	69,3	722.559.700,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01.2.10.000.23.000	Sekretariat Daerah															
4.01.2.10.000.23.001	Bagian Pemerintahan				227.526.200,00		227.526.200,00		282.524.600,00		282.524.600,00		282.524.600,00		1.302.626.200,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayani	95,0	95,0	107.526.200,00	95,0	107.526.200,00	95,0	112.526.200,00	95,0	112.526.200,00	95,0	112.526.200,00	95,0	552.631.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan dan kerjasama daerah	70,0	70,0	120.000.000,00	70,0	120.000.000,00	70,0	169.998.400,00	85,0	169.998.400,00	85,0	169.998.400,00	85,0	749.995.200,00	
4.01.2.10.000.23.002	Bagian Kesejahteraan Rakyat				732.981.000,00		732.981.000,00		836.763.000,00		836.763.000,00		836.763.000,00		3.976.251.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayani	95,0	95,0	77.681.000,00	95,0	77.681.000,00	95,0	77.681.000,00	95,0	77.681.000,00	95,0	77.681.000,00	95,0	388.405.000,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	100,0	100,0	655.300.000,00	100,0	655.300.000,00	100,0	759.082.000,00	100,0	759.082.000,00	100,0	759.082.000,00	100,0	3.587.846.000,00	
4.01.2.10.0.00.23.0003	Bagian Umum				19.065.583.680,00		20.819.340.680,00		23.452.287.880,00		21.923.267.080,00		21.923.267.080,00		107.183.746.400,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	61,5	64,6	19.065.583.680,00	67,8	20.819.340.680,00	71,2	23.452.287.880,00	74,7	21.923.267.080,00	78,5	21.923.267.080,00	78,5	107.183.746.400,00	
		Persentase pelayanan sekretariat daerah terlayani	95,0	95,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0	0,00	
4.01.2.10.0.00.23.0004	Bagian Hukum				630.045.150,00		630.045.150,00		648.849.450,00		648.849.450,00		648.849.450,00		3.206.638.650,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayani	95,0	95,0	187.262.850,00	95,0	187.262.850,00	95,0	206.067.150,00	95,0	206.067.150,00	95,0	206.067.150,00	95,0	992.727.150,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum yang terbitkan	95,0	95,0	442.782.300,00	95,0	442.782.300,00	95,0	442.782.300,00	95,0	442.782.300,00	95,0	442.782.300,00	95,0	2.213.911.500,00	
4.01.2.10.0.00.23.0005	Bagian Organisasi				322.543.800,00		322.543.800,00		357.615.000,00		363.055.000,00		363.055.000,00		1.728.812.600,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Akip OPD Nilai B	42,9	45,0	322.543.800,00	51,8	322.543.800,00	59,5	357.615.000,00	62,5	363.055.000,00	65,6	363.055.000,00	65,6	1.728.812.600,00	
		Persentase OPD yang Pelayanan Publik yang baik	50,0	75,0		95,0		95,0		95,0		100,0		100,0	0,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Perentase OPD yang aktif dalam pelaporan Reformasi Birokrasi	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	0,00	
4.01.2.10.0.00.23.0006	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				527.867.910,00		527.867.910,00		576.455.760,00		556.543.910,00		578.431.180,00		2.767.166.670,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayani	95,0	95,0	527.867.910,00	95,0	527.867.910,00	95,0	576.455.760,00	95,0	556.543.910,00	95,0	578.431.180,00	95,0	2.767.166.670,00	
		Persentase Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang terlaksana	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	0,00	
4.01.2.10.0.00.23.0007	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam				248.467.800,00		248.467.800,00		265.467.800,00		265.467.800,00		265.467.800,00		1.293.339.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayani	95,0	95,0	134.289.800,00	95,0	134.289.800,00	95,0	139.289.800,00	95,0	139.289.800,00		139.289.800,00		686.449.000,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BLUD dalam kondisi baik	50,0	100,0	114.178.000,00	100,0	114.178.000,00	100,0	126.178.000,00	100,0	126.178.000,00	100,0	126.178.000,00	100,0	606.890.000,00	
		Persentase kebijakan Bidang Perkonomian dan SDA yang dilaksanakan	75,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	0,00	
4.01.2.10.0.00.23.0008	Bagian Administrasi Pembangunan				182.749.300,00		182.749.300,00		308.749.300,00		308.749.300,00		308.749.300,00		1.291.746.500,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayani	95,0	95,0	89.427.300,00	95,0	89.427.300,00	95,0	89.427.300,00	95,0	89.427.300,00	95,0	89.427.300,00	95,0	447.136.500,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Fisik Keuangan (Teppra)	100,0	100,0	93.322.000,00	100,0	93.322.000,00	100,0	219.322.000,00	100,0	219.322.000,00	100,0	219.322.000,00	100,0	844.610.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase fasilitasi penyusunan program pembangunan	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	0,00	
4.01.2.10.0.00.23.0009	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				703.104.600,00		703.104.600,00		833.104.600,00		830.982.600,00		830.982.600,00		3.901.279.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlayani	95,0	95,0	174.565.600,00	95,0	174.565.600,00	95,0	204.565.600,00	95,0	204.565.600,00	95,0	204.565.600,00	95,0	962.828.000,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	50,0	50,0	528.539.000,00	50,0	528.539.000,00	50,0	628.539.000,00	50,0	626.417.000,00	50,0	626.417.000,00	50,0	2.938.451.000,00	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	0,00	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	30,7	32,2		33,8		35,5		37,3		39,2		39,2	0,00	
4.01.2.10.0.00.23.0010	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah				5.328.578.725,00		5.779.070.725,00		5.779.070.725,00		5.078.462.725,00		5.078.462.725,00		27.043.645.625,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi pelayanan KDH/ WKDH yang terlayani	100,0	100,0	5.328.578.725,00	100,0	5.779.070.725,00	100,0	5.779.070.725,00	100,0	5.078.462.725,00	100,0	5.078.462.725,00	100,0	27.043.645.625,00	
4.02.0.00.0.00.24.0000	Sekretariat DPRD				37.245.952.486,00		37.245.952.486,00		41.233.851.816,00		42.554.940.386,00		41.110.340.386,00		199.391.037.560,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	61,5	64,5	21.806.509.886,00	67,7	21.806.509.886,00	71,1	22.794.409.216,00	74,7	24.115.497.786,00	78,4	22.670.897.786,00	78,4	113.193.824.560,00	Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95,0	95,0	15.439.442.600,00	95,0	15.439.442.600,00	95,0	18.439.442.600,00	95,0	18.439.442.600,00	95,0	18.439.442.600,00	95,0	86.197.213.000,00	
		0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,00	
		0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.01.0.00.0.00.40.0 000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah															
5.01.0.00.0.00.40.0 000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				4.986.295.822,00		4.986.295.822,00		5.318.460.222,00		5.318.460.222,00		5.318.460.222,00		25.927.972.310,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	67,0	68,4	4.696.295.822,00	69,7	4.696.295.822,00	71,1	4.918.460.222,00	72,6	4.918.460.222,00	74,0	4.918.460.222,00	74,0	24.147.972.310,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian dokumen RPJMD, Renstra dan RKPD	100,0	100,0	150.000.000,00	100,0	150.000.000,00	100,0	180.000.000,00	100,0	180.000.000,00	100,0	180.000.000,00	100,0	840.000.000,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian Prioritas perencanaan pembangunan bidang Ekonomi sosial dan budaya	100,0	100,0	140.000.000,00	100,0	140.000.000,00	100,0	220.000.000,00	100,0	220.000.000,00	100,0	220.000.000,00	100,0	940.000.000,00	
		0	0,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	0,00	
5.02.0.00.0.00.41.0 000	Badan Keuangan Daerah															

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.02.0.00.0.00.41.0 000	Badan Keuangan Daerah				8.207.560.036,00		8.207.560.036,00		9.168.127.136,00		9.187.321.136,00		9.187.321.136,00		43.957.889.480,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	61,32	64,39	7.782.597.636,00	67,61	7.782.597.636,00	70,99	8.629.392.636,00	74,53	8.629.392.636,00	78,26	8.629.392.636,00	78,26	41.453.373.180,00	Badan Keuangan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	12,7	12,7	325.000.000,00	12,6	325.000.000,00	12,6	400.000.000,00	12,6	419.194.000,00	12,6	419.194.000,00	12,6	1.888.388.000,00	
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	-5,0	-5,0		-5,0		-5,0		-5,0		-5,0		0,0	0,00	
		0	15,0	15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0	0,00	
		0	6,3	6,3		6,3		6,3		6,3		6,3		6,3	0,00	
		0	60,7	60,7		60,7		60,7		60,7		60,7		60,7	0,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Daerah yang diamankan	1,0	1,0	99.962.400,00	1,0	99.962.400,00	1,0	138.734.500,00	1,0	138.734.500,00	1,0	138.734.500,00	1,0	616.128.300,00	
		Persentase BMD yang ditertibkan	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
5.02.0.00.0.00.41.0 001	PPKD				205.916.168.790,28		206.325.552.498,30		246.818.188.422,27		208.330.677.064,72		209.363.415.480,01		1.076.754.002.255,57	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Serapan Belanja Daerah	95,0	95,0	205.916.168.790,28	95,0	206.325.552.498,30	95,0	246.818.188.422,27	95,0	208.330.677.064,72	95,0	209.363.415.480,01	95,0	1.076.754.002.255,57	
5.02.0.00.0.00	Badan Pendapatan Daerah															

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.02.0.00.0.00	Badan Pendapatan Daerah				2.615.097.415,00		2.615.097.415,00		2.615.097.415,00		2.615.097.415,00		2.615.097.415,00		13.075.487.075,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	0,0	61,3	2.315.097.415,00	63,8	2.315.097.415,00	66,3	2.315.097.415,00	69,0	2.315.097.415,00	71,7	2.315.097.415,00	71,7	11.575.487.075,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	1,4	1,4	300.000.000,00	1,4	300.000.000,00	1,4	300.000.000,00	1,4	300.000.000,00	1,4	300.000.000,00	1,4	1.500.000.000,00	
5.03.5.05.0.00.42.0.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia															
5.03.5.05.0.00.42.0.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				4.860.348.939,00		4.860.348.939,00		4.860.348.939,00		5.564.516.339,00		5.160.348.939,00		25.305.912.095,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	59,0	62,0	4.061.028.439,00	65,1	4.061.028.439,00	68,3	4.061.028.439,00	71,8	4.061.028.439,00	75,3	4.061.028.439,00	75,3	20.305.142.195,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase peningkatan kompetensi ASN	58,6	58,7	799.320.500,00	58,8	799.320.500,00	59,0	799.320.500,00	59,1	1.503.487.900,00	59,2	1.099.320.500,00	59,2	5.000.769.900,00	
		Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	1,0	1,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0	0,00	
		Persentase ASN yang berkinerja baik	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	0,00	
		Persentase pelanggaran Disiplin ASN yang diselesaikan	100,0	100,0	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	
5.05.0.00.0.00.43.0.000	Badan Penelitian dan Pengembangan															
5.05.0.00.0.00.43.0.000	Badan Penelitian dan Pengembangan				2.236.587.730,00		2.236.587.730,00		2.276.587.730,00		2.336.587.730,00		2.236.587.730,00		11.322.938.650,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	51,9	54,5	2.075.576.250,00	57,3	2.075.576.250,00	60,1	2.075.576.250,00	63,1	2.075.576.250,00	66,3	2.075.576.250,00	66,3	10.377.881.250,00	Badan Penelitian dan Pengembangan
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase OPD yang memiliki Inovasi	53,6	60,7	161.011.480,00	67,9	161.011.480,00	71,4	201.011.480,00	89,3	261.011.480,00	96,4	161.011.480,00	96,4	945.057.400,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6.01.0.00.0.00.39.000	Inspektorat															
6.01.0.00.0.00.39.000	Inspektorat				6.852.365.510,00		6.852.365.510,00		8.199.242.310,00		8.199.242.310,00		8.199.242.310,00		38.302.457.950,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	66,8	70,1	6.210.698.710,00	73,6	6.210.698.710,00	77,3	6.896.584.510,00	81,2	6.896.584.510,00	85,2	6.896.584.510,00	85,2	33.111.150.950,00	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2,0	2,0	453.796.800,00	2,0	453.796.800,00	3,0	1.009.732.800,00	3,0	1.009.732.800,00	3,0	1.009.732.800,00	3,0	3.936.792.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,0	2,0	187.870.000,00	2,0	187.870.000,00	3,0	292.925.000,00	3,0	292.925.000,00	3,0	292.925.000,00	3,0	1.254.515.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7.01.0.00.0.00.25.000	Kecamatan Sukaraja				5.134.268.753,00		5.134.268.753,00		5.134.268.753,00		5.134.268.753,00		5.134.268.753,00		25.671.343.765,00	
7.01.0.00.0.00.25.000	Kecamatan Sukaraja				4.418.887.385,00		4.418.887.385,00		4.418.887.385,00		4.418.887.385,00		4.418.887.385,00		22.094.436.925,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	4.363.887.385,00	60,3	4.363.887.385,00	63,3	4.363.887.385,00	66,5	4.363.887.385,00	70,4	4.363.887.385,00	70,4	21.819.436.925,00	Kecamatan Sukaraja

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang terlayani	0,0	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	75.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	5,0	5,0	30.000.000,00	5,0	30.000.000,00	5,0	30.000.000,00	5,0	30.000.000,00	5,0	30.000.000,00	5,0	150.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	100,0	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	50.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.25.0001	Kelurahan Sukaraja				252.060.708,00		252.060.708,00		252.060.708,00		252.060.708,00		252.060.708,00		1.260.303.540,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	95.960.708,00	60,3	95.960.708,00	63,3	95.960.708,00	66,5	95.960.708,00	70,4	95.960.708,00	70,4	479.803.540,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	156.100.000,00	100,0	156.100.000,00	100,0	156.100.000,00	100,0	156.100.000,00	100,0	156.100.000,00	100,0	780.500.000,00	
7.01.0.00.0.00.25.0002	Kelurahan Babatan				231.660.330,00		231.660.330,00		231.660.330,00		231.660.330,00		231.660.330,00		1.158.301.650,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	75.711.330,00	60,3	75.711.330,00	63,3	75.711.330,00	66,5	75.711.330,00	70,4	75.711.330,00	70,4	378.556.650,00	
37628	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	155.949.000,00	100,0	155.949.000,00	100,0	155.949.000,00	100,0	155.949.000,00	100,0	155.949.000,00	100,0	779.745.000,00	
7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Air Periukan				3.272.628.310,00		3.272.628.310,00		3.272.628.310,00		3.272.628.310,00		3.272.628.310,00		16.363.141.550,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.0.00.0.00.26.0.000	Kecamatan Air Periukan				3.064.391.910,00		3.064.391.910,00		3.064.391.910,00		3.064.391.910,00		3.064.391.910,00		15.321.959.550,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	3.016.892.110,00	60,3	3.016.892.110,00	63,3	3.016.892.110,00	66,5	3.016.892.110,00	70,4	3.016.892.110,00	70,4	15.084.460.550,00	Kecamatan Air Periukan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang terlayani	0,0	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	75.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	5,0	5,0	24.499.800,00	5,0	24.499.800,00	5,0	24.499.800,00	5,0	24.499.800,00	5,0	24.499.800,00	5,0	122.499.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	100,0	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	40.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.26.0.001	Kelurahan Dermayu				208.236.400,00		208.236.400,00		208.236.400,00		208.236.400,00		208.236.400,00		1.041.182.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	67.785.400,00	60,3	67.785.400,00	63,3	67.785.400,00	66,5	67.785.400,00	70,4	67.785.400,00	70,4	338.927.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	140.451.000,00	100,0	140.451.000,00	100,0	140.451.000,00	100,0	140.451.000,00	100,0	140.451.000,00	100,0	702.255.000,00	
7.01.0.00.0.00.27.0.000	Kecamatan Lubuk Sandi				2.041.733.439,00		2.041.733.439,00		2.041.733.439,00		2.041.733.439,00		2.041.733.439,00		10.208.667.195,00	
7.01.0.00.0.00.27.0.000	Kecamatan Lubuk Sandi				2.041.733.439,00		2.041.733.439,00		2.041.733.439,00		2.041.733.439,00		2.041.733.439,00		10.208.667.195,00	
36898	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	2.006.735.639,00	60,3	2.006.735.639,00	63,3	2.006.735.639,00	66,5	2.006.735.639,00	70,4	2.006.735.639,00	70,4	10.033.678.195,00	Kecamatan Lubuk Sandi

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	KABUPATEN/KOTA															
37263	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang terlayani	0,0	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	75.000.000,00	
37628	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	5,0	5,0	11.997.800,00	5,0	11.997.800,00	5,0	11.997.800,00	5,0	11.997.800,00	5,0	11.997.800,00	5,0	59.989.000,00	
38724	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	100,0	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	40.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.28.0 000	Kecamatan Seluma				8.179.510.791,00		8.179.510.791,00		8.179.510.791,00		8.179.510.791,00		8.179.510.791,00		40.897.553.955,00	
7.01.0.00.0.00.28.0 000	Kecamatan Seluma				7.042.045.337,00		7.042.045.337,00		7.042.045.337,00		7.042.045.337,00		7.042.045.337,00		35.210.226.685,00	
36898	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	7.001.076.337,00	60,3	7.001.076.337,00	63,3	7.001.076.337,00	66,5	7.001.076.337,00	70,4	7.001.076.337,00	70,4	35.005.381.685,00	Kecamatan Seluma
37263	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang terlayani	0,0	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	75.000.000,00	
37628	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	5,0	5,0	25.969.000,00	5,0	25.969.000,00	5,0	25.969.000,00	5,0	25.969.000,00	5,0	25.969.000,00	5,0	129.845.000,00	
7.01.0.00.0.00.28.0 001	Kelurahan Pasar Tais				203.380.336,00		203.380.336,00		203.380.336,00		203.380.336,00		203.380.336,00		1.016.901.680,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
36898	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	96.880.336,00	60,3	96.880.336,00	63,3	96.880.336,00	66,5	96.880.336,00	70,4	96.880.336,00	70,4	484.401.680,00	
37628	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	106.500.000,00	100,0	106.500.000,00	100,0	106.500.000,00	100,0	106.500.000,00	100,0	106.500.000,00	100,0	532.500.000,00	
7.01.0.00.0.00.28.0.002	Kelurahan Napal				177.594.222,00		177.594.222,00		177.594.222,00		177.594.222,00		177.594.222,00		887.971.110,00	
36898	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	82.494.222,00	60,3	82.494.222,00	63,3	82.494.222,00	66,5	82.494.222,00	70,4	82.494.222,00	70,4	412.471.110,00	
37628	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	95.100.000,00	100,0	95.100.000,00	100,0	95.100.000,00	100,0	95.100.000,00	100,0	95.100.000,00	100,0	475.500.000,00	
7.01.0.00.0.00.28.0.003	Kelurahan Lubuk Lintang				190.345.912,00		190.345.912,00		190.345.912,00		190.345.912,00		190.345.912,00		951.729.560,00	
36898	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	90.973.912,00	60,3	90.973.912,00	63,3	90.973.912,00	66,5	90.973.912,00	70,4	90.973.912,00	70,4	454.869.560,00	
37628	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	99.372.000,00	100,0	99.372.000,00	100,0	99.372.000,00	100,0	99.372.000,00	100,0	99.372.000,00	100,0	496.860.000,00	
7.01.0.00.0.00.28.0.004	Kelurahan Talang Saling				114.458.760,00		114.458.760,00		114.458.760,00		114.458.760,00		114.458.760,00		572.293.800,00	
36898	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	53.452.760,00	60,3	53.452.760,00	63,3	53.452.760,00	66,5	53.452.760,00	70,4	53.452.760,00	70,4	267.263.800,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
37628	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	61.006.000,00	100,0	61.006.000,00	100,0	61.006.000,00	100,0	61.006.000,00	100,0	61.006.000,00	100,0	305.030.000,00	
7.01.0.00.0.00.28.0005	Kelurahan Talang Dantuk				150.731.300,00		150.731.300,00		150.731.300,00		150.731.300,00		150.731.300,00		753.656.500,00	
36898	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	83.409.500,00	60,3	83.409.500,00	63,3	83.409.500,00	66,5	83.409.500,00	70,4	83.409.500,00	70,4	417.047.500,00	
37628	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	67.321.800,00	100,0	67.321.800,00	100,0	67.321.800,00	100,0	67.321.800,00	100,0	67.321.800,00	100,0	336.609.000,00	
7.01.0.00.0.00.28.0006	Kelurahan Dusun Baru				151.993.300,00		151.993.300,00		151.993.300,00		151.993.300,00		151.993.300,00		759.966.500,00	
38359	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	66.193.300,00	60,3	66.193.300,00	63,3	66.193.300,00	66,5	66.193.300,00	70,4	66.193.300,00	70,4	330.966.500,00	
37628	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	85.800.000,00	100,0	85.800.000,00	100,0	85.800.000,00	100,0	85.800.000,00	100,0	85.800.000,00	100,0	429.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.28.0007	Kelurahan Lubuk Kebur				148.961.624,00		148.961.624,00		148.961.624,00		148.961.624,00		148.961.624,00		744.808.120,00	
36898	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	78.462.024,00	60,3	78.462.024,00	63,3	78.462.024,00	66,5	78.462.024,00	70,4	78.462.024,00	70,4	392.310.120,00	
37628	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan	100,0	100,0	70.499.600,00	100,0	70.499.600,00	100,0	70.499.600,00	100,0	70.499.600,00	100,0	70.499.600,00	100,0	352.498.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		pembangunan														
7.01.0.00.0.00.30.0 000	Kecamatan Seluma Barat				1.846.089.230,00		1.846.089.230,00		1.846.089.230,00		1.846.089.230,00		1.846.089.230,00		9.230.446.150,00	
7.01.0.00.0.00.30.0 000	Kecamatan Seluma Barat				1.846.089.230,00		1.846.089.230,00		1.846.089.230,00		1.846.089.230,00		1.846.089.230,00		9.230.446.150,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	1.805.259.330,00	60,3	1.805.259.330,00	63,3	1.805.259.330,00	66,5	1.805.259.330,00	70,4	1.805.259.330,00	70,4	9.026.296.650,00	Kecamatan Seluma Barat
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang terlayani	0,0	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	75.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	5,0	5,0	17.829.900,00	5,0	17.829.900,00	5,0	17.829.900,00	5,0	17.829.900,00	5,0	17.829.900,00	5,0	89.149.500,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	100,0	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	40.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.30.0 000	Kecamatan Seluma Utara				2.733.897.192,00		2.733.897.192,00		2.733.897.192,00		2.733.897.192,00		2.733.897.192,00		13.669.485.960,00	
7.01.0.00.0.00.30.0 000	Kecamatan Seluma Utara				2.544.520.412,00		2.544.520.412,00		2.544.520.412,00		2.544.520.412,00		2.544.520.412,00		12.722.602.060,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	2.501.576.412,00	60,3	2.501.576.412,00	63,3	2.501.576.412,00	66,5	2.501.576.412,00	70,4	2.501.576.412,00	70,4	12.507.882.060,00	Kecamatan Seluma Utara

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang terlayani	0,0	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	75.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	5,0	5,0	19.944.000,00	5,0	19.944.000,00	5,0	19.944.000,00	5,0	19.944.000,00	5,0	19.944.000,00	5,0	99.720.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	100,0	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	40.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.30.0 001	Kelurahan Puguk				189.376.780,00		189.376.780,00		189.376.780,00		189.376.780,00		189.376.780,00		946.883.900,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	75.776.780,00	60,3	75.776.780,00	63,3	75.776.780,00	66,5	75.776.780,00	70,4	75.776.780,00	70,4	378.883.900,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	113.600.000,00	100,0	113.600.000,00	100,0	113.600.000,00	100,0	113.600.000,00	100,0	113.600.000,00	100,0	568.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.31.0 000	Kecamatan Seluma Selatan				3.907.212.174,00		3.907.212.174,00		3.907.212.174,00		3.907.212.174,00		3.907.212.174,00		19.536.060.870,00	
7.01.0.00.0.00.31.0 000	Kecamatan Seluma Selatan				3.318.659.655,00		3.318.659.655,00		3.318.659.655,00		3.318.659.655,00		3.318.659.655,00		16.593.298.275,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	3.285.334.855,00	60,3	3.285.334.855,00	63,3	3.285.334.855,00	66,5	3.285.334.855,00	70,4	3.285.334.855,00	70,4	16.426.674.275,00	Kecamatan Seluma Selatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang terlayani	0,0	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	75.000.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	5,0	5,0	18.324.800,00	5,0	18.324.800,00	5,0	18.324.800,00	5,0	18.324.800,00	5,0	18.324.800,00	5,0	91.624.000,00	
7.01.0.00.0.00.31.0.001	Kelurahan Rimbo Kedui				214.065.423,00		214.065.423,00		214.065.423,00		214.065.423,00		214.065.423,00		1.070.327.115,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	84.465.423,00	60,3	84.465.423,00	63,3	84.465.423,00	66,5	84.465.423,00	70,4	84.465.423,00	70,4	422.327.115,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	129.600.000,00	100,0	129.600.000,00	100,0	129.600.000,00	100,0	129.600.000,00	100,0	129.600.000,00	100,0	648.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.31.0.003	Kelurahan Sidomulyo				179.769.848,00		179.769.848,00		179.769.848,00		179.769.848,00		179.769.848,00		898.849.240,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	51.717.248,00	60,3	51.717.248,00	63,3	51.717.248,00	66,5	51.717.248,00	70,4	51.717.248,00	70,4	258.586.240,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	128.052.600,00	100,0	128.052.600,00	100,0	128.052.600,00	100,0	128.052.600,00	100,0	128.052.600,00	100,0	640.263.000,00	
7.01.0.00.0.00.31.0.004	Kelurahan Padang Rambun				194.717.248,00		194.717.248,00		194.717.248,00		194.717.248,00		194.717.248,00		973.586.240,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	51.717.248,00	60,3	51.717.248,00	63,3	51.717.248,00	66,5	51.717.248,00	70,4	51.717.248,00	70,4	258.586.240,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	143.000.000,00	100,0	143.000.000,00	100,0	143.000.000,00	100,0	143.000.000,00	100,0	143.000.000,00	100,0	715.000.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.0.00.0.00.32.0 000	Kecamatan Seluma Timur				3.504.170.965,00		3.504.170.965,00		3.504.170.965,00		3.504.170.965,00		3.504.170.965,00		17.520.854.825,00	
7.01.0.00.0.00.32.0 000	Kecamatan Seluma Timur				2.987.458.102,00		2.987.458.102,00		2.987.458.102,00		2.987.458.102,00		2.987.458.102,00		14.937.290.510,00	Kecamatan Seluma Timur
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	2.940.566.102,00	60,3	2.940.566.102,00	63,3	2.940.566.102,00	66,5	2.940.566.102,00	70,4	2.940.566.102,00	70,4	14.702.830.510,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang terlayani	0,0	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	75.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	5,0	5,0	23.892.000,00	5,0	23.892.000,00	5,0	23.892.000,00	5,0	23.892.000,00	5,0	23.892.000,00	5,0	119.460.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	100,0	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	40.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.32.0 001	Kelurahan Sembayat				157.397.582,00		157.397.582,00		157.397.582,00		157.397.582,00		157.397.582,00		786.987.910,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	41,9	75.097.582,00	41,9	75.097.582,00	41,9	75.097.582,00	41,9	75.097.582,00	44,4	75.097.582,00	44,4	375.487.910,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	82.300.000,00	100,0	82.300.000,00	100,0	82.300.000,00	100,0	82.300.000,00	100,0	82.300.000,00	100,0	411.500.000,00	
7.01.0.00.0.00.32.0 002	Kelurahan Bungamas				188.580.562,00		188.580.562,00		188.580.562,00		188.580.562,00		188.580.562,00		942.902.810,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	41,9	69.880.562,00	41,9	69.880.562,00	41,9	69.880.562,00	44,0	69.880.562,00	46,6	69.880.562,00	46,6	349.402.810,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	KABUPATEN/KOTA															
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	118.700.000,00	100,0	118.700.000,00	100,0	118.700.000,00	100,0	118.700.000,00	100,0	118.700.000,00	100,0	593.500.000,00	
7.01.0.00.0.00.32.0.003	Kelurahan Selebar				170.734.719,00		170.734.719,00		170.734.719,00		170.734.719,00		170.734.719,00		853.673.595,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	87.738.719,00	60,3	87.738.719,00	63,3	87.738.719,00	66,5	87.738.719,00	70,4	87.738.719,00	70,4	438.693.595,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	82.996.000,00	100,0	82.996.000,00	100,0	82.996.000,00	100,0	82.996.000,00	100,0	82.996.000,00	100,0	414.980.000,00	
7.01.0.00.0.00.33.0.000	Kecamatan Talo				2.468.055.770,00		2.463.499.770,00		2.463.499.770,00		2.463.499.770,00		2.463.499.770,00		12.322.054.850,00	
7.01.0.00.0.00.33.0.000	Kecamatan Talo				2.276.147.770,00		2.271.591.770,00		2.271.591.770,00		2.271.591.770,00		2.271.591.770,00		11.362.514.850,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	2.238.979.770,00	60,3	2.234.423.770,00	63,3	2.234.423.770,00	66,5	2.234.423.770,00	70,4	2.234.423.770,00	70,4	11.176.674.850,00	Kecamatan Talo
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang terlayani	0,0	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	75.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	5,0	5,0	19.060.000,00	5,0	19.060.000,00	5,0	19.060.000,00	5,0	19.060.000,00	5,0	19.060.000,00	5,0	95.300.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	100,0	100,0	3.108.000,00	100,0	3.108.000,00	100,0	3.108.000,00	100,0	3.108.000,00	100,0	3.108.000,00	100,0	15.540.000,00	
7.01.0.00.0.00.33.0 001	Kelurahan Masmambang				191.908.000,00		191.908.000,00		191.908.000,00		191.908.000,00		191.908.000,00		959.540.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	93.662.000,00	60,3	93.662.000,00	63,3	93.662.000,00	66,5	93.662.000,00	70,4	93.662.000,00	70,4	468.310.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	98.246.000,00	100,0	98.246.000,00	100,0	98.246.000,00	100,0	98.246.000,00	100,0	98.246.000,00	100,0	491.230.000,00	
7.01.0.00.0.00.34.0 000	Kecamatan Ulu Talo				1.350.486.670,00		1.350.486.670,00		1.350.486.670,00		1.350.486.670,00		1.350.486.670,00		6.752.433.350,00	
7.01.0.00.0.00.34.0 000	Kecamatan Ulu Talo				1.350.486.670,00		1.350.486.670,00		1.350.486.670,00		1.350.486.670,00		1.350.486.670,00		6.752.433.350,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	1.306.651.270,00	60,3	1.306.651.270,00	63,3	1.306.651.270,00	66,5	1.306.651.270,00	70,4	1.306.651.270,00	70,4	6.533.256.350,00	Kecamatan Ulu Talo
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang terlayani	0,0	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	75.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	0,0	0,0	25.727.400,00	0,0	25.727.400,00	0,0	25.727.400,00	0,0	25.727.400,00		25.727.400,00		128.637.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	100,0	100,0	3.108.000,00	100,0	3.108.000,00	100,0	3.108.000,00	100,0	3.108.000,00	100,0	3.108.000,00	100,0	15.540.000,00	
7.01.0.00.0.00.35.0 000	Kecamatan Ilir Talo															

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.0.00.0.00.35.0 000	Kecamatan Ilir Talo				1.481.254.480,00		1.481.254.480,00		1.481.254.480,00		1.481.254.480,00		1.481.254.480,00		7.406.272.400,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	1.429.626.780,00	60,3	1.429.626.780,00	63,3	1.429.626.780,00	66,5	1.429.626.780,00	70,4	1.429.626.780,00	70,4	7.148.133.900,00	Kecamatan Ilir Talo
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang terlayani	0,0	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	75.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	5,0	5,0	28.627.700,00	5,0	28.627.700,00	5,0	28.627.700,00	5,0	28.627.700,00	5,0	28.627.700,00	5,0	143.138.500,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	100,0	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	8.000.000,00	100,0	40.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.36.0 000	Kecamatan Talo Kecil				2.143.337.224,00		2.143.337.224,00		2.143.337.224,00		2.143.337.224,00		2.143.337.224,00		10.716.686.120,00	
7.01.0.00.0.00.36.0 000	Kecamatan Talo Kecil				2.143.337.224,00		2.143.337.224,00		2.143.337.224,00		2.143.337.224,00		2.143.337.224,00		10.716.686.120,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	2.117.779.224,00	60,3	2.117.779.224,00	63,3	2.117.779.224,00	66,5	2.117.779.224,00	70,4	2.117.779.224,00	70,4	10.588.896.120,00	Kecamatan Talo Kecil
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang terlayani	0,0	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	75.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	5,0	5,0	5.962.000,00	5,0	5.962.000,00	5,0	5.962.000,00	5,0	5.962.000,00	5,0	5.962.000,00	5,0	29.810.000,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	100,0	100,0	4.596.000,00	100,0	4.596.000,00	100,0	4.596.000,00	100,0	4.596.000,00	100,0	4.596.000,00	100,0	22.980.000,00	
7.01.0.00.0.00.37.0.000	Kecamatan Semidang Alas				3.923.832.086,00		3.923.832.086,00		3.990.792.086,00		3.990.792.086,00		3.990.792.086,00		19.820.040.430,00	
7.01.0.00.0.00.37.0.000	Kecamatan Semidang Alas				3.670.331.390,00		3.670.331.390,00		3.737.291.390,00		3.737.291.390,00		3.737.291.390,00		18.552.536.950,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	3.580.557.090,00	60,3	3.580.557.090,00	63,3	3.647.517.090,00	66,5	3.647.517.090,00	70,4	3.647.517.090,00	70,4	18.103.665.450,00	Kecamatan Semidang Alas
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang terlayani	0,0	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	75.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	5,0	5,0	57.376.800,00	5,0	57.376.800,00	5,0	57.376.800,00	5,0	57.376.800,00	5,0	57.376.800,00	5,0	286.884.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	91,3	100,0	17.397.500,00	100,0	17.397.500,00	100,0	17.397.500,00	100,0	17.397.500,00	100,0	17.397.500,00	100,0	86.987.500,00	
7.01.0.00.0.00.37.0.001	Kelurahan Pajar Bulan				253.500.696,00		253.500.696,00		253.500.696,00		253.500.696,00		253.500.696,00		1.267.503.480,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	75.500.696,00	60,3	75.500.696,00	63,3	75.500.696,00	66,5	75.500.696,00	70,4	75.500.696,00	70,4	377.503.480,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	178.000.000,00	100,0	178.000.000,00	100,0	178.000.000,00	100,0	178.000.000,00	100,0	178.000.000,00	100,0	890.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.38.0.000	Kecamatan Semidang Alas Maras				2.931.309.006,00		2.931.309.006,00		2.943.691.406,00		2.943.691.406,00		2.943.691.406,00		14.693.692.230,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.0.00.0.00.38.0 000	Kecamatan Semidang Alas Maras				2.751.076.710,00		2.751.076.710,00	268,3	2.763.459.110,00		2.763.459.110,00		2.763.459.110,00		13.792.530.750,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	2.706.076.710,00	60,3	2.706.076.710,00	63,3	2.718.459.110,00	66,5	2.718.459.110,00	70,4	2.718.459.110,00	70,4	13.567.530.750,00	Kecamatan Semidang Alas Maras
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang terlayani	0,0	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	100,0	75.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	5,0	5,0	20.000.000,00	5,0	20.000.000,00	5,0	20.000.000,00	5,0	20.000.000,00	5,0	20.000.000,00	5,0	100.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	100,0	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	10.000.000,00	100,0	50.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.38.0 001	Kelurahan Kembang Mumpo				180.232.296,00		180.232.296,00		180.232.296,00		180.232.296,00		180.232.296,00		901.161.480,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,9	50,2	86.701.496,00	60,3	86.701.496,00	63,3	86.701.496,00	66,5	86.701.496,00	70,4	86.701.496,00	70,4	433.507.480,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan perangkat kelurahan dalam perencanaan pembangunan	100,0	100,0	93.530.800,00	100,0	93.530.800,00	100,0	93.530.800,00	100,0	93.530.800,00	100,0	93.530.800,00	100,0	467.654.000,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8.01.0.00.0.00.06.0 000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik															
8.01.0.00.0.00.06.0 000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				8.134.526.408,00		8.134.526.408,00		8.134.526.408,00		8.134.526.408,00		8.134.526.408,00		40.672.632.040,00	

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, OPD, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip Perangkat Daerah	41,4	49,7	3.072.851.408,00	59,6	3.072.851.408,00	62,6	3.072.851.408,00	65,7	3.072.851.408,00	72,3	3.072.851.408,00	72,3	15.364.257.040,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang diverifikasi	100,0	100,0	965.265.000,00	100,0	965.265.000,00	100,0	965.265.000,00	100,0	965.265.000,00	100,0	965.265.000,00	100,0	4.826.325.000,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	58,3	61,3	12.646.000,00	64,3	12.646.000,00	67,5	12.646.000,00	70,9	12.646.000,00	74,4	12.646.000,00	74,4	63.230.000,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penurunan jumlah Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras melalui upaya deteksi dini	5,0	5,1	22.385.000,00	5,2	22.385.000,00	5,3	22.385.000,00	5,4	22.385.000,00	5,5	22.385.000,00	5,5	111.925.000,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang ditangani	100,0	100,0	4.061.379.000,00	100,0	4.061.379.000,00	100,0	4.061.379.000,00	100,0	4.061.379.000,00	100,0	4.061.379.000,00	100,0	20.306.895.000,00	
TOTAL					980.787.464.466,24		981.522.541.174,26		996.379.795.929,23		980.016.767.752,49		996.795.498.447,54		4.935.502.067.769,75	

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rpjmd Kab Seluma 2021-2026





BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Ukuran kemajuan suatu daerah diukur dari indikator yang mampu menggambarkan pembangunan yang telah dilakukan di daerah tersebut. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut diantaranya ditentukan oleh data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan dengan hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Seluma periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Dalam hal ini, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Seluma ditetapkan sebagaimana telah disajikan dalam Bab V tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Seluma selama lima tahun kedepan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 8.1. Sementara itu, keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ditunjukkan dengan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berbagai urusan yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seluma

No	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis	Target Tahun Ke					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Indeks Pembangunan Manusia	67.94	68.68	69.42	70.16	70.9	71.63
1	Indeks Infrastruktur	44.93	47.18	49.53	52.01	54.61	57.34
2	Indeks Pendidikan	79.83	81.03	82.24	83.48	84.73	86
3	Indes Kesehatan	76.25	77.17	78.1	79.03	79.98	80.94
4	Indeks Pembangunan Kebudayaan	59.95	61.15	61.77	62.38	63.01	63.64
II	Angka Kemiskinan	17.57	16.78	16.00	15.21	14.42	13.63
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,57	2,45	2,32	2,21	2,10	1,99
2	Indeks Keparahan Kemiskinan	2.85	2.62	2.41	2.22	2.04	1.88
3	Tingkat Pengangguran terbuka	2.42	2.29	2.17	2.04	1.92	1.79
III	Indeks Resiko Bencana	133	130	127	125	120	117

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



No	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis	Target Tahun Ke					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,5	0,55	0,6	0,7	0,75	0,8
IV	Laju Pertumbuhan Ekonomi	0.92	3.14	4.71	4.88	5.02	5.89
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan dan Potensial	-0.406	3.238	4.87	5.038	5.184	6.084
2	Nilai Investasi Daerah / PMA (Milyar)	1987.68	2007.557	2027.632	2047.909	2068.388	2089.072
3	Nilai Investasi Daerah / PMDN (Milyar)	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
4	Indeks Desa Membangun	0.6898 (berkembang)	0,711 (Maju)	0,7322 (Maju)	0,7534 (Maju)	0,7746 (Maju)	0,7958 (Maju)
IV	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	CC	CC	CC	CC
1	Nilai SAKIP	CC	B	BB	BB	BB	BB
2	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Indeks Inovasi Daerah	2.675 (sangat Inovatif)	2.727	2.76	2.793	2.827	2.827
4	Nilai SPBE	Kurang (1,19)	1.23	1.25	1.26	1.28	1.29



Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Seluma

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (OUTCOME)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	0.92	3.14	4.71	4.88	5.02	5.89	5.89
1.2.	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	CC	B	B	B	B
1.3.	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Kesejahteraan Sosial							
	Sosial							
1.1.	Indeks Pembangunan Manusia	67.94	68.68	69.42	70.16	70.9	71.63	71.63
1.2.	Angka Kemiskinan	17.57	16.78	16.00	15.21	14.42	13.63	13.63
1.3.	Indeks Gini	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21
1.4.	Indeks Keparahan Kemiskinan	2,57	2,45	2,32	2,21	2,10	1,99	1,99
1.5.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2.85	2.62	2.41	2.22	2.04	1.88	1.88
2	Ketenagakerjaan							

RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (OUTCOME)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
2.1.	Tingkat Pengangguran terbuka	2.42	2.29	2.17	2.04	1.92	1.79	1.79
3	Kesehatan							
3.1.	Indeks Kesehatan	76.25	77.17	78.1	79.03	79.98	80.94	80.94
4	Pertanian							
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.42	1.71	2.57	2.66	2.73	3.21	3.21
5	Perdagangan							
	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobi dan Sepeda Motor terhadap PDRB	-2.18	3.82	5.75	5.95	6.12	7.19	7.19
II	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	Terkait Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan							
1.1.	Indeks Pendidikan	79.83	81.03	82.24	83.48	84.73	86	86
1.2.	Persentase SD yang terakreditasi	51.65	52.75	53.85	54.95	56.04	57.14	57.14
1.3.	Persentase SMP yang terakreditasi	57.45	59.57	63.83	65.96	68.09	72.34	72.34
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							

RPJMD Kabupaten Selama Tahun 2021-2026



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (OUTCOME)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
2.1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	51,8	52,84	54,32	54,97	56,07	57,19	57,19
2.2.	Persentase penduduk dengan air minum layak	45.96	51.89	57.82	63.75	69.68	75.61	75.61
2.3.	Persentase penduduk dengan sanitasi layak	39.18	43.72	48.25	52.79	57.33	61.87	61.87
2.4.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	40	48	58	65	72	75	75
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman							
3.1.	Rasio Rumah Layak Huni	91.25	92.22	93.18	94.15	95.11	96.08	96.08
	Tidak Terkait Pelayanan Dasar							
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1.1.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	21.83	11.43	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00
1.2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100
2	Lingkungan Hidup							
2.1.	Indeks kualitas Udara	91,37	91,46	91,55	91,64	91,73	91,82	91,82
2.2.	Indeks Kualitas Air	55,21	55,27	55,32	55,38	55,43	55,49	55,49

RPJMD Kabupaten Selama Tahun 2021-2026



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (OUTCOME)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
3.1.	Indeks Desa Membangun	0.6898 (berkembang)	0,711 (Maju)	0,7322 (Maju)	0,7534 (Maju)	0,7746 (Maju)	0,7958 (Maju)	0,7958 (Maju)
4	Komunikasi dan Informatika							
4.1.	Nilai SPBE	Kurang (1,19)	1,23	1,25	1,26	1,28	1,29	1,29
4	Penanaman Modal							
4.1.	Nilai Investasi Daerah / PMA (Milyar)	1987.68	2007.56	2027.63	2047.91	2068.39	2089.07	2089.072
4.2.	Nilai Investasi Daerah / PMDN (Milyar)	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	Penunjang							
1	Sekretariat Daerah							
1.1.	Nilai SAKIP	CC	B	BB	BB	BB	BB	BB
2	Kepegawaian							
2.1.	Indeks profesional ASN							
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Indeks Infrastruktur	44.93	47.18	49.53	52.01	54.61	57.34	57.34
2	Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)	8543	8782	9022	9261	9501	9740	9740

BAB IX. PENUTUP





BAB IX PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Kabupaten Seluma akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2021-2026), bagaimana mencapainya, dan langkahlangkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan prioritas kepala daerah terpilih.

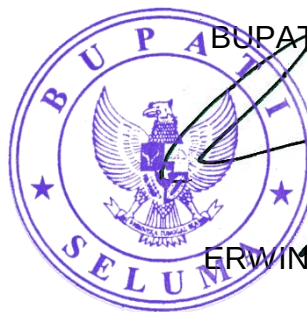
RPJMD ini telah menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rancangan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 ini hendaknya dilakukan secara konsisten, transparan, partisipatif, dan penuh tanggungjawab. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Seluma serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 ini sebaik-baiknya;
2. RPJMD ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Seluma berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2021-2026 ini, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah);



4. Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Seluma berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2021-2026;
5. Program dan kegiatan beserta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan acuan, dan apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam mewujudkan sasaran sub agenda/agenda pembangunan.
6. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2021-2026 sangat tergantung dari peran seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya;
7. Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan wujud penguatan peran (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan;
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026.



BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN